



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
5. Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2022-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 3

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah;
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah;
 - d. BAB IV : Prioritas Program;
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI : Penutup;
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RPKD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2022-2026

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap negara khususnya di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat diwujudkan supaya masyarakat dapat hidup dengan layak sehingga mampu mengembangkan diri agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik. Masyarakat yang sejahtera berarti masyarakat tersebut mengalami kemakmuran. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan masih menjadi perhatian dan isu strategis pembangunan pada negara-negara berkembang. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukoharjo.

Permasalahan kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus karena membiarkan kemiskinan sama saja dengan menggadaikan nilai-nilai martabat bangsa, dimana masyarakat yang miskin akan menjadi titik lemah dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama ini telah melakukan berbagai upaya dalam pengentasan kemiskinan melalui berbagai program pembangunan baik dalam skala nasional, regional maupun daerah, namun dirasa belum cukup optimal baik dari sisi ketepatan program maupun ketepatan sasaran.

Data Badan Pusat Statistik per bulan Nopember 2021, menunjukkan angka kemiskinan untuk seluruh Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan. Situasi pandemi covid 19 yang sudah berlangsung selama 2 tahun terakhir dan saat ini cenderung melandai, telah memberikan dampak langsung, berupa bertambahnya

angka kemiskinan baik secara Nasional maupun Daerah. Kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, tahun 2020 naik 0,54% menjadi 7,68% dan untuk tahun 2021 naik 0,55% menjadi 8,23%. meskipun masih dibawah Provinsi Jawa Tengah (11,79%) dan Nasional (10,14%).

Isu penurunan angka kemiskinan merupakan isu universal baik secara Global, Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) bahwa Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Kebijakan sosial distancing dan general lockdowns telah memicu kenaikan tingkat kemiskinan Nasional dan Jawa Tengah pada Maret 2020. Persentase penduduk miskin Nasional pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Di Jawa Tengah, penduduk miskin pada Maret 2020 berjumlah 3,98 juta orang (11,41 persen), bertambah sebanyak 301,5 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang berjumlah 3,68 juta orang (10,58 persen). Demikian pula apabila dibandingkan dengan keadaan pada Maret tahun sebelumnya, jumlah penduduk miskin Maret 2020 sebesar 3,74 juta orang (10,80 persen) lebih banyak 237,67 ribu orang.

Meningkatnya tingkat kemiskinan secara Nasional dan Jawa Tengah tentunya akan mempengaruhi kebijakan penurunan angka kemiskinan pada tingkat Nasional dalam RPJMN 2020-2024, Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2020-2024 bahwa Tingkat kemiskinan sendiri diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen pada tahun 2024. Tingkat Provinsi, Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023 pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 7,48 hingga 6,48 persen. Termasuk kebijakan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, dimana Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menargetkan penurunan angka kemiskinan pada kondisi kinerja akhir RPJMD 2021-2026 menetapkan target awal (2021) sebesar 7,7-8,5 persen dan Target Akhir (2026) sebesar 6,8-7 persen.

Dalam mencapai target tersebut, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas kemiskinan ekstrem. Pemerintah telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas, target pengurangan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2024. Dalam pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem membutuhkan sinergitas dan komitmen upaya penanggulangan

kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, melalui strategi kebijakan yang meliputi: (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 mencapai 1,76 persen, kondisi ini menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,52 persen, serta Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, berada pada posisi terendah dibandingkan Kabupaten Sragen, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Karanganyar. Kabupaten Sukoharjo merupakan lokasi prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024.

Amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bahwa Pengentasan kemiskinan memerlukan keterlibatan berbagai unsur stakeholders dan pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dimana masyarakat mampu memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan di masa mendatang, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, atau biasa disingkat dengan RPKD yang merupakan penjabaran pembangunan daerah dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

Penyusunan RPKD merujuk pada Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Keberadaan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan bahan masukan kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo periode Tahun 2021-2026, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Sukoharjo juga digunakan sebagai acuan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan RPKD Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant On Civil and Politic Right;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;.
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tetentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
27. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
30. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

31. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
32. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
33. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;
36. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
37. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
39. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
46. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo;
47. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 410/143 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah mempersiapkan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam menentukan target yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Tujuan Penyusunan RPKD Kabupaten Sukoharjo adalah:

1. Menggambarkan kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo saat ini dan kondisi kemiskinan Kabupaten Sukoharjo yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
2. Menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo;
3. Menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan

1.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup materi Penyusunan RPKD Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

- a. Mendiskripsikan kondisi kemiskinan konsumsi dan non konsumsi periode lima tahun terakhir;
- b. Melakukan analisis prioritas bidang intervensi dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. Melakukan analisis prioritas wilayah intervensi dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam menentukan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;

- d. Melakukan tinjauan kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- e. Melakukan kajian anggaran perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam penanggulangan kemiskinan;
- f. Menyusun isu strategis dan rencana aksi daerah dalam penanggulangan kemiskinan.

1.5. Sistematika Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD)

- BAB I. Pendahuluan, memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup materi dan sistematika laporan akhir.
- BAB II. Kondisi Umum Kabupaten Sukoharjo, memuat aspek geografi, aspek demografi, aspek kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, dan aspek kesejahteraan sosial.
- BAB III. Profil Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, memuat kemiskinan konsumsi, dan kemiskinan non konsumsi.
- BAB IV. Prioritas Program, memuat perspektif hukum penanggulangan kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo, dan pemetaan program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.
- BAB V. Lokasi Prioritas, memuat lokasi prioritas pada strategi penurunan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.
- BAB VI. Penutup, memuat pelaksana, metode dan pelaporan pemantauan dan evaluasi.

BAB II KONDISI UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

2.1. Aspek Geografi

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang terletak di wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak di antara $110^{\circ} 57' 33,70''$ BT – $110^{\circ} 42' 6,79''$ BT, dan antara $7^{\circ} 32' 17,00''$ LS – $7^{\circ} 39' 42,00''$ LS. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, maka luas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah seluas 49.323 hektar.

Secara administrasi, Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri atas 17 kelurahan dan 150 desa. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Polokarto (62,18 km²) dan Kecamatan Kartasura merupakan kecamatan terkecil seluas 19,23 km². Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo berpedoman pada:

- Permendagri 19 Tahun 2006 tentang Batas Daerah Antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Gunung Kidul (DIY).
- Permendagri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Wonogiri dengan Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri.
- Permendagri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Dengan Kota Surakarta, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta.
- Permendagri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar.
- Permendagri Nomor 53 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali Kabupaten Sukoharjo, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Boyolali.
- Permendagri Nomor 63 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten, untuk pedoman batas daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Klaten.

Batas-batas wilayah Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kota Surakarta dan Kabupaten Karanganyar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar;

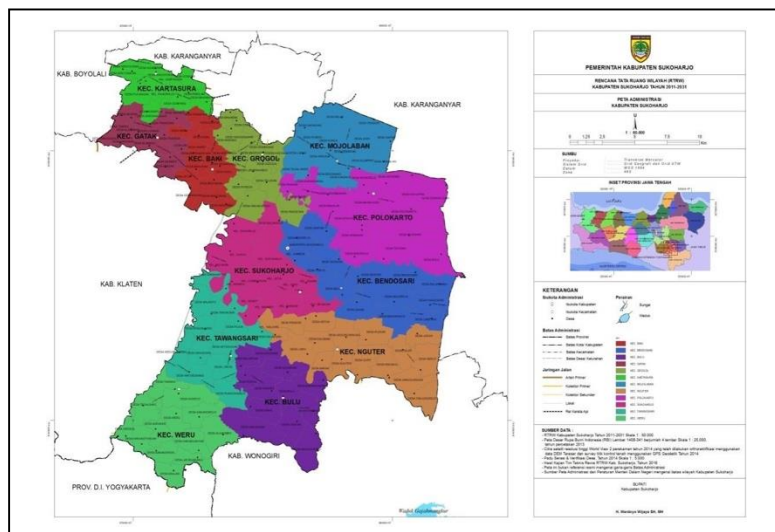
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY) dan Kabupaten Wonogiri;
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten.

Tabel 2.1 Wilayah Administratif Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas
1	Weru	13	41,98
2	Bulu	12	43,86
3	Tawang Sari	12	39,98
4	Sukoharjo	14	44,58
5	Nguter	16	54,88
6	Bendosari	14	52,99
7	Polokerto	17	62,18
8	Mojolaban	15	35,54
9	Grogol	14	30,00
10	Baki	14	21,97
11	Gatak	14	19,47
12	Kartasura	12	19,23
Kabupaten Sukoharjo		167	466,66

Sumber: BPS, Kabupaten Sukoharjo dalam Angka, 2022

Sedangkan mengenai letak masing-masing kecamatan dan perbatasan wilayah dapat dilihat pada gambar berikut.

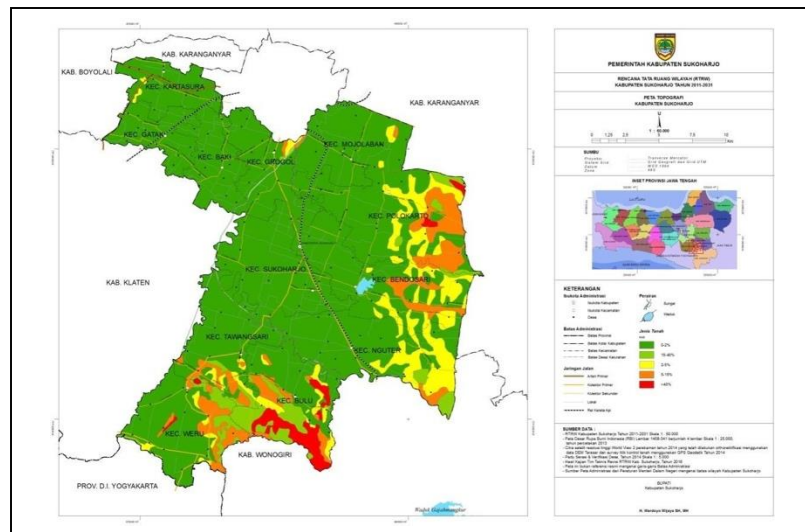


Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Sukoharjo

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Sukoharjo pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berupa dataran (meliputi wilayah Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo, dan Mojolaban) serta kawasan berbukit-bukit (meliputi wilayah Kecamatan Bendosari, Polokerto, Nguter, Tawang Sari, Bulu, dan Weru). Ketinggian wilayahnya berkisar antara 80 m – 125 m dpml, wilayah terendah berada di Kecamatan Grogol dan wilayah tertinggi berada di Kecamatan Bulu.

Kabupaten Sukoharjo memiliki dua kelompok besar kelerengannya yaitu kelerengannya landai dan kelerengannya curam. Kelerengannya landai memiliki kisaran kelerengannya (0-8%) yang terdapat Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Weru, Bulu, Tawang Sari, Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Sukoharjo Grogol, dan Kartasura. Kelerengannya agak landai (8-15%) terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berada di sebagian Kecamatan Grogol, Mojolaban, Polokarto, Nguter, Bendosari, Bulu, Weru, dan Tawang Sari. Sedangkan sebagian wilayah yang berada di Kecamatan Polokarto, Bulu, Weru, dan Tawang Sari memiliki kelerengannya yang beragam karena terdiri dari kelerengannya landai dan curam.



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Sukoharjo

Menurut RTRW, luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 49.323,30 hektar atau sekitar 1,5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Data Penggunaan lahan selengkapnya disajikan dalam tabel berikut :

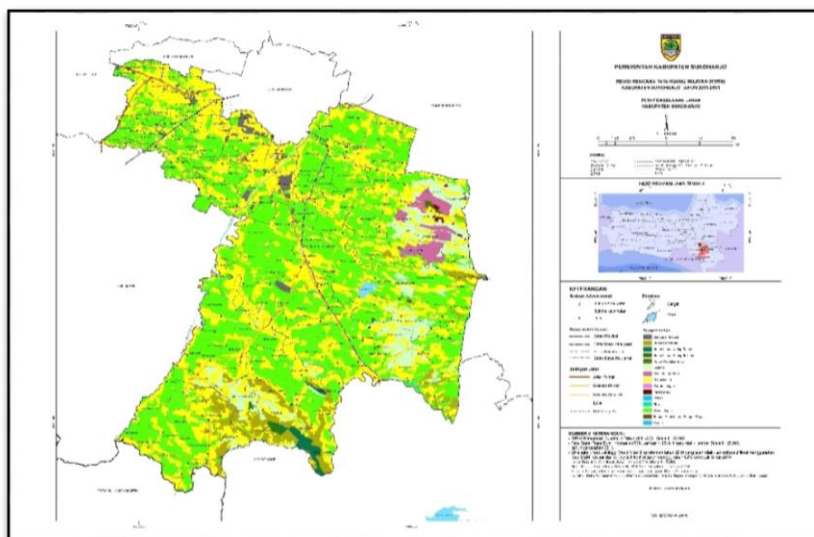
Tabel 2.2 **Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo**

No	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
1	Industri	591,36
2	Hutan	2.547,83
3	Ladang	3.121,69
4	Perkebunan	781,05
5	Pertambangan	1,33
6	Peternakan	88,30
7	Permukiman	20.189,97
8	Sawah	21.664,64
9	dan lain-lain	337,14
Jumlah		49.323,30

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo

Menurut data Perda No. 1 Tahun 2018, penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo 43,92% (21.665 ha) digunakan sebagai lahan

sawah, sebesar 40,93% (20.190 ha) merupakan lahan permukiman sedangkan sisanya sebesar 15,15% (7.467 ha) digunakan untuk penggunaan lahan selain sawah dan permukiman. Penggunaan lahan ini perlu dikendalikan dari tahun ke tahun apalagi dengan adanya perkembangan industrialisasi di Kabupaten Sukoharjo. Lahan pertanian khususnya untuk penyediaan pangan berkelanjutan harus dijaga agar tetap lestari. Berikut adalah peta penggunaan lahan yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo:



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Gambar 2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukoharjo

Menurut fungsinya, penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Kawasan budidaya merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas kondisi potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Berdasarkan fungsi tersebut maka luas kawasan budidaya dan kawasan lindung Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Luas Penggunaan Lahan Menurut Fungsi Kawasan

Jenis Kawasan	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
Kawasan Budidaya	46.516,93	94,345
Industri	591,359	1,199
Ladang	3.121,691	6,329
Pertambangan	1,332	0,003
Peternakan	88,298	0,179
Perkebunan	781,05	1,584
Sawah Irigasi	21.664,643	43,924
Tempat Penimbunan Sampah/Deposit	8,096	0,016
Permukiman	20.189,97	40,934
Hutan Produksi Tetap	38,246	0,078

Jenis Kawasan	Luas Lahan (ha)	Persentase (%)
Hutan Lahan Kering Sekunder	70,495	0,1
Kawasan Lindung	2.441,304	4,993
Hutan Campuran	2.134,716	4,328
Hutan Lahan Kering Primer	304,372	0,617
Polder	2,216	0,004
Lain-Lainnya	326,826	0,663
Rawa	24,867	0,050
Waduk	99,834	0,202
Sungai	202,124	0,410
Total Luas (ha)	49.323,306	100

Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo

Kawasan budidaya mendominasi penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo dengan persentase sebesar 94,345% luas wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menandakan bahwa lahan di Kabupaten Sukoharjo banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial ekonomi. Kawasan lindung perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk mengendalikan pembangunan. Upaya paling mudah yang dapat diimplementasikan yaitu meningkatkan persentase ruang terbuka hijau baik publik ataupun privat.

2. Potensi Pengembangan Wilayah

1) Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertanian pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

a. Kawasan peruntukan hutan produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 70 hektar. Kawasan ini berada di Kecamatan Bulu dan Tawang Sari.

b. Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 3.500 hektar. Kawasan ini tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Tawang Sari, Bulu, Nguter, Bendosari dan Polokarto.

c. Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian Kabupaten Sukoharjo secara garis besar terbagi atas 4 peruntukan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 26.864 hektar di Kabupaten Sukoharjo

terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk pertanian lahan basah memiliki luas 23.502 hektare dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk pertanian lahan kering seluas 3.362 hektar hanya tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu dan Tawang Sari. Kawasan peruntukan pertanian pangan di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh KP2B seluas 23.742 hektar dengan pembagian 20.814 hektar untuk lahan basah dan 2.928 hektar untuk lahan kering. Kawasan peruntukan hortikultura tersebar pada lingkungan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 708 hektar hanya terletak di Kecamatan Polokarto. Kawasan peruntukan peternakan seluas 138 hektar tersebar di Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, Weru dan Tawang Sari.

d. Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 194 hektar. Kawasan ini terbagi atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya air tawar. Untuk kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah kabupaten sedangkan kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan yang berada pada kawasan permukiman.

e. Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 2 jenis yaitu penambangan bahan mineral bukan logam. Lokasi penambangan bahan mineral bukan logam seluas 166 hektar tersebar di Kecamatan Bendosari, Nguter, Weru dan Polokarto.

f. Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo dialokasikan seluas 2.352 hektar. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, Weru, Mojolaban dan Baki. Pengembangan industri ini diarahkan di Kecamatan Nguter dan Bendosari. Untuk industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar permukiman seluruh kecamatan.

g. Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan wisata di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 9 hektar. Kawasan ini terdiri atas kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo terletak di Gunung Taruwangsa, Kecamatan Tawang Sari dan Batu Seribu, Kecamatan Bulu. Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo meliputi wisata situs bersejarah, wisata religi/ziarah dan wisata benda cagar budaya. Wisata-wisata tersebut banyak tersebar di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawang Sari. Untuk

kawasan wisata buatan secara garis besar memiliki bentuk berupa pariwisata kreatif dan wisata air. Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo, Desa Ngrombo dan Mancasan Kecamatan Baki, Desa Wirun dan Bekonang Kecamatan Mojolaban, Desa Banaran Kecamatan Grogol serta Desa Trangsan Kecamatan Gatak sedangkan wisata air yang terletak di Bendosari berupa daya tarik wisata Waduk Mulur.

h. Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo seluas 17.102 hektar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 14.077 hektar tersebar di desa/kelurahan di kawasan perkotaan seluruh kecamatan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas 3.025 hektar tersebar di seluruh kawasan perdesaan Kabupaten Sukoharjo.

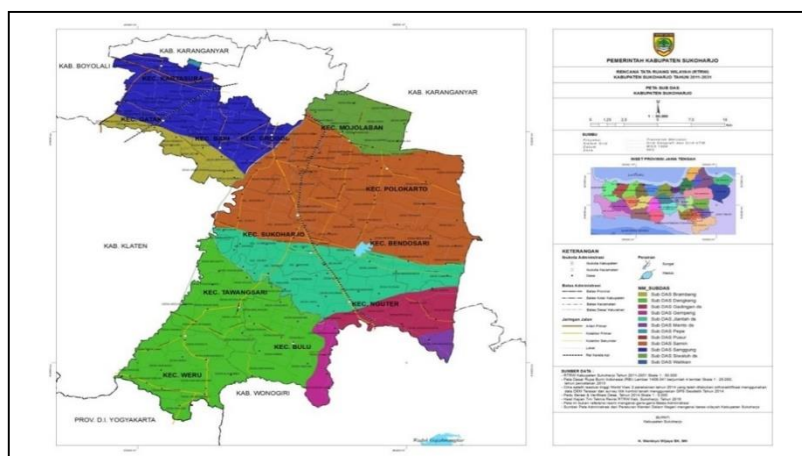
i. Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan ini memiliki luas 127 hektar meliputi Grup 2 Kopassus di Kecamatan Kartasura, Brigif 6/Kostrad dan Batalyon Infanteri 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban.

2) Kawasan Rawan Bencana

a. Kerawanan Bencana Banjir

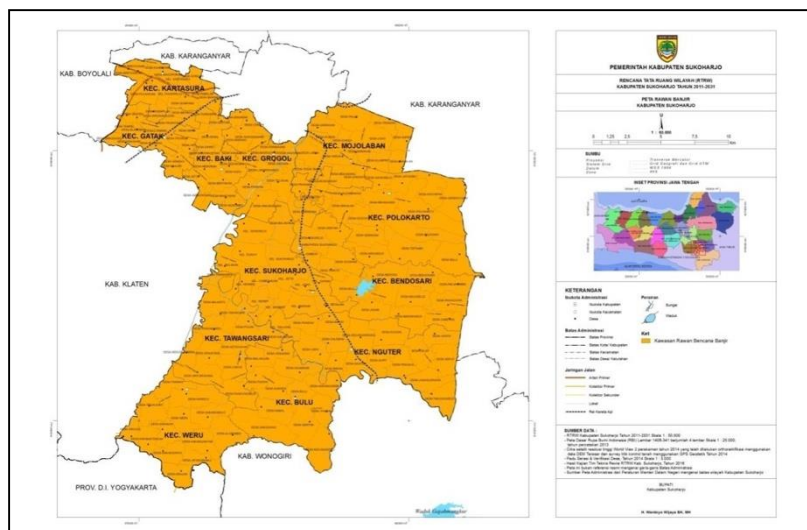
Kabupaten Sukoharjo memiliki paling tidak sebelas aliran sungai, yang meliputi Sungai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Jlantah, Sungai Brambang, Sungai Samin, Sungai Ranjing, Sungai Walikan, Sungai Langsur, Sungai Palur, Sungai Premulung dan Sungai Tanggul.



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Gambar 2.4 Peta Sub DAS Kabupaten Sukoharjo

Keberadaan sungai-sungai tersebut di satu sisi memberikan keuntungan ketersediaan air di Kabupaten Sukoharjo, namun di sisi lain pada musim-musim penghujan misalnya pada bulan Desember hingga bulan Maret dapat memberikan ancaman banjir pada wilayah yang datar dan tidak memiliki kawasan resapan. Secara topografi, wilayah yang rentan akan bahaya banjir meliputi Kecamatan Kartasura, Gatak, Baki, Grogol, Sukoharjo dan Mojolaban. Hal ini dikarenakan wilayah ini merupakan wilayah yang datar dan merupakan kawasan bertemunya beberapa sungai, misalnya Kecamatan Nguter (pertemuan antara Kali Jlantah dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Tawang Sari (pertemuan antara Kali Brambang dan Sungai Bengawan Solo), Kecamatan Grogol (aliran Sungai Bengawan Solo). Selain itu dari segi tanah, sebagian besar Kabupaten Sukoharjo memiliki jenis tanah aluvial yang sulit menyerap air sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi kerawanan banjir di seluruh wilayah.

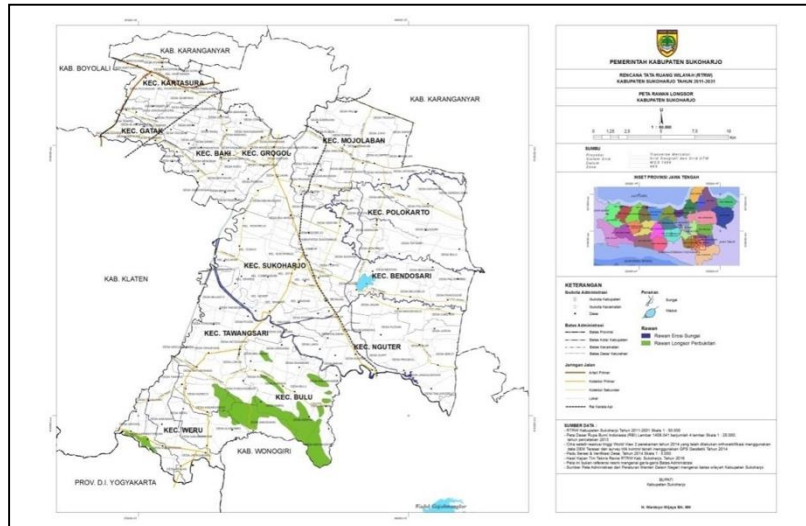


Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi TRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Gambar 2.5 Peta Rawan Banjir Kabupaten Sukoharjo

b. Kerawanan Bencana Longsor

Kabupaten Sukoharjo, terdapat tiga kecamatan yang memiliki ancaman terhadap longsor, yakni Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru dan Kecamatan Tawang Sari. Penyebabnya adalah kondisi topografi kemiringan lahan, ketiga kecamatan tersebut memiliki wilayah yang bergelombang (5- 15%), curam (15-40%) hingga sangat curam (40%). Selain itu, apabila dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar tanah yang berada jenis tanah litosol rentan mengalami erosi.



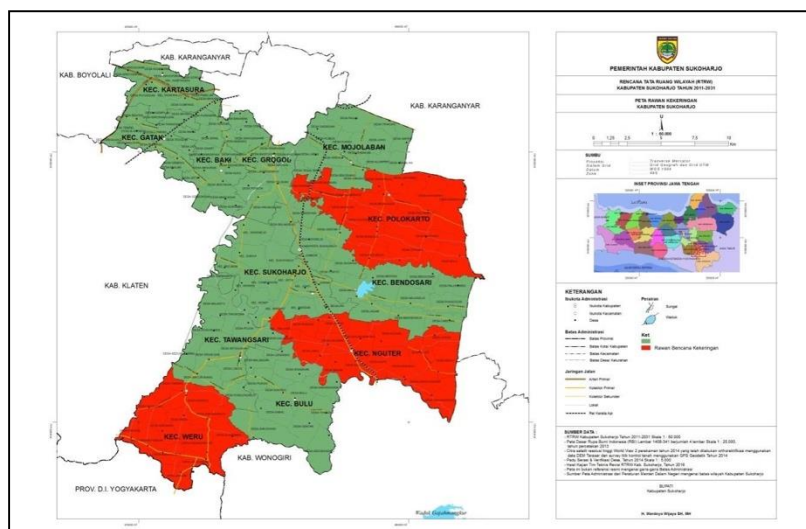
Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Gambar 2.6 Peta Rawan Longsor Kabupaten Sukoharjo

c. Kerawanan Bencana Kekeringan

Penyebab resiko bencana kekeringan karena (i) ada wilayah di Kabupaten Sukoharjo yang akuifer daerah air tanah langka; (ii) memiliki intensitas curah hujan rendah; (iii) keterbatasan cakupan Dam sumber pemasok air.

Wilayah yang mempunyai ancaman kekeringan di musim kemarau, khususnya di wilayah selatan Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Kecamatan Weru, Tawangsari dan Bulu. Sedangkan kekeringan pertanian, melanda sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang mengandalkan Dam Colo sebagai sumber pasokan irigasi.



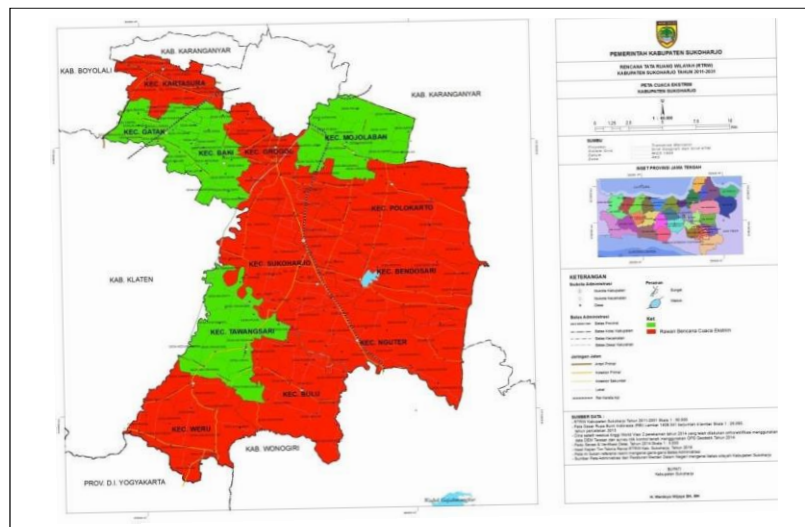
Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Gambar 2.7 Peta Rawan Kekeringan Kabupaten Sukoharjo

d. Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrem

Di Kabupaten Sukoharjo wilayah yang memiliki rawan bencana cuaca ekstrem ini sebagian besar terdapat 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo antara lain Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter dan Kecamatan Weru wilayah yang terlanda cuaca ekstrem biasanya wilayah yang terbuka.

Cuaca ekstrem yang melanda daerah tersebut biasanya berupa hujan lebat disertai angin kencang. Menurut beberapa penelitian, wilayah yang pernah terlanda cuaca ekstrem secara umum memiliki ancaman terhadap cuaca ekstrem di masa datang. Sedangkan bukan daerah rawan bencana terdapat di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Tawang Sari.



Sumber: Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, 2018

Gambar 2.8 Peta Rawan Cuaca Ekstrem Kabupaten Sukoharjo

2.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 tercatat sebanyak 911.603 jiwa. Apabila dilihat dari penyebaran penduduk, persentase Kecamatan Grogol paling tinggi yaitu 13,99%, kemudian Kecamatan Kartasura 12,67%, Kecamatan Sukoharjo 10,69% sedangkan yang terkecil Kecamatan Bulu 3,8%. Rasio Jenis Kelamin pada tahun 2021 sebesar 100,11 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki, hampir di semua kecamatan angka rasio jenis kelamin di atas 100, yaitu berkisar 100 dan 102 kecuali Kecamatan Weru, Bendosari, Mojolaban dan Kartasura dengan sex ratio dibawah 100.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu sepuluh tahun (2011-2021) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 1.954 jiwa setiap km². Di sisi lain penyebaran penduduk masih belum merata. Kartasura merupakan kecamatan dengan penduduk paling padat yaitu 6.007 jiwa per km². Sedangkan Kecamatan Bulu paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 789 jiwa per km².

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2021 sebesar 0,44 persen dimana dalam dua tahun terakhir (2020-2021), laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,97 persen.

Pada rasio jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Sukoharjo menurut hasil SP 2020 sebanyak 456.063 jiwa, atau 50,02 persen dari penduduk Kabupaten Sukoharjo. Sementara jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Sukoharjo menurut hasil SP 2020 sebanyak 455.540 jiwa, atau 49,97 persen dari penduduk Sukoharjo.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2021)	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk Per Km ²
Weru	55.091	0,54	99,44	1.312,32
Bulu	34.605	1,47	102,45	788,99
Tawang Sari	52.750	0,40	100,77	1.319,41
Sukoharjo	97.434	0,43	100,49	2.185,60
Nguter	53.151	1,61	101,56	968,49
Bendosari	62.263	1,14	99,64	1.175,00
Polokerto	84.404	0,78	100,58	1.357,41
Mojolaban	97.114	0,60	99,65	2.732,53
Grogol	127.565	-0,49	100,29	4.252,17
Baki	76.852	0,56	100,78	3.498,04
Gatak	54.853	1,00	100,60	2.817,31
Kartasura	115.521	-0,46	97,94	6.007,33
Kabupaten Sukoharjo	911.603	0,44	100,11	1.953,46

Sumber: BPS, 2022

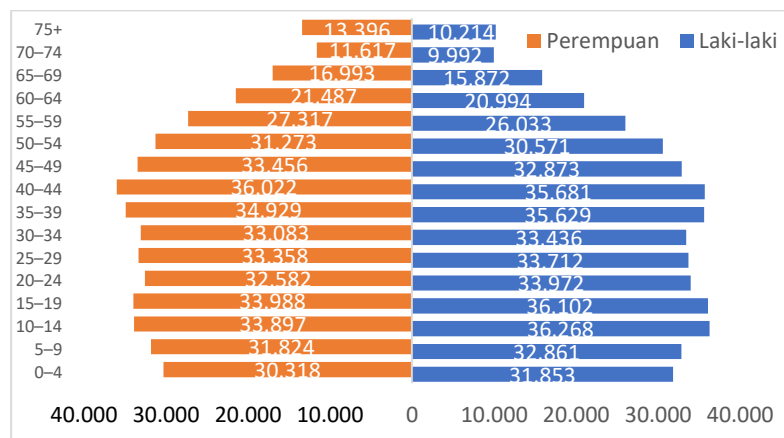
Penduduk Kabupaten Sukoharjo menurut kelompok umur pada tahun 2021 lebih banyak berjenis kelamin Laki-laki sebanyak 456.063 jiwa, sementara untuk perempuan sebanyak 455.540 jiwa. Dilihat berdasarkan kelompok umur di dominasi oleh penduduk usia produktif sebanyak 636.498 jiwa dibandingkan dengan usia non produktif 0-14 dan 65 tahun keatas). Rasio beban ketergantungan Kabupaten Sukoharjo sebesar 43,22% yang berarti sebanyak 100 penduduk menanggung sebanyak 43 orang non produktif.

Tabel 2.5 **Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021**

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	31.853	30.318	62.171
5-9	32.861	31.824	64.685
10-14	36.268	33.897	70.165
15-19	36.102	33.988	70.090
20-24	33.972	32.582	66.554
25-29	33.712	33.358	67.070
30-34	33.436	33.083	66.519
35-39	35.629	34.929	70.558
40-44	35.681	36.022	71.703
45-49	32.873	33.456	66.329
50-54	30.571	31.273	61.844
55-59	26.033	27.317	53.350
60-64	20.994	21.487	42.481
65-69	15.872	16.993	32.865
70-74	9.992	11.617	21.609
75+	10.214	13.396	23.610
Jumlah	456.063	455.540	911.603

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan bentuk piramida struktur penduduk di Kabupaten Sukoharjo selama ini adalah penduduk usia muda, dikarenakan angka usia produktif lebih banyak dari pada usia yang dan/ atau yang sudah tidak produktif. Sumber daya manusia merupakan faktor utama yang mempengaruhi pembangunan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo, sehingga sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar pembangunan. Salah satu potensi saat ini adalah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang mayoritas usia produktif sehingga diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, namun demikian perlu menjadi perhatian bersama bahwa sumber daya manusia yang berkarakter sehat, cerdas dan produktif akan membawa kesejahteraan. Sebaliknya perluantisipasi dengan banyaknya usia produktif maka persaingan antar pencari kerja semakin meningkat namun lapangan pekerjaan terbatas sehingga berdampak pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran serta angka kriminalitas.



Sumber: BPS, 2022

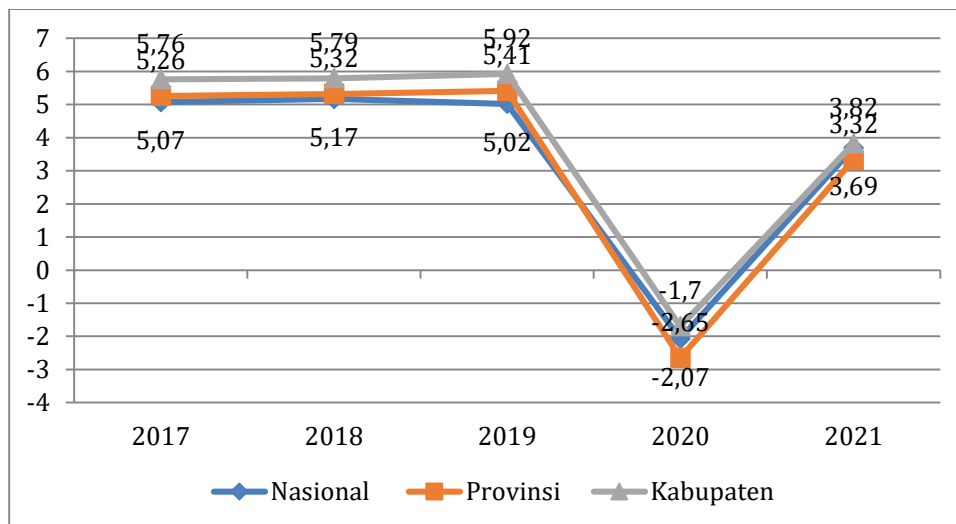
Gambar 2.9 Piramida Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

2.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke-n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke-n-1, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Selama rentang waktu tiga tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo relatif stabil pada kisaran 5,76%-5,92%, bahkan selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebesar -1,70% meningkat menjadi 3,82% tahun 2021, dan ini lebih baik dibandingkan provinsi 3,69% dan nasional 3,32%, hal ini dikarenakan kondisi yang dialami oleh seluruh masyarakat di Indonesia karena pandemi Covid-19.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 3,82 persen sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar -1,7 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2021 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 9,64 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 6,26 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,7 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yaitu minus 0,8 persen.

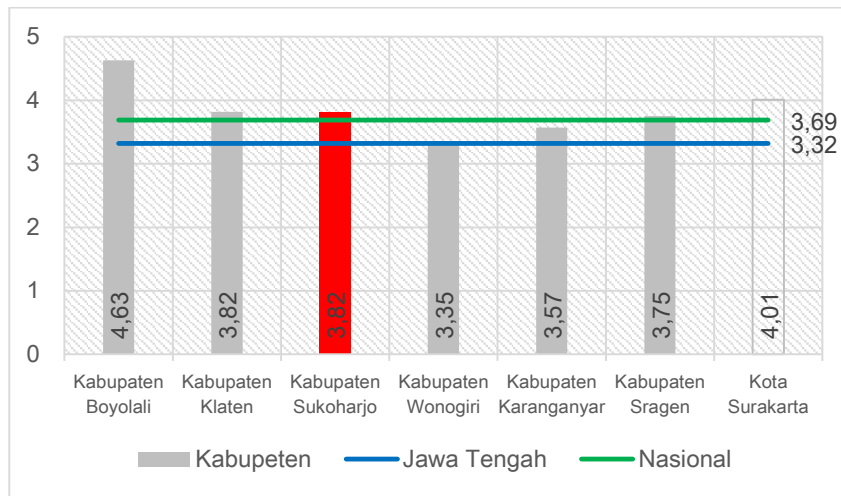
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (persen), 2018–2021

No	Lapangan Usaha	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,67	3,37	0,94	3,58
B	Pertambangan dan Penggalian	2,45	-1,62	-0,21	1,56
C	Industri Pengolahan	6,47	5,65	-2,75	2,63
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,74	5,25	-2,38	4,66
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,25	6,89	2,35	3,65
F	Konstruksi	5,61	5,73	-2,86	4,22
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,62	5,53	-3,50	5,70
H	Transportasi dan Pergudangan	7,23	7,50	-31,75	3,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,39	7,47	-7,27	5,07
J	Informasi dan Komunikasi	10,13	10,38	25,75	9,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	3,47	2,30	1,67
L	Real Estat	6,45	6,37	0,08	2,02
M,N	Jasa Perusahaan	8,54	9,32	-1,67	3,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	3,81	-2,41	-0,80
P	Jasa Pendidikan	7,13	8,07	-2,64	1,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,33	7,39	11,27	0,06
R,S, T,U	Jasa Lainnya	9,25	9,18	-3,01	1,10
	Produk Domestik Regional Bruto	5,79	5,92	-1,70	3,82

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Posisi relatif pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo sebesar 3,82 persen menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan Kabupaten sekitar, serta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,32 persen dan Nasional sebesar 3,69 persen.

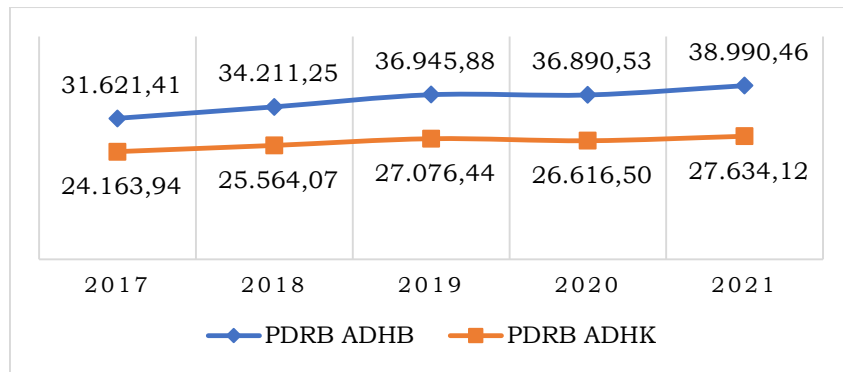


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.11 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun perhitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar perhitungan).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 adalah Rp.38.990,46 miliar, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp.36.890,53 miliar. Sama halnya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada 2021 sebesar Rp.27.634,12 miliar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp.26.616,50 miliar.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.12 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021 (Miliar Rupiah)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 adalah 38,9 triliun rupiah, angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 36,91 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 38,98 persen. Selain itu, sektor yang besar distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,28 persen.

Tabel 2.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (Miliar Rupiah), 2017–2021

Lapangan Usaha (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
A Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2.894,16	3.006,50	3.158,31	3.229,38	3.371,91
B Pertambangan dan Penggalian	149,57	156,87	155,93	158,79	163,26
C Industri Pengolahan	12.233,45	13.359,37	14.417,55	14.423,67	15.198,04
D Pengadaan Listrik dan Gas	35,50	38,35	40,47	39,24	40,77
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur	11,24	11,79	13,23	13,79	14,44
F Konstruksi	2.137,04	2.340,89	2.542,72	2.475,84	2.674,38
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.573,87	5.943,00	6.415,80	6.274,28	6.736,68
H Transportasi dan Pergudangan	1.043,70	1.131,69	1.239,87	873,82	933,62

Lapangan Usaha (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.171,18	1.273,73	1.394,08	1.307,90	1.398,96
J Informasi dan Komunikasi	1.422,25	1.576,22	1.762,34	2.224,97	2.440,34
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1.234,85	1.322,12	1.390,95	1.428,11	1.499,53
L Real Estat	706,58	771,15	836,59	839,26	865,31
M Jasa Perusahaan	128,02	142,48	159,55	161,60	168,81
N					
O Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	746,96	790,16	832,98	823,37	809,09
P Jasa Pendidikan	1.385,95	1.522,09	1.678,97	1.666,04	1.709,30
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	308,65	339,31	370,89	423,36	427,89
R Jasa Lainnya	438,43	485,55	535,63	527,12	538,14
S					
T					
U					
Produk Domestik Regional Bruto	31.621,41	34.211,25	36.945,88	36.890,53	38.990,46

*Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain*

Sedangkan berikut adalah rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha ADHK 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo (Miliar Rupiah), 2017-2021

Lapangan Usaha (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.047,77	2.061,47	2.131,03	2.151,04	2.228,05
B Pertambangan dan Penggalian	91,15	93,38	91,87	91,67	93,10
C Industri Pengolahan	9.271,98	9.871,78	10.429,13	10.141,92	10.408,91

D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,56	33,05	34,79	33,96	35,54
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,16	9,55	10,21	10,45	10,83
F	Konstruksi	1.564,78	1.652,48	1.747,17	1.697,17	1.768,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.462,75	4.669,00	4.927,40	4.755,07	5.026,00
H	Transportasi dan Pergudangan	882,05	945,86	1.016,76	693,92	720,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	908,70	975,84	1.048,73	972,52	1.021,84
J	Informasi dan Komunikasi	1.382,47	1.522,57	1.680,57	2.113,40	2.317,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	855,86	891,13	922,06	943,32	959,11
L	Real Estat	606,42	645,55	686,67	687,22	701,09
M,N	Jasa Perusahaan	93,34	101,31	110,76	108,90	112,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	519,08	541,76	562,40	548,84	544,43
P	Jasa Pendidikan	870,20	932,28	1.007,52	980,89	995,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	222,73	241,28	259,11	288,32	288,49
R,S, T,U	Jasa Lainnya	343,94	375,77	410,27	397,90	402,28
	Produk Domestik Regional Bruto	24.163,94	25.564,07	27.076,44	26.616,50	27.634,12

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara
 Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Struktur perekonomian Kabupaten Sukoharjo menurut lapangan usaha selama tahun 2017-2021 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan (38,98%); perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (17,28 %) dan pertanian, kehutanan dan perikanan; (8,65%).

Tabel 2.9 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016–2020 (%)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020 *	2021 *
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,15	8,79	8,55	8,75	8,65
B	Pertambangan dan Penggalian	0,47	0,46	0,42	0,43	0,42
C	Industri Pengolahan	38,69	39,05	39,02	39,10	38,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	6,76	6,84	6,88	6,71	6,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,63	17,37	17,37	17,01	17,28
H	Transportasi dan Pergudangan	3,30	3,31	3,36	2,37	2,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,70	3,72	3,77	3,55	3,59
J	Informasi dan Komunikasi	4,50	4,61	4,77	6,03	6,26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,91	3,86	3,76	3,87	3,85
L	Real Estat	2,23	2,25	2,26	2,28	2,22
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,42	0,43	0,44	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,31	2,25	2,23	2,08
P	Jasa Pendidikan	4,38	4,45	4,54	4,52	4,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,98	0,99	1,00	1,15	1,10
R,S, T,U	Jasa Lainnya	1,39	1,42	1,45	1,43	1,38
	Produk Domestik Regional Bruto	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Sukoharjo akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2010 sampai dengan 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian

besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Sukoharjo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori).

Kondisi perekonomian Sukoharjo setelah mengalami pemulihan akibat krisis ekonomi yang melanda dunia tahun 2008, maka di tahun 2021 kembali harus mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia saat ini. Hal ini terlihat dari PDRB tahun 2021 yang mengalami penurunan dan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan arah negatif.

Peningkatan ekonomi selama tahun 2017 – 2021 tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB ADHB Sukoharjo selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume konsumsi.

Tabel 2.10 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	22 165,433	23 821,932	25 326,115	25 431,000	26 360,962
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	352,249	386,200	438,092	435,379	457,817
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 845,665	1 947,133	2 063,575	1 971,593	1 974,505
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 540,870	8 357,936	9 130,166	8 684,869	9 208,377
Perubahan Inventori	-389,219	-514,200	-279,764	102,489	116,166
Net Ekspor Barang dan Jasa	106,413	212,263	267,694	265,200	872,627
PDRB / GRDP	31.621,41	34.211,25	36.945,88	36.890,53	38.990,46

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Tidak

berbeda dengan PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK 2010 juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020. Hal ini akibat dampak dari pandemi Covid 19 yang melanda dunia mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh.

Tabel 2.11 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

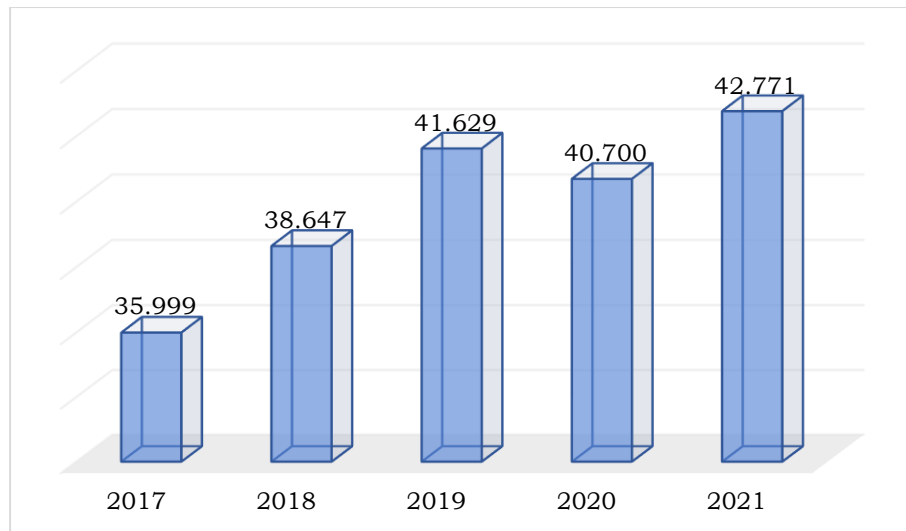
Jenis Pengeluaran	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.514,272	17.389,342	18.185,269	18.081,254	18.450,239
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	238,598	254,798	283,290	276,966	284,305
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.185,499	1.230,173	1.292,642	1.239,644	1.208,492
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5.597,856	5.918,915	6.234,521	5.926,416	6.236,171
Perubahan Inventori Net Ekspor Barang dan Jasa	-200,666	-171,830	-70,762	53,665	32,882
	832,378	942,665	1.151,480	1.038,556	1.422,025
PDRB / GRDP	24.163,94	25.564,07	27.076,44	26.616,50	27.634,12

Catatan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi yang sedang berlangsung. Kemudian pada tahun 2021 sudah mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 PDRB per Kapita Kabupaten Sukoharjo sebesar 35.999 ribu rupiah meningkat sampai tahun 2019 menjadi 41.629 ribu rupiah. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat resesi kondisi perekonomian menjadi 40.700 ribu rupiah. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 42.771 ribu rupiah.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.13 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 – 2021

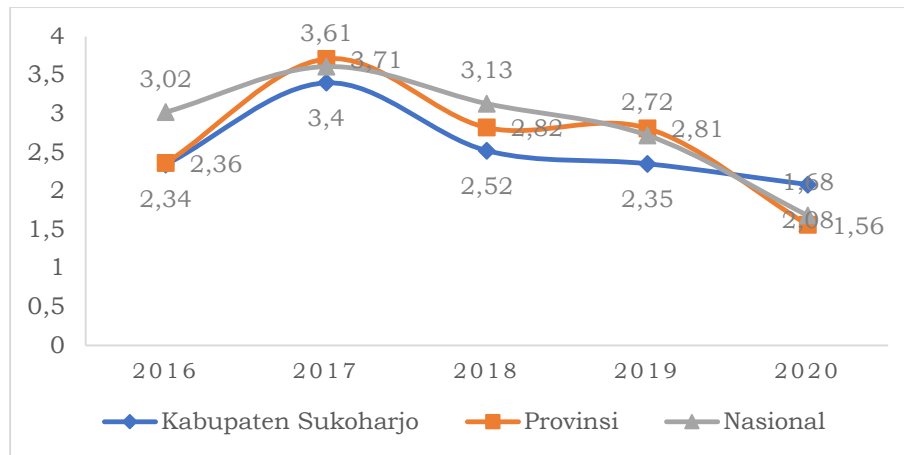
2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjodisebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo.

Namun demikian, terkendalnya tingkat inflasi di Kabupaten Sukoharjo selama ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sukoharjo. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga.

Pada tahun 2016 inflasi Kabupaten Sukoharjo itu sebesar 2,34 dibawah angka Nasional dan Provinsi. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,4 namun tetap berada di bawah Provinsi dan Nasional, dan pada tahun 2018 dan 2019 berada kembali dibawah provinsi dan nasional. Sedangkan pada tahun 2020 angka inflasi Kabupaten Sukoharjo berada di atas angka Nasional dan Provinsi yaitu sebesar 2,08 karena kondisi Covid-19.

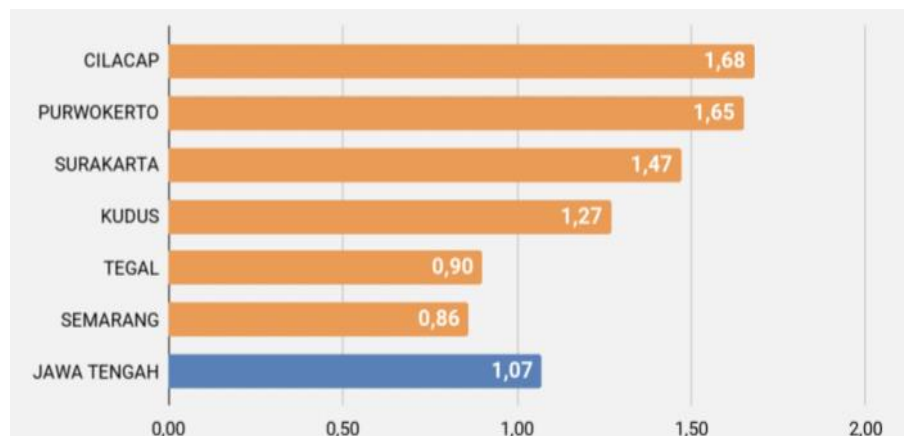


Sumber: BPS, 2022

Gambar 2.14 Tingkat Inflasi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020

Pada April 2022, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 1,07 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,74. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 1,68 persen dengan IHK sebesar 110,08 diikuti oleh Kota Purwokerto sebesar 1,65 persen dengan IHK sebesar 110,57; Kota Surakarta sebesar 1,47 persen dengan IHK sebesar 110,70; Kota Kudus sebesar 1,27 persen dengan IHK sebesar 109,44; Kota Tegal sebesar 0,90 persen dengan IHK sebesar 110,82; dan inflasi terendah terjadi di Kota Semarang sebesar 0,86 persen dengan IHK sebesar 109,37.

Kota Surakarta mengalami inflasi yang utamanya disebabkan kenaikan harga bensin, minyak goreng, mobil, bawang putih, dan es. Sedangkan beberapa komoditas yang menahan inflasi di Kota Surakarta antara lain cabai rawit, cabai merah, sepeda motor, bawang merah, dan tomat.



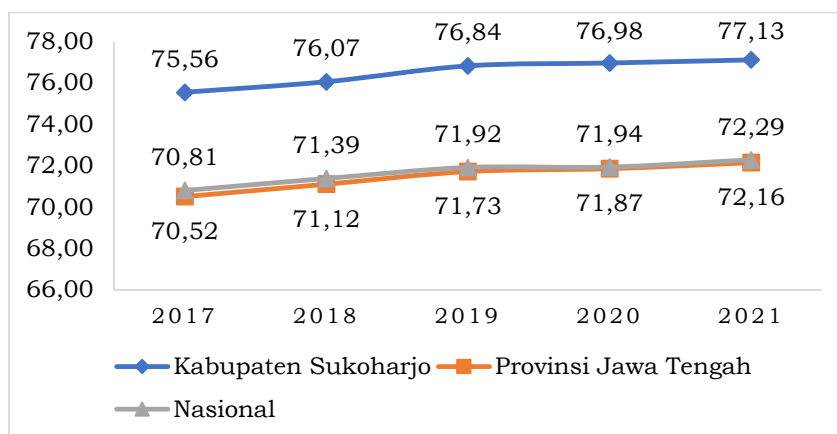
Sumber BPS, 2022

Gambar 2.15 Inflasi Enam Kota IHK dan Jawa Tengah, April 2022

2.4. Aspek Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

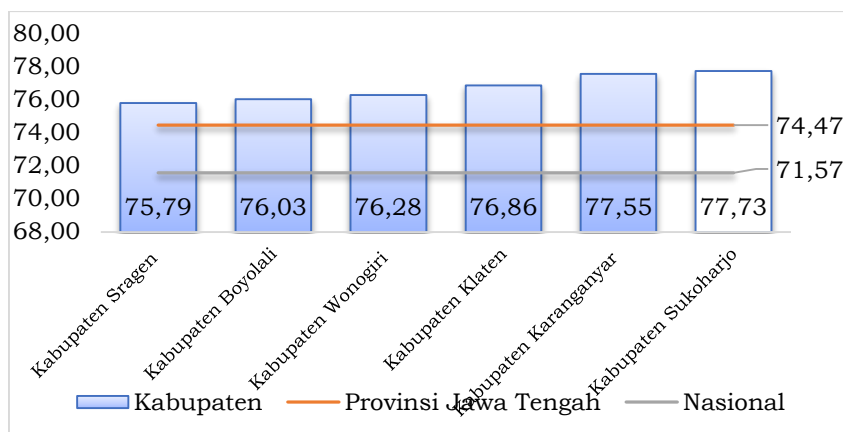
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. IPM Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 sampai tahun 2021 terus meningkat, yaitu pada tahun 2017 sebesar 75,56 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 77,13. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.16 Perkembangan IPM Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

IPM Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar 77,13 dibandingkan kabupaten sekitar menempati posisi tertinggi, serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,16 dan Nasional sebesar 72,29. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

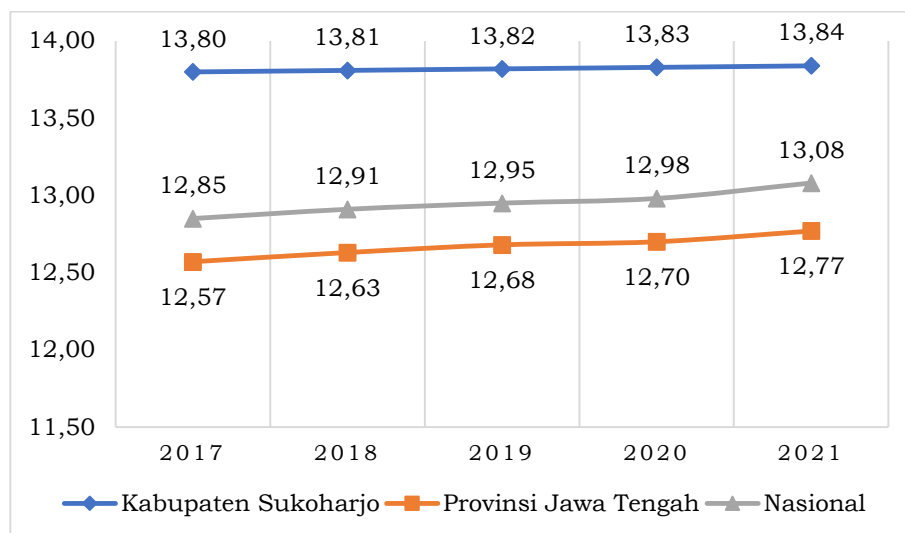
Gambar 2.17 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Perkembangan IPM sangat dipengaruhi oleh perkembangan Indikator pembentuk IPM. Indikator pembentuk tersebut terdiri dari Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

a. Dimensi Pengetahuan

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

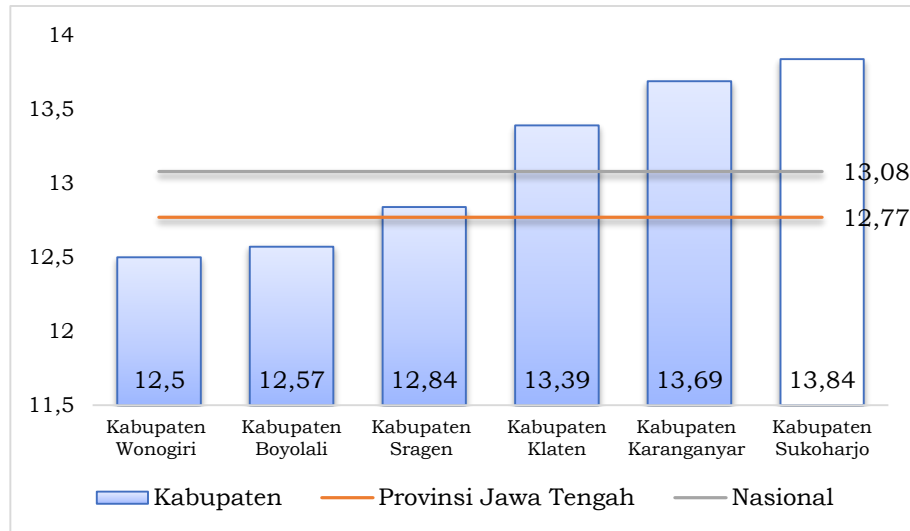
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 13,80 tahun dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 13,84 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo sebesar 13,84 tahun berarti lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (tujuh tahun keatas) dimasa mendatang selama 13,82 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan Perguruan tinggi jenjang Diploma I. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.18 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

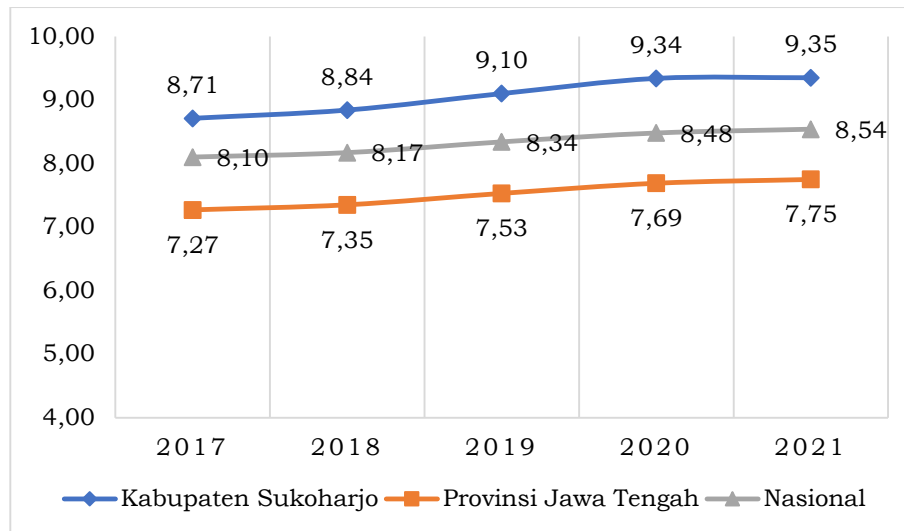
Posisi relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 sebesar 13,84 tahun dibandingkan dengan kabupaten sekitar menempati posisi tertinggi, serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,77 tahun dan Nasional sebesar 13,08 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.19 Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

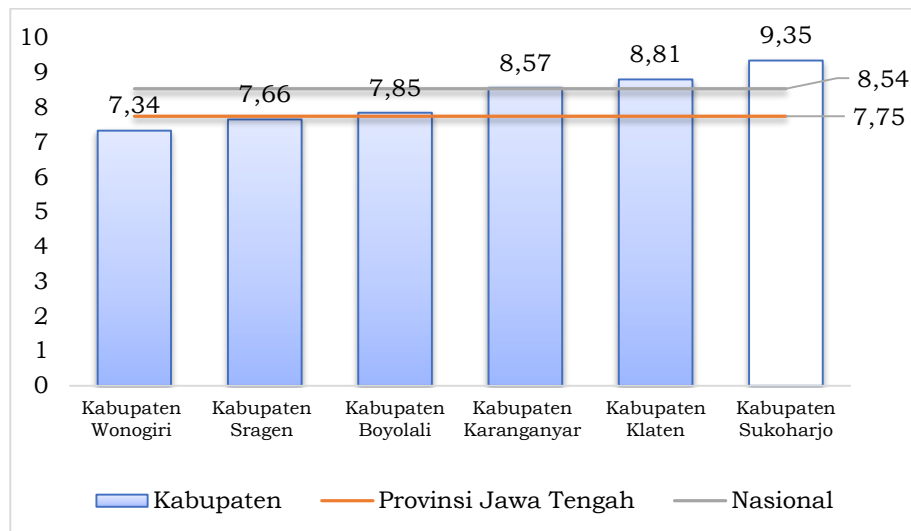
Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani Pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Perkembangan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 hingga tahun 2021 terus mengalami kenaikan, yaitu tahun 2017 sebesar 8,71 tahun dan tahun 2021 menjadi sebesar 9,35 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kondisi Kab Sukoharjo tahun 2021 menjadi sebesar 9,35 tahun menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Sukoharjo yang berumur diatas 25 tahun rata-rata telah mengenyam pendidikan selama 9,35 tahun atau bersekolah hingga jenjang kelas 1 SMA. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.20 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo sebesar 9,35 dibandingkan dengan kabupaten sekitar menempati posisi tertinggi, serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,75 tahun dan Nasional sebesar 8,54 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



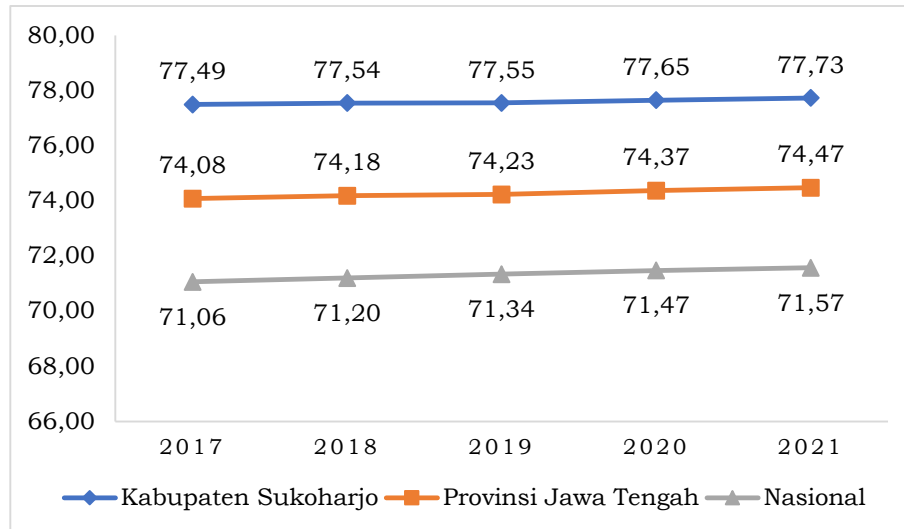
Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.21 Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

b. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Perkembangan usia harapan hidup Kabupaten Sukoharjo pada

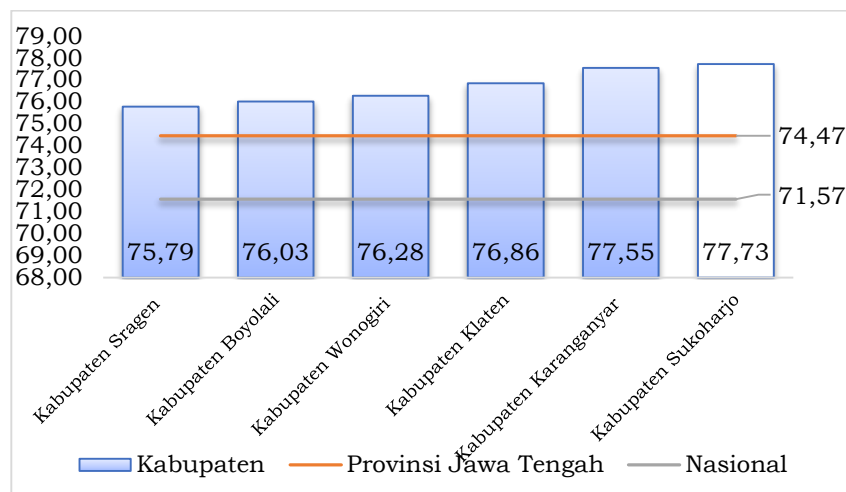
tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 77,49 dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 77,73. Kondisi tersebut relevan dengan perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.22 Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Posisi relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar 77,73 dibandingkan dengan kabupaten sekitar menempati posisi tertinggi, serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,47 dan Nasional sebesar 71,57. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

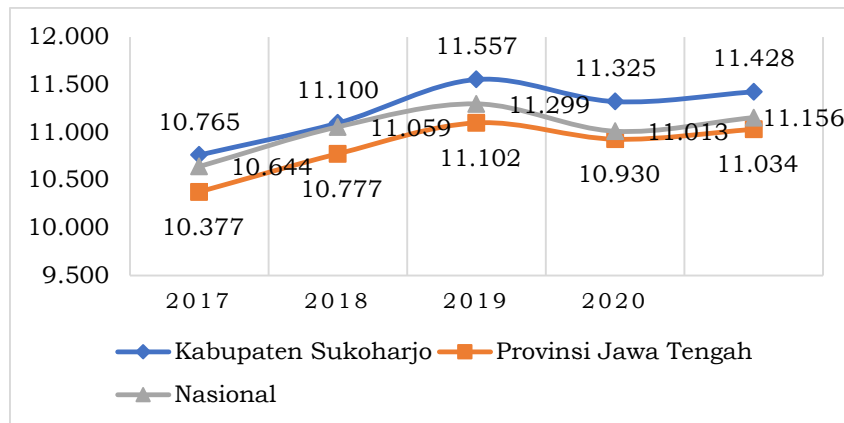


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.23 Posisi Relatif Usia Harapan Hidup Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

c. Dimensi Standar Hidup Layak

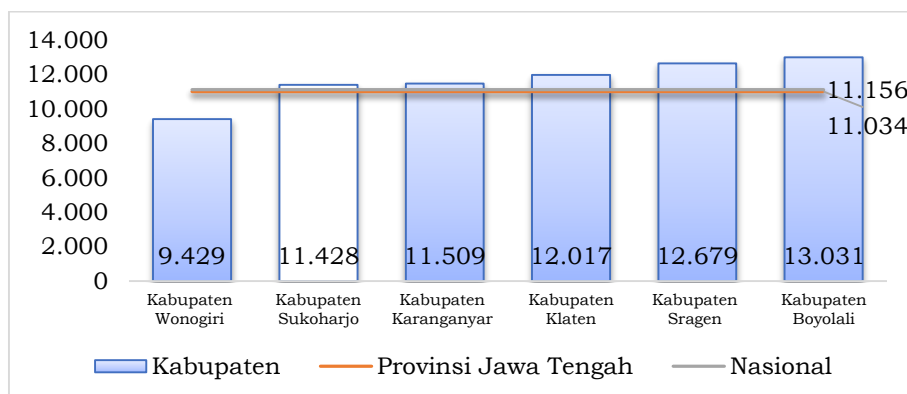
Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat, yaitu dari Rp10.765 pada tahun 2017 menjadi Rp 11.428 pada tahun 2021. Namun pernah menurun pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.24 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar Rp.11.428 menempati posisi kedua terendah dibandingkan dengan kabupaten sekitar, setelah Kabupaten Wonogiri (Rp. 9.429) serta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah Rp. 11.034 dan Nasional Rp. 11.156. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



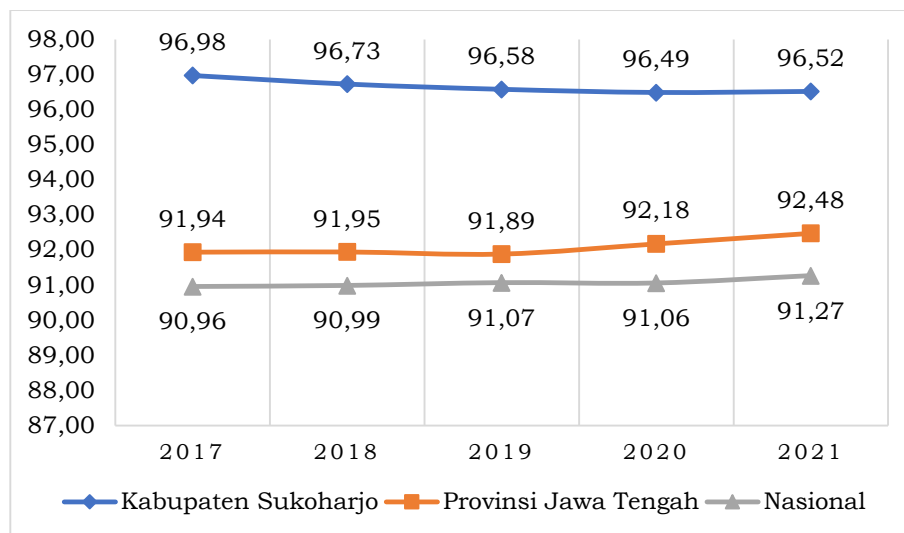
Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.25 Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran nilai yang dibentuk dengan cara merasionalkan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

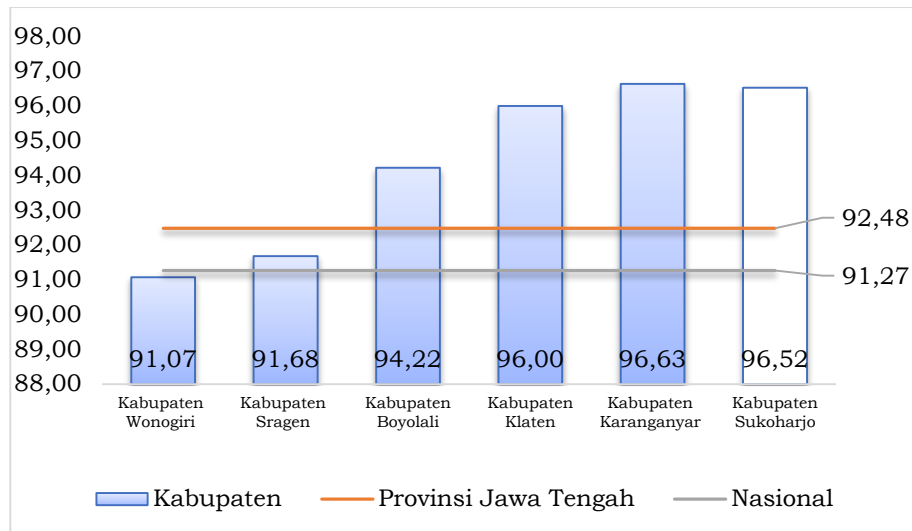
Perkembangan IPG Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung menurun yaitu dari 96,98 pada tahun 2017 menjadi 96,52 pada tahun 2021. Kondisi ini tidak relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.26 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Posisi relatif IPG Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 96,52 dibandingkan dengan kabupaten sekitar menempati posisi tertinggi, serta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,48 dan Nasional sebesar 91,27. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



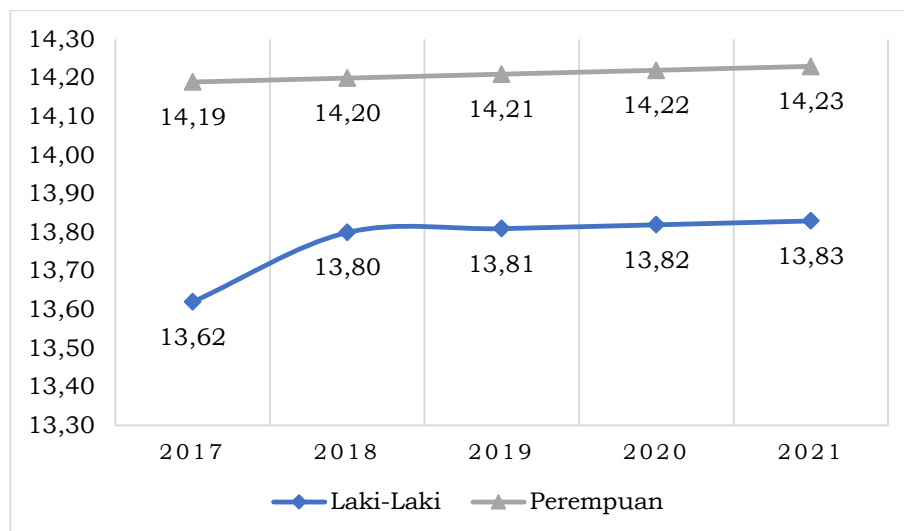
Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.27 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Perkembangan indikator pembentuk IPG Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

a. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Perkembangan Harapan Lama Sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Sukoharjo baik laki-laki maupun perempuan sama-sama menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, HLS laki-laki sebesar 13,83 tahun lebih rendah dibandingkan HLS perempuan yang mencapai sebesar 14,23 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

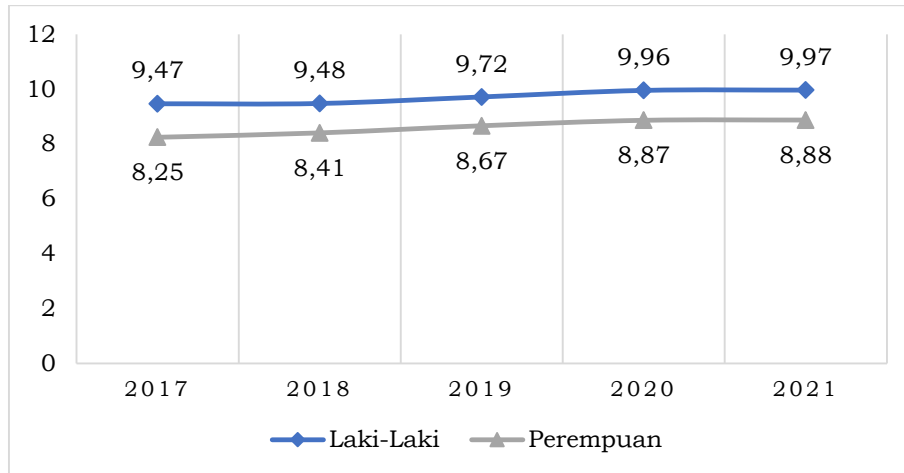


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.28 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

b. Rata-rata lama sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Sukoharjo baik laki-laki maupun perempuan terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. RLS laki-laki sebesar 9,97 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,88 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

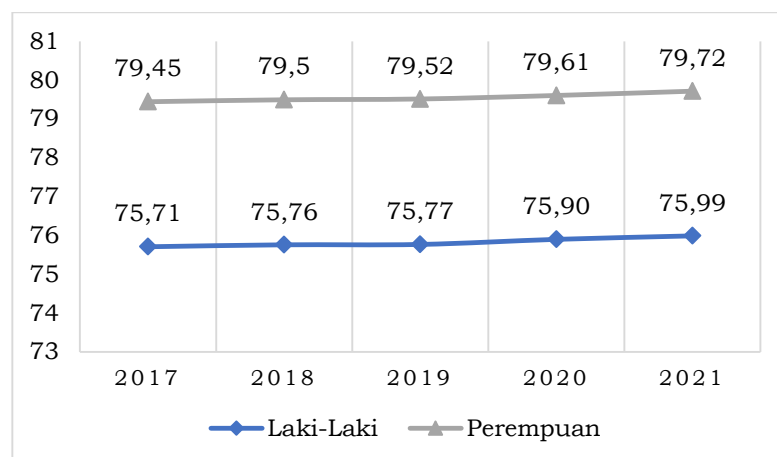


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.29 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

c. Usia Harapan Hidup (UHH)

Perkembangan Umur Harapan Hidup menurut jenis kelamin pada tahun 2017 hingga tahun 2021 baik laki-laki dan perempuan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. UHH laki-laki sebesar 75,99 tahun lebih rendah dibandingkan UHH perempuan sebesar 79,72 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

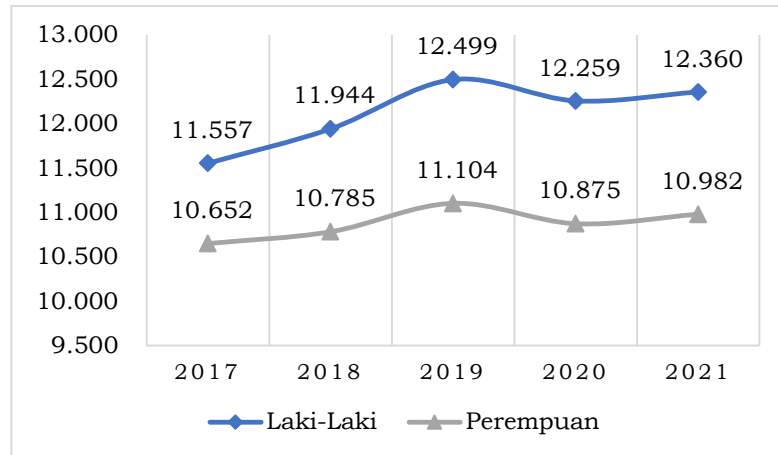


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.30 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

d. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Perkembangan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan jenis kelamin baik laki-laki dan perempuan pernah mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga tahun 2020, yaitu laki-laki dari Rp. 12.499 menjadi Rp. 12.259, serta perempuan dari Rp. 11.104 menjadi Rp. 10.875. Namun pengeluaran per kapita yang disesuaikan baik laki-laki dan perempuan kembali naik pada tahun 2021, yaitu laki-laki menjadi Rp. 12.360 dan perempuan menjadi sebesar Rp. 10.982. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut



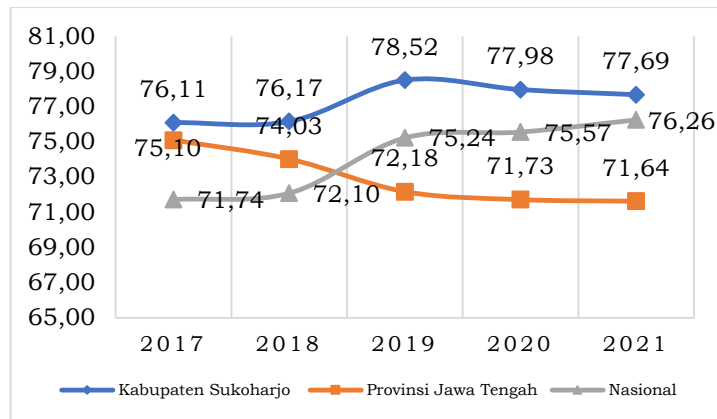
Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.31 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

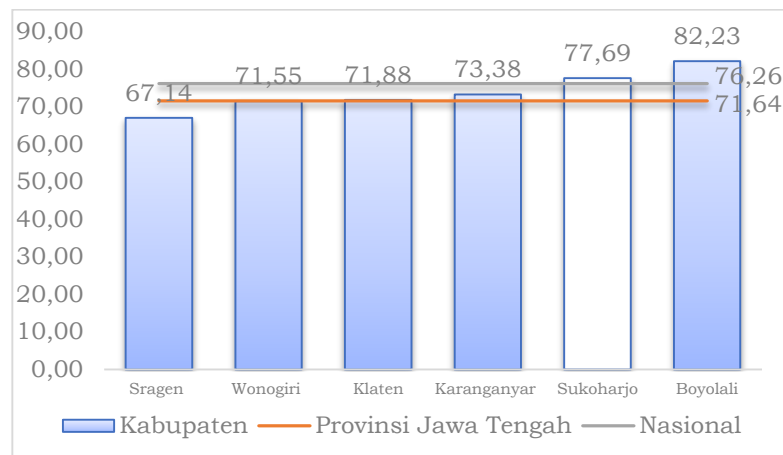
Perkembangan IDG Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun terakhir, terus menurun pada tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu dari 78,52 menjadi sebesar 77,69. Kondisi ini berkontribusi negatif terhadap rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan tidak relevan terhadap perkembangan rata-rata Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.32 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Posisi relatif IDG Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar 77,69 menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten wilayah sekitar, setelah Kabupaten Boyolali (82,23), serta berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,64 dan Nasional sebesar 76,26. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

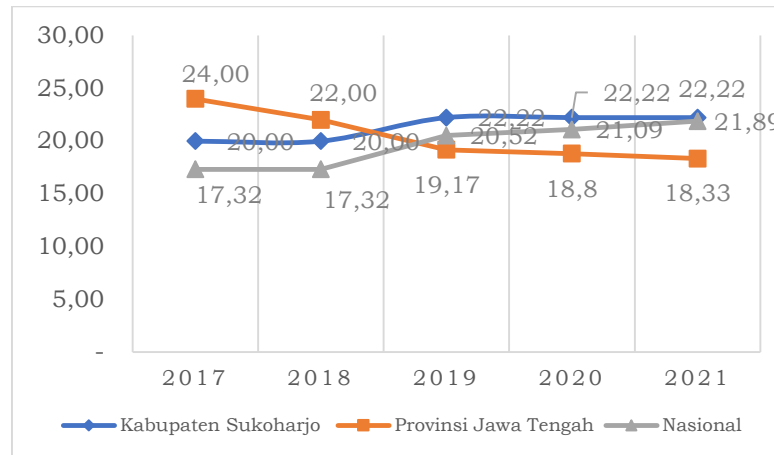
Gambar 2.33 Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Perkembangan indikator pembentuk IDG Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 hingga tahun 2021 sebagai berikut:

a. Keterlibatan Perempuan di Parlemen

Perkembangan persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu dari 20,00 persen naik menjadi sebesar 22,22 persen. Kondisi ini tidak relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun relevan

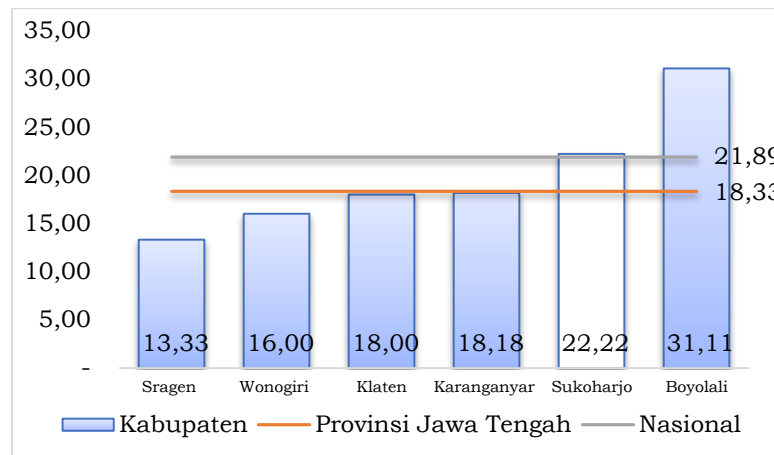
terhadap perkembangan rata-rata Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.34 Perkembangan Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Posisi relatif persentase keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 sebesar 22 persen menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten wilayah sekitar, setelah Kabupaten Boyolali (31,11 persen) serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 18,33 persen dan Nasional sebesar 21,89 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



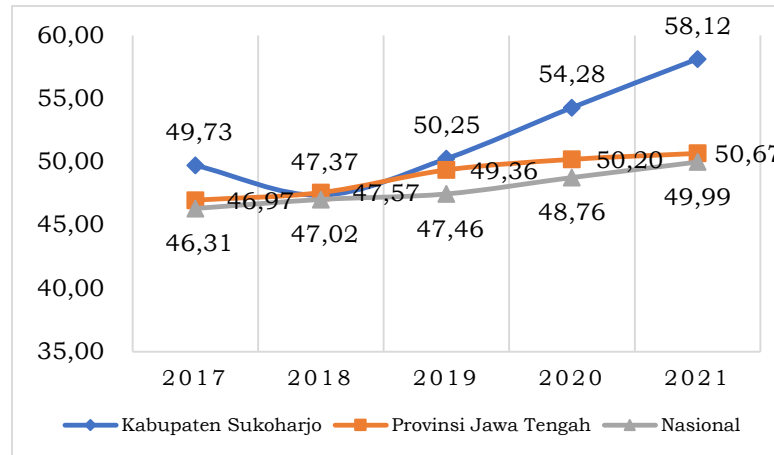
Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.35 Posisi Relatif Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

b. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

Perkembangan persentase perempuan sebagai tenaga manager, professional, administrasi, dan teknisi di Kabupaten Sukoharjo

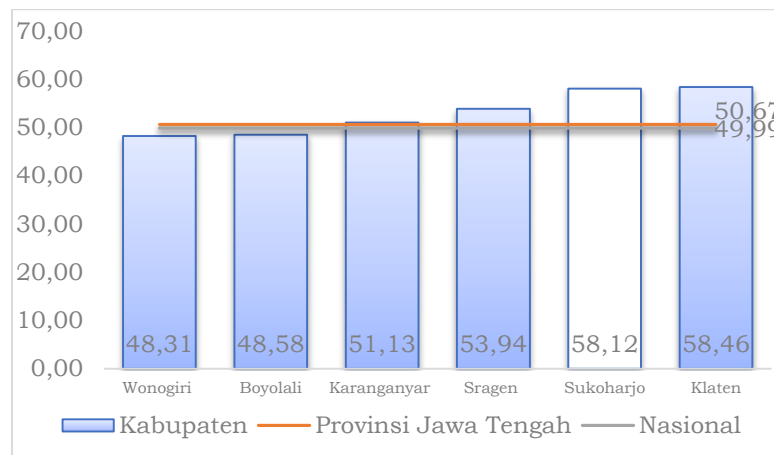
mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sebesar 49,73 persen dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 58,12 persen. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.36 Perkembangan Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Posisi relatif Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 58,12 persen menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar, setelah Kabupaten Klaten (58,46 persen), serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 50,67 persen dan Nasional sebesar 49,99 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.

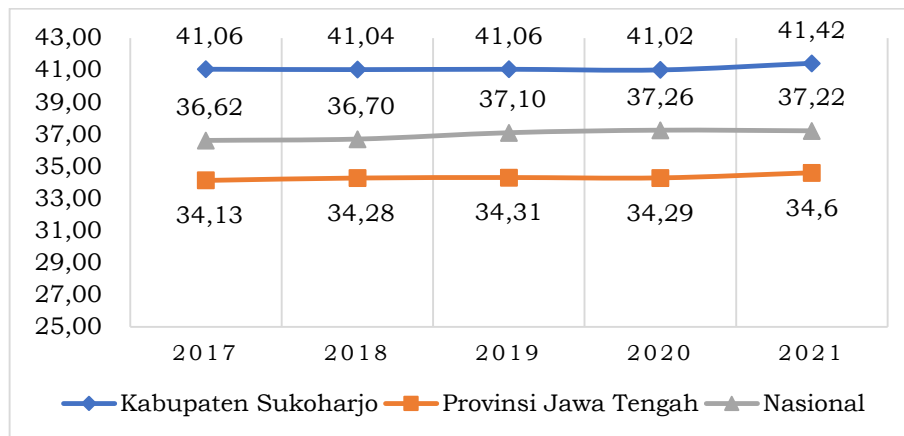


Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.37 Posisi Relatif Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

c. Sumbangan Pendapatan Perempuan

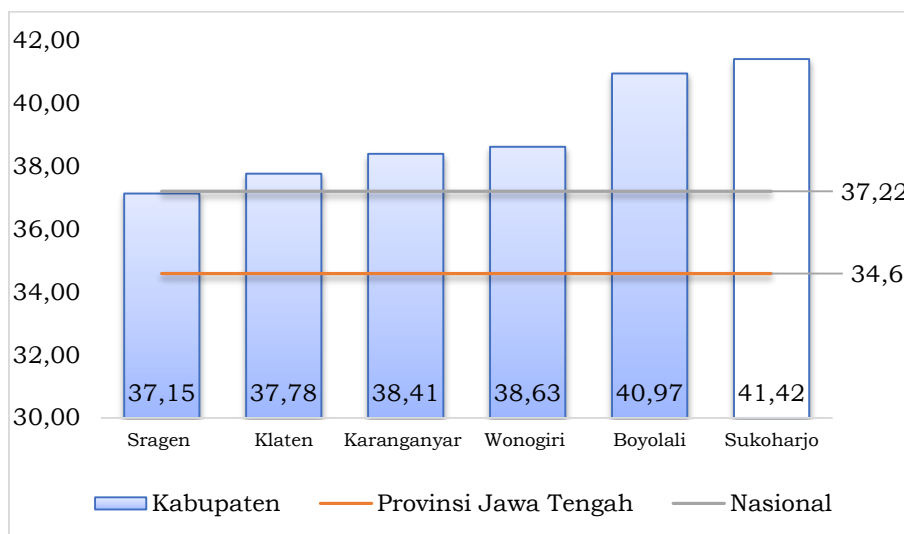
Persentase sumbangan pendapatan perempuan di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu pada tahun 2017 sebesar 41,06 persen dan pada tahun 2021 naik menjadi sebesar 41,42 persen. Kondisi ini relevan terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah, namun tidak relevan terhadap perkembangan rata-rata Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.38 Perkembangan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

Jika dibandingkan dengan kabupaten wilayah sekitar, Kabupaten Sukoharjo sebesar 41,42 persen menempati posisi tertinggi, serta berada di atas Provinsi Jawa Tengah sebesar 34,6 persen dan Nasional sebesar 37,22 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 2.39 Posisi Relatif Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

BAB III PROFIL KEMISKINAN KABUPATEN SUKOHARJO

Kemiskinan pada negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut. Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan isu strategis nasional dan daerah yang masih menjadi perhatian. Kemiskinan dapat ditemui baik di wilayah desa maupun kota di daerah. Secara umum kemiskinan merupakan kekurangan sumber daya tertentu dalam menunjang kesejahteraan hidup seseorang ataupun masyarakat.

Kemiskinan dipandang sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong orang miskin.

Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase kemiskinan pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Pada 1993, BPS menyajikan data kemiskinan di Indonesia yang dihitung sampai dengan tingkat provinsi. Sejak 2003, BPS menyampaikan data jumlah dan persentase penduduk miskin secara rutin setiap tahun. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan standar dan konsep yang diterapkan di banyak negara, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach). Dalam pendekatan ini, kebutuhan minimum makanan rumah tangga sebanyak 2.100 kilokalori per orang ditambah dengan kebutuhan paling mendasar kelompok bukan makanan. Adapun ketidakmampuan dari sisi pengeluaran atau pendapatan untuk hidup layak minimum dalam rupiah merupakan pendekatan secara moneter (monetary approach). Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan (GK) (BPS, 2020).

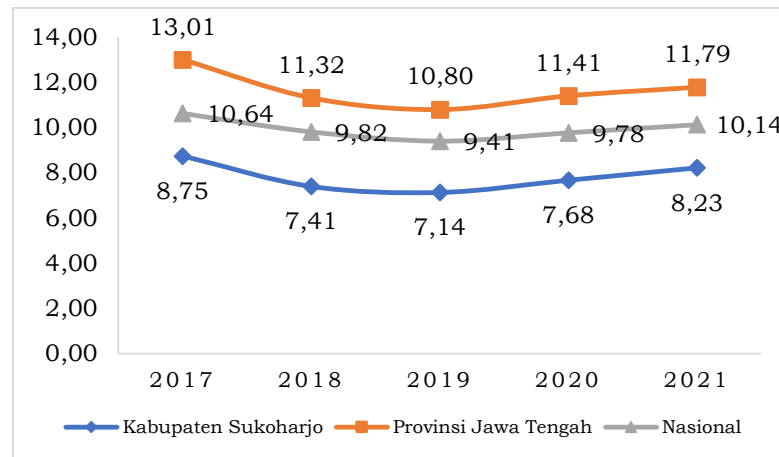
Kondisi kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa banyak hal, seperti harga kebutuhan pokok, pendapatan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan dan lain-lain. Kenaikan harga kebutuhan pokok, menuntut masyarakat untuk mengeluarkan biaya atau pengeluaran yang lebih banyak. Hal ini biasanya dipengaruhi atau disebabkan dari pendapatan yang mereka dapatkan nilainya lebih kecil dari pada pengeluaran untuk kebutuhan. Ketidakimbangan antara pendapatan dan pengeluaran menjadi salah satu faktor terjadinya ketimpangan yang pada akhirnya masuk dalam kategori kemiskinan.

3.1. Kemiskinan Konsumsi

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat diindikasikan dengan kondisi kemiskinan konsumsi. Kondisi kemiskinan konsumsi dapat dilihat dari 5 indikator meliputi: 1) Persentase Penduduk Miskin (P0); 2) Jumlah Penduduk miskin; 3) Garis Kemiskinan; 4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); 5) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukoharjo akibat menurunnya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo mengalami kenaikan pada tahun 2019 hingga tahun 2021, yaitu tahun 2019 sebesar 7,14 persen (63,6 ribu jiwa) dan tahun 2021 menjadi sebesar 8,23 persen (73,84 ribu jiwa) atau terjadi kenaikan 1,09 persen poin (10,24 ribu jiwa).

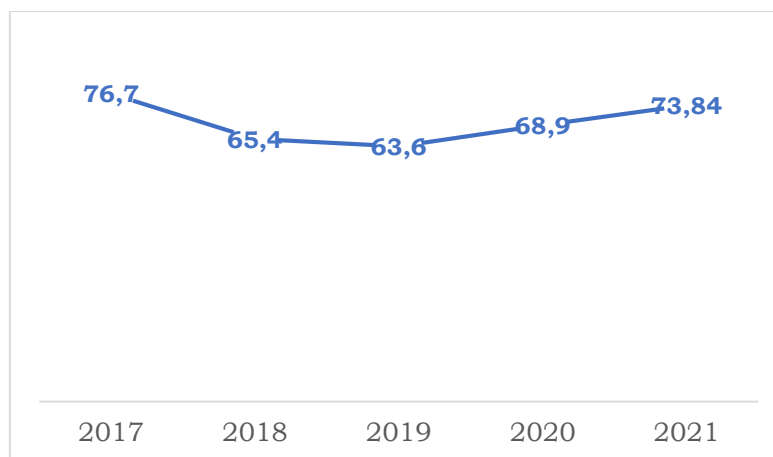
Secara rinci persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

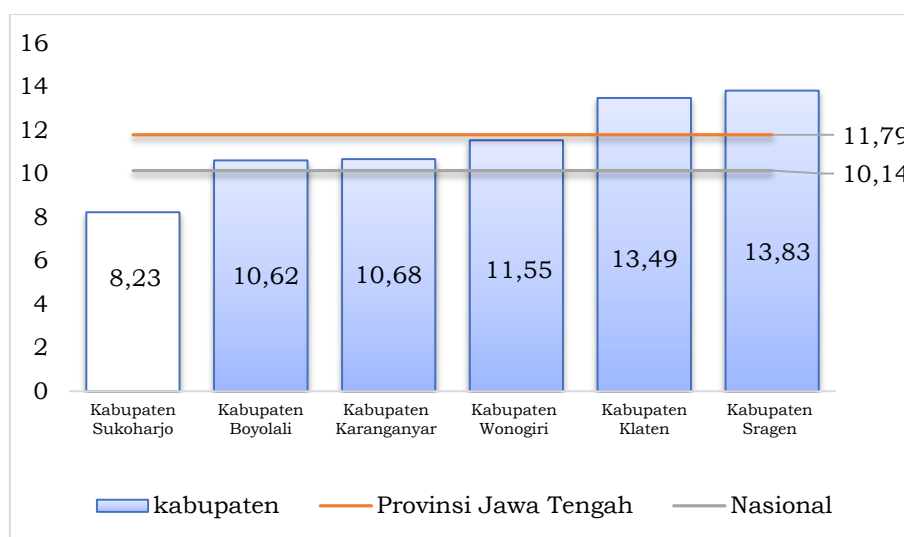
Secara rinci jumlah penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3.2 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

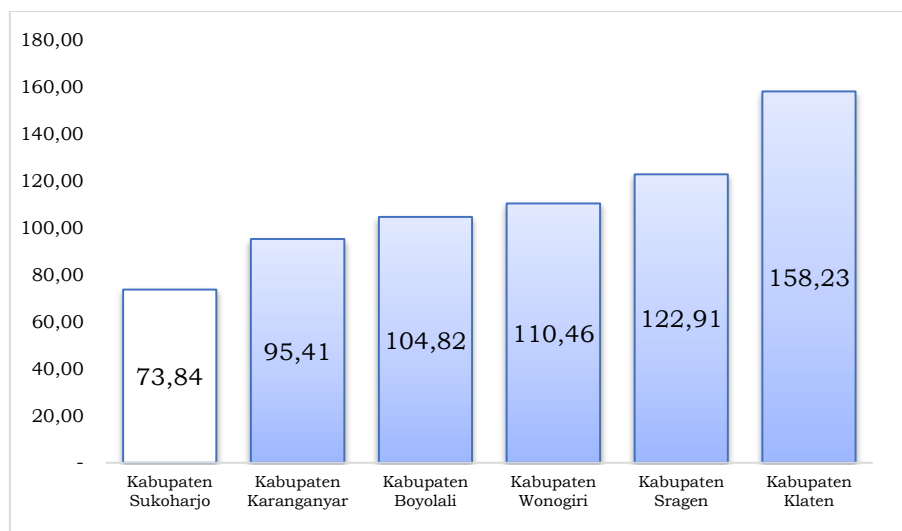
Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 8,23 persen menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, serta berada di bawah Provinsi Jawa Tengah (11,79 persen) dan Nasional (10,14 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3.3 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Posisi relatif jumlah penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebanyak 73,84 ribu jiwa menempati posisi terendah dibandingkan kabupaten lain di sekitarnya seperti Klaten, Sragen, Wonogiri, Boyolali dan Karanganyar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut



Sumber: BPS, 2022

Gambar 3.4 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Meningkatnya persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo, tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2020 dan 2021 diakibatkan kebijakan *social distancing* dan *general lockdowns* dalam penanganan pandemi COVID-19. Pandemi Covid-19 menghantam seluruh pendapatan masyarakat, utamanya masyarakat ekonomi kelas bawah yang menurun (<https://www.gatra.com/detail/news/484716/ekonomi/akibat-covid-angka-kemiskinan-indonesia-naik-2642-juta>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020). Selain itu, melonjaknya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh naiknya harga eceran komoditas pokok, seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir pada periode Maret 2020, harga eceran beberapa komoditas pokok mengalami kenaikan. Harga beras naik 1,78 persen, daging ayam ras 5,53 persen, minyak goreng 7,06 persen, telur ayam ras 11,10 persen, serta gula pasir 13,35 persen.

Kontribusi kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2020 selain persoalan harga sembako yang naik, sektor pariwisata juga terdampak. Meskipun pemerintah resmi mengumumkan kasus Covid-19 pada bulan Maret, sektor pariwisata dan pendukungnya sudah mulai terdampak sejak Februari, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada Maret 2020 anjlok 64,11 persen dibandingkan dengan Maret 2019 (<https://www.republika.id/posts/8625/waspadai-ledakan-kemiskinan>. Diakses tanggal 10 Agustus 2020).

Berdasarkan hasil survei demografi BPS diikuti sebanyak 87.379 responden, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi covid-19 terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

1) Penurunan Pendapatan Masyarakat

Adapun masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 1,8 juta per bulan sebanyak 70,53 persen masyarakat atau responden mengalami penurunan pendapatan, penghasilan Rp 1,8 juta sampai Rp 3 juta 46,77 persen pendapatannya mengalami penurunan. Adapula masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta 37,19 persen pendapatannya mengalami penurunan.

Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta sebanyak 31,67 persen mengalami penurunan pendapatan. Dan masyarakat dengan pendapatan yang di atas Rp 7,2 juta, 30,34 persen mengalami penurunan pendapatan.

Survei demografi yang dipaparkan tersebut diikuti sebanyak 87.379 responden, di mana secara rata-rata 35,78 persen yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan. Dari sebanyak responden itu pula diketahui sebanyak 56,4 persen bekerja, 18,34 persen dirumahkan sementara, 2,52 persen terkena PHK, dan 22,74 persen tidak bekerja.

2) Konsumsi Rumah Tangga Melambat

Hal lain yang membuat angka kemiskinan naik yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB (Produk Domestik Bruto) melambat. Di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02 persen.

3) Pariwisata Terpuruk

Pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa Indonesia terbesar terbilang terpuruk. Jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11 persen dibandingkan Maret 2019.

4) Harga Bahan Pokok Naik

BPS juga mencatat, faktor lain yang membuat angka kemiskinan meningkat, karena adanya kenaikan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok. Pada periode September 2019 - Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami kenaikan. Selama periode September 2019-Maret 2020, beras naik 1,78 persen, daging ayam ras naik 5,53 persen, minyak goreng naik 7,06 persen, telur ayam ras naik 11,1 persen, dan gula pasir naik 13,35 persen.

Meningkatnya kemiskinan sejak tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 secara nasional dan daerah, Pemerintah dan Pemerintah Daerah terus berupaya mendorong percepatan pemulihan kinerja ekonomi. Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Persoalan meningkatnya kemiskinan bukan hanya sekedar berapa

persentase penduduk miskin tetapi perlu memperhatikan dimensi lain yaitu Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), serta pengurangan kemiskinan ekstrem.

BPS dalam mengukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Besaran garis kemiskinan menunjukkan pengeluaran seseorang dalam Rupiah/Kapita/Bulan termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut :

1) Komoditi Makanan

Pada September 2021, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 19,61 persen di perkotaan dan 21,25 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (9,54 persen di perkotaan dan 8,86 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,56 persen di perkotaan dan 4,70 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,47 persen di perkotaan dan 4,04 persen di perdesaan), gula pasir (2,94 persen di perkotaan dan 2,93 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Tabel 3.1 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2021

No	Komoditi	Kota (persen)	Komoditi	Desa (persen)
1	Beras	19,61	Beras	21,25
2	Rokok kretek filter	9,54	Rokok kretek filter	8,86
3	Telur ayam ras	4,56	Telur ayam ras	4,70
4	Daging ayam ras	4,47	Daging ayam ras	4,04
5	Gula pasir	2,94	Gula pasir	2,93
6	Mie instan	2,61	Tempe	2,69
7	Tempe	2,61	Tahu	2,45
8	Kue basah	2,50	Mie instan	2,35
9	Tahu	2,47	Kue basah	2,26
10	Bawang merah	1,95	Bawang merah	2,05
11	Komoditi makanan lainnya	20,87	Komoditi makanan lainnya	22,43
	Total Makanan	74,13	Total Makanan	76,00

Sumber: BPS, 2022

2) Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK Maret 2020, baik perkotaan maupun perdesaan, meliputi perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

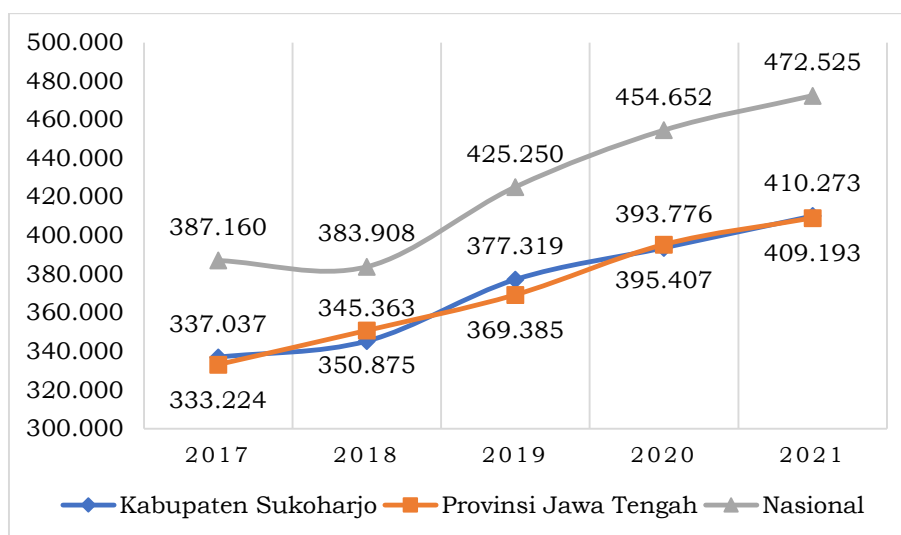
Tabel 3.2 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2021

No	Komoditi	Kota (persen)	Komoditi	Desa (persen)
1	Perumahan	6,79	Perumahan	7,96
2	Bensin	4,32	Bensin	3,85
3	Listrik	2,57	Listrik	1,80
4	Pendidikan	2,19	Pendidikan	1,19
5	Perlengkapan mandi	1,30	Perlengkapan mandi	1,15
6	Pajak kendaraan bermotor	0,74	Sabun cuci	0,80
7	Kesehatan	0,72	Kesehatan	0,79

No	Komoditi	Kota (persen)	Komoditi	Desa (persen)
8	Komoditi bukan makanan lainnya	7,25	Komoditi bukan makanan lainnya	6,46
	Total Bukan Makanan	25,87	Total Bukan Makanan	24,00

Sumber: BPS, 2022

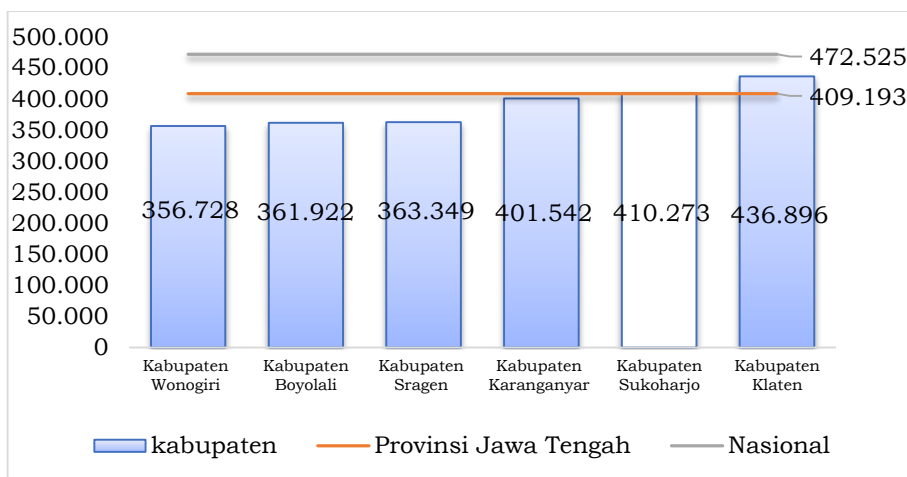
GK Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu lima tahun terakhir terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu dari sebesar Rp 337.037,-/kapita/bulan menjadi Rp 410.273,-/kapita/bulan. Kondisi relevan terhadap dengan perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Kenaikan GK berpengaruh terhadap ukuran pengeluaran penduduk miskin sehingga perlu upaya-upaya dalam peningkatan rata-rata pendapatan penduduk miskin dan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, serta mengendalikan harga komoditi makanan dan bukan makanan yang berkontribusi terhadap kenaikan GK.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.5 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)

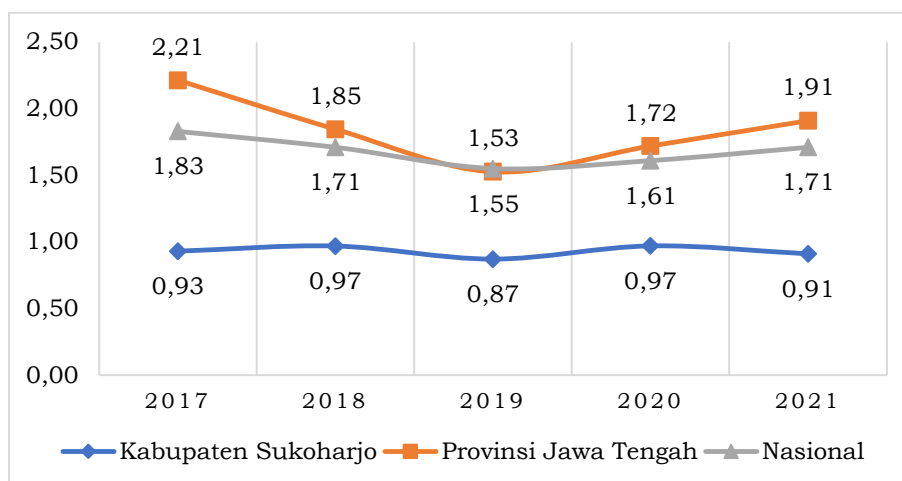
Garis kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sebesar Rp.410.273,-/kapita/bulan berada di atas rata-rata GK Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.409.193,-/kapita/bulan dan di bawah Nasional sebesar Rp.472.525,-/kapita/bulan, serta Kabupaten Sukoharjo menempati posisi kedua tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, setelah Kabupaten Klaten (Rp.436.896,-/kapita/bulan).



Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.6 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019 terus meningkat hingga tahun 2021 (kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin tinggi), yaitu dari 0,87 menjadi sebesar 0,91. Kondisi ini berkontribusi negatif terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

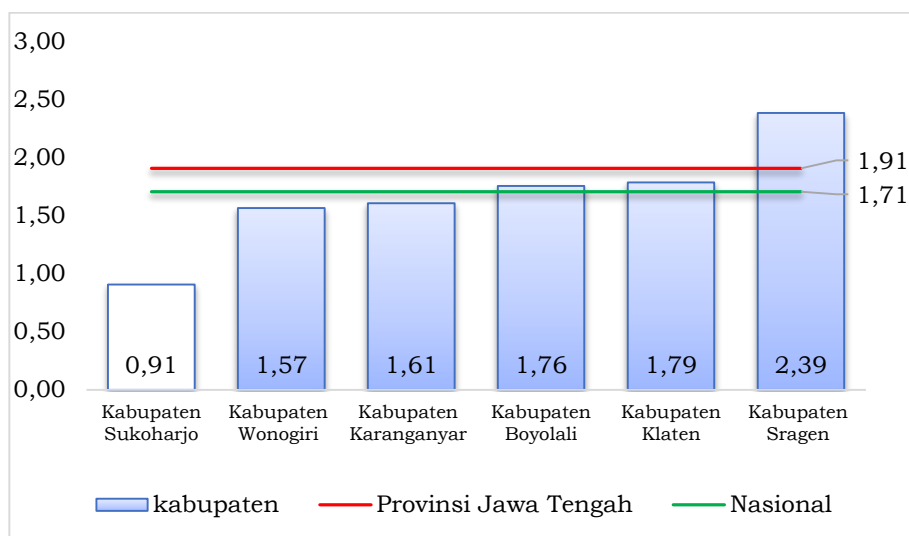


Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.7 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 – 2021

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 sebesar 0,91 menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten di wilayah sekitarnya, serta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,91 dan di atas Nasional sebesar 1,71.

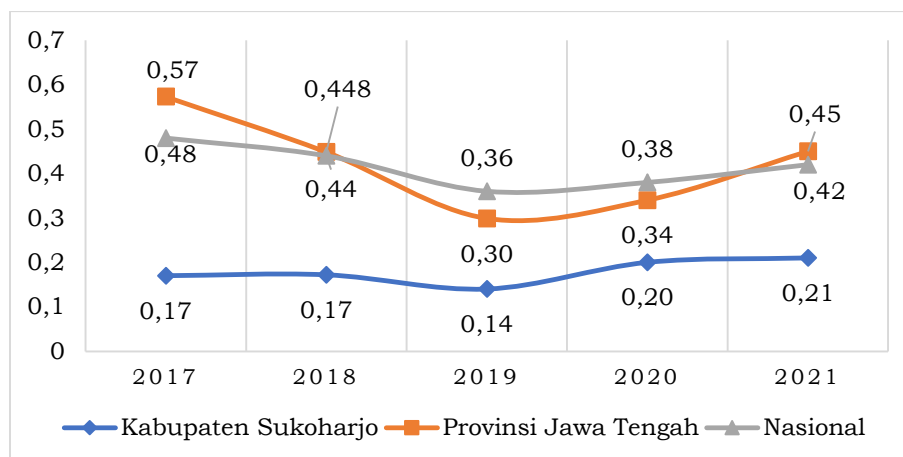
Secara rinci posisi relatif P1 Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.8 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

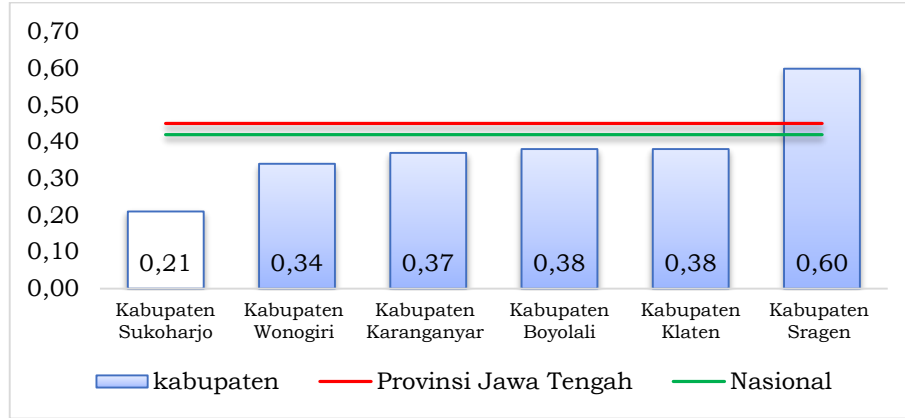
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019 terus meningkat hingga tahun 2021 (ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin dari garis kemiskinan semakin tinggi), yaitu dari 0,14 menjadi sebesar 0,21. Kondisi ini berkontribusi negatif terhadap perkembangan rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.9 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 - 2021

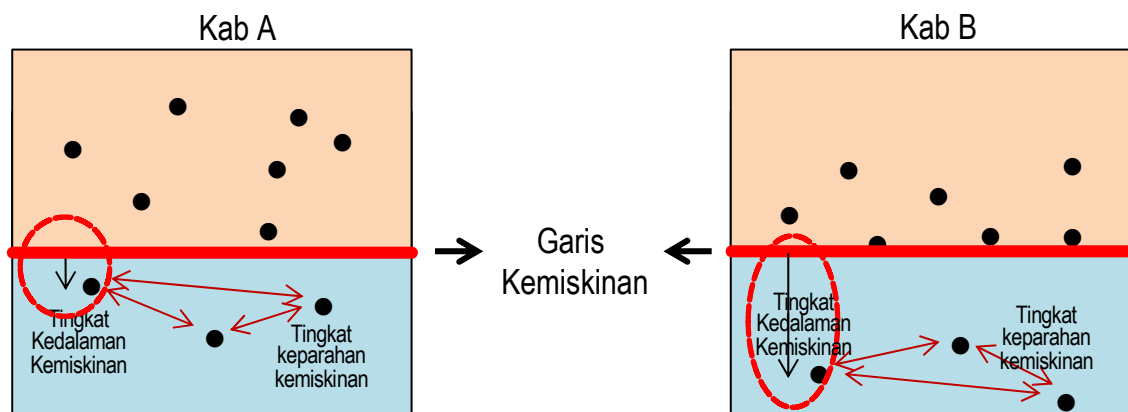
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo tercatat pada tahun 2021 sebesar 0,21 menempati posisi terendah dibandingkan dengan kabupaten di wilayah sekitarnya, serta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,45 dan Nasional sebesar 0,42. Secara rinci posisi relatif P2 Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS, 2022

Gambar 3.10 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

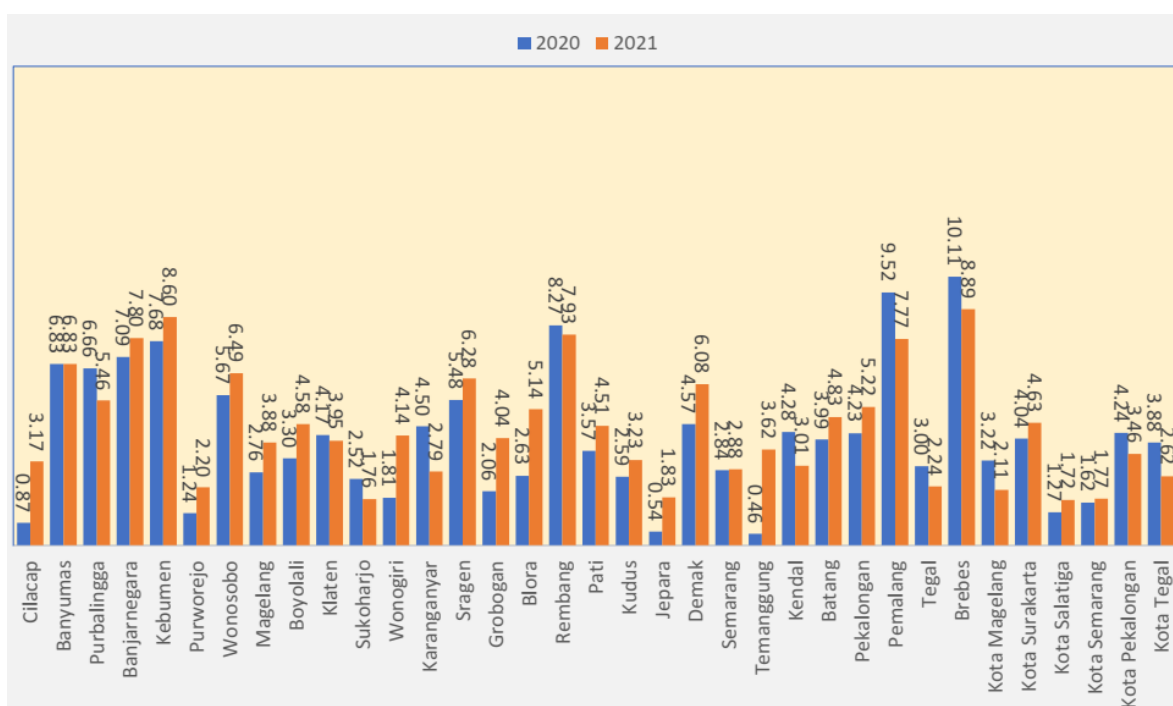
Tahun 2021, persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Sukoharjo dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Klaten dan Sragen sehingga upaya penurunan kemiskinan di Kab Sukoharjo seharusnya lebih mudah bila dibandingkan dengan Kabupaten Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Klaten dan Sragen.



Sumber: TNP2K, 2020

Gambar 3.11 Visualisasi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan USD 1.9 PPP atau penduduk miskin yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah sekitar 0,7 GK. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 mencapai 1,76 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,52 persen, serta dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, menempati posisi terendah dibandingkan Kabupaten Wonogiri, Sragen, Boyolali, Wonogiri, Klaten, dan Karanganyar. Arah Presiden target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 membutuhkan upaya extraordinary dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan Pemda. Selengkapnya perubahan kemiskinan ekstrem menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: TNP2K, 2022

Gambar 3.12 Perubahan Kemiskinan Ekstrem menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2020-2021

3.2. Kemiskinan Non Konsumsi

Banyak studi menunjukkan secara umum kemiskinan di Indonesia berkaitan erat dengan masalah ketenagakerjaan dan kewirausahaan, tidak meratanya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tidak memadainya infrastruktur (prasarana) dasar, rentannya kecukupan pangan, serta permasalahan kesejahteraan sosial. Pendekatan penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut dalam konsep TNP2K disebut dengan pendekatan Multi-Interventions, yaitu Kemiskinan Ekstrem adalah Masalah Multidimensi. Multi-Interventions diarahkan ke wilayah kantong kemiskinan.

Kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu dimensi saja seperti konsumsi atau pendapatan. Kemiskinan multidimensi merupakan suatu pendekatan pengukuran kemiskinan yang berusaha menyelesaikan masalah kemiskinan dengan menyodorkan perspektif yang lebih luas dalam memandang kemiskinan. Dalam hal ini, kemiskinan multidimensi akan memotret kemiskinan dari beragam dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, bahkan pekerjaan.

Salah satu kelebihan kemiskinan multidimensi adalah dapat menangkap bukan hanya berapa jumlah penduduk miskin, tetapi sudah memberitahu apa karakteristik dari kemiskinan yang dialami oleh penduduk tersebut, sehingga pada saat pemerintah memberikan kebijakan, maka kebijakan akan lebih tepat karena mempunyai indikator yang jelas dalam menentukan keberhasilan program.

Dengan demikian fokus dan indikator pemantauan dapat dilakukan terhadap kelompok bidang penanggulangan kemiskinan tersebut, yang terdiri dari beberapa indikator yang menggambarkan capaian (outcome) penanggulangan kemiskinan atau disebut juga sebagai indikator utama. Umumnya indikator ini mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh suatu program penanggulangan kemiskinan. Dalam perencanaan kebijakan, keberadaan masalah kemiskinan dinyatakan dengan berbagai indikator yang telah disepakati secara global (melalui SDGs), nasional (melalui RPJMN), maupun daerah (melalui RPJMD).

Indikator utama kemiskinan non konsumsi mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3 Telaah Bidang dan Indikator Utama Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi Dalam Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
1. Ketenagakerjaan	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
	2. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme

¹ TNP2K, Panduan Penanggulangan Kemiskinan (Buku Pegangan Resmi TKPK Daerah), Oktober 2011

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
					Program Hubungan Industrial	Prosentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
		Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi
						Cakupan pembinaan atlet muda
	3. Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB sektor industri
					Program Pengendalian Izin Usaha	Persentase jumlah IUI Kecil

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)					
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program	
					Industri Kabupaten/Kota	dan menengah yang diterbitkan	
		Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
						Pertumbuhan Wirausaha Baru	
						Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat
						Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspor
		Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	
						Program Pengawasan Dan	Prosentase Koperasi aktif

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
		Berdaya Saing Tinggi	Berkualitas Dan Inklusif		Pemeriksaan Koperasi	
					Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
					Program Pemberdayaan UMKM	Prosentase kemitraan KUMKM
						Prosentase Fasilitas Peningkatan Perizinan bagi UMKM
				Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peningkatan Omset Produk UMKM	
	4. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhdap total kesempatan kerja	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin		Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)
						Persentase penduduk miskin perdesaan

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						(DTKS Desil 1 dan 2)
					Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya
					Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial
		Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)
					Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat,	Persentase Jenis Lembaga kemasyarakatan Desa yang dibina

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
					Dan Masyarakat Hukum Adat	
	5. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi
2. Kesehatan	1. Angka Kematian Bayi (AKB)	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)
	2. Angka Kematian Balita (AKBA)				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit menular
	3. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						menular dan kesehatan jiwa
	4. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans
	a. Gizi Buruk					Persentase FKTP terakreditasi
	b. Gizi Kurang					Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi
	5. Proporsi anak berusia 1 tahun diimunisasi campak					Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi
	6. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih					Persentase Fasyankes yang

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						memberikan layanan JKN
	7. Cakupan pelayanan antenatal (K4)/ Kontak minimal 4 kali selama masa kehamilan					Persentase Capaian UHC (Universal Health Coverage)
	8. Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-24 tahun					Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu
	9. Angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk					Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi
	10. Angka kejadian tubeculosis per 100.000 penduduk					Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
	11. Proporsi kasus tuberculosis yang disembuhkan melalui DOTS					Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat
	12. Angka kematian DBD					Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar
						Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprodksi
						Persentase Puskesmas dengan cakupan yan

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						kesehatan pada lansia
						Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan
						Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja
						Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga
						Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar
						Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa siaga aktif mandiri
	13. Angka pemakaian kontrasepsi/ Contraceptive Prevalence Rate (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Pengendalian Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)
	14. Tingkat kelahiran pada				Program Pembinaan	Cakupan Peserta KB Aktif

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
	remaja per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun				Keluarga Berencana (KB)	
	15. Unmetneed KB				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif
3. Pendidikan	1. Angka Partisipasi Murni (APM)	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)
	a. APM SD/MI sederajat					Harapan Lama Sekolah (Tahun)
	b. APM SMP/MTs sederajat				Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan
	2. Angka Partisipasi Kasar (APK)	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca
	a. APK SD/MI sederajat					
	b. APK SMP/MTs sederajat					

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
	3. Angka Melek Huruf					
	4. Rasio APM perempuan /laki-laki					
	a. SD/MI sederajat					
	b. SMP/MTs sederajat					
	5. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun					
	6. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kota					
4. Infrastruktur Dasar	1. Akses sanitasi layak	Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infratraktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses Sanitasi yang layak Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
	2. Akses air minum layak	Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infratraktur		Akses air minum yang layak
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan
	3. Proporsi rumah tidak layak huni	Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infratraktur		Persentase Lingkungan Hunian Layak
					Program Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
					Utilitas Umum (PSU)	
5. Ketahanan Pangan	1. Perkembangan harga beras	Misi 3 :Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
	2. Harga bahan kebutuhan pokok utama				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Prosentase Pengendalian Harga
	3. Produksi beras					Prosentase Kios Pupuk Lengkap (KPL)
		Misi 3 :Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, dan perikanan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani
						Prosentase penggunaan benih padi bersertifikat
				Program Penyediaan Dan Pengembangan	Prosentase penggunaan alat mesin	

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
					Prasarana Pertanian	pertanian oleh petani Jumlah Luas Tanam (Ha)
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Jumlah Populasi ternak (animal unit)
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen Prosentase Pengendalian penyakit Zoonosis
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
					Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan klas kelompok
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB
						Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan
					Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)

Bidang	Indikator Utama ¹	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
		Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
	4. Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum a. Kurang dari 1.400 kkal/kapita/hari b. Kurang dari 2.000 kkal/kapita/hari	Misi 3 :Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Skor Pola Pangan Harapan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)
						Koefisien Variasi Harga Pangan Strategis:
						Telur
					Bawang Merah	
					Cabe	
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani

Kondisi indikator utama kemiskinan non konsumsi Kabupaten Sukoharjo dilihat dari bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan, sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Ketenagakerjaan

Masalah pokok ketenagakerjaan adalah produktivitas tenaga kerja yang masih rendah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan tersedia untuk bekerja. Dengan melihat TPT secara langsung dapat mengindikasikan seberapa luas kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut. Semakin Tinggi TPT di suatu wilayah maka dapat mengindikasikan bahwa semakin sempitnya kesempatan kerja yang ada di wilayah tersebut.

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Beberapa konsep yang terkait dengan indikator ini, yakni: Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan penganggur, Penduduk usia kerja yang tidak termasuk angkatan kerja mencakup penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya

TPT selama kurun waktu Tahun 2017-2021 menunjukan angka yang cenderung naik, dimana pada Tahun 2017 sebesar 2,27 mengalami kenaikan menjadi 6,93 pada Tahun 2020, akibat adanya Pandemi Covid-19, dan pada Tahun 2021 menjadi 3,32.

Sedangkan TPAK selama tahun 2017-2021 cenderung meningkat, di tahun 2016 sebesar 67,15 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 69,11 persen, kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 69,21 persen, di tahun 2019 meningkat menjadi 69,22 persen dan terus meningkat menjadi 69,43 persen pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Peningkatan pada Tahun 2020 tidak terjadi di Kabupaten

Sukoharjo, bahkan secara Nasional juga mengalami hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sukoharjo pada Tahun 2021 sebanyak 493.258 orang. Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Pada Tahun 2021, sebanyak 476.867 orang penduduk di Kabupaten Sukoharjo bekerja sedangkan sebanyak 16.391 orang menganggur. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada penambahan penduduk penganggur, melainkan juga pada dinamika aktivitas ketenagakerjaan penduduk usia kerja secara umum di Kabupaten Sukoharjo. Dari 31,66 juta penduduk usia kerja di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 terdapat 4,23 juta atau 13,36 persen yang terdampak Covid-19.

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dimana pada tahun 2019 sebesar 72,32%. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif dan berakhir tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018, begitu juga dengan AKAD dan AKAN memiliki nilai yang berfluktuasi.

Pencapaian di Kabupaten Sukoharjo selama periode tahun 2016-2021 mengalami peningkatan dan rasio UMK dibandingkan KHL sudah mencapai 100% mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah memenuhi kebutuhan hidup layak.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	TPT	%	2,27	2,72	3,39	6,93	3,32
2.	TPAK	%	67,29	68,16	68,17	68,74	68,78
3.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas	Jiwa		692.423,00	-	710.305,00	717.171,00
4.	Angkatan Kerja	Jiwa		471.973,00	477.197,00	488.250,00	493.258,00
5.	Bekerja	Jiwa		458.859,00	460.954,00	454.419,00	476.867,00
6.	Pengangguran Terbuka	Jiwa		13.114,00	16.243,00	33.831,00	16.391,00
7.	Bukan Angkatan Kerja	Jiwa		220.450,00	-	222.055,00	223.913,00
8.	AKL	%	2.110	1.648	2.761	1.993	3.572
9.	AKAD	%					
10.	AKAN	%	280	221	2.318	122	78
11.	UMK	Rp/Bln/orang	1.513.000,00	1.648.000,00	1.783.500,00	1.938.000,00	1.986.450,00
12.	KHL	Rp/Bln/orang	1.513.000,00	1.648.000,00	1.783.500,00	1.938.000,00	1.986.450,00
13.	Ratio UMK terhadap KHL	%	100	100	100	100	100

Sumber data: Dispernaker Kabupaten Sukoharjo dan BPS, Tahun 2022

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.

Kawasan peruntukkan pariwisata terdiri dari Objek wisata alam, Objek wisata buatan, Objek wisata ziarah, dan Objek wisata. Capaian kinerja urusan pariwisata kabupaten Sukoharjo sebagai berikut. Beberapa objek wisata di wilayah Kabupaten Sukoharjo meliputi:

- a. Objek wisata alam, di antaranya
 1. Objek Wisata Batu Seribu di Kecamatan Bulu.
 2. Gunung Sepikul di Kecamatan Bulu.
 3. Curug Krajan di Kecamatan Weru
 4. Telaga Claket di Kecamatan Nguter.
 5. Gunung Taruwongso di Kecamatan Sukoharjo.
- b. Objek wisata buatan, di antaranya:
 1. Pandawa Water World di Kecamatan Grogol
 2. Royal Water Adventure di Kecamatan Grogol
 3. Dam Colo di Kecamatan Nguter
 4. Pemandian Sendang Pinilih di Kecamatan nguter
 5. Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari
 6. Alas Karet di Kecamatan Polokarto
 7. The Heritage Palace di Kecamatan Kartasura
 8. Desa Wisata Wirun di Kecamatan Mojolaban, dengan produk khasnya adalah gamelan
 9. Desa Wisata Kenep di Kecamatan Sukoharjo, dengan produk khasnya Karak dan jenang.
 10. Desa Wisata Sonorejo di Kecamatan Sukoharjo, dengan produk khasnya tatah sungging (wayang kulit).
 11. Kawasan perbelanjaan di Solobaru, Kecamatan Grogol.
- c. Objek wisata ziarah, di antaranya:
 1. Makam Ki Ageng Balak di Kecamatan Polokarto.
 2. Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol
 3. Makam Ki Ageng Sutowijoyo di Kecamatan Tawang Sari
 4. Makam Ki Ageng Purwotosidik di Kecamatan Weru

5. Makam Mbah Sayidiman dan Goa Mertan di Kecamatan Bendosari
 6. Candi Sonosewu di Kecamatan Mojolaban.
- d. Objek wisata sejarah, di antaranya:
1. Petilasan Keraton Pajang di Kecamatan Baki
 2. Petilasan Keraton Kartasura di Kecamatan Kartasura.
 3. Selain itu Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai wisata Seni Budaya, di antaranya ritual Pulung Langse, Kebo Kinul dan Jurit Suropaten

Salah satu bagian integral dari perkembangan pariwisata suatu daerah adalah kulinernya. Warung makan dan restoran merupakan hal yang tidak lepas dari kegiatan pariwisata. Usaha penyediaan makanan selain dapat mendukung kegiatan pariwisata namun juga bisa menjadi daya tarik wisata utama. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui wisata kuliner khas sehingga dapat menarik kepuasan wisata yang berkunjung di Sukoharjo. Beberapa kuliner khas di Kabupaten Sukoharjo antara lain yaitu jenang dodol, krasikan, alakatak, ayam goreng kampung dan masih ada banyak lagi. Berikut adalah persebaran warung makan dan restoran yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Data rumah makan/restoran yang sudah memiliki izin TDUP mengalami peningkatan di Tahun 2021 sebanyak 115 dari tahun 2017-2020 terjadi penurunan. Dari Tahun 2019 yang hanya 7 rumah makan meningkat menjadi 10 rumah makan di Tahun 2021. Perkembangan jumlah warung makan dan restoran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa antusias pengembang usaha kuliner dalam masih tinggi. Potensi ini dapat digunakan untuk menunjang atraksi dan amenitas wisata yang ada di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pariwisata Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
			1.	Rumah Makan yang Memiliki Izin TDUP	Jumlah	22	11
2.	Warung Makan Dan Restoran	Jumlah	1.314	1.938	147	170	
3.	Kunjungan wisata	Jiwa	79.000	80.000	81.000	81.775	
4.	PAD sektor pariwisata	Rupiah		117.276.000	650.889.000	94.615.000	

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022

Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan MKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Prosentase koperasi aktif di Tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2020, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif.

Tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Sukoharjo dalam kurun waktu 2017-2021 cenderung meningkat, dari sebesar 88,43 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 88,48 persen pada tahun 2018, namun terjadi penurunan di tahun 2019 dan Tahun 2020 menjadi 85,88 persen dan 81,67 persen, dan terjadi kenaikan di Tahun 2021 sebesar 81,84 persen. Hal ini disebabkan karena banyak koperasi aktif yang naik badan hukum ke Provinsi. Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pascapenerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi. Selain itu, jumlah koperasi di Kabupaten Sukoharjo belum optimal karena masih adanya koperasi yang tidak aktif dan perlu adanya pendampingan khusus.

Tabel 3.6 Jumlah Koperasi dan Anggota Menurut Jenis Koperasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Jenis Koperasi	Koperasi			
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Anggota
-1	-2	-3	-4	-5
01. KUD	9	3	12	27,113
02. Koperasi Pondok Pesantren	3	1	4	558
03. Kopinkra	1	0	1	255
04. K P R I	59	8	67	7,852
05. Kopkar	8	6	14	4,490
06. Koperasi Angkatan Darat	4	0	4	1,350
07. Koperasi Serba Usaha	24	20	44	2,225
08. Koperasi Pasar	0	0	0	0
09. Koperasi Wanita	4	2	6	84
10. Koperasi Pepabri	1	0	1	46

Jenis Koperasi	Koperasi			
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Anggota
11. Koperasi Mahasiswa	2	0	2	90
12. Koperasi Lainnya	17	6	23	1,563
13. Koperasi Sekunder	2	0	2	61
14. Koperasi KSP/KJKS	222	33	255	34,134
2021	356	79	435	79821
2020	353	79	432	114391
2019	351	75	426	113,232
2018	337	52	429	115,224
2017	384	50	434	115 204

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UMK

Dari tabel diatas pada rentang Tahun 2017-2021 terjadi kenaikan jumlah UMKM Kabupaten Sukoharjo dari 19.804 Unit di Tahun 2017 dengan volume usaha sebesar Rp. 10,649,398,000, menjadi sebesar 227.405 unit di Tahun 2021 dengan vplume uisaha sebesar Rp. 36,877,590,000.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 -2021

No	Indikator Utama	Satuan					
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Persentase Koperasi Aktif	%	88,43	88,48	85,88	81,67	81,84
2.	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah	384	374	351	352	356
3.	Jumlah Koperasi tidak aktif	Jumlah	50	52	75	79	79
4.	Jumlah Koperasi	Jumlah	434	429	426	431	435
5.	Anggota koperasi	Jumlah	115 204	115,224	113,232	114391	79821
6.	Jumlah UMKM	Unit	19,804	19,804	20,580	224,905	227,405
7.	Volume usaha UMKM	Rp. 000	10,649,398,000	10,649,398,000	15,425,750,000	30,745,480,000	36,877,590,000

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kab Sukoharjo, 2022

Pembangunan sektor industri untuk menumbuhkembangkan home industri di pedesaan sesuai potensi desa, meningkatkan peran industri kecil dan menengah dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat penguasaan teknologi peralatan dalam upaya pencapaian akses pasar dan penguasaan modal.

Sektor industri memiliki kinerja terhadap sumbangan PDRB Kabupaten Sukoharjo yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar Rp 10.408.909,89 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 37,67% terhadap total PDRB sebesar Rp 27.634.117,53 Juta. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2021 sebesar Rp 15.198.038,15 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 38,98% terhadap total PDRB sebesar Rp 38.990.458,19 Juta.

Sektor industri dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sukoharjo mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian daerah, yaitu mencapai 38,98% pada tahun 2021. Sektor industri merupakan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sukoharjo. Jumlah industri di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Peningkatan ini didukung terutama oleh pertumbuhan jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Industri kecil ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.8 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Nilai total PDRB ADHB	Juta rupiah	24.163.939,48	25.564.065,09	27.076.442,63	26.616.937,31	27.634.117,53
2.	Nilai Sektor Industri terhadap PDRB ADHK	Juta rupiah	9.271.979,94	9.871.777,71	10.428.612,22	10.144.769,83	10.408.909,89
3.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK	%	38,37	38,62	38,52	38,11	37,67
4.	Nilai total PDRB ADHK	Juta rupiah	31.621.414,17	34.211.246,04	36.970.814,29	36.911.517,77	38.990.458,19
5.	Nilai Sektor Industri terhadap PDRB ADHK	Juta rupiah	12.233.453,02	13.359.367,03	14.441.718,34	14.447.977,90	15.198.038,15
6.	PDRB ADHB sektor industri	%	38,69	39,05	39,06	39,14	38,98
7.	Jumlah Industri kecil	Jumlah	236	269	746	846	

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
8.	Jumlah Industri menengah	Jumlah	117	130	104	154	
9.	Bidang usaha besar	Jumlah	44	44	6	15	
10.	Jumlah industri	Jumlah	397	443	856	1015	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, 2022

Pembangunan sektor perdagangan sampai dengan Tahun 2021, setelah diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan, maka semua perijinan berusaha harus melalui sistem OSS. Disamping itu semua perijinan berusaha tidak lagi diklasifikasikan berdasarkan SIUP Mikro, Kecil, Menengah dan Besar, tetapi didasarkan pada modal yang ada yaitu modal dibawah 50 juta masuk kriteria Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan diatas 50 juta masuk Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja maka TDP (Tanda Daftar Perusahaan) diganti dengan Nomor Induk Berusaha, yang berlaku Identitas Pelaku Usaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah melakukan pendaftaran perusahaan mendapatkan NIB yang berlaku sebagai TDP. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (Online Single Submission) setelah pelaku usaha melakukan Pendaftaran. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS, baik usaha baru maupun usaha yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Jumlah perusahaan yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan NIB di tahun 2020 sejumlah 1.381 perusahaan.

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2017 hingga tahun 2021 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Kabupaten Sukoharjo dan hingga saat ini merupakan dua besar sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan tahun 2021 sebesar Rp. 5.025.998,71 juta, nilai

PDRB ADHB sektor perdagangan Rp 6.736.676,76 juta yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Kabupaten Sukoharjo sebesar 17,28 persen.

Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “Ekspor Neto”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran uang masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran uang keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selama periode 2017 - 2021, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo dengan luar negeri dan antar kabupaten/provinsi menunjukkan nilai positif dan cenderung semakin meningkat. Nilai ekspor yang lebih besar dari impor menyebabkan adanya aliran uang masuk, yang dalam konteks lain disebut sebagai “surplus luar wilayah”. Pada tahun 2021, neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Sukoharjo menunjukkan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan net eksport sebesar 872,63 milyar rupiah. Ekspor perdagangan tahun 2020 mencapai US\$ 15.105.538.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Pengusaha Memiliki SIUP	Unit			1.358	2.471	1.194
2.	Jumlah Perusahaan Memiliki TDP	Unit	773	603			
3.	Jumlah Perusahaan Memiliki NIB	Unit				628	1.833
4.	Nilai Sektor PerdaganganPDRB ADHK	Juta rupiah	4.462.750,34	4.668.998,70	4.927.396,82	4.755.069,46	5.025.998,71
5.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	%	18,47	18,26	18,20	17,86	18,19
6.	Nilai Sektor PerdaganganPDRB ADHB	Juta rupiah	5.573.874,22	5.943.000,51	6.415.800,96	6.274.280,95	6.736.676,76
7.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	17,63	17,37	17,35	17,00	17,28

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
8.	Net ekspor (X – M) ADHB	Miliar rupiah	106,41	212,26	267,69	265,20	872,63
9.	Proporsi Neraca Perdagangan barang dan jasa	%	0,34	0,62	0,72	0,72	2,24
10.	Realisasi Ekspor Nilai FOB	Ribu USD	236.452,33	278.537,94	393.946,76	8.568.578,03	156,372,255.66
11.	Realisasi Ekspor IDR	Juta Rupiah	3.192.106,43	3.899.531,15	4.333.571,94	125.743.882,52	
12.	Pertumbuhan Ekspor	%	3,57	22,16	11,13	2801,62	

Sumber data: DPMPTSP dan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kab Sukoharjo,, 2022

Masih banyaknya kalangan masyarakat yang hidupnya kurang beruntung, seperti fakir miskin dan anak-anak terlantar/anak jalanan, orang jompo dan lanjut usia, orang cacat dan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya maka pembangunan daerah harus memperhatikan sistem yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Sejalan dengan perkembangan kondisi sosial saat ini maka semakin berpengaruh terhadap kondisi jumlah penyandang masalah kemiskinan di masyarakat.

Masalah sosial sangat kompleks dan menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Urusan sosial menanggapi peningkatan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kabupaten Sukoharjo memiliki permasalahan sosial yang cukup kompleks. Hal ini ditandai dengan adanya golongan yang kurang beruntung, seperti gelandangan, pengemis, tunasusila, anak jalanan, anak terlantar dan lain-lain yang dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pembangunan di bidang sosial juga termasuk upaya untuk menanggulangi kemiskinan atau menurunkan penduduk miskin.

Penanganan pemberian pelayanan PMKS tidak dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial harus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan yang terkait lainnya. Ada banyak PMKS yang belum atau bahkan tidak memiliki administrasi kependudukan padahal dalam pengurusan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial harus memiliki data administrasi kependudukan yang benar. Perlu

adanya koordinasi dan sinkronisasi yang intensif antar perangkat agar pemberian pelayanan dapat menjadi lebih baik.

Kabupaten Sukoharjo sudah mempunyai regulasi terkait aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yaitu Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo. Permasalahan yang muncul terkait infrastruktur fasilitas umum yang ada di Kabupaten Sukoharjo yaitu belum semua ramah disabilitas. Fasilitas aksesibilitas ramp dan handriil baru dimiliki oleh beberapa gedung milik pemerintah.

Tabel 3.10 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah	3.311	2.706	3.396	3.306	416.714
2.	PMKS yang tertangani	Jumlah	3.456	2.863	3.503	252.603	357.066
3.	PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan	Jumlah	28.387	26.606	27.356	249.197	624.722

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, 2022

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang

tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal : $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal : $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang : $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju : $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri : $IDM > 0,8155$

Klasifikasi terhadap status desa tersebut bertujuan untuk penetapan status perkembangan dan rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan pada Tahun 2021. Sehingga Pendekatan dan intervensi yang diterapkan pada Status Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri akan berbeda sesuai hasil Updating data di Tahun 2021.

Status IDM di Kabupaten Sukoharjo belum ada yang statsunya Mandiri, adapun 137 desa dengan status MAJU dan 13 Desa statu desa BERKEMBANG, hal ini menuntut Kabupaten Sukoharjo untuk menuju Desa MANDIRI di lima tahun yang akan datang.

Tabel 3.11 Status IDM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

No	Kecamatan	STATUS IDM				Nilai
		MANDIRI	MAJU	BERKEMBANG	TERTINGGAL	
1	Weru	-	-	13	-	0,6910
2	Bulu	-	12	-	-	0,7364
3	Tawang Sari	-	8	-	-	0,7360
4	Sukoharjo	-	-	-	-	
5	Nguter	-	13	-	-	0,7194
6	Bendosari	-	13	-	-	0,7120
7	Polokarto	-	17	-	-	0,7157
8	Mojolaban	-	15	-	-	0,7396
9	Grogol	-	14	-	-	0,7329
10	Baki	-	14	-	-	0,7121
11	Gatak	-	14	-	-	0,7033
12	Kartasura	-	10	-	-	0,7677
Sukoharjo			150			0,7230

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Posyandu atau Pos Pelayanan Terpadu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Berikut adalah jumlah posyandu beserta kader yang ada di Kabupaten Sukoharjo:

Keberadaan Posyandu di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Begitu pula dengan jumlah kader di setiap wilayah juga mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan di tingkat desa serius dilakukan oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Suatu usahanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Di sini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat atau objek saja. Rukun Warga atau Rukun Tetangga (RW/RT) sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat hendaknya didorong untuk lebih berperan dalam penyelenggaraan proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasinya. Selain RT/RW, PKK menjadi aktor lain yang juga perlu mendapat perhatian.

BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berikut adalah perkembangan jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 3.12 Perkembangan Jumlah BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2021

No	Kecamatan	2019	2020	2021
1	Weru	7	11	12
2	Bulu	6	9	9
3	Tawang Sari	3	9	12
4	Sukoharjo	-	-	
5	Nguter	15	9	15
6	Bendosari	5	10	12
7	Polokarto	7	17	17

No	Kecamatan	2019	2020	2021
8	Mojolaban	6	10	10
9	Grogol	9	13	13
10	Baki	7	13	13
11	Gatak	8	9	10
12	Kartasura	4	8	8
	Jumlah	70	125	131

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sedangkan berikut adalah klasifikasi BumDes di Kabupaten Sukoharjo beserta jumlahnya:

Tabel 3.13 Klasifikasi BUMDes di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2021

Klasifikasi BUMDes	2020	2021
Dasar	46	38
Tumbuh	76	82
Berkembang	3	3
Maju	-	3
Total	125	131

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan data yang ada keberadaan BUMdes di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan jumlah. Walaupun demikian klasifikasi BUMDes yang ada masih didominasi dengan klasifikasi tumbuh. Upaya pendampingan masih perlu dilakukan guna meningkatkan kondisi BUMDes menjadi lebih mandiri dan maju.

Pasar adalah salah satu unit usaha yang bisa dijalankan oleh BUMDesa adalah pasar desa yang berfungsi untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa dan sebagai sumber pendapatan bagi Pemerintahan Desa. Berikut adalah jumlah pasar desa per kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 3.14 Jumlah Pasar Desa Per Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah Pasar Desa
1	Weru	4
2	Bulu	1
3	Tawang Sari	2
4	Sukoharjo	-
5	Nguter	5
6	Bendosari	4
7	Polokarto	5
8	Mojolaban	3

No	Kecamatan	Jumlah Pasar Desa
9	Grogol	3
10	Baki	3
11	Gatak	1
12	Kartasura	2
<i>Total</i>		<i>33</i>

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo

Keberadaan pasar desa merupakan hal penting untuk diadakan. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa juga diharapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi desa. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berkualitas tidaknya penyelenggaraan pelayanan publik tidak terlepas dari kapasitas SDM aparat kelurahan. Secara umum kapasitas aparat kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum optimal, pemahaman dan kemampuan aparat dalam perencanaan pembangunan dan evaluasi atas hasil pembangunan belum menunjukkan hasil yang cukup baik.

Tabel 3.15 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Posyandu	Jumlah	1.184	1.184	1.184	1.193	
2.	Kader yang mendapat insentif	Jumlah	7.175	7.200	7.432	7.498	
3.	Kader	Jumlah	7.507	7.507	7.507	7.677	
4.	Perkembangan BUMDes	Jumlah			70	125	131
5.	BUMDes Dasar	Jumlah				46	38
6.	BUMDes Tumbuh	Jumlah				76	82
7.	BUMDes Berkembang	Jumlah				3	3
8.	BUMDes Maju	Jumlah					3
9.	BUMDes Total	Jumlah				125	131

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, 2022

2.2.2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pembangunan bidang pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing output pendidikan serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan pendidikan dengan mengelola potensi yang ada pada urusan pendidikan mulai dari Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF), Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Pembinaan Ketenagaan, Pengembangan Budaya Baca.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) seluruh jenjang kelompok usia mengalami fluktuasi. Puncaknya pada tahun 2020 rata-rata angka partisipasi sekolah di seluruh kelompok usia berada pada angka terendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya pandemi Covid-19 yang memaksa anak untuk belajar di rumah secara daring dan membutuhkan gawai atau perangkat lainnya untuk mengakses internet.

Capaian Pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 40,69% dan pada Tahun 2021 turun drastis menjadi 36,72%. APK PAUD di Kabupaten Sukoharjo tergolong masih rendah, hal ini disebabkan dari masih rendahnya kesadaran serta pengetahuan orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum anak di sekolahkan ke tingkat pendidikan dasar (SD). Hal tersebut perlu dilakukan Sosialisasi untuk mengedukasi masyarakat agar paham mengenai tujuan pendidikan anak usia dini.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM ini merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Pada kurun waktu tahun 2017-2021, APM Kabupaten Sukoharjo pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/MI), dan SMP/MTs mengalami penurunan, dilihat dari data bahwa APS SD/MI pada tahun 2017 sebesar 95,60 persen menjadi 97,10 persen pada Tahun 2021. Sedangkan APM jenjang SMP/MTs mengalami penurunan mulai dari tahun 2017 angkanya sebesar 82,94 persen menjadi 79,39 pesen di tahun 2021.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, termasuk pendidikan Non Formal turut diperhentikan. Capaian Angka Partisipasi Kasar jenjang SD/MI di Kabupaten Sukoharjo selama kurun waktu tahun

2016 hingga tahun 2019 cenderung menurun, dilihat dari data bahwa tahun 2017 APK SD/MI sebesar 101,63 persen menjadi 103,99 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 102,33, dan terjadi kenaikan kembali menjadi 108,83 persen di Tahun 2021. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan, pada kurun waktu yang sama bahwa APK SMP/MTs di tahun 2017 sebesar 99,88 menjadi 103,69 di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 turun menjadi 101,77, dan pada Tahun 2021 naik kembali menjadi 108,42.

Angka Kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs di tahun 2016s/d 2020 sudah mencapai 100. Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, selama kurun waktu tahun 2016-2020, berdasar data pada jenjang SD/MTs ke SMP/MTs, dan SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat mengalami fluktuasi. Adapun pada jenjang SD/MI melanjutkan ke SMP/MI mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 103,35%, menjadi 102,54% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 s/d 2020 mengalami peningkatan dari 102,26% menjadi 106,90%, hal tersebut dikarenakan adanya sekolah SMP/ sederajat berada di perbatasan Kabupaten. Sedangkan jenjang melanjutkan dari SMP/MI ke SMA/SMK mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sebesar 116,85% menurun menjadi 106,35% pada tahun 2017 dan 2018, dan diikuti pada tahun 2019 sebesar 104,57% menjadi 103,15% pada tahun 2020.

Persentase lulusan SD/ sederajat yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, selama kurun waktu tahun 2016-2020, berdasar data pada jenjang SD/MTs ke SMP/MTs, dan SMP/ sederajat ke SMA/ sederajat mengalami fluktuasi. Adapun pada jenjang SD/MI melanjutkan ke SMP/MI mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 103,35%, menjadi 102,54% pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 s/d 2020 mengalami peningkatan dari 102,26% menjadi 106,90%, hal tersebut dikarenakan adanya sekolah SMP/ sederajat berada di perbatasan Kabupaten. Sedangkan jenjang melanjutkan dari SMP/MI ke SMA/SMK mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sebesar 116,85% menurun menjadi 106,35% pada tahun 2017 dan 2018, dan diikuti pada tahun 2019 sebesar 104,57% menjadi 103,15% pada tahun 2020.

Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuatif dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Angka putus sekolah di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 pada jenjang SD/ sederajat sebesar 0,02 %, angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2018 tercatat sebesar 0,03 %. Adapun Angka Putus Sekolah jenjang SMP/ sederajat di Kabupaten Sukoharjo tahun 2017 mengalami

penurunan menjadi 0,03 % dibandingkan dengan Angka Putus Sekolah tahun 2016, kemudian mengalami kenaikan Angka Putus Sekolah di tahun 2018, 2019 dan 2020 sebesar 0,04 %.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat Pendidikan dasar per 10.000 jumlah usia Pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia Pendidikan Dasar Pada kurun waktu 2016-2020, jumlah SD/MI di Kabupaten Sukoharjo, menurun pada tahun 2016 dari 557 unit menjadi 537 unit di tahun 2020, dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun, sebanyak 67.270 orang, pada Tahun 2016, di tahun 2020 jumlah penduduk usia 7-12 tahun meningkat menjadi 69.465 orang, Berdasar data rasio ketersediaan SD/MI dengan jumlah penduduk usia 7-12 mengalami penurunan 82,25 menjadi 77,88 per 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP/MTs, jumlah ketersediaan sekolah dari 89 unit di tahun 2016 menjadi 92 unit di tahun 2020, dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun, sebanyak 35.018 orang di tahun 2016 menjadi 27.511 di tahun 2020. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah jenjang pendidikan dasar SMP/MTs pada tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 25,42 menjadi 34,54.

Tabel 3.16 Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tahun 2021 Menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Gedung sekolah SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	Rasio	Jumlah Gedung sekolah SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	Rasio
1.	Kartasura	58	4.943	117,34	13	2.949	44,08
2	Sukoharjo	53	8.870	59,75	12	4.033	29,75
3	Grogol	47	9.079	51,77	8	4.128	19,38
4	Mojolaban	51	6.108	83,50	10	3.022	33,09
5	Bendosari	46	4.816	95,51	5	2.500	20,00
6	Polokarto	57	6.455	88,30	10	3.062	32,66
7	Baki	35	5.277	66,33	7	2.444	28,64
8	Weru	49	5.812	84,31	7	3.158	22,17
9	Gatak	36	4.707	76,48	5	2.306	21,68
10	Tawangsar i	36	5.015	71,78	6	2.366	25,36
11	Nguter	37	4.924	75,14	5	2.742	18,23
12	Bulu	32	3.459	92,51	4	2.282	17,53

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan Kemenag Kabupaten Sukoharjo

Rasio guru terhadap siswa adalah perbandingan jumlah guru terhadap jumlah siswa berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengidentifikasi ketersediaan antara jumlah pendidik dan jumlah ideal siswa untuk satu guru agar

tercapai proses pembelajaran yang berkualitas. Melihat data rasio guru terhadap siswa di Kabupaten Sukoharjo selama tahun 2016-2020, dapat digambarkan bahwa kondisi ketersediaan jumlah guru dan siswa cenderung tetap dengan perbandingan 1 guru paling banyak melayani 15 siswa di tahun 2020 jenjang SD dan SMP di tahun 2020 sesuai data 1 guru paling banyak melayani 15 murid. Rasio ini menunjukkan ketersediaan guru pada pelayanan Pendidikan dasar skala Kabupaten sudah baik. Tetapi sesuai data per kecamatan menunjukkan penyebaran guru kurang kurang merata.

Tabel 3.17 Jumlah Guru dan Siswa Pada Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2021 menurut Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo

No.	Kecamatan	SD / MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Kartasura	788	11.153	14,15	389	5.025	12,92
2	Sukoharjo	770	10.730	13,94	486	7.159	14,73
3	Grogol	623	9.105	14,61	284	3.750	13,20
4	Mojolaban	610	7.899	12,95	362	5.062	13,98
5	Bendosari	537	5.234	9,75	123	1.405	11,42
6	Polokarto	656	7.768	11,84	292	3.423	11,72
7	Baki	466	6.262	13,44	217	3.129	14,42
8	Weru	531	4.688	8,83	181	2.569	14,19
9	Gatak	403	4.222	10,48	144	1.940	13,47
10	Tawang Sari	407	4.154	10,21	173	2.268	13,11
11	Nguter	400	3.905	9,76	127	1.495	11,77
12	Bulu	347	2.444	7,04	96	1.044	10,88

Sumber: Dapodik Kemendikbud Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo

Salah satu bentuk pelayanan pendidikan adalah penyediaan sekolah atau kondisi ruang kelas yang baik dan sesuai standar nasional pendidikan. Pada tahun 2016-2020, kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 dari 4.059 bangunan/ruang kelas SD/ Sederajat terdapat 3.267 dalam keadaan baik, 604 dalam keadaan rusak sedang, dan 188 dalam keadaan rusak berat. Sedangkan untuk bangunan/ruang kelas SMP/ sederajat pada tahun 2020 terdapat 188 bangunan/ruang kelas dalam kondisi rusak berat, 604 bangunan/ruang kelas dalam kondisi rusak sedang dari 3.267 total bangunan/ruang kelas yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan data, rasio kondisi bangunan/ruang kelas untuk jenjang SD/ sederajat masih lebih rendah jika dibandingkan dengan jenjang SMP/ sederajat sehingga perlu adanya prioritas

selanjutnya. Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidikan yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Di Kabupaten Sukoharjo kondisi pada tahun 2016-2020, capaian kinerjanya menunjukkan peningkatan untuk jenjang PAUD, SD/MI, SMP/MTs, di Kabupaten Sukoharjo dari 8.011 di tahun tahun 2016 menjadi 8.527 di tahun 2020. Pendidikan non formal menjadi penting dan strategis dalam upaya membantu mewujudkan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pendidikan non formal berupa pendidikan kesejahteraan, pendidikan kesetaraan memiliki peran membantu peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang pendidikan masing - masing. Selain itu dengan diselenggarakannya Kelompok Belajar Masyarakat (KBM) akan membantu meningkatkan ketrampilan penduduk putus sekolah atau tidak sekolah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Memperhatikan capaian SPM bidang Pendidikan maka semua jenis pelayanan belum mencapai target. Penerapan SPM Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo masih belum maksimal karena belum adanya strategi khusus untuk pencapaiannya. Dalam pelaksanaannya penerapan SPM Pendidikan baik pada tingkat Kabupaten maupun satuan pendidikan belum sepenuhnya terdokumentasi dengan baik, sehingga kesulitan dalam memberikan evaluasi dan penilaian terhadap ketercapaian setiap indikator.

Tabel 3.18 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pendidikan untuk Angka Kelulusan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	%	40,69	40,78	40,89	92,32	36,72
2.	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
3.	a. APK SD/MI/Paket A	%	101,63	101,07	103,99	102,33	108,83

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
4.	b. APK SMP/MTs/Paket B	%	99,88	100,02	103,69	101,77	108,42
5.	Angka Partisipasi Murni (APM)						
6.	a. APM SD/MI/Paket A	%	95,60	95,22	95,52	95,95	97,10
7.	b. APM SMP/MTs/Paket B	%	82,94	79,02	81,44	82,38	79,39
8.	Angka Kelulusan						
9.	Angka Kelulusan SD	%	100	100	100	100	100
10.	Angka Kelulusan SMP	%	100	100	100	100	100
11.	Angka Melanjutkan						
12.	a. SD/MI ke SMP/MTs	%	102,54	102,26	106,34	106,90	103,90
13.	b. SMP/MTs ke SMA/SMA/MA	%	106,35	106,35	104,57	103,15	101,82
14.	Angka Putus Sekolah						
15.	a. APS SD/MI/Paket A	%	0,02	0,03	0,01	0,02	0,02
16.	b. APS SMP/MTs/Paket B	%	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03
17.	Persentase Guru SD & SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	82,36	84,36	83,92	89,18	92,33
18.	Rasio Guru dan Siswa SD		1:13	1:13	1:12	1:13	1:13
19.	Rasio Guru dan Siswa SMP		1:15	1:15	1:15	1:15	1:14
20.	SPM Pendidikan anak usia dini					41,0	36,7
21.	SPM Pendidikan Dasar					99,8	97,1
22.	SPM Pendidikan Kesetaraan					0,7	0,7

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2022

Perpustakaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari nilai budaya di masyarakat. Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society) menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap dan mudah serta murah. Peningkatan minat baca masyarakat dapat dilihat salah satunya dengan meningkatnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Jumlah pengunjung perpustakaan secara umum mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan pengunjung disebabkan adanya kegiatan melibatkan masyarakat, makin gencarnya promosi melalui bazar dan penambahan jumlah pengunjung secara daring (melalui internet). Selain itu

juga meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan diperhitungkan melalui layanan perpustakaan keliling.

Faktor pendukung yang berperan penting untuk meningkatkan minat baca yaitu tersedianya jumlah buku perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka. Jumlah setiap tahunnya secara umum menunjukkan peningkatan meskipun terjadi penambahan dan pengurangan jumlah buku dan koleksi bahan pustaka yang dikarenakan beberapa sebab, meliputi pengadaan bahan pustaka, buku rusak dan hibah dari masyarakat Sukoharjo.

Tabel 3.19 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1.	Kunjungan perpustakaan selama 1 tahun	Orang	13.802	20.396	5.167	2.128
2.	Populasi Perpustakaan yang harus dilayani	Orang	885.307	891.900	898.448	
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	33.771	62.752	62.772	76.380
4.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,55	2,28	0,58	0,24
5.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	Orang/tahun	1.150	1.801	431	177
6.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Judul	22.424	24.156	24.169	29.190
7.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	orang	4	4	6	12

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Sukoharjo, 2022

2.2.3. Bidang Kesehatan

Keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya adalah terciptanya masyarakat yang sehat baik fisik maupun mental. Selama ini apresiasi masyarakat terhadap kesehatan masih relatif rendah terutama bagi keluarga-keluarga miskin. Terjadinya kematian yang disebabkan oleh penyakit menular, faktor sanitasi, dan faktor ketidaktahuan masyarakat dalam menyikapi kesehatan harusnya menjadi perhatian utama semua pihak khususnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Perkembangan kondisi kesehatan di Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan oleh beberapa indikator diantaranya adalah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Balita (AKBA) sebagaimana tercantum dalam SDGs. Jika disederhanakan maka faktor-faktor yang cukup besar peranannya dalam mempengaruhi AKB adalah status gizi, perawatan, kesehatan ketika dalam kandungan maupu ketika baru lahir, kelengkapan imunisasi yang diberikan, dan pertolongan persalinan pertama.

Angka Kematian Ibu Maternal menggambarkan status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan dan tingkat serta ketersediaan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, melahirkan dan nifas. Berdasarkan laporan rutin yang diterima dari Puskesmas dan Rumah Sakit pada tahun 2021 terdapat 7 kematian ibu dengan penyebab: eklamsi 3 kasus, perdarahan 1 kasus, Jantung 1 kasus, DM 1 kasus, Kanker Otak 1 kasus. Sehingga estimasi Angka Kematian Ibu Maternal pada tahun 2020 adalah 57.08/100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 39.84/100.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian ada di 5 kecamatan yaitu: Weru 1 kasus, Tawang Sari 3 kasus, Polokarto 1 kasus, Mojolaban 1 kasus, Baki 1 kasus. Dari ke 7 kasus tersebut di atas, 2 diantaranya sebab kematian dipengaruhi oleh komplikasi/penyakit lainnya yang diderita ibu seperti kanker otak dan DM.

Angka Kematian Bayi tahun 2020 di Kabupaten Sukoharjo terdapat 91 kematian, dengan penyebab sebagai berikut: BBLR 21 kasus, kelainan kongenital 28 kasus, asfiksia 14 kasus, BBLSR premature 2 kasus, sindrom down dengan kelainan jantung 1 kasus, diare dengan dehidrasi 1 kasus, sepsis 1 kasus, infeksi paru 2 kasus, pnemonia 3 kasus, bronkopnemonia 1 kasus, perdarahan otak 4 kasus, gagal cardio pulmonal 5 kasus, aspirasi 4 kasus, DOA 3 kasus, Ca mata 1 kasus.

Oleh karena itu estimasi Angka Kematian Bayi pada tahun 2020 adalah 7,42/ 1.000 Kelahiran Hidup. Jumlah kematian bayi pada tahun 2020 ada peningkatan bila dibanding tahun 2019 sebanyak 71 dengan penyebab sebagai berikut : kongenital

24 kasus, asfiksia 7 kasus, BBLR 15 kasus, kelainan perdarahan otak 2 kasus, BBLSR premature 6 kasus, sindrom down aspirasi 1 kasus, acut respiratori 1 kasus, kecelakaan 2 kasus, sepsis 2 kasus, infeksi paru 2 kasus, infeksi otak 1 kasus, kolestiasis ascites 1 kasus, kelainan darah 1 kasus, aspirasi BBLR 1 kasus, kejang demam 3 kasus.

Pada tahun 2020 berdasarkan data laporan register dari puskesmas dan rumah sakit terdapat penyebab sebagai berikut : kelainan 18 kematian balita, dengan congenital 4 kasus, febris konvulsi 2 kasus, pnemonia 1 kasus, tenggelam 2 kasus, leukemia 1 kasus, sepsis 1 kasus, cerebral palsy 1 kasus, infeksi paru 1 kasus, Ca kelenjar getah bening 1 kasus, suspect DBD 2 kasus, kolestiasis 1 kasus.

Pada tahun 2019 yang dilaporkan ada 22 kematian balita, dengan penyebab sebagai berikut: kelainan congenital 9 kasus, febris konvulsi 2 kasus, ISPA dengan meningitis 2 kasus, kanker otak 1 kasus, DSS 1 kasus, Infeksi saluran cerna 1 kasus, tenggelam 1 kasus, combutsio 1 kasus, epilepsi dengan pneumonia 1 kasus, meningitis 1 kasus, hidrosepalus 1 kasus, diare dengan dehidrasi 1 kasus. Kematian balita tertinggi di kecamatan Weru dengan 5 kematian balita.

Tahun 2020 jumlah kematian terbanyak ada pada kasus kelainan congenital /penyakit penyerta yang diderita oleh balita, dan kasus kecelakaan pada Balita, seperti tenggelam di sungai. Masih perlu edukasi dan pendampingan kepada keluarga untuk lebih memprioritaskan pola Asuh dan perhatian penuh dalam mendampingi balita, walaupun hal ini sudah dilaksanakan pada bimbingan dan penyuluhan pada kelas Ibu Balita dan di Posyandu serta pemanfaatan Buku KIA pada Bab. Hindari anak dari Bahaya.

Perkembangan stunting di Jawa Tengah beberapa tahun kebelakang mengacu dari berbagai sumber, mengingat saat itu data stunting belum dilakukan integrasi data. Baru pada tahun 2019 terdapat data stunting yang disepakati atau digunakan secara resmi oleh pemerintah pusat yaitu data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) yang telah diintegrasikan dengan data Riset.

Menurunnya Prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk dengan Indikator Kinerja antara lain : Prosentase Balita Stunting target 25% realisasi 7,11% atau sebanyak 1.402 kasus dengan prosentase capaian sebesar 189%.

Sesuai dengan tupoksinya, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2PM) menangani kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) dan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonosis (P2TVZ). Kejadian penyakit menular

di Kabupaten Sukoharjo sangat dipengaruhi oleh perilaku penduduk dan iklim. Dari perilaku dan iklim berdampak pada kondisi lingkungan masing masing wilayah desa kelurahan yang hal ini sangat mempengaruhi kejadian penyakit menular. Data kejadian penyakit menular yang dikelola oleh Seksi P2PM digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20 Data Kejadian Penyakit Menular Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

No	Penyakit	Tahun dan Jumlah Penderita/Kejadian				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Demam Berdarah (DBD)	115	35	317	185	222
2	Chikungunya	84	0	31	558	
3	Malaria	4	2	3	2	
4	Leptospirosis	3	17	10	14	
5	Avian Flu/ Flu Burung	0	0	0	0	
6	Antraks	0	0	0	0	
7	Filaria	0	0	0	6	
8	Tuberculosis	475	604	744	611	
10	Diare	15.074	17.196	16.848	13.902	
11	Pneumonia Balita	933	991	1.315	572	
12	Kusta	25	17	20	12	
13	HIV (kasus baru)	45	17	47	56	
14	AIDS (Kasus Baru)	49	45	27	31	
15	IMS (Inf.Men. Seksual)	88	91	105	60	
17	GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies)	14	18	34	14	

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) target < 49 per 100.000 penduduk terealisasi 24,3 /100.000 penduduk atau sebanyak 222 kasus dengan prosentase capaian sebesar 150,4%, Prevalensi penderita HIV terhadap penduduk berisiko target < 5% realisasi 0,21 % dengan prosentase capaian sebesar 195,80%, Desa/kalurahan Universal Child Immunization (UCI) target 100% realisasi 100% dengan prosentase capaian sebesar 100% atau tercapai 167 Desa/kalurahan, Kesembuhan penderita TBC Paru BTA positif target \geq 85% realisasi 90% atau sebanyak 675 kasus dengan prosentase capaian sebesar 100%, Proporsi Hipertensi diantara seluruh kasus di Fasyankes target < 30 % realisasi 50,04% atau sebanyak 269.296 kasus dengan prosentase capaian sebesar 33,20%, dan Proporsi Diabetes Melitus (DM) diantara seluruh kasus di fasilitas pelayanan

kesehatan target < 50% realisasi 7,50% atau sebanyak 17.910 kasus dengan prosentase capaian sebesar 185%.

Pada tahun 2021, jumlah rumah sakit umum di kabupaten Sukoharjo sebanyak 10 buah dan tersedianya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang terdapat hampir di seluruh kecamatan. Jumlah tenaga kesehatan di kabupaten Sukoharjo sebanyak 360 dokter, 2.184 perawat, dan 624 bidan.

Tabel 3.21 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo tahun 2017-2021

Sarana Pelayanan Kesehatan	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Puskesmas induk	12	12	12	12	12
02. Puskesmas Pembantu	57	57	55	55	54
03. R S	9	9	10	10	10
04. Klinik	76	88	98	97	84
05. Dukun Bayi Terlatih	-	-	-	-	0
06. Dokter Praktek	326	721	362 *	343 *	219*
07. Dok. Gigi Praktek Swasta	176	20	38 *	53 *	31*
08. Apotek Swasta	194	215	205	210	218
09. Klinik Keluarga Berencana	0	0	0	0	0
10. Industri Farmasi	1	1	1	1	1
11. Toko Obat Swasta	18	22	17	22	19
12. Laboratorium	6	5	6	4	4
13. Posyandu	1 219	1 188	1190	1193	1195

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo

Tabel 3.22 Prasarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

Kecamatan	Rumah Sakit		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik	Apotek
	Unit	Tempat Tidur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(4)
010 Weru	-	-	1	5	0	10
020 Bulu	-	-	1	3	1	1
030 Tawang Sari	-	-	1	8	2	8
040 Sukoharjo	2	349	1	5	9	36
050 Nguter	-	-	1	5	4	8
060 Bendosari	1	110	1	5	6	11
070 Polokarto	-	-	1	4	5	19
080 Mojolaban	-	-	1	3	10	18
090 Grogol	2	375	1	4	16	36
100 Baki	-	-	1	4	11	19

110 Gatak	-	-	1	3	1	10
120 Kartasura	5	599	1	5	19	42
Kabupaten Sukoharjo	10	1 433	12	54	84	218
2019	10	1 124	12	55	98	205
2018	9	1 137	12	57	88	205
2017	9	1 060	12	57	76	194

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo

Tabel 3.23 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

Kecamatan	PNS	Non PNS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
010 Weru	66	3	69
020 Bulu	41	12	53
030 Tawang Sari	53	11	64
040 Sukoharjo	69	7	76
050 Nguter	59	5	64
060 Bendosari	51	5	56
070 Polokarto	57	7	64
080 Mojolaban	56	7	63
090 Grogol	71	9	80
100 Baki	56	11	67
110 Gatak	60	5	65
120 Kartasura	64	6	70
Kabupaten Sukoharjo	703	88	791

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo

Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit. Sarana jamban sehat dapat diklasifikasikan menjadi jamban sharing/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP) dan jamban sehat permanen (JSP). Jamban sharing/komunal merupakan jamban yang digunakan bersama dalam masyarakat (penggunanya lebih dari satu keluarga). Jamban sehat semi permanen belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak didalam rumah. Jamban sehat permanen adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah.

Pada tahun 2020, sebesar 96 persen keluarga (292.822 KK) di Kabupaten Sukoharjo sudah menggunakan jamban sehat permanen. Sisanya 2 persen menggunakan jamban sehat semi

permanen dan masih ada 2 persen menggunakan jamban sharing/komunal. Prosentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 adalah 100 persen. Pencapaian akses sanitasi layak 100 persen ini sudah tercapai sejak tahun 2017. Hanya saja prosentase keluarga dengan kepemilikan jamban sehat permanen baru 86 persen. Sehingga masih sangat diperlukan program sanitasi yang berkelanjutan melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dasar hukum penetapan SPM bidang kesehatan yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2021 yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil tercapai 96%, pelayanan kesehatan ibu bersalin 100%, pelayanan kesehatan bayi baru lahir tercapai 100%, pelayanan kesehatan balita 86,9%, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar tercapai 92,3%, pelayanan kesehatan pada usia produktif 79,1%, pelayanan kesehatan pada usia lanjut 77,5%, pelayanan kesehatan penderita hipertensi 43,0%, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 96,9%, pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 58,2%, pelayanan kesehatan TB 20,03% dan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV tercapai 70,4%.

Tabel 3.24 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	%	6,38	5,65	5,49	7,42	5,5
2	Angka kelangsungan hidup bayi	%	72	77,49	77,54		
3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	%	8,54	7,41	7,25	8,89	7,2
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	%	3,99	3,98	2,94	5,14	3,9
5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	%	31,94	31,87	39,84	57,09	173
6	Rasio posyandu per satuan balita	%	01:47	01:48	01:48	24,14	24,55

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	%	1:9274	1:5681	1:5493	12,06	12,24
8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	%	1:9995 0	1:9910 3	1:9064 0	1,10	1,11
9	Rasio dokter per satuan penduduk	%	1:1859	1:1763	1:1221	74,13	88,47
10	Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk	%	1:673	1:602	1:371	305,3 8	368,0 0
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	100	100	100	100	100
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100
14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	98,9	99,6	99	98,4	98,1
16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	3,60	2,55	4	1,02	2
17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	46,67	30,7	40,84	26,95	26,64
18	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	24,9	35,24	39,3	32,4	35,8
19	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	53,1	67,1	83,4	67	77,6

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
20	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	%	0,00	1,79	3,5	3,73	4,4
21	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	100	100	100	100	100
22	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	42,95	89,47	92,5	92,61	92,8
23	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
24	Penderita diare yang ditangani	%	100	100	100	100	100
25	Angka kejadian Malaria	%	0,00	0,22	3	0,002	0,008
26	Tingkat kematian akibat malaria	%	0	0	0	50	0
27	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0	0	0	0
28	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0	0	0	0
29	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
30	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
31	Cakupan kunjungan bayi	%	100	100	100	100	100
32	Cakupan puskesmas	%	12	12	12	12	12
33	Cakupan pembantu puskesmas	%	57	57	57	55	55

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
34	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	93,34	93,23	100	95,3	95,97
35	Cakupan pelayanan nifas	%	97,93	96,45	98,29	100	100
36	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	100	100	100	100	100
37	Cakupan pelayanan anak balita	%	85,2	100	100	85,8	86,93
38	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	0	-	100	100	100
39	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	100	100	100	62,09	92,27
40	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	100	100	100	100	100
41	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
42	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
43	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	12.803	12.550	13.897	12.535	12010
44	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	12.538	12.550	12.558	12.247	11589
45	Jumlah Bayi Baru Lahir yang	%	12.522	12.390	12.548	12.262	11587

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	mendapatkan layanan kesehatan (SPM)						
46	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	42.644	47.648	49.811	42.409	42319
47	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	17.137	30.379	26.079	15.711	58805
48	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	423.312	436.621	517.881	400.923	466714
49	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	58.098	55.543	99.131	98.219	97790
50	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	20.906	26.767	85.418	110.116	115801
51	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	4.946	9.313	18.596	15.653	17349
52	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan (SPM)	%	991	1.564	851	1.075	1326
53	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	454	604	4.338	2.586	2174

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
54	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan (SPM)	%	8.481	12.539	14.008	12.544	10347
55	Pencapaian SPM bidang kesehatan						
	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;	%				95,3	96,0
	b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	%				100	100
	c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	%				100	100
	d. Pelayanan kesehatan balita;	%				85,8	86,9
	e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	%				100	92,3
	f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	%				69,2	79,1
	g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	%				75,4	77,5
	h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	%				41,3	43,0
	i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	%				88,2	96,9
	j. Pelayanan kesehatan orang	%				47,4	58,2

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	dengan gangguan jiwa berat;						
	k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	%				24,2	20,03
	l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang bersifat peningkatan/pro motif dan pencegahan/preventif.	%				84,9	70,4

Sumber data: Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Upaya pengaturan kelahiran melalui program Keluarga Berencana dari tahun ke tahun semakin dipermudah dalam mendapatkan pelayanan. Kemudahan berupa layanan antar jemput calon akseptor KB, perluasan jangkauan pelayanan Keluarga Berencana bersama mitra kerja melalui kegiatan Bakti Sosial menjaring akseptor dan ketersediaan alat dan obat di fasilitas kesehatan (faskes) terdekat selalu terjaga. Kepesertaan KB Aktif ditunjukkan dengan nilai prevalensi yang semakin meningkat. Prosentase jumlah peserta KB aktif tahun 2021 sebanyak 91,12 dan persentase ini meningkat dibanding tahun 2020 sebesar 68,05%.

Mulai tahun 2017 basis data menggunakan Pendataan Keluarga (PK) 2015 dan menggunakan standard penghitungan baru. Sebagai contoh jumlah PUS dan PA mengalami penurunan yang signifikan hal ini dikarenakan PUS usia 50 tahun dalam sistem pendataan yang baru langsung didrop out meskipun masih aktif menggunakan kontrasepsi. Dari capaian Peserta KB Aktif (PA) pada Tahun 2020 sebesar 75,04% tersebut komposisi peserta KB Wanita sebanyak 39.687 atau 88,30% dan peserta KB pria sebanyak 5.356 atau 11,91%.

Dari gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa minat dan kesadaran kaum pria untuk menjadi peserta KB

masih kurang, walaupun sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Langkah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk memberikan reward bagi peserta KB pria metode MOP, masih belum dapat mengoptimalkan capaian target. Tahun 2020 reward yang disediakan sejumlah 5 sudah terserap semua. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi calon peserta KB Pria utamanya berbasis kelompok/komunitas terus ditingkatkan.

PUS bukan peserta KB yang belum terlayani (unmet need) merupakan potensi bagi calon peserta KB. Tahun 2019 di Kabupaten Sukoharjo terdapat unmet need sebesar 9.42%. Jumlah ini belum mencapai target nasional sebesar 9%. Capaian tahun 2020 sebesar 8,23% namun target nasional untuk DIY sebesar 5,74%. Penyebab capaian ini antara lain PUS bukan peserta KB (unmeetneed) usia 45 tahun keatas sudah sulit diajak ber KB karena sudah merasa tidak membutuhkan padahal masih ada kemungkinan hamil. Sementara itu penurunan jumlah peserta KB Aktif tersebut juga dipengaruhi oleh penurunan jumlah pasangan usia subur dan peningkatan bukan peserta KB (unmet need).

Upaya peningkatan ketahanan keluarga juga dilakukan melalui kader bina keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Komunikasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR) serta Klinik Ketahanan Keluarga.

Cakupan kepesertaan keluarga yang mengikuti kegiatan kelompok bina keluarga (BKB, BKR, BKL) sangat dinamis perkembangannya tiap tahunnya menandakan kesertaan anggota keluarga dalam mengikuti kegiatan tersebut juga dinamis. Hal ini disebabkan adanya perbedaan metode perhitungan dengan mengeluarkan anggota yang sudah tua dan tidak aktif dalam kegiatan dari kelompok. Demikian juga untuk data kelompok BKB, BKR, dan BKL. Hasil dari kegiatan PIK Remaja adalah terwujudnya remaja GenRe (Generasi Berencana) yaitu remaja yang dapat mempraktikan pola hidup sehat, seperti: terhindar dari resiko pergaulan bebas, NAPZA, HIV/AIDS, menunda usia perkawinan sampai dengan usia ideal yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, bercita-cita dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, memiliki life skill atau keterampilan hidup dan remaja GenRe harus bisa dalam model, idola, dan sumber informasi bagi teman sebayanya.

Pemberdayaan ekonomi keluarga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kelompok UPPKS. Tujuan dibentuknya kelompok UPPKS adalah upaya peningkatan pendapatan keluarga menuju keluarga sejahtera. Pembinaan kelompok UPPKS dengan melalui pelatihan ketrampilan dan manajemen pengelolaan kelompok serta mengupayakan kemudahan dalam

pelayanan pemberian kredit, kemudahan dalam memperoleh SP-IRT, serta mengikuti pameran baik tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, serta pendampingan dalam pelatihan ketrampilan..

Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS semakin menurun baik jumlah maupun prosentasenya. Hal ini dikarenakan sudah semakin banyaknya program dari sektor lain yang turut menysasar keluarga. Namun demikian kualitas anggota UPPKS yang ada adalah yang terbaik, karena anggota kelompok yang sudah tidak aktif lagi akan dikeluarkan. Dengan demikian yang terdaftar sebagai anggota adalah benar benar aktif sebagai anggota kelompok UPPKS.

Dalam rangka penguatan program, sejak tahun 2016 Kabupaten Sukoharjo telah mengembangkan Kampung KB sebagai basis kegiatan program secara lengkap mulai dari PIK Remaja, BKB, BKR, BKL, UPPKS dan sektor pembangunan lainnya di tingkat kampung (Pedukuhan/Desa). Hingga tahun 2018, di Kabupaten Sukoharjo telah terbentuk 23 Kampung KB (10 Kampung KB di antaranya di desa stunting). Untuk tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 maka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terpaksa dibatasi dan belum ada penambahan kampung KB.

Tabel 3.25 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	KB aktif	Orang	110.343	94.790	96.567	97.260	78.160
2.	Pasangan Usia Subur (PUS)	Pasangan	149.295	140.183	140.865	142.918	143.093
3.	Pravelensi	%	73,91	67,62	68,55	68,05	54,62
4.	PUS bukan peserta KB (<i>Unmet Need</i>)	Orang	38.952	45.393	44.298	45.658	64.933
5.	Ingin Anak Tunda (<i>IAT</i>)	Orang	8.618	10.351	96.91	10.680	15.955
6.	Tidak Ingin Anak Lagi	Orang	9.458	8.890	11.061	11.691	23.541
7.	Persentase	%	12,11	13,73	14,73	15,65	27,81
8.	Kelompok UPPKS	Kelompok	627	575	548	548	
9.	Jumlah anggota UPPKS	Orang	6877	10063	10733		

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
10.	Kelompok BKB	Kelompok	175	176	176		
11.	Kelompok BKR	Kelompok	142	142	143		
12.	Kelompok BKL	Kelompok	170	170	169		
13.	PIK KRR	Kelompok	68	69	69		

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo, 2022

2.2.4. Bidang Infrastruktur Dasar

Untuk daya dukung air (ketersediaan dan kebutuhan air) di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan kebutuhan air tahun 2019 (DA) untuk keperluan penduduk, sawah, kebun dan peternakan sebesar 255.779.738,49 m³/tahun dengan ketersediaan air (SA) sebesar 573.362.827,83 m³/tahun. Hasil perhitungan dapat diketahui bahwa (SA) kebutuhan air tahun 2019 (573.362.827,83 m³/ tahun) > (DA) ketersediaan air, (255.779.738,49 m³/ tahun), sehingga kondisi daya dukung air dinyatakan surplus.

Sumber air bersih yang digunakan keluarga/rumah tangga dapat dibedakan menurut bentuknya yaitu perpipaan dan non perpipaan. Sumber air bersih perpipaan menurut asal penyediaan dananya terbagi menjadi 4 yaitu PDAM, PAMSIMAS, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD. Pelayanan air bersih melalui PDAM di Kabupaten Sukoharjo dilakukan oleh PDAM Tirta Makmur. Untuk melayani penyediaan air bersih tersebut, PDAM memanfaatkan sumber air baku yang berasal dari air permukaan, mata air, dan sumur dalam. Sistem yang digunakan adalah melalui pemasangan pipa air secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui pemasangan pompa, pembangunan sumur dalam, sumur dangkal serta pembangunan terminal air. Dalam hal ini PDAM menyediakan air bersih yang aman. Pengelolaan dan pemeliharaan air bersih perdesaan dilakukan melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).

Penggunaan air minum layak di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019. Pada Tahun 2020 penggunaan air minum mengalami penurunan karena adanya pertambahan penduduk yang tidak diimbangi dengan jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR). Walaupun demikian untuk air minum aman terjadi peningkatan penggunaan tiap tahunnya. Secara umum, penggunaan air

minum masih belum menjangkau seluruh rumah tangga di Kabupaten Sukoharjo. Pemerintah tetap perlu mengupayakan akses air bersih agar dapat mencapai seratus persen jangkauan. Selain menyediakan secara kuantitas, kualitas air harus dijaga terutama dalam penyediaan air bersih yang layak dan aman.

Tabel 3.26 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Aspek Cakupan Penggunaan Air Bersih Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penggunaan air minum layak						
	a. Penduduk Sukoharjo	Jiwa	899.550	878.374	891.912	907.587	897.916
	b. Perpipaan	Jiwa	270.083	291.094	320.654	333.341	262.489
		SR	52.888	56.620	61.388	63.722	68.673
		%	30,02	33,14	35,95	36,73	29,23
	c. Non Perpipaan	Jiwa	479.050	510.669	503.773	503.773	574.158
		%	53,25	58,14	56,48	55,51	63,94
	d. Total perpipaan dan non perpipaan	Jiwa	749.133	801.763	824.427	837.114	836.648
		%	83,28	91,28	92,43	92,24	93,18
	2.	Penggunaan air minum aman	%	18,07	20,42	21,66	22,38
PDAM		Jiwa	162.520	179.402	193.178	203.126	133.235
		SR	27.446	30.694	32.973	34.722	36.645
		%	18,07	20,42	21,66	22,38	14,48

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan DPKP Kabupaten Sukoharjo, 2022

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Menurut WHO definisi sanitasi merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti urin dan feses. Di Kabupaten Sukoharjo untuk sanitasi layak diterapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang mencakup lima pilar, yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (PAM RT), pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah rumah tangga.

Capaian sanitasi layak diketahui bahwa pengguna jamban yang layak meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini juga diiringi dengan capaian sanitasi aman di Kabupaten Sukoharjo walaupun pada tahun 2020 menurun sedikit yaitu sebesar 0,01%. Hal ini menandakan bahwa upaya pemerintah dalam memberantas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 0% serius dilakukan dan diiringi dengan penyediaan prasarana sanitasi.

Penanganan pengelolaan air limbah diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh pemerintah salah satu contohnya yaitu IPAL Gumpang dan Jombor. Selain itu, ada juga Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Desa Mojorejo, Bendosari.

Sebaran wilayah yang terdapat pengelolaan limbah (IPAL) baik domestik maupun IPAL biogas, tersebar di seluruh wilayah kecamatan sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah pembangunan IPAL sehingga diharapkan dapat merata diseluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 3.27 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pada Aspek Penduduk yang Mengakses Sanitasi Sehat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pengguna jamban	SR/K	234.8	250.1	258.1	255.03	267.85
		K	85	07	12	6	7
		Jiwa	704.6	750.3	774.3	888.59	790.21
			55	21	36	1	0
2.	Sanitasi layak	%	78,33	85,42	86,82	72,45	72,45
3.	SPALD-S	SR	3.249	3.262	3.367	3.417	3.417
		Jiwa	16.04	16.37	17.32	17.570	17.570
		%	1,78	1,86	1,94	1,94	1,96
4.	SPALD-T	SR	500	500	459	459	656
		Jiwa	2.500	2.500	2.295	2.295	3144
		%	0,28	0,28	0,26	0,25	0,35
5.	SPALD-S dan T	SR	3.749	3.762	3.826	3.876	4.073
		Jiwa	18.54	18.87	19.61	19.865	20.714
		%	2,06	2,15	2,20	2,19	2,31

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
6.	IPAL Komunal Perumahan	Jumlah lokasi	33	46	77	87	90
		Jumlah layanan (KK)	1.994	2.254	2.584	2.662	2.859
7.	SPM Bidang Pekerjaan Umum						
	a. Jumlah komulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi dalam sebuah Kab/kota					92,2	92,9
	b. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, limbah tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD					97,9	88,0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan dan DPKP Kabupaten Sukoharjo, 2022, 2022

Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,87% dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (demand) dan sisi penyediaan (supply). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan backlog rumah.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah backlog rumah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan baik sisi backlog kepemilikan maupun backlog kepemilikan. Berdasarkan perhitungan data perumahan dari BPS tahun 2017, Backlog Milik sebesar 45.826 dan Backlog Huni sebesar 28.524.

Untuk penyediaan rumah yang layak huni bagi seluruh kepala keluarga sampai akhir tahun 2020, diperkirakan membutuhkan 289.428 unit rumah. Pada tahun 2021 dilakukan validasi data yang meliputi jumlah rumah baik yang layak huni maupun yang tidak layak huni serta jumlah kepala keluarga untuk mengetahui angka backlog sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan hasil validasi data perumahan tahun 2021 didapatkan informasi jumlah backlog sebanyak 25.518 KK.

Pembangunan perumahan dan permukiman khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terus dilakukan guna memberi pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu. Upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lain agar dapat berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut. Penanganan RTLH sampai dengan Tahun 2020 sejumlah 7.026 sehingga jumlah RTLH pada tahun 2020 tinggal sejumlah 10.866 dari jumlah semula 17.982 di tahun 2015. Pada tahun 2021 dilakukan verifikasi data RTLH ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/479 TAHUN 2021 sejumlah 11.524 unit dan penanganan RTLH tahun 2021 sejumlah 2.384 unit sehingga sisa RTLH sejumlah 9.140 unit.

Makin berkurangnya persentase RTLH juga berdampak signifikan terhadap penurunan persentase lingkungan kumuh di Kabupaten Sukoharjo. Pembangunan Kawasan Permukiman meliputi pembangunan permukiman yang sehat dan layak huni. Membangun permukiman merupakan landasan utama dalam membangun bangsa, karena dengan mewujudkan permukiman yang layak bagi masyarakat akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan hak dasar rakyat dan pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa yang berjati diri serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya. Pembangunan kawasan permukiman diarahkan untuk meningkatkan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak. Beberapa langkah strategis dalam mewujudkan hal tersebut di antaranya melalui pencapaian amanah pembangunan nasional dengan mengurangi luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan hingga 0%. Luasan Kumuh Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 663/626/2020 tanggal 20 Oktober 2020 seluas 138,093 Ha. Luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai dengan tahun 2021 seluas 225,373 Ha.

Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) yang memadai, di mana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan orang dan lingkungan. Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menangani permasalahan penyerahan PSU dari pengembang ke pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum. Setelah PSU diserahkan ke pemerintah daerah, pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Tabel 3.28 Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Jumlah PSU yang diserahkan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Weru	-					
2	Bulu	-					
3	Tawang Sari	-					
4	Sukoharjo	3		2	5	5	3
5	Nguter	-					
6	Bendosari	-				3	
7	Polokarto	-				1	
8	Mojolaban	1		1	5	11	6
9	Grogol	2		2	12	12	8

10	Baki	3		1	5	5	12
11	Gatak	3		3	7	7	4
12	Kartasura	1			21	21	13
	Jumlah	4	13	9	16	65	48

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya pengembang yang belum menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, pada tahun 2022 sebanyak 48 pengembang.

Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan (SPM) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mulai tahun anggaran 2021 sudah memenuhi ketentuan didalam Permendagri Nomor 100 tahun 2018 yaitu mengalokasikan anggaran bagi korban bencana alam untuk perbaikan rumah.

Tabel 3.29 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	RLTH yang tertangani	Jumlah	1.222	1.356	1.469	1.815	2.384
2.	Jumlah RLTH	Ribu	15.506	14.150	12.681	10.866	9.140
3.	Luas Perumahan dan Permukiman Kumuh	Ha	197,023	176,009	78,863	138,093	69,403
4.	Luas Kabupaten	Ha	46.667	46.667	46.667	46.667	46.667
5.	Perumahan dan permukiman kumuh	%	0,414	0,377	0,169	0,098	0,148
6.	Capaian Penanganan perumahan dan permukiman kumuh	Ha	9,544	17,014	97,146	32,979	68,690

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo, 2022

2.2.5. Ketahanan Pangan

Kerawanan pangan, tersebar di 12 kecamatan. Data tersebut dilihat dari Peta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Secara garis besar kerawanan pangan terjadi pada daerah yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.30 Perkembangan Jumlah Desa Rawan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa Rawan Pangan	Keterangan
1	Weru	2	Karangmojo, Ngreco
2	Bulu	1	Malangan
3	Tawang Sari	1	Watubonang
4	Sukoharjo	2	Bulakan, Sukoharjo
5	Nguter	2	Serut, Plesan
6	Bendosari	1	Mertan
7	Polokarto	2	Polokarto, Mranggen
8	Mojolaban	1	Palur
9	Grogol	1	Cemani
10	Baki	1	Mancasan
11	Gatak	1	Trangsan
12	Kartasura	1	Pucangan
	Jumlah	16	

Sumber: Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Selain itu pangan, merupakan salah satu aspek utama dalam kaitannya dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem. Pentingnya pencapaian skor PPH tersebut diamanatkan oleh Undang- Undang (UU) Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel 3.31. Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dinilai dari skor pangan (dietary score)/skor PPH.

Ketersediaan energi mencerminkan ketersediaan pangan dari sisi kualitas bahan pangan. Dengan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) dari berbagai jenis pangan yang tersedia, diketahui jumlah energi yang tersedia untuk mencukupi kebutuhan energi per kapita dan Skor Pola Pangan Harapan Renstra Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 78 (PPH) Ketersediaan. Sedangkan Konsumsi Energi

mencerminkan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi penduduk yang menunjukkan jumlah energi yang dikonsumsi oleh penduduk per kapita per hari dalam Kilo Kalori. Demikian juga Angka Konsumsi Protein mencerminkan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi penduduk, yang menunjukkan jumlah protein yang dikonsumsi penduduk per kapita per hari dalam gram. Ketersediaan energi dan protein dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain : ketersediaan bahan pangan dan pertumbuhan penduduk. Ketersediaan bahan pangan dipengaruhi oleh produksi pangan dan distribusi pangan ke seluruh wilayah kabupaten serta keluar masuknya bahan pangan di Kabupaten Sukoharjo. Pada awal perencanaan yaitu tahun 2016 ketersediaan energi mencapai 3.991 KKal/Kapita/Hari, menunjukkan bahwa ketersediaan energi melampaui angka kecukupan energi ketersediaan 2.400 KKal/Kapita/Hari. Pada akhir periode Renstra tahun 2021 ditargetkan ketersediaan energi sebesar 3.650 KKal/Kapita/Hari dengan mempertimbangkan kenaikan jumlah penduduk setiap tahun. Angka konsumsi energi ditargetkan 2.150 KKal/Kapita/Hari, angka konsumsi protein ditargetkan 57 Gr/Kapita/Hari pada tahun 2021. Untuk Skor PPH Ketersediaan pada tahun 2016 sebesar 98,27 % dari Skor Ideal 100, dan ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 99,05 %.

Tabel 3.31 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pangan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Ketersediaan Energi	KKal/ Kapita /Hari	2.904	2.926	2.948	3.560	3.650
2.	Konsumsi Energi	KKal/ Kapita / Hari	2.068	2.110	2.131	2.141	2.150
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	%	94,27	94,50	95,74	99,00	99,05
4.	Angka Konsumsi Protein	Gr/ Kapita /Hari	53	54	55	56,9	57

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukoharjo, 2022

Berdasarkan data eksisting penggunaan lahan pertanian (Ladang dan Sawah) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 21.664,643 ha untuk sawah irigasi dan 3.121,691 ha untuk ladang. Data tersebut diambil berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031.

Urusan pertanian di Kabupaten Sukoharjo meliputi sektor tanaman pangan. Tanaman pangan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau.

Produksi tanaman pangan Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah produksi tanaman pangan sebanyak 443.119 ton pada tahun 2016 kemudian menurun berturut-turut hingga tahun 2020 puncaknya karena adanya pandemi COVID-19 yaitu sebesar 369.873.

Produktivitas Tanaman Hortikultura yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, kentang, dan tomat. Selama periode 2016-2020, produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2018 produksi tanaman hortikultura mengalami penurunan dari 277,7 ton menjadi 176 ton. Mulai tahun 2019 produksi mulai naik yaitu menjadi 211,6 dan puncaknya pada tahun 2020 produksi meningkat drastis yaitu sebesar 860,8 ton.

Produktivitas Tanaman Buah-Buahan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari mangga, durian, jeruk siam, pisang, papaya, salak, rambutan, dan Nangka/ cempedak. Produktivitas tanaman buah-buahan di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016-2017 produksi mengalami kenaikan yaitu sebesar 17.221 ton. Pada tahun 2018 mengalami penurunan kemudian naik lagi produksinya pada tahun 2019. Puncaknya pada tahun 2020 produksi buah-buahan menurun lagi pada jumlah 40.425,4 ton.

Produktivitas Tanaman Biofarmaka yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari jahe, lengkuas, kencur, kunyit, lempuyang, dan temulawak. Data produktivitas tanaman biofarmaka dapat dilihat pada tabel berikut. Selama periode 2016-2020, produktivitas tanaman biofarmaka di Kabupaten Sukoharjo mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 jumlah produksi 1.729,931 ton yang selama 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan hingga puncaknya pada tahun 2020 total produksi yaitu 1.627,434 tanaman biofarmaka yang mengalami peningkatan produksi seperti jahe dan kunyit.

Produktivitas Tanaman Perkebunan yang ada di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari tebu, tembakau, kelapa, cengkeh, kapuk, mete, kemiri, dan wijen. Selama periode 2016-2020, produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan pada tahun pada tahun 2016 ke 2017 sejumlah masing-masing 483,24 ton pada tahun 2016 dan 1.041,35 ton. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, produksi tanaman perkebunan mengalami peningkatan jumlah produksi, dengan jumlah masing-masing 372,66 ton pada tahun 2018 dan

431,83 ton. Produksi pada tahun 2020 mengalami penurunan dari total jumlah produksi tahun sebelumnya sejumlah 728,22 ton.

Sektor pertanian juga merupakan andalan setelah sektor perindustrian dan perdagangan. Luas lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat sebesar 20.460 Ha. Dari jumlah tersebut, terdiri atas sawah irigasi teknis 14.489 Ha, sawah irigasi ½ teknis 2.241 Ha, irigasi sederhana 1.874 Ha, dan sawah tadah hujan 1.876 Ha.

Dari 14.489 irigasi teknis tersebut, 73% di antaranya tergantung pada aliran Dam Colo, sedangkan sisanya tergantung pada aliran irigasi provinsi atau kabupaten. Untuk itu, petani yang tidak memiliki sumber pengairan lainnya otomatis tidak dapat menanam lahan mereka saat Dam Colo ditutup atau dikuras.

Data hingga September 2019 melaporkan bahwa kondisi pertanian di Kabupaten Sukoharjo tercatat seluas 11.934 Ha. Terdiri atas tanaman padi seluas 10.914 Ha, tanaman perkebunan 167 Ha, hortikultura 148 Ha, dan palawija 71 Ha. Ternak besar didominasi oleh ternak sapi dewasa. Sedangkan untuk ternak kecil didominasi oleh ternak ayam ras. Keduanya dikatakan mengalami peningkatan produksi tiap tahun. Hal ini perlu didukung guna memenuhi ketersediaan pangan khususnya pemenuhan protein hewani.

Menurut ketersediaan lahannya, penentuan status daya dukung lahan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Hasil perhitungan tahun 2018 dapat diketahui SL (208.340,31 Ha) > DL (206.724,13 Ha). Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan pada tahun 2019 dinyatakan surplus. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.

Tabel 3.32 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Produksi padi	Ton	392.587	393.157	375.750	370.305	389.248
2.	Produktivitas padi	Kw/ha	74,64	73,7	75	77,20	74,49
3.	Produksi jagung	Ton	12.379	8.008	19.723	30.277	18.812
4.	Produktivitas jagung	Kw/ha	87,35	87,52	96,12	95,18	94
5.	Produksi kedelai	Ton	1.821	5.105	2.389	4.805	5.875
6.	Produktivitas kedelai	Kw/ha	22,70	22,69	21,88	27,35	25
7.	Produksi kacang tanah	Ton	6.343	6.797	5.083	4.654	2.799
8.	Produksi hortikultura (bawang	Ton	1.323,70	1.679	12.446	2.743,6	1.924

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	merah, cabe, melon, semangka						
9.	Produksi biofarma	Ton	2.006,10	1.685	4.280	1.545,8	1.399
10.	Produksi ubi kayu	Ton	20.201,00	17.846	25.840	19.331	14.987
11.	Produktivitas ubi kayu (kw/ha)	Kw/ha	161,87	166,63	243,31	280,16	310
12.	Rata-rata konsumsi energi (Kkal/kap/hari)	Kkal/kap/hari	2.001,20	1.929,50	2004,5	2.100,10	2.150
13.	Rata-rata ketersediaan energi (kkal/kap/hari)	Kkal/kap/hari	3.318	3.579	3.293	3.765	3.882
14.	Produksi kelapa	Ton	589,58	590,77	623	593,00	597
15.	Produksi lada	Ton	0,24	0,26	0,197	0,26	0,30
16.	Produksi mete	Ton	68,29	68	69,68	65,00	72
17.	Produksi tebu	Ton	36.785,20	2.812,28	2.171,80	2.445,80	-
18.	Produksi hasil peternakan (daging)	Ton	8.973,66	11.419,90	13.791,557	13.795,80	13.905
19.	Produksi hasil peternakan (telur)	Ton	14.166,64	9.384,50	10.226,24	13.406,30	13.422
20.	Produksi tanaman pangan	Ton	435.310	420.279	403.187	369.873	
	a. Padi	Ton	392.587	363.282	339.445	310.778	
	b. Jagung	Ton	12.379	9.313	16.030	30.277	
	c. Ubi Kayu	Ton	20.201	37.328	41.269	19.331	
	d. Ubi Jalar	Ton	0	0	0	0	
	e. Kacang Tanah	Ton	6.383	6.051	4.753	4.654	
	f. Kacang Kedelai	Ton	3.674	4.217	1.690	4.805	
	g. Kacang Hijau	Ton	86	88	0	28	
21.	Produksi tanaman holtikultura	Ton	216,3	176	211,6	860,8	
	a. Bawang Merah	Ton	143,6	115,6	69,1	486	
	b. Bawang Putih	Ton	-	-	-	-	
	c. Cabai Besar	Ton	32,2	43,7	76,5	236,7	
	d. Cabai Rawit	Ton	23,5	5,7	6	53,1	
	e. Kentang	Ton	-	-	-	-	
	f. Bawang Merah	Ton	17	11	60	85	
22.	Produksi tanaman buah-buahan	Ton	31.454,1	27.886,499	56.051,3	40.425,4	
	a. Mangga	Ton	16.528,8	22.955,6	44.236,4	28.534,5	
	b. Durian	Ton	415,9	201,3	334,6	125,6	
	c. Jeruk Siam	Ton	27,7	40,2	79,4	72,3	
	d. Pisang	Ton	8.908,8	10.299	5.962,5	5.937,3	
	e. Pepaya	Ton	1.728,3	1.634,1	2.016,1	2.457,2	
	f. Salak	Ton	0,4	0,2	-	-	
	g. Rambutan	Ton	2.777,6	2.198,7	1.484,5	1.096,7	

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	h. Nangka/ Cempedak	Ton	1.066,6	846,1	1.937,7	2.201,8	
23.	Produksi tanaman biofarmaka	Ton	1.825,331	1.538,298	1.373,488	1.627,434	
	a. Jahe	Ton	327,866	288,360	220,598	305,446	
	b. Lengkuas	Ton	158,259	135,740	138,531	100,424	
	c. Kencur	Ton	106,428	100,240	116,542	130,541	
	d. Kunyit	Ton	865,927	662,394	604,119	787,472	
	e. Lempuyang	Ton	162,377	170,134	162,223	144,336	
	f. Temulawak	Ton	204,474	181,430	131,475	159,215	
24.	Produksi tanaman perkebunan	Ton	3.322,47	3.695,13	4.126,96	3.398,74	
	a. Tebu	Ton	2284,58	2.812,28	3.287,83	2.690,98	
	b. Tembakau	Ton	307,94	150,03	236,60	105,20	
	c. Kelapa	Ton	589,58	590,74	602,53	602,56	
	d. Cengkeh	Ton	1,01	1,01	-	-	
	e. Kapuk	Ton	70,98	71,01	-	-	
	f. Mete	Ton	68,29	69,14	-	-	
	g. Kemiri	Ton	0,090	0,92	-	-	
	h. Wijen	Ton	0	0	0	0	
25.	Ternak Besar						
	a. Kuda Muda	Ekor	41	42	43	47	
	b. Kuda Dewasa	Ekor	200	199	200	198	
	c. Kerbau Muda	Ekor	193	221	212	216	
	d. Kerbau Dewasa	Ekor	337	384	385	389	
	e. Sapi Muda	Ekor	11.153	10.828	11.434	11.706	
	f. Sapi Dewasa	Ekor	17.441	18.472	18.311	18.755	
26.	Ternak Kecil						
	a. Ayam Ras	Ekor	2.942.829	3,259,318.00	4,340,450.00	4,990,990.00	
	b. Ayam Bukan Ras	Ekor	843,754.00	877,245.00	883,975.00	892,810.00	
	c. Itik Muda	Ekor	46,467.00	50,497.00	55,609.00	55,776.00	
	d. Itik Dewasa	Ekor	181,516.00	176,393.00	178,723.00	178,723.00	

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo dan BPS

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Sukoharjo sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Realisasi pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2017-2021, Konsumsi ikan tahun 2021 sebesar 19,50 kg/kap/tahun meningkat dengan Konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 19,10 kg/kap/tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya pada tahun 2021 tercapai 12.843 ton meningkat dari Tahun 2020 (12.293 Ton). Peningkatan produksi

ikan tahun 2021 tercapai 550 Ton atau 4,28% dari produksi pada tahun 2020 sebesar 524 ton atau 4,26%.

Tercapainya target konsumsi ikan perkapita ditunjang dengan kebijakan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pengolah hasil Perikanan dan pembinaan pengolah dan pemasar hasil Perikanan. Kebijakan ini didukung dengan pelaksanaan program/kegiatan seperti:

- 1) Penyuluhan Gemar Makan Ikan (GEMARI)
- 2) Bazar Olahan Ikan
- 3) Rapat Koordinasi FORIKAN

Terdapat 2 (satu) indikator yang dapat diperbandingkan dengan tingkat provinsi dan Nasional, yaitu produktivitas Padi dan Angka Konsumsi Ikan.

Pertama, capaian kinerja produktivitas Padi sebesar 77,20 Kw/ha pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan produktivitas padi tingkat Provinsi Jawa Tengah 56,93 kw/ha dan produktivitas padi tingkat nasional 51,28 kw/ha pada posisi yang lebih tinggi. Keberhasilan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dari tingkat provinsi Jawa Tengah ataupun Nasional, didukung dari seluruh elemen stakeholders sektor pertanian (khususnya padi) yang mulai dapat berubah ke arah mekanisasi pertanian dan didukung dengan ketersediaan sumber daya air yang baik.

Kedua, capaian Angka Konsumsi Ikan di Tingkat Nasional mencapai 56,39 Kg/kapita/Tahun. Dibandingkan dengan capaian Angka Konsumsi Ikan di tingkat Kabupaten yang baru mencapai 22,23 Kg/kapita/Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa capaian di Kabupaten Sukoharjo masih jauh tertinggal dibandingkan capaian pada tingkat nasional. Hal ini memerlukan kerja keras dari semua pihak untuk dapat meningkatkan capaian kinerja di Angka Konsumsi Ikan.

Tabel 3.33 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Konsumsi ikan	Kg/kap/tahun	17,90	18,3	18,70	19,10	19,50
2.	Produksi perikanan budidaya	Ton	10.793	11.269	11.769	12.293	12.843
3.	Prosentase cakupan bina	%	76	82	88	94	100

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
	kelompok perikanan						
4.	Peningkatan produksi ikan	%	4,22	4,22	4,25	4,26	4,28

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, 2022

Sumber daya air merupakan hal vital dalam kehidupan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari juga untuk kebutuhan teknis kewilayahan mengingat dominasi penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo adalah pertanian. Dalam hal ini sarana dan prasarana irigasi sangat dibutuhkan. Berikut adalah persebaran embung yang terdapat di wilayah Kabupaten Sukoharjo:

Tabel 3.34 Persebaran Embung di Kabupaten Sukoharjo

No.	Nama Embung	Lokasi Kecamatan	Luas (ha)	Volume (m ³)
1	Paluhombo	Bendosari	0,25	5.000
2	Bulu	Polokarto	0,25	5.000
3	Tanjung	Nguter	0,18	3.600
4	Ponowaren	Tawang Sari	0,25	5.000
5	Grogol	Weru	0,40	10.000
6	Jagan	Bendosari	0,12	2.250
7	Puhgogor	Bendosari	0,06	1.875
8	Celep	Nguter	0,46	-
9	Kriwen	Sukoharjo	0,2	6.000
10	Sanggung	Bulu	0,25	7.500
11	Penggik	Tawang Sari	0,08	3.200
12	Gentan	Bulu	0,8	-
13	Manisharjo	Bendosari	-	-
14	Pengkol	Nguter	-	-
15	Kenep	Sukoharjo	0,16	4.800
16	Serut	Nguter	0,45	-
17	Juron	Nguter	-	21.000
18	Kemasan	Polokarto	-	5.700

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

Persebaran embung di Kabupaten Sukoharjo hanya terletak pada lokasi Kecamatan Bendosari, Polokarto, Nguter, Weru, Sukoharjo dan Bulu. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut yang memiliki potensi pertanian tinggi. Oleh karena itu, penyediaan

sumber air baku sudah memperhatikan kebutuhan air untuk kepentingan pertanian.

Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan sumberdaya air baku ada beberapa kewenangan. Kewenangan tersebut antara lain:

- a. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, meliputi DI Colo Barat dan DI Colo Timur
- b. DI Trani merupakan Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.
- c. Status Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten meliputi 70 DI. Sistem jaringan irigasi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo berupa pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, terdiri atas : Jaringan irigasi primer; Jaringan irigasi sekunder; dan Jaringan irigasi tersier.

Luas daerah irigasi kewenangan pusat provinsi dan kabupaten secara berturut-turut yaitu 10.556 hektar, 4210 hektar dan 6.364 hektar. Menurut data daerah irigasi sudah tersedia di seluruh kecamatan. Berdasarkan hal tersebut diharapkan dapat mencukupi kebutuhan irigasi di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Dari 70 DI di atas, terdapat penurunan kualitas kondisi daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo. Daerah irigasi dengan kondisi baik turun dari 59% menjadi 29% dan pada tahun 2021 menjadi 19,30%. Dinas perlu meningkatkan perhatian terhadap hal ini mengingat Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan kerawanan bencana kekeringan sehingga kerugian di masa mendatang bisa dicegah.

Tabel 3.35 Capaian Indikator Utama Pada Aspek Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kondisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021 dan Target Tahun 2022

No	Indikator Utama	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Irigasi baik	%			59	29	19,30
2.	Irigasi rusak ringan	%			16	26	30,66
3.	Irigasi rusak sedang	%			15	37	50,04
4.	Irigasi rusak berat	%			10	9	
5.	Luas Daerah Irigasi	Ha			4.353	4.353	4.353

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo

3.3. Determinan Kemiskinan

Salah satu model analisis untuk mendekati determinan masalah adalah evaluasi dampak (impact evaluation), dengan menggunakan analisis akar masalah dan basis teori perubahan (theory of change) atau logika program. Dalam hal ini, evaluasi dampak bertujuan menguji apakah hubungan sebab-akibat yang digambarkan oleh logika program konsisten dengan bukti yang ada disertai analisis akar masalah ketidaksesuaian pencapaian kinerja program. Untuk itu sebelum melakukan intervensi perlu mencari tahu akar masalah dari setiap permasalahan pada setiap bidang tersebut melalui evaluasi pengukuran kinerja dilakukan menggunakan metode Gap Analysis. Metode ini membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Dalam rangka memudahkan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan program maka perlu dibuat notifikasi capaian kinerja berdasarkan capaian indikator masing-masing program, dapat dilihat pada tabel berikut:

Notifikasi	Warna	Kriteria Notifikasi	Kategori
	Hijau	Apabila target tercapai $\geq 95\%$	Sudah tercapai atau <i>On Track/ On Trend</i>
	Kuning	Apabila mencapai target $< 95\%$ dan $\geq 75\%$	Perlu kerja keras
	Merah	Apabila target mencapai $< 75\%$	Sulit tercapai

Gambar 3.13 Tabel Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja indikator utama kemiskinan non konsumsi mewakili tujuan yang hendak dicapai oleh Program Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.36 Evaluasi Pengukuran Kinerja Bidang dan Indikator Utama Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi Tahun 2021 Dalam Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
1. Ketenagakerjaan							
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	83	75,16	83	90,55	Perlu Upaya Keras
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90	88	90	98	On Track/On Trend
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	83	75,16	83	90,55	Perlu Upaya Keras
Program Hubungan Industrial	Prosentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	3	2,6	3	87	Perlu Upaya Keras
Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0	41,77	39,51	105,72	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10,95	11,43	11,00	103,89	On Track/On Trend
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan PDRB sektor industri	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	-2,75	2,63	4,62	56,93	Sulit Tercapai
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	90	85	90	94	Perlu Upaya Keras
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	-3,5	5,7	4,6	123,91	On Track/On Trend
	Pertumbuhan Wirausaha Baru	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	10	26,34	11	239,45	On Track/On Trend
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	0	100	100	100	On Track/On Trend
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	76,9	76,92	80,7	95,32	On Track/On Trend
Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspor	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	-16,05	0,2	0,2	100	On Track/On Trend
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	2,6	-0,67	2,7	-24,81	Sulit Tercapai

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	81,67	90	82	99,34	On Track/On Trend
Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	-1,19	3	3	100	On Track/On Trend
Program Pemberdayaan UMKM	Prosentase kemitraan KUMKM	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	5,62	6	6,56	91,46	Perlu Upaya Keras
Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peningkatan Omset Produk UMKM	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	20	23	25	92	Perlu Upaya Keras
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,7156	0,723	0,74	97,7	On Track/On Trend
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2,67	2,67	2,67	100	On Track/On Trend
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Jenis Lembaga kemasyarakatan Desa yang dibina	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33,33	33,33	33,33	100	On Track/On Trend
Meningkatnya Kualitas Anak,	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan	96,49	96,52	96,45	100,07	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Perempuan, Dan Pemuda		Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,12	0,12	0,12	100	On Track/On Trend
2. Kesehatan							
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan	77,55	77,73	77,65	100,1	On Track/On Trend
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	On Track/On Trend
	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	On Track/On Trend
	Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	On Track/On Trend
	Persentase FKTP terakreditasi	Dinas Kesehatan	18	18	18	100	On Track/On Trend
	Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi	Dinas Kesehatan	34	34	34	100	On Track/On Trend
	Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	Dinas Kesehatan	20	20	20	100	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
	Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN	Dinas Kesehatan	48	49	50	98	On Track/On Trend
	Persentase Capaian UHC	Dinas Kesehatan	82,44	84,76	81	104,64	On Track/On Trend
	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	Dinas Kesehatan	95,3	95,97	100	95,97	On Track/On Trend
	Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	On Track/On Trend
	Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	Dinas Kesehatan	85,8	86,93	100	86,93	Perlu Upaya Keras
	Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	79,4	83,1	100	83,1	Perlu Upaya Keras
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Dinas Kesehatan	59	93	100	93	Perlu Upaya Keras
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan pada kesehatan reproduksi	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	On Track/On Trend
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan pada lansia	Dinas Kesehatan	62,27	77,5	100	77,5	Perlu Upaya Keras
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	47	100	58	172,41	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	Dinas Kesehatan	33	100	42	238,1	On Track/On Trend
	Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olah raga	Dinas Kesehatan	83	80	92	86,96	Perlu Upaya Keras
	Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	94	86,78	80	108,48	On Track/On Trend
	NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	Dinas Kesehatan	47,3	29,07	46	63,2	Sulit Tercapai
	Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	Dinas Kesehatan	100	100	100	100	On Track/On Trend
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa siaga aktif mandiri	Dinas Kesehatan	40	44	45	97,77	On Track/On Trend
Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Dinas Pengendalian Peduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,88	0,44	0,88	50	Sulit Tercapai
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	Dinas Pengendalian Peduduk, KB, dan Pemberdayaan	68,05	58,56	68,5	85,49	Perlu Upaya Keras

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
		Perempuan dan Perlindungan Anak					
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Dinas Pengendalian Peduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70	68,66	72	94,94	Perlu Upaya Keras
3. Pendidikan							
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9,1	9,35	9,34	100,11	On Track/On Trend
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ; Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13,82	13,84	13,83	100,07	On Track/On Trend
Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	92,33	93	93,23	99,75	On Track/On Trend
Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	46	39,91	46	86,76	Perlu Upaya Keras
4. Infrastruktur dasar							
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Akses Sanitasi yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	97,91	88	98	89,80	Perlu Upaya Keras

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,13	2,21	2,21	100	On Track/On Trend
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Akses air minum yang layak	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92,24	93,18	94	99,13	On Track/On Trend
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,85	70,14	70,14	100	On Track/On Trend
Meningkatnya kualitas infrastruktur	Persentase Lingkungan Hunian Layak	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	72,49	79,8	75,54	105,64	On Track/On Trend
Program Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah Tertangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29,98	24	30,89	77,69	Perlu Upaya Keras
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	38,72	39,49	39,49	100	On Track/On Trend
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4,24	5	5,16	96,91	On Track/On Trend
5. Ketahanan Pangan							
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	-3,5	5,7	4,6	123,91	On Track/On Trend
Program Stabilisasi Harga Barang	Prosentase Pengendalian Harga	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM	100	98	100	98	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, dan perikanan	Dinas Pertanian Dan Perikanan	2,27	3,58	2,3	155,65	On Track/On Trend
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani	Dinas Pertanian Dan Perikanan	95	94	95,25	98,69	On Track/On Trend
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani	Dinas Pertanian Dan Perikanan	68	68	70	97,14	On Track/On Trend
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Dinas Pertanian Dan Perikanan	32	31	32,5	95,38	On Track/On Trend
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen	Dinas Pertanian Dan Perikanan	0,01	3	3	100	On Track/On Trend
Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berijin	Dinas Pertanian Dan Perikanan	50	60	60	100	On Track/On Trend
Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan klas kelompok	Dinas Pertanian Dan Perikanan	0	2	2	100	On Track/On Trend
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap	Dinas Pertanian Dan Perikanan	388,35	390	392,32	99,5	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	Dinas Pertanian Dan Perikanan	13486,4	13900	13907,97	99,9	On Track/On Trend
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB	Dinas Pertanian Dan Perikanan	15	15	25	92	Perlu Upaya Keras
Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)	Dinas Pertanian Dan Perikanan	15,68	28	30	93,3	Perlu Upaya Keras
Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Ketahanan Pangan	93,3	93,7	93,5	100,21	On Track/On Trend
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	8,38	9,34	9,58	97,49	On Track/On Trend
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)	Dinas Ketahanan Pangan	171,13	116,1	118,43	98,03	On Track/On Trend
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani	Dinas Ketahanan Pangan	12,25	25	25	100	On Track/On Trend
6. Sosial							
	Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)	Dinas Sosial	4,3	4,3	4,25	98,82	On Track/On Trend

Bidang/ Sasaran/Program	Indikator Sasaran dan Program	Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	2021			
				Realisasi Capaian Kinerja	Target Kinerja	Tingkat Capaian Kinerja	Status Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)	Dinas Sosial	2,94	2,94	2,9	98,62	On Track/On Trend
Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya	Dinas Sosial	21,76	32,8	34,67	94,6	Perlu Upaya Keras
Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial	Dinas Sosial	13,99	10,65	14,99	71,04	Sulit Tercapai
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial	Dinas Sosial	60,87	65,9	73,91	89,16	Perlu Upaya Keras
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif	Dinas Pengendalian Peduduk, KB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	70	68,66	72	94,94	Perlu Upaya Keras
Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	95	100	95	On Track/On Trend
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	95	100	95	On Track/On Trend

Determinan kemiskinan/analisis akar masalah merupakan analisis lebih mendalam setelah menggambarkan kondisi umum kemiskinan daerah. Determinan kemiskinan secara umum memiliki keterkaitan dengan tidak meratanya akses terhadap ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan ketahanan pangan, serta sosial. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada setiap bidang selanjutnya akan dijadikan prioritas kebijakan. Membaiknya indikator-indikator utama bidang, maka dampak selanjutnya yang lebih besar adalah perbaikan terhadap indikator kemiskinan (perbaikan goal). Berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja indikator utama kemiskinan non konsumsi, determinan kemiskinan dari masing-masing bidang penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 3.37 Determinan Kemiskinan Bidang dan Indikator Utama Kondisi Kemiskinan Non Konsumsi Kabupaten Sukoharjo

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
1.	Ketenagakerjaan		
(1)	Ketenagakerjaan/Tenaga Kerja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum semua paket pelatihan bisa diadakan secara penuh dikarenakan keterbatasan dana ▪ Bursakerja online belum sepenuhnya dipahami pencari kerja. ▪ Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bursa kerja online ▪ Masih Minimnya sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Semua calon tenaga kerja mendapatkan pelatihan sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia ▪ Tidak semua lowongan kerja sesuai dengan basic dan pendidikan, minat bakat dan keterampilan ▪ Belum semua pencari kerja mendapatkan penempatan yang sesuai dengan yang diinginkan ▪ Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menerapkan peraturan ketenagakerjaan
(2)	Ketenagakerjaan/Perindustrian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya Sosialisasi tentang persyaratan teknis perizinan sektor industri melalui aplikasi siinas ▪ Kurangnya pelatihan SDM bagi pelaku IKM ▪ Kurangnya bantuan peralatan dan modal ▪ Minimnya standarisasi produk ▪ Minimnya pengembangan industri wisata di sentra IKM ▪ Kurangnya pelatihan bisnis dan manajemen wirausaha bagi IKM ▪ Minimnya pembinaan terkait teknis produksi dan standarisasi produk 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pemahaman bagi sektor industri tentang persyaratan perizinan melalui aplikasi siinas ▪ kurangnya pemahaman pelaku IKM dalam menglola IKM termasuk dalam pemasaran dan pengembangannya. ▪ Kurangnya pengetahuan Pelaku tentang cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan modal. ▪ Rendahnya pemahaman pelaku IKM tentang standarisasi produk

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimnya pembinaan pengembangan dan diversifikasi produk ▪ Minimnya fasilitasi sertifikasi produk dan manajemen mutu 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya minat Pelaku IKM dalam berorientasi di sektor wisata, masih berorientasi pada produksi barang ▪ Minimnya penerapan manajemen wirausaha dan bisnis ▪ Minimnya pengetahuan tentang pentingnya teknis produksi dan standarisasi produk ▪ Minimnya pengetahuan pengembangan produk dan diversifikasi produk ▪ Minimnya IKM yang menerapkan sertifikasi produk dan manajemen mutu
(3)	Ketenagakerjaan/Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya jenis pelatihan kewirausahaan sesuai dengan minat dan keahlian pemuda ▪ Belum optimalnya monev hasil pelaksanaan pelatihan kewirausahaan ▪ Terbatasnya SDM Perangkat Daerah dalam Kewirausahaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kualitas peserta lulusan pelatihan kewirausahaan pemuda dan rendahnya peserta yang menjadi wirausaha setelah mengikuti pelatihan
(4)	Ketenagakerjaan/Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya sosialisasi dan publikasi prosedur perijinan perdagangan ▪ Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan perdagangan yang ada, dimana banyak kios dan Los di pasar yang berada di lantai 2 tidak diminati pedagang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih belum meratanya penguasaan dan pemanfaat Teknologi informasi (Aplikasi ijin online) ▪ Masih banyak usaha perdagangan yang belum ber ijin

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya kapasitas kewenangan daerah dalam pencatatan pelaku usaha dan volume ekspor saat ini pelaporan ekspor dicatat oleh Surakarta untuk kawasan Subosukawonosraten ▪ Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi produk ekspor (produk tekstil - Sritex, Rotan, meuble, kaca grafir) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya promosi sarana perdagangan yang mengakibatkan kekosongan Kios dan Los di Pasar ▪ kurang inovatif pelaku usaha dalam membuat dan mengemas produk
(5)	Ketenagakerjaan/Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum Optimalnya pengawasan koperasi ▪ Belum optimalnya pemberian modal ▪ Belum optimlnya jalinan kemitraan dengan berbagai pihak (Perbankan, Minimarket, Swasta) ▪ Belum optimlnya sosialisasi dan publikasi kepada UMKM terkait periznan ▪ Masih kurangnya gelar promosi produk UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya pengetahuan dan pengalaman anggota dalam mengelola koperasi ▪ Masih rendahnya kapasitas sebagian SDM pengurus dan anggota koperasi. ▪ Masih kurangnya kesempatan kemitraan UMKM ▪ Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM ▪ Kurang mengoptimalkan teknologi dalam promosi produk UMKM
(6)	Ketenagakerjaan/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pembinaan terhadap dana bergulir masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) ▪ kidak kesesuaian Regulasi/Perda tentang BUMDES dengan kondisi kebijakan ini 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perguliran masih relatif rendah dan tunggakannya masih tinggi ▪ Keresahan pengelola dana bergulir masyarakat Eks PNPM MPd jika bertansformasi menjadi BUM Desa Bersama LKD

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pembentukan kawasan perdesaan baru 1 kawasan, yaitu Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian, Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Pariwisata (Windu Lanang: Wirun Dukuh Laban Cangkol) ▪ Belum adanya pendataan potensi desa dalam pengembangan kawasan ▪ Kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa ▪ Belum optimalnya pelatihan usaha bagi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) ▪ Kurangnya pembinaan terhadap kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Banyaknya amanah dari Pemerintah dalam program desa, termasuk banyaknya aplikasi yang dikelola dari beberapa kementerian/lembaga ▪ Kurangnya modal untuk pengembangan usaha bagi rumah tangga miskin ▪ Kurangnya pengetahuan tentang pengembangan usaha kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) ▪ Belum adanya kelembagaan yang menampung hasil usaha anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)
(7)	Ketenagakerjaan/Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum tersedianya data perempuan rentan yang membutuhkan pelatihan kewirausahaan dan Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) ▪ Rendahnya fasilitasi sarana pendukung pelatihan PPEP ▪ Tidak memiliki data perempuan kepala keluarga (PEKA) ▪ Tingginya cakupan PEKA untuk mengakses PPEP ▪ Belum optimalnya penguatan BKB, BKR, BKL dalam penguatan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat dan stakeholder belum melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan ▪ Rendahnya PEKA yang sudah dilatih dalam kepemilikan sarana pendukung dan permodalan usaha ▪ Rendahnya kemampuan PEKA yang sudah dilatih dalam marketing digital, serta produk usaha terbentur IPRT dalam pemasaran ▪ Belum optimalnya gerakan BKB, BKR, BKL dalam penguatan keluarga

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kuantitas Kader Pembantu Petugas KB Desa (PPKBD dan Sub PPKBD dalam Pembinaan pertemuan kelompok kegiatan/Poktan bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) dan Pendampingan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 	
2.	Kesehatan		
(1)	Kesehatan/Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Belum semua Puskesmas memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan penyakit menular Belum semua wilayah kerja puskesmas memiliki posbindu Belum optimalnya peran Stakeholder dalam Pelaksanaan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Belum optimalnya peran kader dan petugas dalam Pelaksanaan Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan pendekatan berbasis masyarakat Belum optimalnya pembinaan, mapping survei dan menyusun regulasi akreditasi Fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan penularan penyakit menular, pentingnya deteksi dini faktor resiko dan pencegahan penyakit tidak menular Rendahnya pemahaman masyarakat tentang imunisasi, berita HOAK tentang imunisasi, serta adanya faktor budaya penolakan imunisasi Rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan jaminan pemeliharaan kesehatan, terutama pada keluarga yang memiliki keluarga rentan seperti ibu hamil Rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya dalam melakukan tumbuh kembang balita Kurangnya pemahaman masyarakat akan Promosi dan Konseling Pemberian Makanan

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<p>kesehatan tingkat pertama (FKTP), Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), RS, dan Labkes Pemerintah dan Swasta</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pelaksanaan SDIDTK (Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak) ▪ Belum seluruh remaja putri mendapatkan tablet tambah darah ▪ Kurangnya kader dalam pengembangan Posyandu Lansia ▪ Masih kurangnya capaian kepemilikan sarana sanitasi pada pilar 4 (Pengelolaan sampah) dan pilar 5 (Pengelolaan limbah) pada 5 pilar STBM di Masyarakat ▪ Belum seluruh pekerja formal dan informal menerima pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerja ▪ Belum semua masyarakat melakukan aktifitas fisik sesuai prinsip BBTT (Baik Benar Teratur dan Terukur) ▪ Kondisi klinis pasien yang dirujuk ke IGD sudah jelek, kebanyakan CKB (Cidera Kepala Berat) dan kegawatdaruratan jantung ▪ Kurangnya SDM Promkes untuk pembinaan Posyandu dalam perwujudan kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 % 	<p>Bayi dan Anak (PMBA), serta mengenai beban permasalahan gizi (buruk, kurang dan gizi lebih serta stunting).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya peran sekolah dalam pelaksanaan UKS (pelayanan kesehatan peserta didik usia pendidikan dasar) ▪ Masih terdapat kasus anemia pada remaja putri ▪ Belum optimalnya pelaksanaan Posyandu Lansia sesuai dengan kebutuhan lansia ▪ Belum seluruh masyarakat memiliki sarana sanitasi ▪ Masih kurangnya Pekerja formal dan informal mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi di tempat kerja ▪ Masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya aktivitas fisik / olahraga ▪ Belum seluruh kecamatan mempunyai Posyandu mandiri > 27 % (data saat ini 8 kecamatan)

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
(2)	Kesehatan/Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ▪ Belum optimalnya pengembangan kampung KB aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya peran Stakeholders dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana ▪ Rendahnya peran pemdes dalam pelaksanaan kampung KB
(3)	Kesehatan/Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya komitmen percepatan penurunan stunting 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya konvergensi penanganan stunting
3.	Pendidikan		
(1)	Pendidikan/Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan dalam penyediaan biaya peserta didik pendidikan non formal, promosi PKBM, kelas PKBM tingkat Desa dan kelas PKBM online. ▪ Rendahnya kuantitas PAUD Negeri (TK Pembina) hanya 3 unit ▪ Belum optimalnya pengelolaan PAUD (pembangunan gedung, ruang kelas, ruang guru, pembangunan sarana prasarana dan utilitas, serta pengadaan perlengkapan) ▪ Belum optimalnya penyediaan biaya personil dan perlengkapan peserta didik PAUD, SD dan SMP 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya minat calon peserta didik pendidikan non formal/kesetaraan ▪ Rendahnya kesadaran orang tua balita untuk menyekolahkan ke PAUD ▪ Tingginya anak usia sekolah tidak bersekolah karena masalah ekonomi keluarga, sosial psikologis ataupun lingkungan ▪ Rendahnya kompetensi dan pendidikan pendidik PAUD, SD dan SMP

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya cakupan peningkatan pendidikan pendidik PAUD, SD dan SMP ▪ Tidak meratanya distribusi pendidik pendidikan dasar 	
(2)	Pendidikan/Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Minimnya jumlah perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus yang dikelola sesuai Standar Nasional Perpustakaan (dari segi sarpras, koleksi perpustakaan, anggaran, dan SDM perpustakaan belum memenuhi standar nasional perpustakaan) ▪ Tingginya cakupan layanan perpustakaan keliling dan kelas gemar membaca dengan sasaran kelompok khusus 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya minat baca masyarakat ▪ Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perpustakaan sebagai tempat pendidikan, penelitian, pelestarian dan rekreasi serta kegiatan inklusi untuk peningkatan kecakapan hidup
4.	Infrastruktur Dasar		
(1)	Infrastruktur dasar/Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengoperasian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terbangun ▪ Belum optimalnya penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terbangun ▪ Belum optimalnya pelatihan kepada BPSPAM/ pengelola dalam pengoperasian SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan; Usulan DAK Bidang Air Minum TA 2022 tidak disetujui. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pengelolaan Air Limbah Domestik ▪ Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan mengelola keberlangsungan pengoperasian SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang sudah terbangun

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
(2)	Infrastruktur dasar/Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya komitmen Penanganan permukiman kumuh yang bersumber dana APBD ▪ Tingginya cakupan RTLH dari sumber Dana APBD yang harus ditanganu masih sebesar 10.886 unit ▪ Belum Optimalnya penyerahan PSU Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang telah dibangun pengembang kepada pemerintah daerah kabupaten sukoharjo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sebagian besar permukiman kumuh dihuni oleh MBR ▪ Perilaku dan budaya masyarakat yang tidak mendukung perilaku hidup bersih sehat ▪ Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Sukoharjo ▪ Pemerintah Daerah belum bisa menangani Prasarana , sarana dan Utilitas Umum di Perumahan MBR dikarenakan belum menjadi aset Pemerintah Kbaupaten Sukoharjo
5.	Ketahanan Pangan		
(1)	Ketahanan Pangan/Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian produk, baik kualitas maupun harga ▪ Belum optimalnya monitoring Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Adanya permainan kartel Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting ▪ Belum optimalnya ketepatan sasaran Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
(2)	Ketahanan Pangan/Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang merata kualitas ke seluruh wilayah. ▪ Masih terdapat penggunaan alat dan Mesin Pertanian impor menyebabkan harga mahal serta menghambat peralihan ke mekanisasi ▪ Rendahnya kuantitas dan Kualitas SDM memenuhi kompetensi dan kinerja berpengaruh terhadap kinerja dari Dinas (perangkat Daerah) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya skala usaha (tidak ekonomis/kecil) tidak sesuai biaya produksi ▪ Rendahnya mitigasi terhadap iklim dan perubahan iklim ▪ Belum masifnya kepemilikan alsintan dan penggunaannya sehingga menghambat penurunan biaya produksi

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan Sarana dan Prasarana pada Perangkat Daerah dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ▪ Belum optimalnya pengembangan Agribisnis dari Usaha Peternakan ▪ Belum optimalnya fasilitasi, pelatihan dan pemberdayaan kelompok Petani Ikan Tangkap ataupun Pembudidaya Ikan ▪ Belum populernya penggunaan produk Ikan sebagai bahan perjamuan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya permodalan dan akses permodalan petani dalam Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian ▪ Usaha peternakan masih menjadi sampingan dari petani dengan skala usaha kecil serta lebih pada penggemukan ternak ▪ Rendahnya permodalan dan akses permodalan petani dalam penyediaan sarana dan prasarana pertanian ▪ Rendahnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya masih tradisional ▪ Rendahnya akses permodalan dan pemasaran hasil perikanan budidaya ▪ Menurunnya populasi ikan di perairan umum akibat kondisi perairan umum maupun penangkapan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab ▪ Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat gemar makan Ikan
(3)	Ketahanan Pangan/Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbatasnya pemberdayaan kelompok Lumbung Pangan Masyarakat ▪ Belum seluruh desa membentuk kelompok lumbung pangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya permodalan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat dalam pengadaan sarana prasarana Lumbung Pangan dan pengisiannya, serta ▪ Rendahnya kapasitas anggota kelompok dalam pengelolaan Lumbung Pangan

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum adanya mekanisme untuk melakukan intervensi atau subsidi untuk komoditas yang mengalami kenaikan harga ▪ Terbatasnya pemberdayaan Desa Rawan Pangan ▪ Kurangnya cakupan sasaran penanganan kerawanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya kemauan masyarakat untuk membudidayakan komoditas tertentu yang cenderung mengalami fluktuasi harga ▪ Terbatasnya kemampuan permodalan kelompok afinitas dalam kegiatan ekonomi produktif ▪ Kurangnya kapasitas anggota kelompok dalam pengelolaan bantuan hibah ▪ Kurangnya pengetahuan dalam pola asuh anak balita gizi buruk dan pencegahan stunting
6.	Sosial		
(1)	Sosial/Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang belum melaksanakan Tugas sesuai dengan Tupoksinya ▪ Kurangnya pendanaan untuk sarana dan prasarana dalam memenuhi pelayanan terhadap PPKS yang memadai ▪ Belum optimalnya pemberdayaan terhadap KPM dalam meningkatkan taraf hidup secara ekonomi ▪ Belum optimalnya evaluasi distribusi program nasional seperti PKH, BPNT, PIS, PIP dll ▪ Belum optimalnya evaluasi penerima manfaat PKH (wisuda PKH) ▪ Belum optimalnya operasional rumah singgah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum semua penduduk miskin mendapat bantuan dari pemerintah ▪ Tidak menggunakan keperluan bantuan yang diterima dengan semestinya ▪ Belum semua penduduk miskin mengetahui haknya utk mengajukan permohonan bantuan dari pemerintah ▪

No.	Bidang/Urusan	Determinan Kemiskinan	
		Perangkat Daerah/ Penyedia Layanan (Supply Side)	Penerima Manfaat/ Kelompok Sasaran (Demand Side)
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pengelolaan data DTKS dalam penanggulangan kemiskinan ▪ Belum optimalnya pemanfaatan data DTKS bagi perangkat daerah dalam menetapkan sasaran program ▪ Belum adanya kebijakan daerah dalam penentuan penduduk miskin sesuai dengan kriteria di daerah 	
(2)	Sosial/Adminitrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya jangkauan layanan penduduk non permanen dan rentan adminduk ▪ Belum pernah dilaksanakan Itsbat Nikah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterbatasan ekonomi, mobilitas dan kemampuan penduduk rentan untuk mengurus dokumen kependudukan ke Dinas/UPTD ▪ Rendahnya kesadaran dan kemauan pengurusan Akta Lahir untuk bayi diluar pernikahan dan pemahaman pentingnya dalam akses pelayanan dasar
(3)	Sosial/Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga (PUSPAGA) dalam Konseling, konsultasi, penjangkauan dan sosialisasi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya pemahaman pasangan muda dalam pengasuhan positif ▪ Rendahnya motivasi lansia ▪ Rendahnya pengetahuan remaja tentang kesiapan menikah dan pendidikan sexual sejak dini

Teori perubahan atau logika program (Theory of Change) adalah cara untuk menentukan outcome apa yang ingin diwujudkan dan bagaimana akan dicapai melalui intervensi kebijakan dan program. Alih-alih untuk memproyeksikan outcome dari serangkaian program, logika program membalik proses itu dimana tujuan/sasaran (impact) dirunut ke belakang kepada pra kondisi untuk pencapaiannya, sampai kepada program yang diperlukan untuk menciptakan pra kondisi dimaksud.

Theory of Change dari masing-masing bidang penanggulangan kemiskinan memiliki tujuan (goal/final outcome) yaitu:

1. Bidang Ketenagakerjaan

1) Meningkatnya Pertumbuhan Produktifitas Kerja dan Berusaha, dapat diukur dengan:

- (1) Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
- (2) Pertumbuhan PDRB sektor industry
- (3) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
- (4) Pertumbuhan Wirausaha Baru
- (5) Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil

Meningkatnya pertumbuhan produktifitas kerja dan berusaha dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- (2) Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja;
- (3) Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
- (4) Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS;
- (5) Terlaksananya Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha bagi IKM;
- (6) Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- (7) Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan;
- (8) Terbinanya dan Berkembangnya Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan;

- (9) Terlaksananya Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi;
- (10) Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi;
- (11) Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro;
- (12) Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro; dan
- (13) Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja;
 - (2) Sosialisasi bursa kerja online dan peningkatan kesadaran masyarakat/keluarga dan pencari kerja untuk meningkatkan semangat juang dalam mengakses pekerjaan sampai ketinggian desa, serta pelaksanaan bursa kerja online;
 - (3) Sosialisasi peraturan ketemagakerjaan kepada pimpinan perusahaan secara kontinyu, serta optimalisasi penyelesaian sengketa perburuhan (KKB);
 - (4) Sosialisasi kepada perusahaan Industri tentang pemahaman persyaratan teknis sektor industri melalui aplikasi SIINAS;
 - (5) Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Manajemen Wirausaha bagi IKM;
 - (6) Pendampingan Perijinan Perdagangan secara online;
 - (7) Gerakan Promosi optimalisasi Pasar tradisional;
 - (8) Penetapan Produk Ekspor Unggulan;
 - (9) Digitalisasi Manajemen Koperasi;
 - (10) Bimbingan Teknis Perkoperasian;
 - (11) Kemitraan UMKM; dan
 - (12) Penguatan Kualitas Pengembangan Usaha UMKM.
- 2) Meningkatnya Kualitas Perempuan dan Pemuda, dapat diukur dengan:
- (1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - (2) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
- Meningkatnya kualitas perempuan dan pemuda dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemula Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan;
- (2) Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
- (3) Terlaksananya Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

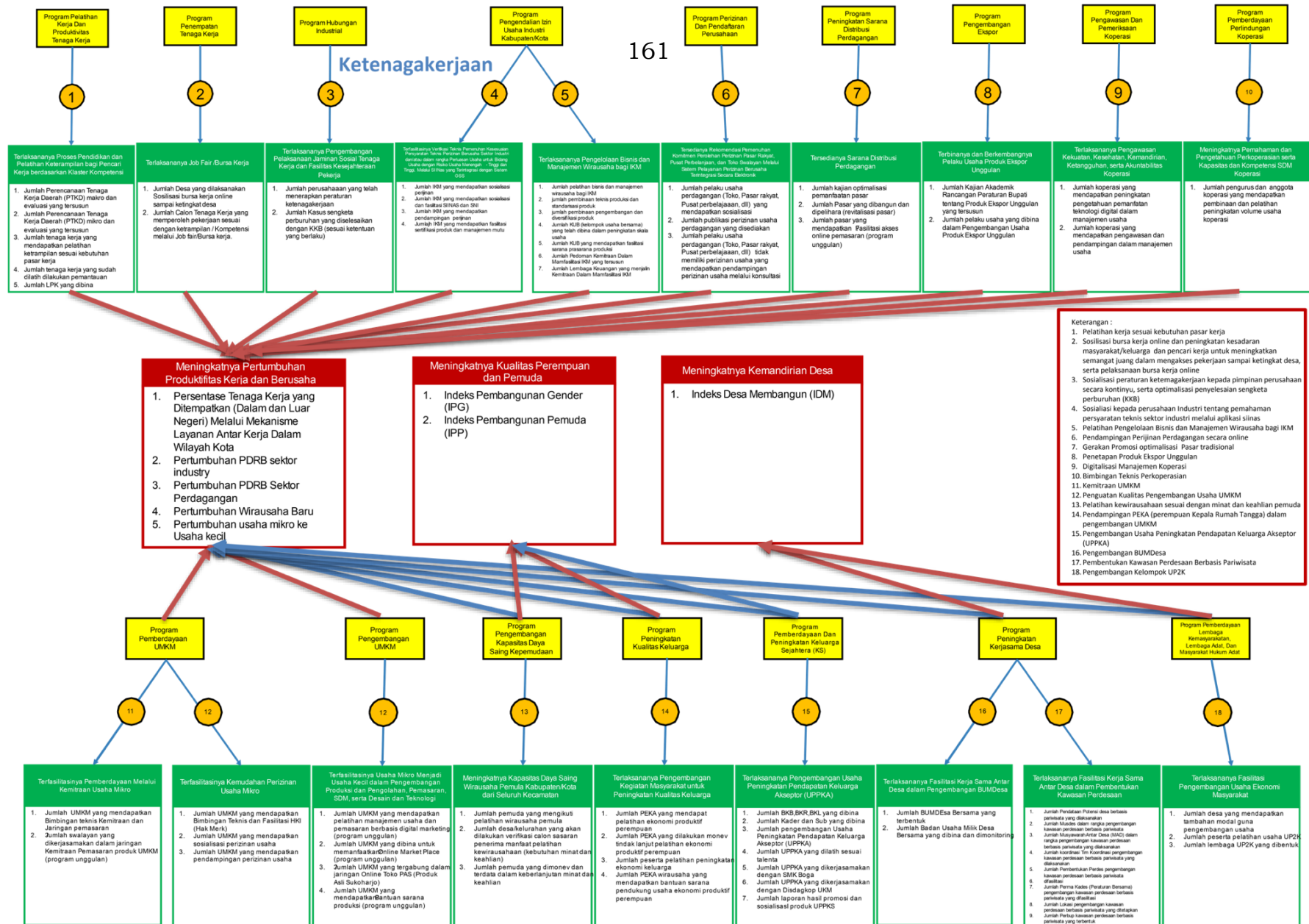
- (1) Pelatihan kewirausahaan sesuai dengan minat dan keahlian pemuda;
 - (2) Pendampingan PEKA (perempuan Kepala Rumah Tangga) dalam pengembangan UMKM; dan
 - (3) Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
- 3) Meningkatkan Kemandirian Desa, dapat diukur dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

Meningkatnya kemandirian desa dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Pengembangan BUMDesa;
- (2) Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Pembentukan Kawasan Perdesaan; dan
- (3) Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Pengembangan BUMDesa;
- (2) Pembentukan Kawasan Perdesaan Berbasis Pariwisata; dan
- (3) Pengembangan Kelompok KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K).



Gambar 3.14 Theory of Change Bidang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

2. Bidang Kesehatan

- 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, dapat diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH).

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Pencegahan Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- (2) Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar;
- (3) Terkelolanya Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Gizi Ibu, Bayi, Balita dan Anak Sekolah Sesuai Standar;
- (4) Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan;
- (5) Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat; dan
- (6) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Pengembangan peran dan kualitas kader masyarakat dan patugas;
- (2) Penguatan dan Pembentukan POSBINDU (dalam pencapaian SPM);
- (3) Peningkatan peran Stakeholder dalam Pelaksanaan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) dan Konvergensi Penanganan Gizi;
- (4) Pembinaan, mapping survei dan menyusun regulasi akreditasi FKTP, FKTU, RS, dan Labkes Pemerintah dan Swasta;
- (5) Pengembangan pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui peran stakeholder; dan
- (6) GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).

- 2) Meningkatnya Pengendalian Penduduk, dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

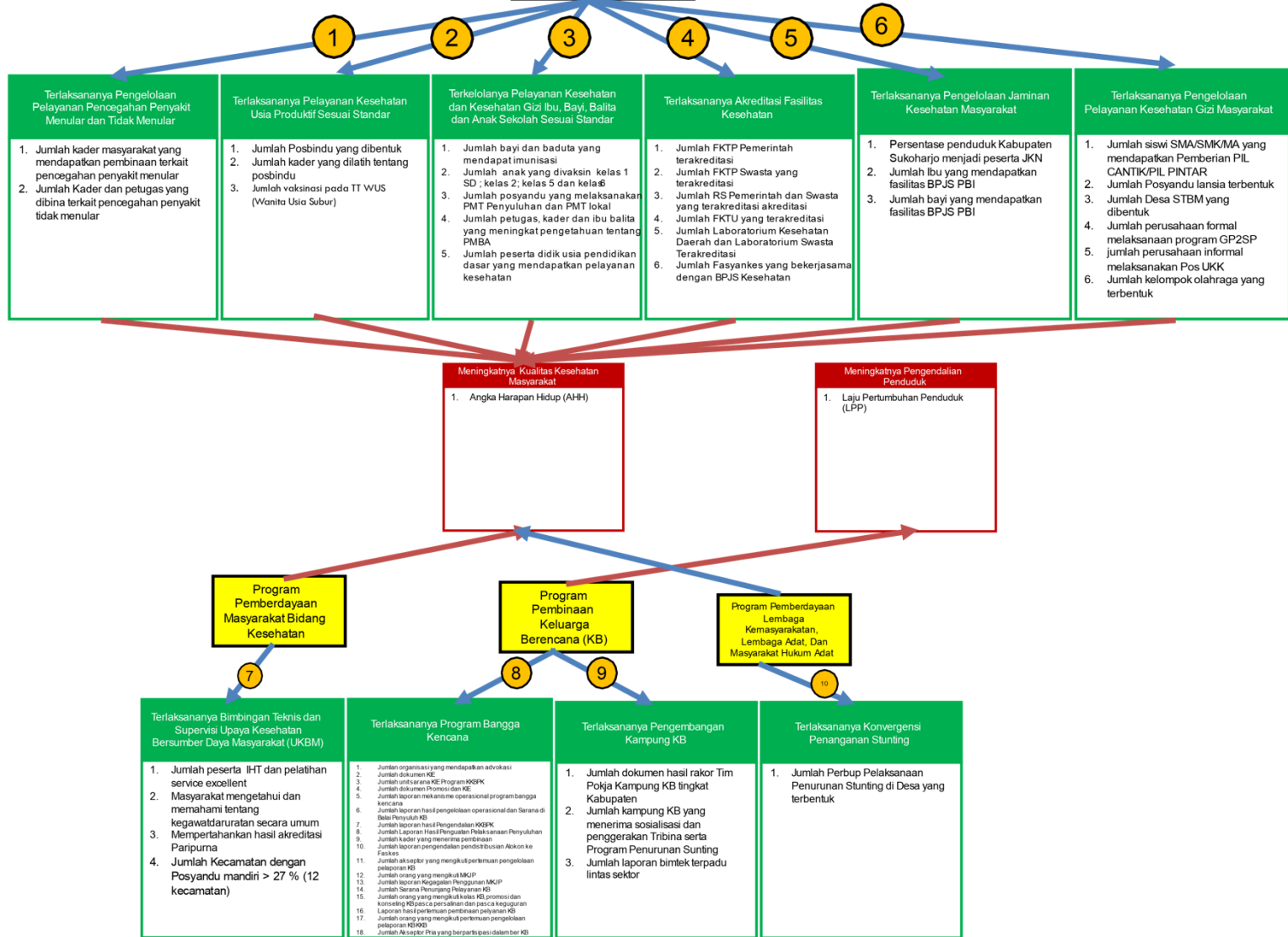
Meningkatnya pengendalian penduduk dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM);
- (2) Terlaksananya Program Bangga Kencana;
- (3) Terlaksananya Pengembangan Kampung KB; dan
- (4) Terlaksananya Konvergensi Penanganan Stunting..

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Pengembangan Kecamatan dengan Posyandu mandiri;
- (2) Program Bangga Kencana;
- (3) Pengembangan Kampung KB; dan
- (4) Komitmen Konvergensi Penanganan Stunting.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota



Keterangan :

1. Pengembangan peran dan kualitas kader masyarakat dan petugas.
2. Penguatan dan Pembentukan POSBINDU (dalam pencapaian SPM).
3. Peningkatan peran Stakeholder dalam Pelaksanaan BIAN (Bulan Imunisasi Anak Nasional) dan Konvergensi Penanganan Gizi.
4. Pembinaan, maring survei dan menyusun regulasi akreditasi FKTP, FKTU, RS, dan Labkes Pemerintah dan Swasta.
5. Pengembangan pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan melalui peran stakeholder.
6. GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat).
7. Pengembangan Kecamatan dengan Posyandu mandiri.
8. Program Bangga Kencana.
9. Pengembangan Kampung KB.
10. Komitmen Konvergensi Penanganan Stunting.

Gambar 3.15 Theory of Change Bidang Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

3. Bidang Pendidikan

1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan, dapat diukur dengan:

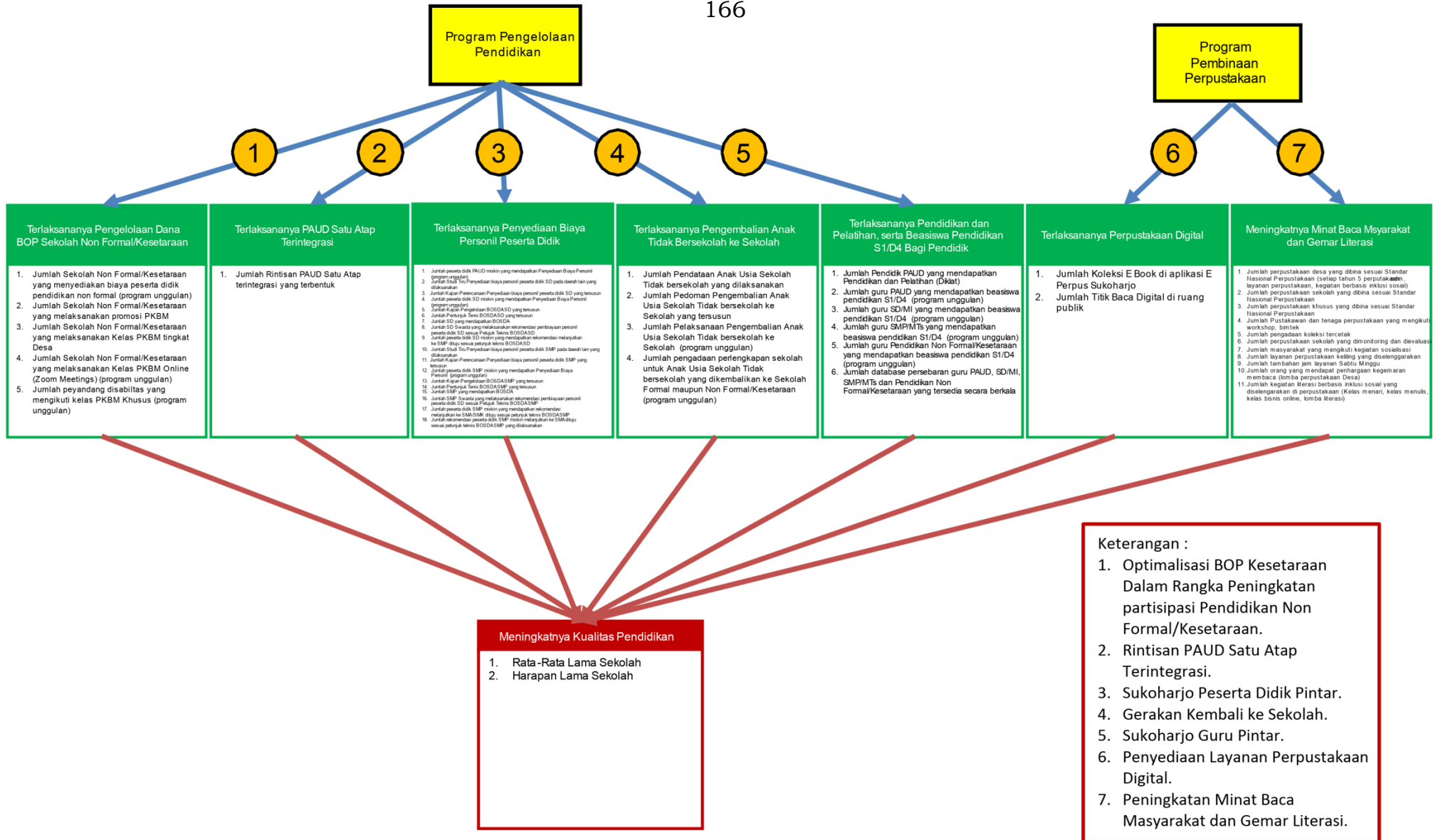
- (1) Rata-Rata Lama Sekolah
- (2) Harapan Lama Sekolah

Meningkatnya kualitas pendidikan dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan;
- (2) Terlaksananya PAUD Satu Atap Terintegrasi;
- (3) Terlaksananya Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik;
- (4) Terlaksananya Pengembalian Anak Tidak Bersekolah ke Sekolah;
- (5) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan, serta Beasiswa Pendidikan S1/D4 Bagi Pendidik;
- (6) Terlaksananya Perpustakaan Digital; dan
- (7) Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Gemar Literasi.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Optimalisasi BOP Kesetaraan Dalam Rangka Peningkatan partisipasi Pendidikan Non Formal/Kesetaraan;
- (2) Rintisan PAUD Satu Atap Terintegrasi;
- (3) Sukoharjo Peserta Didik Pintar;
- (4) Gerakan Kembali ke Sekolah;
- (5) Sukoharjo Guru Pintar;
- (6) Penyediaan Layanan Perpustakaan Digital; dan
- (7) Peningkatan Minat Baca Masyarakat dan Gemar Literasi.



Gambar 3.16 **Theory of Change Bidang Pendidikan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo**

4. Bidang Infrastruktur Dasar

1) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur, dapat diukur dengan:

- (1) Akses Sanitasi yang layak
- (2) Akses air minum yang layak
- (3) Persentase Lingkungan Hunian Layak

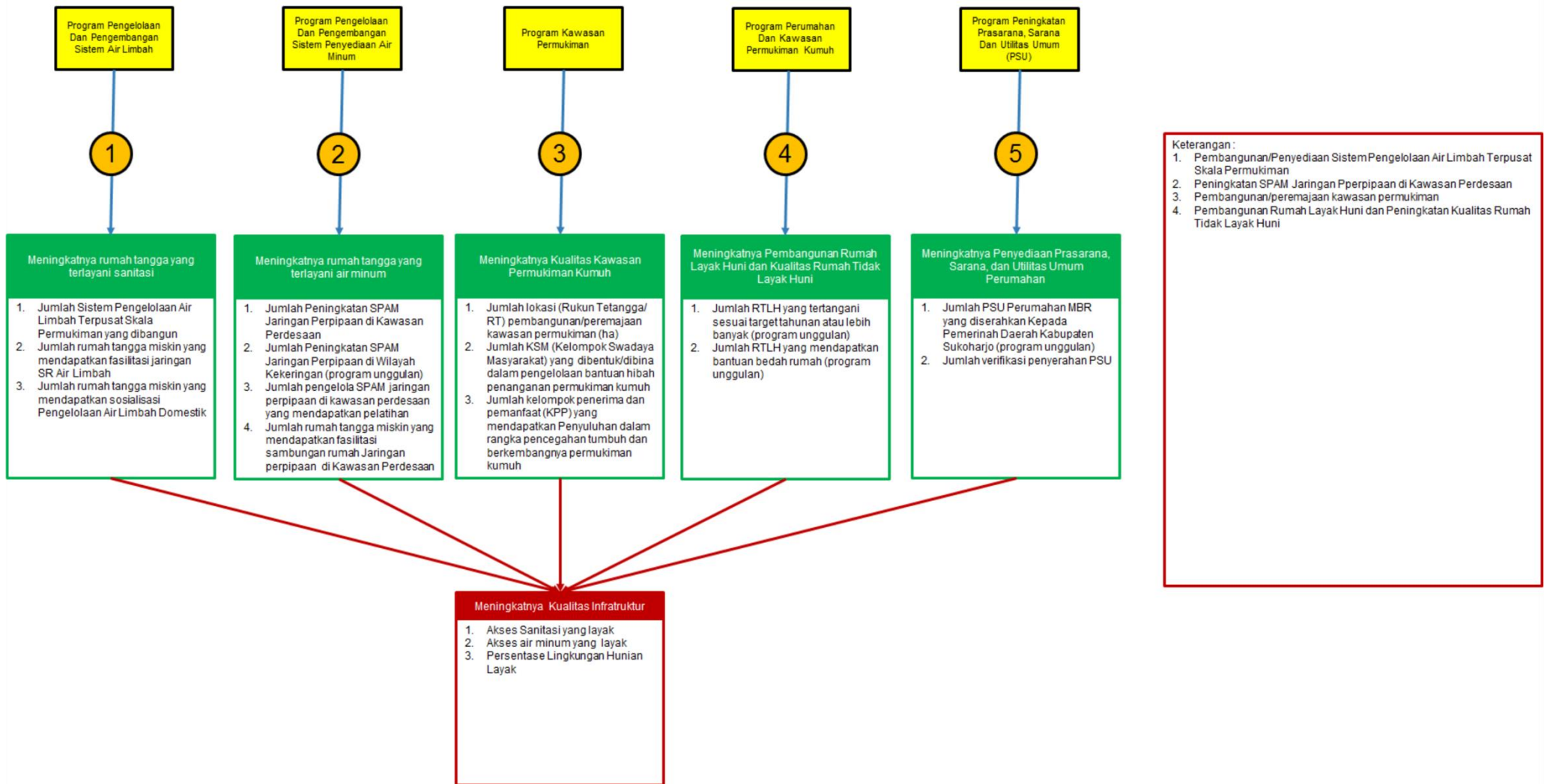
Meningkatnya kualitas infrastruktur dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

- (1) Meningkatnya rumah tangga yang terlayani sanitasi;
- (2) Meningkatnya rumah tangga yang terlayani air minum;
- (3) Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
- (4) Meningkatnya Pembangunan Rumah Layak Huni dan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni; dan
- (5) Meningkatnya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman;
- (2) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
- (3) Pembangunan/Peremajaan Kawasan Permukiman;
- (4) Pembangunan Rumah Layak Huni dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni; dan
- (5) Penyediaan PSU Perumahan.

Infrastruktur Dasar



Gambar 3.17 Theory of Change Bidang Infrastruktur Dasar Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

5. Bidang Ketahanan Pangan

1) Meningkatnya Pengendalian, Pertumbuhan Produktifitas Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan, dapat diukur dengan:

- (1) Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
- (2) Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, dan perikanan
- (3) Skor Pola Pangan Harapan

Meningkatnya pengendalian, pertumbuhan produktifitas ketersediaan dan kebutuhan pangan dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

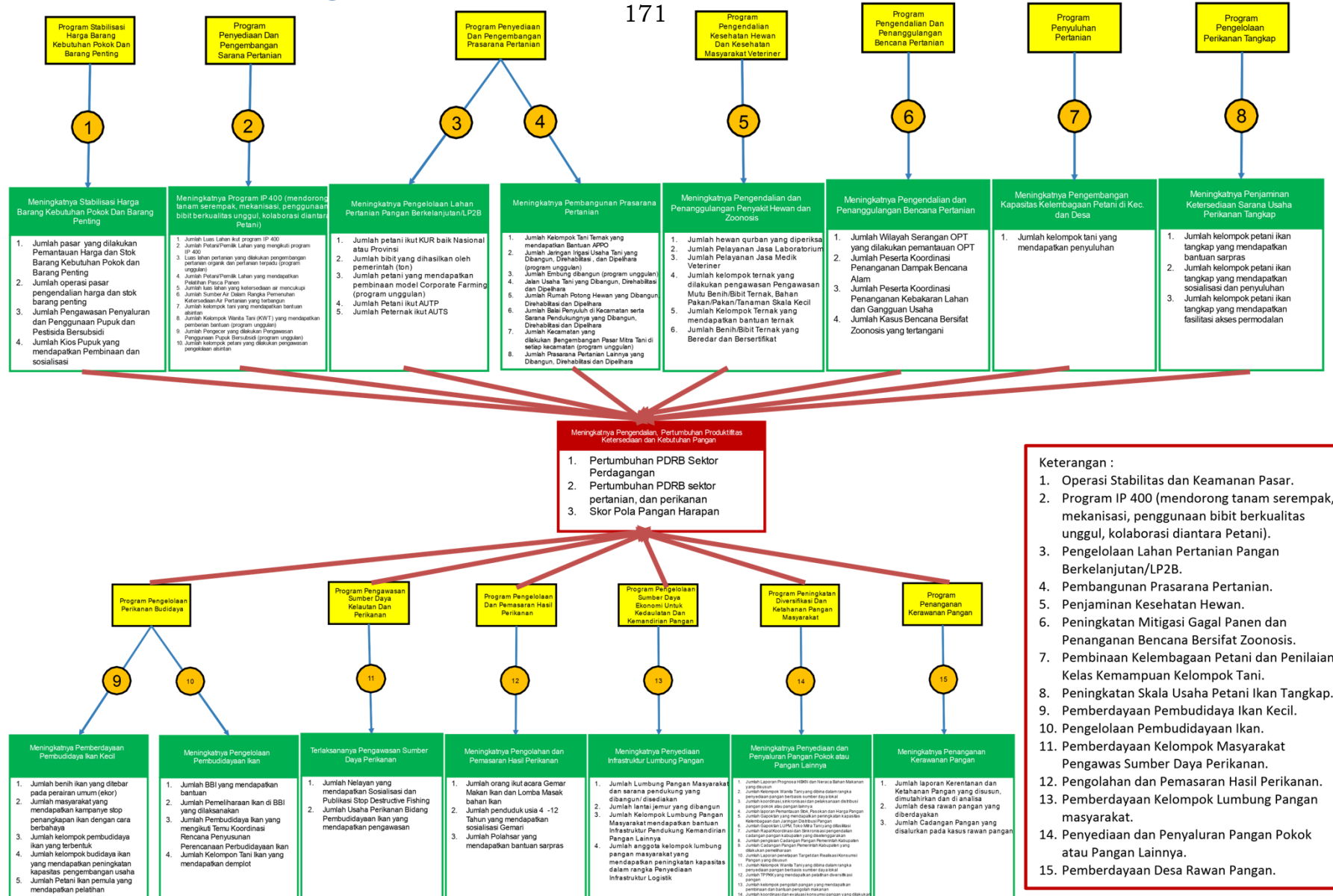
- (1) Meningkatnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
- (2) Meningkatnya Program IP 400 (mendorong tanam serempak, mekanisasi, penggunaan bibit berkualitas unggul, kolaborasi diantara Petani);
- (3) Meningkatnya Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- (4) Meningkatnya Pembangunan Prasarana Pertanian;
- (5) Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis;
- (6) Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- (7) Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec. dan Desa;
- (8) Meningkatnya Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap;
- (9) Meningkatnya Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- (10) Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- (11) Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
- (12) Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (13) Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan;
- (14) Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya; dan
- (15) Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

- (1) Operasi Stabilitas dan Keamanan Pasar;
- (2) Program IP 400 (mendorong tanam serempak, mekanisasi, penggunaan bibit berkualitas unggul, kolaborasi diantara Petani);

- (3) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- (4) Pembangunan Prasarana Pertanian;
- (5) Penjaminan Kesehatan Hewan;
- (6) Peningkatan Mitigasi Gagal Panen dan Penanganan Bencana Bersifat Zoonosis;
- (7) Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani;
- (8) Peningkatan Skala Usaha Petani Ikan Tangkap;
- (9) Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
- (10) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- (11) Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan;
- (12) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- (13) Pemberdayaan Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat;
- (14) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya; dan
- (15) Pemberdayaan Desa Rawan Pangan.

Ketahanan Pangan



Keterangan :

1. Operasi Stabilitas dan Keamanan Pasar.
2. Program IP 400 (mendorong tanam serempak, mekanisasi, penggunaan bibit berkualitas unggul, kolaborasi diantara Petani).
3. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B.
4. Pembangunan Prasarana Pertanian.
5. Penjaminan Kesehatan Hewan.
6. Peningkatan Mitigasi Gagal Panen dan Penanganan Bencana Bersifat Zoonosis.
7. Pembinaan Kelembagaan Petani dan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok Tani.
8. Peningkatan Skala Usaha Petani Ikan Tangkap.
9. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.
10. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.
11. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Sumber Daya Perikanan.
12. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
13. Pemberdayaan Kelompok Lumbung Pangan masyarakat.
14. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya.
15. Pemberdayaan Desa Rawan Pangan.

Gambar 3.18 Theory of Change Bidang Ketahanan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

6. Bidang Sosial

1) Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Status Kesejahteraan Rendah (Desl 1-2), dapat diukur dengan:

(1) Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)

(2) Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)

Meningkatnya kualitas hidup penduduk status kesejahteraan rendah (Desl 1-2) dapat didorong dengan beberapa faktor utama, yaitu:

(1) Meningkatnya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

(2) Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial;

(3) Meningkatnya Pengelolaan Data Fakir Miskin;

(4) Meningkatnya Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar;

(5) Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk Melalui Jemput Bola dan Pelaporan Online;

(6) Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil Melalui Jemput Bola dan Pelaporan Online; dan

(7) Meningkatnya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak.

Langkah operasional (inovasi/aktivitas) untuk mencapai target sasaran, sebagai berikut:

(1) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;

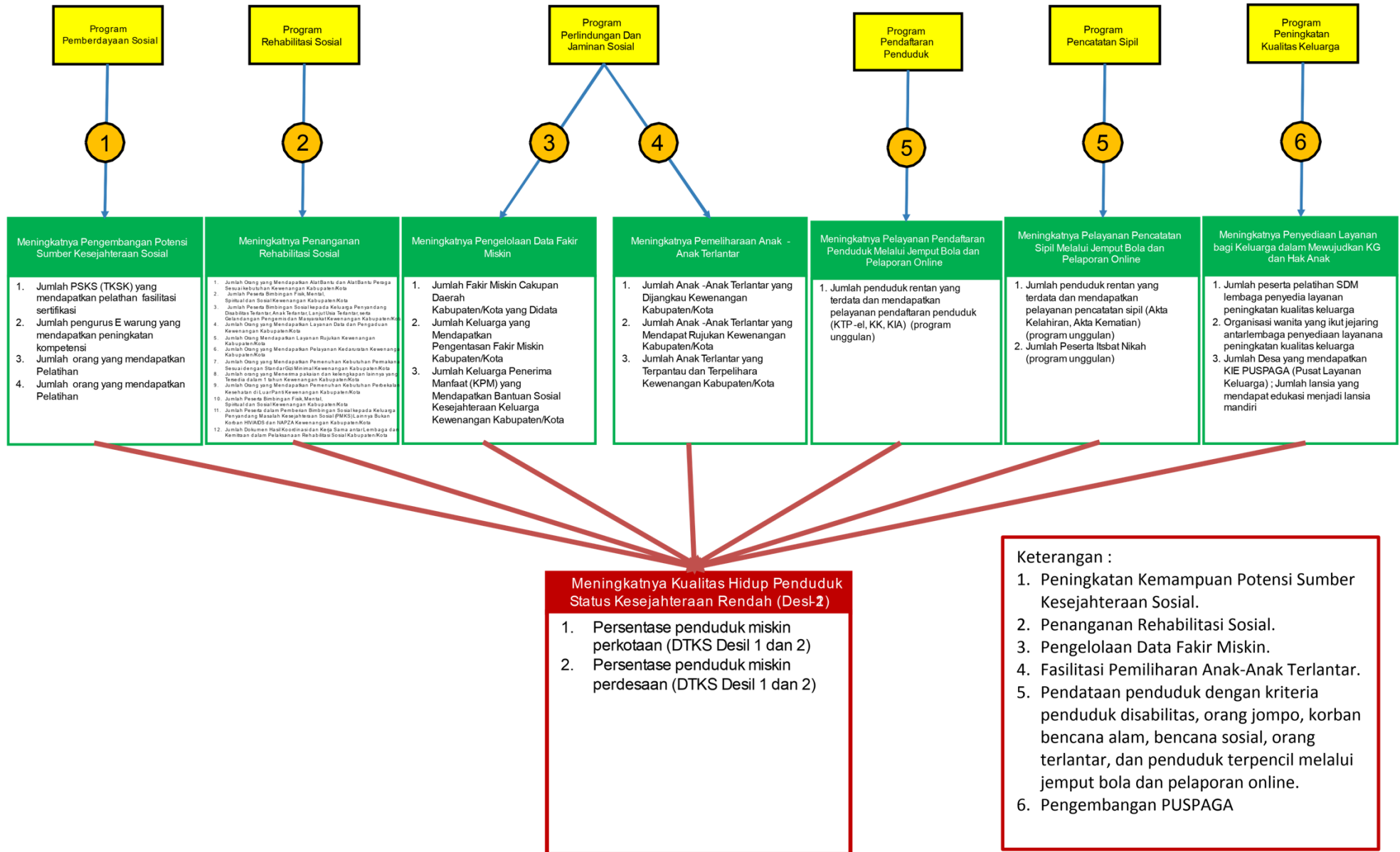
(2) Penanganan Rehabilitasi Sosial;

(3) Pengelolaan Data Fakir Miskin;

(4) Fasilitasi Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar;

(5) Pendataan penduduk dengan kriteria penduduk disabilitas, orang jompo, korban bencana alam, bencana sosial, orang terlantar, dan penduduk terpencil melalui jemput bola dan pelaporan online; dan

(6) Pengembangan PUSPAGA (Pusat Layanan Keluarga).



Gambar 3.19 Theory of Change Bidang Sosial Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

4.1. Perspektif Hukum Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan penanggulangan kemiskinan, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pekerja Sosial;

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Adapun Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang salah satunya ialah persoalan kemiskinan. Praktis bahwa melalui Undang-Undang ini pula secara eksplisit pemerintah bertugas untuk melakukan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19 telah mengatur bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Adapun berdasarkan Pasal 20 Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan hal di atas, terdapat catatan bahwa Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud di atas menjadi tanggung jawab Menteri. Adapun Pemerintah Provinsi belum diatur untuk dilibatkan. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sudah sangat rinci mengatur terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pasal 28 mengatur wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial (yang salah satunya mengatur terkait persoalan kemiskinan) meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan lembaga kesejahteraan sosial nasional;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Selain rincian kewenangan di atas, diatur pula terkait peran masyarakat dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial. Berdasarkan hal tersebut, Pasal 42 ayat (1) menegaskan perlunya Pembentukan lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri di tingkat Provinsi.

Pemerintah Provinsi melalui Pasal 47 juga mempunyai kewenangan untuk melakukan Pendataan terkait lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; Pasal 54 ayat (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing; dan Pasal 55 ayat (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Fakir Miskin.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin ini lahir salah satunya adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang sampai saat ini masih menjadi masalah bersama. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Adapun Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Sasaran penanganan fakir miskin ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat.

Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk:

- a. pengembangan potensi diri;
- b. bantuan pangan dan sandang;
- c. penyediaan pelayanan perumahan;
- d. penyediaan pelayanan kesehatan;
- e. penyediaan pelayanan pendidikan;
- f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- g. bantuan hukum; dan/atau
- h. pelayanan sosial.

Pada Pasal 7 ayat (2) ditegaskan bahwa Penanganan fakir miskin dapat dilakukan melalui:

- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
- b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
- c. jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
- d. kemitraan dan kerja sama antarpemangku kepentingan; dan/atau
- e. koordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, dimana dalam Pasal 41 ayat (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan dan

pengawasan penanganan fakir miskin. Adapun peran serta masyarakat tersebut dilakukan oleh:

- a. badan usaha;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perseorangan;
- d. keluarga;
- e. kelompok;
- f. organisasi sosial;
- g. yayasan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. organisasi profesi; dan/atau
- j. pelaku usaha.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam penanggulangan kemiskinan, daerah diberikan kewenangan untuk menangani kemiskinan dimana hal tersebut merupakan urusan bidang sosial.

Adapun urusan bidang sosial merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana bidang sosial merupakan urusan pemerintahan wajib. Artinya penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab

bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

2. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Pelaksana Pasal 8, 11, 12, 18, 35, 45 dan 50 Undang-Undang Nomor 11 Nomor 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 ini mengatur bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat. Adapun Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:

- a. Kemiskinan;
- b. ketelantaran;
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 3 mengatur bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: Rehabilitasi Sosial; Jaminan Sosial; Pemberdayaan Sosial; dan Perlindungan Sosial. *Pertama*, bahwa berdasarkan Pasal 4, Rehabilitasi Sosial Jaminan Sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. *Kedua*, berdasarkan Pasal 10 Jaminan sosial dimaksudkan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi serta menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. *Ketiga*, berdasarkan Pasal 15 pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. *Keempat* berdasarkan Pasal 28 Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Peraturan Pelaksana Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin).

3. Peraturan Presiden

- 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan muncul didasarkan atas tiga pertimbangan. *Pertama* bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat; *Kedua*, bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan; dan *Ketiga* bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.

Pasal 1 angka (1) menegaskan bahwa Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Adapun berdasarkan Pasal 1 angka (2) ditegaskan bahwa Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Pasal 3 mengatur bahwa Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun berdasarkan Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan jo Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan muncul didasarkan pada dua pertimbangan. Pertama, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Kedua, bahwa dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya-upaya penajaman program perlindungan sosial.

Pasal 2 mengatur bahwa untuk mempercepat program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial yang meliputi: a. Program Simpanan Keluarga Sejahtera; b. Program Indonesia Pintar; dan c. Program Indonesia Sehat. Adapun berdasarkan Pasal 6 diatur bahwa

pendanaan bagi pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah ikut serta dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan.

4. Instruksi Presiden

- 1) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
- 2) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;
- 4) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Dalam pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem membutuhkan sinergitas dan komitmen upaya penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 yang menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas kemiskinan ekstrem, melalui strategi kebijakan yang meliputi: (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

5. Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota .

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota disebutkan dalam Pasal 26 Permendagri ini bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Permendagri No. 53 Tahun 2020 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, mengamanatkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Permendagri ini dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggungjawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, serta dalam melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk TKPK Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota..

TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan RPKD dan rencana aksi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. koordinasi penyusunan rancangan RKPD provinsi dan RPKD Kabupaten/Kota di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;

- f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. harmonisasi penyusunan RPKD antara RPKD Provinsi dan RPKD Kabupaten/Kota; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dalam Pasal 6 hingga pasal Pasal 8, disebutkan susunan keanggotaan TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota yang melibatkan unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Susunan keanggotaan sendiri terdiri atas penanggungjawab, ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, serta kelompok pengelola program meliputi 1) koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; 2) koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan. Termasuk keanggotaan TKPK yang terdiri dari: 1) kepala dan unsur Perangkat Daerah provinsi yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan; 2) perwakilan masyarakat; 3) perwakilan dunia usaha; dan 4) pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam Permendagri No. 53 Tahun 2020 disebutkan dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 bahwa dalam membantu pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Sekretariat TKPK Provinsi berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.

Susunan keanggotaan Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota, terdiri dari kepala, wakil kepala dan anggota meliputi 1) kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan 2. unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan. Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;

- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

Tata kerja TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan dan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah berkoordinasi dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Agenda kerja tahunan dimaksud memuat rencana kerja penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan melalui rapat koordinasi TKPK Provinsi atau TKPK Kabupaten/Kota yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh Ketua TKPK Provinsi dan Ketua TKPK Kabupaten/Kota.

Penyelarasan kerja antara TNP2K, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 hingga Pasal 21. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui strategi dan program. Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- a. pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan dengan Sasaran penerima manfaat berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan. Program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Permendagri No. 53 Tahun 2020, pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui direktur jenderal yang membidangi bina pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur melalui Wakil Gubernur. Pembinaan sebagaimana dimaksud dibebankan pada APBN dan APBD Provinsi dilakukan melalui pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam hal pelaporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 bahwa Gubernur melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi kepada Wakil Presiden melalui Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- 2) Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kepmenko PMK ini telah menetapkan lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, diperluas dari 35 kabupaten menjadi 212 kabupaten/kota pada tahun 2022 dan selanjutnya tahun 2023 diperluas lagi sebanyak 302 kabupaten/kota sehingga mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023-2024. Lokasi prioritas ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Dimana Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional

Secara nasional, kebijakan penurunan angka kemiskinan dapat dilihat dari perencanaan jangka panjang nasional dan pejabarannya dalam perencanaan jangka menengah yang bersifat lima tahunan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPNas) yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPNas) 2005-2025, bahwa visi pembangunan nasional untuk 20 tahun ke depan adalah :

“Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, ditetapkan melalui penjabaran 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Melalui misi kelima yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, arah pembangunan baik pusat dan daerah ditujukan dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Konteks mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan ini dalam rangka peningkatan kesejahteraan secara merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan pemerataan pembangunan secara merata dan berkeadilan adalah:

1. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
4. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Untuk mencapai tingkat pemerataan dan berkeadilan dalam pembangunan, arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
2. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem nomor induk kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
4. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan bersama sistem perlindungan sosial nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan dan pendanaan serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas. secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat luas.
5. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan

perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.

6. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (1) peningkatan kualitas pengelolaan aset (asset management) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (2) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (3) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (4) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin
7. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Sejalan dengan proses demokratisasi, pemenuhan hak dasar rakyat diarahkan pada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mewujudkan hak-hak dasar rakyat. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada peningkatan mutu penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Tahapan perencanaan pembangunan dalam RPJP Nasional terbagi atas 4 tahapan perencanaan jangka menengah atau yang biasa disebut RPJM, terdiri dari RPJM ke-1 untuk periode 2005 – 2009, RPJM ke-2 untuk periode 2010 – 2014, RPJM ke-3 periode 2015-2019 dan RPJM ke-4 untuk periode 2020 – 2024.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya

struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu strategi dalam arahan pembangunan SDM melalui strategi layanan dasar dan perlindungan sosial. Strategi layanan dasar dan perlindungan sosial dalam RPJMN 2020-2024, sebagai berikut:

1. Tata Kelola Kependudukan

2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda.



PEMBANGUNAN SDM

STRATEGI



LAYANAN DASAR DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1. Tata Kelola Kependudukan
2. Perlindungan Sosial
3. Kesehatan
4. Pendidikan
5. Pengentasan Kemiskinan
6. Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda



PRODUKTIVITAS

1. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
2. Pendidikan Tinggi
3. Iptek dan Inovasi
4. Prestasi Olahraga



PEMBANGUNAN KARAKTER

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
3. Moderasi Beragama
4. Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas



HIGHLIGHT SASARAN 2024

- 100% penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian
- 98% penduduk mendapatkan perlindungan sosial
- 183 per 100.000 kelahiran hidup angka kematian ibu
- 9,18 tahun rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 40% rumah tangga miskin dan rentan memiliki aset produktif
- Indeks Perlindungan Anak: 73,49
- Indeks Pembangunan Pemuda: 57,67

- Indeks Pembangunan Gender (IPG): 91,39
- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG): 74,18
- 49,8% Angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas
- 66,7% lulusan Perguruan Tinggi langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan
- 40% hasil inovasi Prioritas Riset Nasional
- 3 Medali Emas baik *Olympic Games* maupun *Paralympic Games* tahun 2024
- 50% pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi

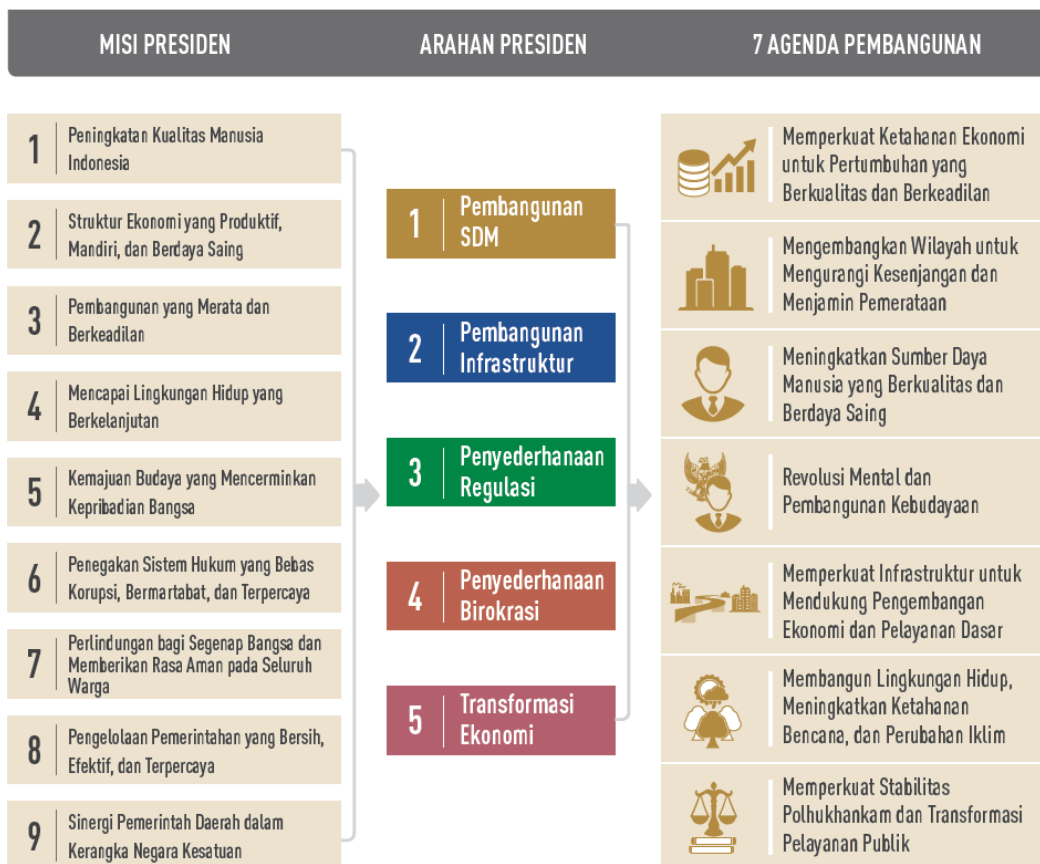
- Indeks Capaian Revolusi Mental: 74,3
- Indeks Pembangunan Kebudayaan: 62,7
- Indeks Pembangunan Masyarakat : 0,65
- Indeks Kerukunan Umat Beragama: 75,8
- Nilai Budaya Literasi: 71,0
- Indeks Pembangunan Keluarga: 61,0
- Median usia kawin pertama perempuan: 22,1

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

RPJPN 2005 – 2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020–2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.

VISI PRESIDEN

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong*



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Pengentasan kemiskinan merupakan agenda ke 3, yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Dalam sasaran makro pembangunan 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, pada tahun 2024 tingkat kemiskinan diharapkan menurun 6,0-7,0%. Tentunya dalam pencapaian tingkat kemiskinan secara Nasional tersebut, membutuhkan sinergitas dan komitmen upaya penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota



Keterangan: Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024

Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Kebijakan nasional lainnya terkait penanggulangan kemiskinan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDGs). SDGs disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. SDGs ditetapkan pada 25 September 2015 dan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan global dengan 169 (seratus enam puluh sembilan) target yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Pada mulanya, konsep SDGs diusulkan oleh Kolombia dalam government retreat yang diadakan oleh Indonesia pada Juli 2011 di Solo sebagai persiapan konferensi Rio+20. Usulan ini kemudian dibawa oleh Departemen Informasi Publik PBB pada 64th NGOs Conference pada September 2011 dan menghasilkan 17 usulan tujuan berkelanjutan serta target-target terkait. Usulan ini juga banyak didiskusikan pada konferensi Rio+20, hingga menghasilkan suatu resolusi yang dikenal dengan nama "The Future We Want". Disepakati pula dalam konferensi bahwa pembentukan SDGs harus berorientasi pada tindakan, ringkas dan mudah dikomunikasikan, serta dapat diaplikasikan secara universal oleh berbagai negara dengan mempertimbangkan kapasitas,

tingkat pembangunan, serta menghormati kebijakan dan prioritas setiap negara.

Pada 19 Juli 2014, Grup Kerja Terbuka (Open Working Group, OWG) PBB meneruskan usulan SDGs kepada Majelis Umum PBB. Usulan tersebut terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang menjangkau isu-isu pembangunan berkelanjutan secara luas. Pada 5 Desember 2014, Majelis Umum PBB menerima usulan OWG sebagai dasar untuk membentuk agenda pasca-MDGs. Negosiasi dengan pemerintah berbagai negara dimulai pada Januari 2015 dan berakhir pada Agustus 2015. Setelah negosiasi, usulan diadopsi ke dalam UN Sustainable Development Summit pada 25 – 27 September 2015 yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat.

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah komitmen global dan nasional pengganti Millennium Development Goals (MDGs) yang telah berakhir pada tahun 2015. SDGs telah disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

SDGs merupakan pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Didalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) terdapat 17 tujuan sebagai upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang mencakup: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Adapun empat pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs di Indonesia yaitu:

- (1) Pilar Pembangunan Sosial mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5.
- (2) Pilar Pembangunan Ekonomi yang mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17.
- (3) Pilar Pembangunan Lingkungan yang mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.
- (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola yaitu untuk Tujuan 16.

SDGs Inonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan, yang mencakup tujuan (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; dan (5) Kesetaraan Gender sangat erat kaitannya dengan pencapaian pembangunan dalam bidang penanggulangan kemiskinan.

- Tujuan (1) Tanpa Kemiskinan berbicara tentang meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Tujuan 1 menggunakan berbagai sudut pandang untuk menggambarkan kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat, dan memberikan sumber daya dan pelayanan untuk membantu membebaskan mereka dari kemiskinan secara tepat sasaran.
- Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai mitra utama untuk mencapai tujuan 1 terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi.

- Pemerintah Daerah dapat memainkan peran penting untuk mengentaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pengembangan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana.

Tujuan (2) Tanpa Kelaparan berbicara tentang menjamin bahwa semua orang dapat menikmati makanan yang aman dan bernutrisi sepanjang tahun.

- Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah daerah di Kawasan perdesaan, khususnya lahan dan air, menyokong ketahanan pangan untuk wilayah sekitarnya kemiskinan, dan karenanya membutuhkan berbagai tanggapan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah dapat mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal.
- Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi.
- Pemerintah daerah dapat menggunakan sekolah dan layanan kesehatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi malnutrisi pada anak.
- Pemerintah daerah kawasan perdesaan dapat mengelola sumber daya kolektif dan memperbaiki kepemilikan tanah agar mampu melindungi hak-hak kelompok masyarakat miskin.

Tujuan (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera berbicara tentang membantu masyarakat untuk hidup sehat dan panjang umur.

- Penyediaan air bersih dan sanitasi yang difasilitasi Pemerintah Daerah sangat penting untuk mengurangi angka kematian ibu, anak, dan bayi. Pemerintah daerah di kawasan perkotaan khususnya harus waspada terhadap tingkat kematian anak yang tidak kian menurun. Pemerintah daerah dapat menangani permasalahan ini melalui program perbaikan permukiman kumuh dan dengan meningkatkan akses masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan dasar.
- HIV/AIDS semakin dipahami sebagai sebuah permasalahan pemerintahan daerah. Kawasan perkotaan seringkali bertindak sebagai penghubung penyebaran HIV/AIDS karena kepadatan penduduknya yang tinggi, pusat sarana transportasi dan besarnya keberadaan kelompok rentan. Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat,

membiasakan kegiatan terkait HIV/AIDS di seluruh departemen, serta mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan. Telah banyak pula pemerintah daerah yang menyediakan pendidikan, informasi, dan layanan untuk mencegah HIV/AIDS.

- Pemerintah daerah dapat menggunakan perencanaan kota dan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara, menelihara gaya hidup sehat dan mencegah kematian akibat kecelakaan lalu lintas.
- Pemerintah daerah dapat berkontribusi kepada pengurangan angka kematian akibat polusi air dan tanah melalui manajemen sumber daya alam yang efektif dan perlindungan terhadap lingkungan.

Tujuan (4) Pendidikan Berkualitas berbicara tentang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga.

- Pendidikan, khususnya pada tingkat dasar, merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah di banyak negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membantu pencapaian tujuan 4.
- Pemerintah daerah berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dialami masyarakat untuk bersekolah.
- Pemerintah daerah dapat memadukan program pelatihan teknis dan kejuruan ke dalam strategi pengembangan ekonomi lokal, memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan peluang kerja.
- Kedudukan yang dimiliki pemerintah daerah secara khusus memungkinkan untuk menjangkau individu dan masyarakat yang rentan dan termarginalisasi serta memastikan bahwa mereka memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan.

Tujuan (5) Kesetaraan Gender berbicara tentang mengakhiri kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan memiliki kesempatan, peran dan partisipasi yang sama dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan.

- Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai contoh bagi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui penyediaan pelayanan yang tidak mendiskriminasi penduduknya dan praktik kerja yang adil.
- Pemerintah daerah berada pada garis terdepan dalam mengidentifikasi dan menangani kekerasan dan perilaku yang membahayakan perempuan. Perencanaan kota (khususnya melalui pengadaan dan pengelolaan ruang terbuka publik) dan kebijakan daerah merupakan alat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Pemerintah daerah memiliki peran yang harus dipenuhi dalam penyediaan layanan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.

- Pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi hambatan bagi perempuan dalam memperoleh kepemilikan dan hak guna lahan.
- Meningkatkan peran perempuan dalam pemerintahan daerah merupakan prioritas utama dalam memberdayakan perempuan, selain memenuhi hak perempuan pada hakikatnya, juga karena pemerintah daerah seringkali merupakan langkah awal menuju jenjang karir yang lebih tinggi. Keberadaan perempuan sebagai pemimpin dalam pemerintahan daerah dapat mematahkan stereotype gender dan menginspirasi anak-anak perempuan lainnya.
- Pemerintah daerah dapat mengupayakan kesetaraan gender dalam seluruh bidang pekerjaannya untuk menangkal berbagai hambatan dalam pemberdayaan perempuan.

Pemerintah telah menetapkan pengurangan kemiskinan ekstrem sebagai agenda prioritas tahun 2021-2024, target pengurangan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada tahun 2024. Hal tersebut merupakan arahan Presiden pada Rapat Terbatas Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan pada 4 Maret 2020 dan Rapat Terbatas Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem pada 21 Juli 2021. Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem atau setara dengan 1,9 dolar Amerika PPP (purchasing power parity) per hari. Tingkat kemiskinan ekstrem secara Nasional tahun 2021 sebesar 4 persen. Pengurangan kemiskinan diperlukan pendekatan multi-interventions, karena kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi, multi-interventions diarahkan ke wilayah kantong kemiskinan.

Dalam pencapaian pengurangan kemiskinan ekstrem membutuhkan sinergitas dan komitmen upaya penanggulangan kemiskinan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program dengan melibatkan peran serta masyarakat yang difokuskan pada lokasi prioritas kemiskinan ekstrem, melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Pelaksanaan strategi kebijakan pengurangan beban pengeluaran masyarakat, Pemerintah Daerah perlu memastikan pelaksanaan dan penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan tepat sasaran (penerima manfaat), tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas[6]. Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan APBD dalam pelaksanaan strategi

tersebut, mengingat sebagian kelompok sasaran belum termasuk kuota APBN.

Kelompok Usia	Langsung		Tidak Langsung
Anak (Usia Dini dan Usia Sekolah)	PKH, PIP, PBI Jamsos Kesehatan	Sembako dan Subsidi Energi (Listrik dan LPG)	Posyandu, Puskemas, BOS, Fasilitas Sekolah, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
Usia Produktif	PBI Jamsos Kesehatan dan Jamsos Ketenagakerjaan*		Puskesmas
Lansia	Bansos Lansia* PBI Jamsos Kesehatan		Bantu LU/Atensi LKS Puskesmas
Penyandang Disabilitas	Bansos Penyandang Disabilitas* PBI Jamsos Kesehatan		ASPD/Atensi Puskesmas

Sumber: TNP2K, Materi Paparan Rakor Jawa Tengah "Prinsip, Strategi, Sasaran, Pemantauan Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan", 6 Juli 2022

Pelaksanaan strategi kebijakan peningkatan pendapatan masyarakat dengan jenis intervensi berupa (1) peningkatan akses pekerjaan; (2) peningkatan produktivitas/kapasitas ekonomi; dan (3) penguatan sarana/prasarana dan peningkatan ekosistem. Kelompok sasaran dari strategi ini, yaitu individu, keluarga/rumah tangga, dan kelompok/komunitas.

Jenis Intervensi	Masyarakat Miskin Ekstrem		
	Individu	Keluarga/Rumah Tangga	Kelompok/Komunitas
Peningkatan Akses Pekerjaan	1. Padat karya desa 2. Padat karya sektoral	1. Transfer aset produktif	1. Transfer aset produktif
Peningkatan Produktivitas/ Kapasitas Ekonomi	1. Pelatihan 2. Pendampingan 3. Peningkatan akses modal	1. Peningkatan akses pasar	1. Pelatihan 2. Pendampingan 3. Peningkatan akses modal 4. Peningkatan akses pasar
Penguatan Sarana/ Prasarana dan Peningkatan Ekosistem	1. Infrastruktur pendukung	1. Infrastruktur pendukung	1. Infrastruktur pendukung 2. Penguatan lembaga penunjang ekonomi rakyat 3. Koordinasi kelembagaan

Sumber: TNP2K, Materi Paparan Rakor Jawa Tengah "Prinsip, Strategi, Sasaran, Pemantauan Dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan", 6 Juli 2022

Pelaksanaan strategi kebijakan Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan jenis intervensi[6], yaitu (1) Meningkatkan akses terhadap layanan dasar; (2) Meningkatkan konektivitas antar wilayah; (3) Mendorong konvergensi anggaran; (4) Mendorong konsolidasi program; (5) Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan; dan (6) Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting).

Lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024. Lokasi prioritas ini diperluas dari 35 kabupaten menjadi 212 kabupaten/kota pada tahun 2022 dan selanjutnya tahun 2023 diperluas lagi sebanyak 302 kabupaten/kota sehingga mencakup seluruh kabupaten/kota pada tahun 2023-2024. Dimana Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023-2024. Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 mencapai 1,76 persen.

4.3. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah

Dalam dokumen RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2025 adalah mewujudkan daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan sasaran pokok yang ingin dicapai adalah sebagai berikut 1) Terwujudnya sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya 2) Terwujudnya perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan. 3). Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga pelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan 4). Terwujudnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah, 5).Terwujudnya kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta keadilan dan kesetaraan gender.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dalam RPJMD 2018-2023 secara jelas tertuang dalam misi ke 3 yaitu

“Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”. Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

- 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan
- 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan.

Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan ini adalah:

- 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah;
- 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan
- 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

Target penurunan angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RPJMD 2018-2023, pada akhir periode ditargetkan menjadi sebesar 7,48% hingga 6,48%, seperti terlihat pada gambar tabel sebagai berikut:

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,64 ¹⁾	2,64 ¹⁾	2,76	2,88	3,00	3,12	3,24	3,24
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	75,94	80,18	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,66	3,43	3,45	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	na	na	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	29,00
			Indeks Sistem Merit	Angka	na	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		Angka Kemiskinan	%	12,23	11,19	10,57-9,57	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	7,48-6,48

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal V-11

Gambar 4.1 Target Penurunan Angka Kemiskinan di Jawa Tengah (RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023)

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2018 merupakan penurunan tertinggi selama kurun waktu lima tahun, bahkan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penurunan ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun tidak tumbuh tinggi sebagaimana provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk itu, pembangunan ekonomi Jawa Tengah lima tahun kedepan juga didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas. Artinya bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk semakin banyak melibatkan masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas kontribusi mereka. Kapabilitas individual ataupun kelompok masyarakat akan semakin meningkat dan merata secara bersama-sama sehingga akan mempersempit kesenjangan antar pelaku ekonomi. Disisi lain, pembangunan ekonomi ke depan juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.

Dengan pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif, diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dan gotong royong dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian Tujuan kesatu Misi 3 adalah menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran meliputi: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan 2) menurunnya pengangguran terbuka. Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya.
- b. Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi masyarakat).
- c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan.
- d. Menurunkan pengangguran.

Tujuan kedua misi ketiga adalah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.
- b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan.
- c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu.
- d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan.
- e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah.
- f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local based community) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah.
- g. Perbaiki iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan.

Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Pengembangan wilayah Subosukawonosraten untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,45% sampai dengan 6,80%, Angka Kemiskinan pada kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,05% sampai dengan 4,40% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. WP Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Secara detail sasaran kemiskinan WP Subosukawonosraten dapat dilihat pada Gambar Tabel berikut.

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Boyolali	8.39 - 9.39	7.75 - 8.75	7.10 - 8.10	6.45 - 7.45	5.81 - 6.81
2	Sukoharjo	5.91 - 6.91	5.42 - 6.42	4.93 - 5.93	4.43 - 5.43	3.94 - 4.94
3	Karanganyar	8.29 - 9.29	7.58 - 8.58	6.87 - 7.87	6.15 - 7.15	5.44 - 6.44
4	Wonogiri	10,35 - 11,35	9,95 - 10,95	9,55 - 10,55	9,15 - 10,15	8,75 - 9,75
5	Sragen	11.55 - 12.55	10.99 - 11.99	10.43 - 11.43	9.87 - 10.87	9.30 - 10.30
6	Klaten	11.44 - 12.44	10.91 - 11.91	10.38 - 11.38	9.86 - 10.86	9.33 - 10.33
7	Kota Surakarta	7.55 - 8.55	7.02 - 8.02	6.49 - 7.49	5.95 - 6.95	5.42 - 6.42

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, hal VII-17

Gambar 4.2 Sasaran Kemiskinan WP Subosukowonosraten Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023

4.4. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah “Sukoharjo Yang Maju, Adil, dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui 5 misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius;
2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat;
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan dari masing-masing misi pada tahap rencana pembangunan lima tahunan keempat, diarahkan pada:

1. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia penggerak pembangunan yang produktif, cerdas, sehat, berbudaya dan religius.
2. Mewujudkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan daerah dan pemanfaatan sumber daya alam dalam konsteks pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang didukung kelengkapan sarana dan prasarana penunjang aktifitas sosial ekonomi masyarakat.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) didukung oleh aparatur Pemerintah Daerah yang profesional bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
5. Mewujudkan kondisi daerah yang aman, damai, tertib dan tenteram melalui penegakan supremasi hukum dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu: “Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”. Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020. Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. MAKMUR juga

merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas
3. Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Dari misi pembangunan lima tahun yang akan datang, perwujudan kebijakan dibidang penanggulangan kemiskinan tercermin pada misi ke 2 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas”. Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera. Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

Tujuan utama dalam pembangunan misi ini adalah Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter, dengan indikator kinerja tujuan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, yaitu Angka Kemiskinan. Sasaran dari tujuan utama dalam rangka penanggulangan kemiskinan, adalah Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin, dengan indikator sasaran, yaitu:

1. Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)
2. Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)

Dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, target penurunan angka kemiskinan ditetapkan hingga akhir periode RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 menjadi sebesar 7,0-6,8%%, secara rinci dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Target Capaian					Target Akhir Periode
		2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan: Terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Indikator tujuan: Angka Kemiskinan (%)	8,2-7,6	7,9-7,5	7,6-7,4	7,3-7,1	7,0-6,8	7,0-6,8
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin	Indikator sasaran: Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2) (%)	4,20	4,15	4,10	4,05	4,00	4,00
	Indikator sasaran: Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2) (%)	2,85	2,80	2,75	2,70	2,65	2,65

Strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas hidup penduduk miskin adalah:

Tabel 4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Penduduk Miskin Dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
<p>1. Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan digitalisasi dan integrasi penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi bantuan; b. peningkatan sinergi basis data terpadu (BDT) kesejahteraan sosial dengan data dasar kependudukan serta basis data program bantuan sosial lainnya; dan c. peningkatan peran Pemda dalam pendampingan dan penyaluran bantuan. 	<p>Percepatan Pengurangan Kemiskinan</p> <p>Terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih</p>
<p>2. Perlindungan sosial adaptif, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan resiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim dan bencana alam; b. penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko sosial dan ekonomi akibat perubahan iklim dan bencana alam. 	

<p>3. Peningkatan kesejahteraan sosial, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing terintegrasi dan holistik; pembangunan masyarakat, lingkungan, dan sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas; penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan; pemberdayaan kelanjutusiaan bagi lanjut usia, pengembangan pendidikan dan keterampilan sepanjang hayat bagi lanjut usia; dan penguatan pelayanan sosial bagi kelompok rentan 	<p>produktif dan berdaya secara ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat menjadi kelompok ekonomi menengah.</p>
<p>4. Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu, mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> peningkatan peran dan kapasitas pendamping masyarakat; peningkatan pengetahuan, pemahaman mengenai pendidikan anak, kesehatan dan gizi serta pengelolaan keuangan bagi keluarga; dan penguatan mekanisme pengaduan, pendataan dan layanan terpadu. 	

4.5. Tinjauan APBD Untuk Penanggulangan Kemiskinan

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Gambaran mengenai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021, disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017–2021

Kode	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan	2.055.571.033.667,00	2.055.517.964.074,00	2.143.687.569.516,00	2.040.394.761.328,00	2.119.543.415.538,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	464.567.409.857,00	433.485.481.219,00	458.742.223.869,00	469.540.567.890,00	528.264.139.902,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	221.901.158.399,00	235.894.522.749,00	262.419.139.461,00	235.186.691.560,00	234.425.731.615,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22.340.480.906,00	23.045.710.072,00	19.063.457.759,00	16.773.376.084,00	18.274.725.507,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	15.495.303.717,00	20.894.425.195,00	22.647.818.941,00	33.756.900.228,00	34.782.214.740,00
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	204.830.466.835,00	153.650.823.203,00	154.611.807.708,00	183.822.600.018,00	240.781.468.040,00
1.2	Dana Perimbangan	1.217.877.693.551,00	1.219.811.099.454,00	1.241.762.236.865,00	1.163.627.289.398,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0	0	17.113.151.303,00	39.941.956.429,00	46.484.759.001,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum / Dana Transfer Umum	939.544.746.129,00	932.923.827.592,00	946.104.486.000,00	859.146.406.000,00	847.875.034.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus / Dana Transfer Khusus	278.332.947.422,00	286.887.271.862,00	278.544.599.562,00	264.538.926.969,00	254.562.284.322,00

Kode	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	373.125.930.259,00	402.221.383.401,00	443.183.108.782,00	407.226.904.040,00	70.751.650.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	10.028.344.700,00	75.882.026.633,00	72.448.960.000,00	74.920.940.000,00	2.997.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	152.241.844.678,00	152.732.310.427,00	167.900.983.786,00	133.988.064.440,00	172.597.941.561,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	123.576.433.000,00	126.076.256.000,00	43.339.923.000,00	52.189.671.000,00	148.043.106.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	31.934.457.881,00	11.780.790.341,00	12.830.754.996,00	1.154.709.000,00	2.319.045.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0	0	146.662.487.000,00	144.973.519.600,00	67.754.650.000,00
1.3.7	Dana Insentif Daerah (DID)	55.344.850.000,00	35.750.000.000,00	0	0	46.509.519.000,00

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Bappelbangda

Sedangkan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana tabel berikut.:

Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

No	Uraian	2022 (Rp) APBD	Proyeksi 2023(Rp) RPJMD
1.	Pendapatan Daerah	1.893.440.960.000	1.979.198.075.000
1. 1.	Pendapatan Asli Daerah	357.999.604.000	366.663.129.000
1. 1. 1	Hasil Pajak Daerah	174.700.000.000	184.485.865.000
1. 1. 2	Hasil Retribusi Daerah	20.875.528.000	20.101.005.000
1. 1. 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.525.775.000	27.601.215.000
1. 1. 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	131.898.301.000	134.475.044.000
1. 2.	Pendapatan Transfer	1.532.441.356.000	1.539.320.209.000
1. 2. 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.348.843.356.000	1.375.762.271.000
1. 2. 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	183.598.000.000	163.557.938.000
1. 3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.000.000.000	73.214.737.000
1. 3. 1	Pendapatan Hibah	3.000.000.000	3.000.000.000
1. 3. 2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan per-UU	0	70.214.737.000

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Bappelbangda

Pemanfaatan pendapatan daerah adalah melalui penggunaan dana untuk keperluan belanja daerah. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan umum belanja daerah yang berdasarkan pada pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil sesuai dengan tugas dan fungsi dari setiap OPD berdasarkan pada hasil pengelolaan keuangan tahun sebelumnya. Kebijakan umum Belanja Daerah dalam pencapaian sasaran dalam RKPD Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha utamanya UMKM dan IKM yang terdampak;
2. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
3. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemiskinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemic Covid-19;
4. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
5. Memenuhi alokasi prosentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20% fungsi pendidikan dan 10%

fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;

6. Alokasi belanja daerah adalah untuk pemenuhan kepentingan publik dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Alokasi belanja daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan wajib diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat Kabupaten Sukoharjo di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan sosial dan pemerintahan umum untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi.

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja	1.887.503.285.006,00	2.050.161.904.519,00	2.114.149.361.513,00	2.073.080.966.909,00	1.756.972.447.254,00
Belanja Operasi	1.636.029.249.932,00	1.661.510.751.281,00	1.763.457.458.854,00	1.770.127.747.604,00	1.472.694.410.236,00
Belanja Pegawai	840.372.861.444,00	856.943.060.675,00	884.166.878.630,00	838.548.756.755,00	830.659.026.029,00
Belanja Barang dan Jasa	448.191.857.488,00	445.037.515.606,00	493.197.006.024,00	490.000.647.249,00	575.798.113.836,00
Belanja Bunga	0	0	0	0	0,00
Belanja Hibah	25.907.256.000,00	33.963.567.000,00	29.017.219.200,00	71.383.208.000,00	624.509.495,00
Belanja Bantuan Sosial	15.577.000.000,00	16.245.000.000,00	19.074.000.000,00	24.923.500.000,00	48.541.701.076,00
Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa	12.221.647.000,00	32.211.620.000,00	24.345.536.000,00	23.123.358.000,00	17.071.059.800,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	293.758.628.000,00	277.109.988.000,00	313.656.819.000,00	322.148.277.600,00	
Belanja Modal	250.940.426.244,00	388.468.318.338,00	350.577.750.659,00	238.738.380.776,00	283.872.873.485,00
Belanja Modal	250.940.426.244,00	388.468.318.338,00	350.577.750.659,00	238.738.380.776,00	283.872.873.485,00
Belanja Tidak Terduga	533.608.830,00	182.834.900,00	114.152.000,00	64.214.838.529,00	405.163.533,00
Belanja Tidak Terduga	533.608.830,00	182.834.900,00	114.152.000,00	64.214.838.529,00	405.163.533,00

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Bappelbangda

Sedangkan untuk Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.6 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

No	U R A I A N	2022 (Rp) APBD	Proyeksi 2023(Rp) RPJMD
2.	Belanja Daerah	2.148.630.930.145	2.188.175.517.000
2. 1.	Belanja Operasi	1.532.552.020.951	1.499.869.024.000
2. 1. 1	Belanja Pegawai	891.129.208.846	946.629.019.000
2. 1. 2	Belanja Barang dan Jasa	593.930.450.505	489.348.913.000
2. 1. 3	Belanja Bunga	0	0
2. 1. 4	Belanja Subsidi	1.478.511.000	6.420.313.000
2. 1. 5	Belanja Hibah	43.717.271.000	48.335.123.000
2. 1. 6	Belanja Bantuan Sosial	2.296.579.600	9.135.656.000
2. 2.	Belanja Modal	259.985.639.194	372.805.021.000
2. 3.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000	11.000.000.000
2. 4.	Belanja Transfer	306.093.270.000	304.501.472.000
2. 4. 1	Belanja Bagi Hasil	24.838.738.000	29.268.848.000
2. 4. 2	Belanja Bantuan Keuangan	281.254.532.000	275.232.624.000
	Jumlah Belanja	2.148.630.930.145	2.188.175.517.000
	Surplus / (Defisit)	-255.189.970.145	-208.977.442.000

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Bappelbangda

Pembiayaan Daerah adalah pemanfaatan sumber-sumber dana yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi daerah atau menimbulkan kewajiban ekonomis bagi daerah. Pembiayaan daerah dialokasikan untuk dapat menutup anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dengan pendapatan daerah yang bersumber dari pinjaman daerah atau pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah juga dapat dialokasikan untuk penyertaan modal dari pemerintah daerah pada BUMD maupun usaha lain yang dapat memberi nilai tambah ekonomis bagi Pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku atau pembentukan dana cadangan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah untuk keperluan tertentu.

Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang perlu dibayarkan baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya dan penerimaan lain yang bukan merupakan pendapatan daerah. Kebijakan umum untuk Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 adalah:

1. Penggunaan SiLPA adalah sebagai sumber penerimaan pembiayaan dalam tahun anggaran berikutnya dalam rangka mendanai kegiatan-kegiatan yang belum selesai pada tahun anggaran berkenaan maupun

- penggunaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi anggaran riil maka diupayakan untuk menutup 214embaga melalui:
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan berupa pelepasan saham ataupun penjualan pemerintah daerah lainnya pada BUMD maupun usaha lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Penerimaan pinjaman daerah dari pihak lain baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun donor yang dimanfaatkan untuk keperluan pendanaan kegiatan jangka pendek maupun jangka Panjang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 3. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran 2022.

Tabel 4.7 Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017-2021

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021
A	Realisasi Pendapatan Daerah	2.055.571.033.667	2.055.517.964.074	2.143.687.569.516	2.040.394.761.328,00	2.119.543.415.538,00
B	Realisasi Belanja Daerah	1.887.503.285.006	2.050.161.904.519	2.114.149.361.513	2.073.080.966.909,00	1.756.972.447.254,00
	Surplus (Defisit) Anggaran	168.067.748.661	5.356.059.555	29.538.208.003	(32.686.205.581,00)	30.087.856.684,00
C	Pembiayaan Daerah					
1	Penerimaan Pembiayaan	387.853.956.767	467.281.226.263	441.750.796.760	420.458.357.396,00	358.453.599.194,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	289.621.352.709	467.281.226.263	310.182.333.525	420.458.357.396,00	358.453.599.194,00
	Pencairan Dana Cadangan	98.232.604.058	-	131.568.463.235	-	
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	
2	Pengeluaran Pembiayaan	88.640.479.064	162.454.952.293	50.830.647.367	29.318.552.621,00	26.836.457.124,00
	Pembentukan Dana Cadangan	53.460.228.064	127.154.952.293	5.430.647.367	2.094.552.621,00	
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	35.180.251.000	35.300.000.000	45.400.000.000	27.224.000.000,00	24.987.990.582,00
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	
	Surplus (Defisit) Pembiayaan	299.213.477.703	304.826.273.970	390.920.149.393	391.139.804.775,00	
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	467.281.226.364	310.182.333.525	420.458.357.396	358.453.599.194,00	

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Bappelbangda

Sedangkan proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

No	Uraian	2022 (Rp) APBD	Proyeksi 2023(Rp) RPJMD
3.	Pembiayaan Daerah	229.000.274.012	208.977.442.000
3. 1.	Penerimaan Pembiayaan	257.500.274.012	253.965.442.000
3. 1. 1	<i>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)</i>	257.500.274.012	253.965.442.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	257.500.274.012	253.965.442.000
3. 2.	Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000	44.988.000.000
3. 2. 1	<i>Pembentukan Dana Cadangan</i>	20.000.000.000	20.000.000.000
3. 2. 2	<i>Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah</i>	8.500.000.000	24.988.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000	44.988.000.000
	Pembiayaan Netto	229.000.274.012	208.977.442.000
3. 3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-26.189.696.133	0

Sumber: RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, Bappelbangda

Berdasarkan arah kebijakan belanja daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengoptimalkan penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 hingga 2026.

4.6. Pemetaan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Pemetaan program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo akan dilakukan pada perumusan isu strategis yang mendasarkan amanah peraturan perundangan-undangan terkait penanggulangan kemiskinan, kebijakan nasional, kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Kabupaten Sukoharjo, serta determinan kemiskinan baik supply side maupun demand side serta aktivitas/inovasi penyelesaiannya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Isu strategis penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Belum optimalnya peningkatan produktivitas dan pemberdayaan penduduk usia produktif (15-59 tahun) tidak bekerja;
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
3. Belum optimalnya penanganan penduduk usia sekolah tidak bersekolah;

4. Belum optimalnya penyediaan akses sanitasi, air minum dan hunian layak;
5. Belum optimalnya pengendalian, pertumbuhan produktifitas ketersediaan dan kebutuhan pangan; dan
6. Belum optimalnya penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat.

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui bantuan sosial dan jaminan sosial, diantaranya melalui:

- a. Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako.
- b. Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, Top Up bansos reguler.
- c. Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- d. Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat.

Strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Peningkatan akses pekerjaan, melalui Padat Karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui vokasi dan pelatihan.
- c. Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
- d. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- e. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- a. Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
- b. Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.

Arah kebijakan berdasarkan tiga strategi utama Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai berikut:

1. Penurunan beban pengeluaran masyarakat.

Arah kebijakan dari strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat difokuskan pada:

- a. Penentuan kriteria penerima dengan mengutamakan masyarakat miskin ekstrem.
- b. Koordinasi proses integrasi program dalam rangka menurunkan beban pengeluaran (Forum Gabungan).
- c. Koordinasi komplementaritas dalam seluruh program pengurangan beban pengeluaran sesuai dengan kriteria program.
- d. Koordinasi komplementaritas dengan program peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan.
- e. Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem berdasarkan basis data penargetan.

2. Peningkatan pendapatan masyarakat.

Arah kebijakan dari strategi peningkatan pendapatan masyarakat difokuskan pada:

- a. Penentuan kriteria dan jumlah target penerima program peningkatan pendapatan.
- b. Pelaksanaan asesmen dan kesiapan penerima program untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan/pendapatan; peningkatan produktivitas SDM melalui peningkatan keterampilan dan keahlian; dan peningkatan kapasitas pengembangan UMKM.
- c. Peningkatan akses terhadap pekerjaan/pendapatan antara lain meliputi program Padat Karya Tunai sektoral, reforma agraria, perhutanan sosial, program Padat Karya Tunai desa, pengalihan pengelolaan aset, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, dan perluasan kesempatan kerja dari investasi di daerah.
- d. Peningkatan produktivitas SDM antara lain meliputi program pelatihan termasuk Prakerja, pendidikan vokasi, peningkatan keterampilan dan keahlian di Balai Latihan Kerja.
- e. Peningkatan kapasitas UMKM antara lain meliputi peningkatan akses pembiayaan, pendampingan wirausaha, peningkatan akses pasar, dan digitalisasi dan akses terhadap teknologi tepat guna.

- f. Pendampingan wirausaha yang profesional, bekerja sama dengan BUMDES, koperasi, atau unit usaha lain untuk memastikan pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat dan menjaga kesinambungan usaha.
- g. Peningkatan kerja sama dengan UMKM, pihak swasta, BUMD, BUMN, dan lainnya untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah diberikan pelatihan keterampilan atau keahlian bidang lainnya.
- h. Koordinasi integrasi program dalam rangka meningkatkan pendapatan (Forum Gabungan).
- i. Koordinasi komplementaritas dengan program pengurangan beban dan meminimalkan kantong kemiskinan.
- j. Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem, berdasarkan basis data penargetan.

3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

Arah kebijakan dari strategi meminimalkan wilayah kantong kemiskinan difokuskan pada:

- a. Pelaksanaan intervensi di lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.
- b. Pelaksanaan asesmen lokasi program berdasarkan kebutuhan pelayanan dasar dan infrastruktur.
- c. Peningkatan perbaikan infrastruktur jalan, perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, perbaikan sanitasi lingkungan dan air bersih, dan pemenuhan akses jaringan komunikasi.
- d. Koordinasi integrasi program dalam rangka meminimalkan kantong kemiskinan (Forum Gabungan).
- e. Koordinasi komplementaritas dengan program pengurangan beban dan peningkatan pendapatan.
- f. Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem.

Pemetaan program prioritas penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo sebagai berikut:

Tabel 4.9 Pemetaan Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
1. Ketenagakerjaan	(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Perindungan sosial Penyelesaian Exclusion Error 	Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
	(2) Peningkatan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses pekerjaan Peningkatan produktivitas/kapasitas ekonomi Penguatan sarana/prasarana dan peningkatan ekosistem 				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	(3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin Pengelolaan dan Pemutakhiran DTKS Peningkatan akses terhadap layanan dasar Peningkatan konektifitas antar wilayah Mendorong konvergensi anggaran Mendorong konsolidasi program Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan Penyediaan Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting) 				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota
			Program Hubungan Industrial	Prosentase Peningkatan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial			
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)			
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase wirausaha muda			
		Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda		Pertumbuhan PDRB sektor industri	
		Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah IUI Kecil dan menengah yang diterbitkan	
		Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	
					Pertumbuhan Wirausaha Baru		

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
			Berdaya Saing Tinggi	Berkualitas Dan Inklusif		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi
						Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pasar Rakyat yang nyaman dan sehat
						Program Pengembangan Ekspor	Prosentase Peningkatan Ekspor
			Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan usaha mikro ke Usaha kecil
						Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Prosentase Koperasi aktif
						Program Pemberdayaan Perlindungan Koperasi	Prosentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi
						Program Pemberdayaan UMKM	Prosentase kemitraan KUMKM
						Program Pengembangan UMKM	Prosentase Peningkatan Omset Produk UMKM
			Misi 3 : Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)
						Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Jumlah Desa Yang Melaksanakan Kerjasama
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Jenis Lembaga kemasyarakatan Desa yang dibina

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
			Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, Dan Pemuda	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Persentase perempuan yang mendapat pendampingan jadi pelaku usaha ekonomi
2. Kesehatan	(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan sosial ▪ Penyelesaian Exclusion Error 	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan UKM Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Angka Harapan Hidup (AHH)
	(3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin ▪ Pengelolaan dan Pemutakhiran DTKS ▪ Peningkatan akses terhadap layanan dasar ▪ Peningkatan konektivitas antar wilayah ▪ Mendorong konvergensi anggaran ▪ Mendorong konsolidasi program ▪ Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan ▪ Penyediaan Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting) 					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayan penyakit menular
							Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
							Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans
							Persentase FKTP terakreditasi
							Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut)/ RS terakreditasi
							Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi
							Persentase Fasyankes yang memberikan layanan JKN
							Persentase Capaian UHC
							Persentase cakupan puskesmas dengan

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
							peningkatan kesehatan ibu
							Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi
							Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita
							Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat
							Persentase Puskesmas dengan cakupan yankes pada usia pendidikan dasar
							Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reprduksi
							Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada lansia
							Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan
							Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja
							Persentase Puskesmas dengan cakupan

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
							<p>pelayanan Kesehatan olah raga</p> <p>Persentase Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit</p> <p>NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar</p> <p>Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna</p> <p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</p> <p>Persentase Desa siaga aktif mandiri</p>
			Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Pengendalian Penduduk		<p>Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)</p> <p>Cakupan Peserta KB Aktif</p> <p>Cakupan kelompok kegiatan yang aktif</p>
3. Pendidikan	(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Perindungan sosial Penyelesaian Exclusion Error 	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Pendidikan		<p>Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (Tahun)</p> <p>Harapan Lama Sekolah (Tahun)</p>
	(3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin Pengelolaan dan Pemutakhiran DTKS 				Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga negara usia 5-15 dalam Satuan pendidikan

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
		<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan akses terhadap layanan dasar Peningkatan konektivitas antar wilayah Mendorong konvergensi anggaran Mendorong konsolidasi program Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan Penyediaan Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting) 	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Program Pembinaan Perpustakaan	Prosentase Pembinaan Perpustakaan dan Kegemaran Membaca
4. Infrastruktur Dasar	(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Perlindungan sosial Penyelesaian Exclusion Error 	Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Akses Sanitasi yang layak Proporsi rumah tangga yang dilayani SPALD
	(3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin Pengelolaan dan Pemutakhiran DTKS Peningkatan akses terhadap layanan dasar Peningkatan konektivitas antar wilayah Mendorong konvergensi anggaran Mendorong konsolidasi program Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan Penyediaan Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting) 	Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Akses air minum yang layak Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, pedesaan
			Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	Persentase Lingkungan Hunian Layak Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah tertangani
			Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani
			Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah
			Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Kawasan Permukiman	Prosentase Kawasan Kumuh yang sudah tertangani
			Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase RTLH diluar kawasan kumuh yang sudah tertangani
Misi 4 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan	Terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	Prosentasi PSU yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah			

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						Dan Utilitas Umum (PSU)	
5. Ketahanan Pangan	(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan sosial ▪ Penyelesaian Exclusion Error 	Misi 3 :Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan
	(2) Peningkatan pendapatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akses pekerjaan ▪ Peningkatan produktivitas/kapasitas ekonomi ▪ Penguatan sarana/prasarana dan peningkatan ekosistem 					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
	(3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin ▪ Pengelolaan dan Pemutakhiran DTKS ▪ Peningkatan akses terhadap layanan dasar ▪ Peningkatan konektivitas antar wilayah ▪ Mendorong konvergensi anggaran ▪ Mendorong konsolidasi program ▪ Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan ▪ Penyediaan Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting) 	Misi 3 :Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, dan perikanan
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani
						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase penggunaan alat mesin pertanian oleh petani
						Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
						Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase gagal panen
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Usaha di Bidang Peternakan dan					

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
							Kesehatan Hewan yang berijin
						Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase kenaikan kelas kelompok
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan Tangkap
						Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya (ton)
						Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Jumlah Pembudidaya bersertifikat CBIB
						Program Pengelolaan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Prosentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang memiliki ijin Usaha (RTP)
			Misi 3 :Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Inklusif	Meningkatnya pertumbuhan produktifitas		Skor Pola Pangan Harapan
						Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan yang mengelola Lumbung Pangan
						Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Prosentase Ketersediaan Energi (Kalori)

Bidang	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Sasaran Jangka Menengah Daerah Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026)				
			Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran dan Program
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan yang Ditangani
6. Sosial	(1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perlindungan sosial ▪ Penyelesaian Exclusion Error 	Misi 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, inovatif, dan berkarakter	Meningkatnya Kualitas Hidup Penduduk Miskin		Persentase penduduk miskin perkotaan (DTKS Desil 1 dan 2)
	(3) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan validasi data mengenai identitas penduduk sangat miskin ▪ Pengelolaan dan Pemutakhiran DTKS ▪ Peningkatan akses terhadap layanan dasar ▪ Peningkatan konektivitas antar wilayah ▪ Mendorong konvergensi anggaran ▪ Mendorong konsolidasi program ▪ Meningkatkan peran daerah dan pemangku kepentingan ▪ Penyediaan Data Terpadu Wilayah Prioritas (Geographical Targeting) 					Persentase penduduk miskin perdesaan (DTKS Desil 1 dan 2)
						Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang meningkat kapasitasnya
						Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase penanganan rehabilitasi sosial
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial
						Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang aktif
						Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Layanan Dokumen Kependudukan
Program Pencatatan Sipil	Cakupan Layanan Dokumen Pencatatan Sipil						

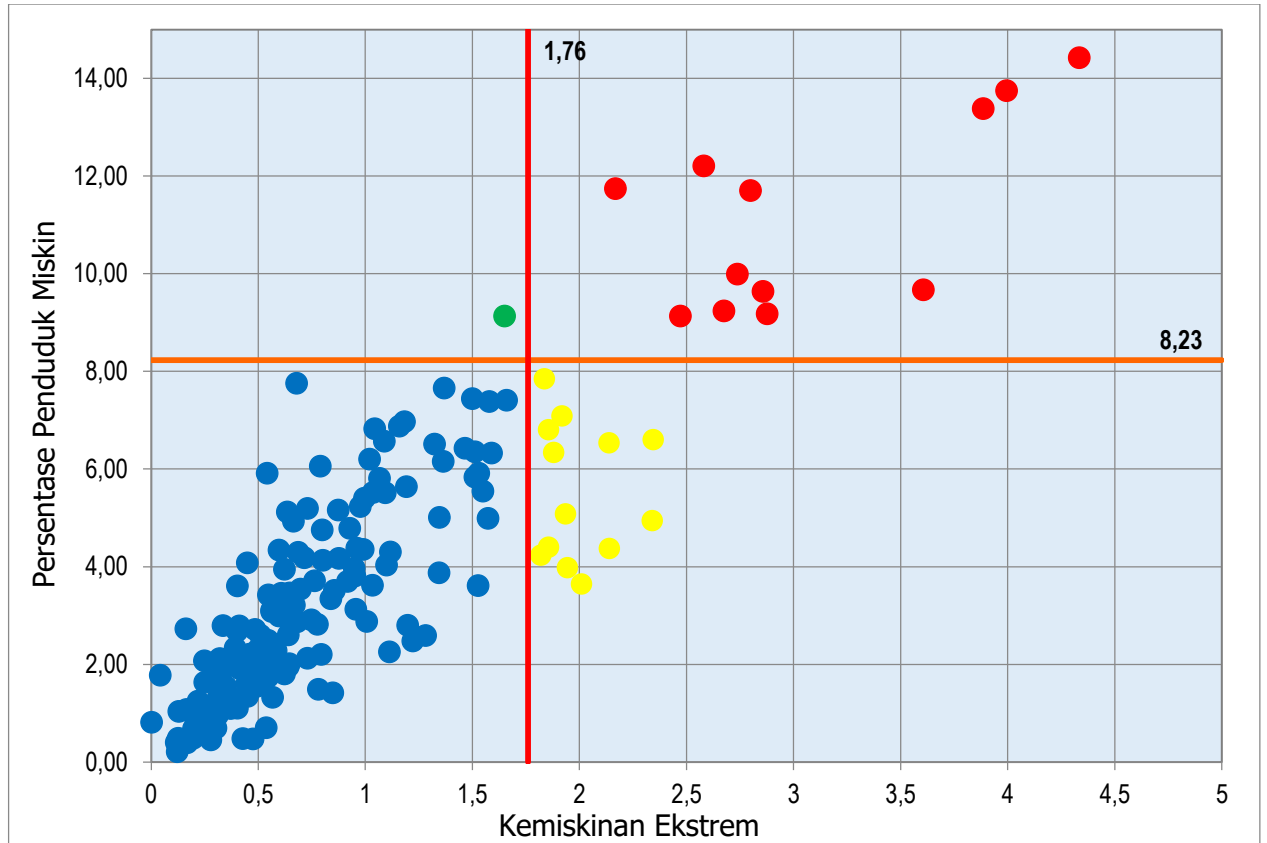
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo yang memuat strategi, sasaran, bidang/urusan, program, inovasi/aktivitas, target kinerja dan kerangka pendanaan, serta lokasi prioritas termuat pada tabel 4.10 terlampir.

BAB V LOKASI PRIORITAS

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial (United Nations, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (Purchasing Power Parity). Purchasing Power Parity merupakan unit harga yang telah disesuaikan sehingga nilai mata uang di berbagai negara dapat dibandingkan satu dengan yang lain. Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs).

Tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo tahun 2021 mencapai 1,76 persen, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 2,52 persen. Sasaran intervensi program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo ditunjukkan berdasarkan indikator kemiskinan hasil Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan DTKS, 1,76 persen kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo setara dengan individu dengan status kesejahteraan 0-2%. Sedangkan tingkat kemiskinan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan data BPS sebesar 8,23 persen, berdasarkan DTKS, 8,23 persen kemiskinan ekstrem Kabupaten Sukoharjo setara dengan individu dengan status kesejahteraan 0-9%

Sesuai kebijakan penanggulangan kemiskinan, bahwa penentuan lokasi prioritas menggunakan DTKS sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, berikut lokasi prioritas tingkat desa/kelurahan dengan kemiskinan ekstrem dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem prioritas yang perlu menjadi pedoman Perangkat daerah sebagai pengampu urusan yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dalam penentuan sasaran program dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Penduduk Miskin Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Penduduk Miskin Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Penduduk Miskin Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Penduduk Miskin Rendah

Gambar 5.1

Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Sukoharjo

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dari sisi kemiskinan ekstrem dan penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1
Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan
Ekstrem Di Kabupaten Sukoharjo

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
1.	Nguter	Plesan	4,33	14,43	1
2.	Nguter	Jangglengan	3,99	13,75	1
3.	Bendosari	Puhgogor	3,89	13,39	1
4.	Bulu	Kedungsono	3,60	9,67	1
5.	Weru	Karangtengah	2,88	9,18	1
6.	Nguter	Serut	2,86	9,64	1
7.	Tawang Sari	Pundungrejo	2,80	11,71	1
8.	Bendosari	Manisharjo	2,74	10,00	1
9.	Weru	Karangmojo	2,67	9,24	1
10.	Tawang Sari	Tambakboyo	2,58	12,21	1
11.	Weru	Ngreco	2,47	9,14	1
12.	Bulu	Sanggung	2,17	11,74	1
13.	Bulu	Bulu	2,34	6,61	2
14.	Gatak	Jati	2,34	4,95	2
15.	Mojolaban	Laban	2,14	4,38	2
16.	Polokarto	Bugel	2,14	6,54	2
17.	Nguter	Juron	2,01	3,65	2
18.	Gatak	Krajan	1,94	3,98	2
19.	Gatak	Trangsan	1,93	5,09	2
20.	Nguter	Celep	1,92	7,09	2
21.	Tawang Sari	Grajegan	1,88	6,34	2
22.	Bulu	Ngasinan	1,85	4,40	2
23.	Weru	Alasombo	1,85	6,81	2
24.	Bendosari	Paluhombo	1,83	7,86	2
25.	Bulu	Kamal	1,82	4,24	2
26.	Bulu	Malangan	1,65	9,13	3
27.	Bulu	Tiyaran	1,66	7,41	4
28.	Weru	Karanganyar	1,59	6,33	4
29.	Bendosari	Mertan	1,58	7,38	4
30.	Bulu	Gentan	1,57	4,99	4
31.	Grogol	Kwarasan	1,55	5,55	4
32.	Nguter	Tanjungrejo	1,53	5,92	4
33.	Baki	Bentakan	1,53	3,62	4
34.	Tawang Sari	Pojok	1,51	5,84	4
35.	Nguter	Gupit	1,51	6,36	4
36.	Bendosari	Bendosari	1,50	7,44	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
37.	Baki	Mancasan	1,46	6,43	4
38.	Bendosari	Jagan	1,37	7,66	4
39.	Bendosari	Mojorejo	1,36	6,16	4
40.	Tawang Sari	Ponowaren	1,34	5,01	4
41.	Bulu	Lengking	1,34	3,88	4
42.	Nguter	Lawu	1,32	6,52	4
43.	Nguter	Pengkol	1,28	2,59	4
44.	Bulu	Karangasem	1,22	2,49	4
45.	Sukoharjo	Mandan	1,20	2,81	4
46.	Polokarto	Godog	1,19	5,64	4
47.	Tawang Sari	Lorog	1,18	6,97	4
48.	Polokarto	Kemasan	1,16	6,88	4
49.	Polokarto	Mranggen	1,12	4,31	4
50.	Sukoharjo	Begajah	1,11	2,26	4
51.	Baki	Jetis	1,10	4,04	4
52.	Gatak	Tempel	1,09	5,52	4
53.	Gatak	Geneng	1,09	6,58	4
54.	Grogol	Pandeyan	1,07	5,81	4
55.	Weru	Karakan	1,04	6,83	4
56.	Tawang Sari	Majasto	1,03	5,53	4
57.	Polokarto	Bakalan	1,03	3,62	4
58.	Tawang Sari	Dalangan	1,02	6,21	4
59.	Sukoharjo	Kenep	1,00	2,88	4
60.	Bendosari	Toriyo	0,99	5,41	4
61.	Weru	Tegalsari	0,99	4,36	4
62.	Polokarto	Kayuapak	0,97	5,24	4
63.	Nguter	Daleman	0,96	4,38	4
64.	Mojolaban	Kragilan	0,95	3,13	4
65.	Grogol	Kadokan	0,95	3,81	4
66.	Polokarto	Polokarto	0,95	3,97	4
67.	Grogol	Pondok	0,93	4,79	4
68.	Polokarto	Tepisari	0,92	3,70	4
69.	Baki	Gedongan	0,88	4,17	4
70.	Polokarto	Ngombakan	0,87	5,16	4
71.	Grogol	Banaran	0,85	3,52	4
72.	Nguter	Kedungwinong	0,85	1,42	4
73.	Polokarto	Pranan	0,84	3,35	4
74.	Tawang Sari	Kateguhan	0,80	4,13	4
75.	Mojolaban	Gadingan	0,80	4,76	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
76.	Sukoharjo	Dukuh	0,79	2,20	4
77.	Tawang Sari	Watubonang	0,79	6,06	4
78.	Nguter	Nguter	0,78	1,49	4
79.	Polokarto	Jatisobo	0,77	2,82	4
80.	Mojolaban	Klumprit	0,76	3,72	4
81.	Sukoharjo	Kriwen	0,75	2,92	4
82.	Nguter	Tanjung	0,73	5,20	4
83.	Grogol	Langenharjo	0,73	2,13	4
84.	Sukoharjo	Bulakan	0,71	4,19	4
85.	Gatak	Wironanggan	0,70	3,54	4
86.	Weru	Karangwuni	0,69	4,30	4
87.	Mojolaban	Dukuh	0,68	2,87	4
88.	Tawang Sari	Tangkisan	0,68	7,76	4
89.	Weru	Grogol	0,67	3,22	4
90.	Polokarto	Kenokorejo	0,66	4,93	4
91.	Weru	Tawang	0,65	3,11	4
92.	Mojolaban	Palur	0,64	3,47	4
93.	Kartasura	Pucangan	0,64	2,02	4
94.	Mojolaban	Wirun	0,64	1,95	4
95.	Polokarto	Rejosari	0,64	2,61	4
96.	Mojolaban	Plumbon	0,63	5,13	4
97.	Weru	Krajan	0,62	3,95	4
98.	Sukoharjo	Sukoharjo	0,62	1,80	4
99.	Gatak	Luwang	0,61	3,18	4
100.	Bendosari	Cabeyan	0,61	3,46	4
101.	Tawang Sari	Kedungjambal	0,60	4,34	4
102.	Nguter	Kepuh	0,60	3,00	4
103.	Bulu	Puron	0,58	2,29	4
104.	Mojolaban	Bekonang	0,58	2,20	4
105.	Kartasura	Pabelan	0,57	1,33	4
106.	Baki	Siwal	0,56	3,09	4
107.	Nguter	Baran	0,56	3,11	4
108.	Sukoharjo	Banmati	0,55	2,06	4
109.	Baki	Menuran	0,55	3,43	4
110.	Baki	Gentan	0,55	1,75	4
111.	Baki	Bakipandeyan	0,55	2,49	4
112.	Baki	Ngrombo	0,54	5,92	4
113.	Sukoharjo	Joho	0,54	0,71	4
114.	Mojolaban	Tegalmade	0,53	1,67	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
115.	Gatak	Sraten	0,52	1,95	4
116.	Grogol	Parangjoro	0,51	2,60	4
117.	Baki	Kudu	0,50	2,31	4
118.	Grogol	Grogol	0,49	1,87	4
119.	Kartasura	Kartasura	0,49	1,55	4
120.	Mojolaban	Cangkol	0,48	2,72	4
121.	Polokarto	Karangwuni	0,48	1,99	4
122.	Bulu	Kunden	0,48	0,48	4
123.	Bendosari	Mulur	0,46	2,22	4
124.	Sukoharjo	Sonorejo	0,45	1,35	4
125.	Baki	Duwet	0,45	4,08	4
126.	Gatak	Kagokan	0,45	1,62	4
127.	Sukoharjo	Jetis	0,43	0,48	4
128.	Grogol	Telukon	0,41	1,91	4
129.	Weru	Weru	0,41	2,79	4
130.	Gatak	Klaseman	0,40	3,61	4
131.	Polokarto	Wonorejo	0,40	1,11	4
132.	Bendosari	Sugihan	0,40	2,68	4
133.	Gatak	Trosemi	0,39	2,34	4
134.	Bendosari	Sidorejo	0,39	1,28	4
135.	Weru	Jatingarang	0,38	1,98	4
136.	Sukoharjo	Gayam	0,37	1,10	4
137.	Grogol	Cemani	0,35	1,54	4
138.	Grogol	Sanggrahan	0,35	1,28	4
139.	Gatak	Blimbing	0,33	2,79	4
140.	Polokarto	Genengsari	0,32	1,73	4
141.	Bendosari	Gentan	0,32	2,12	4
142.	Mojolaban	Demakan	0,32	2,09	4
143.	Mojolaban	Joho	0,31	1,20	4
144.	Kartasura	Ngadirejo	0,31	0,96	4
145.	Kartasura	Ngabeyan	0,31	1,29	4
146.	Baki	Kadilangu	0,30	1,66	4
147.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,30	0,70	4
148.	Kartasura	Singopuran	0,28	0,45	4
149.	Grogol	Madegondo	0,27	1,69	4
150.	Kartasura	Makamhaji	0,27	0,57	4
151.	Baki	Purbayan	0,26	1,14	4
152.	Gatak	Mayang	0,25	1,63	4
153.	Baki	Waru	0,25	2,08	4

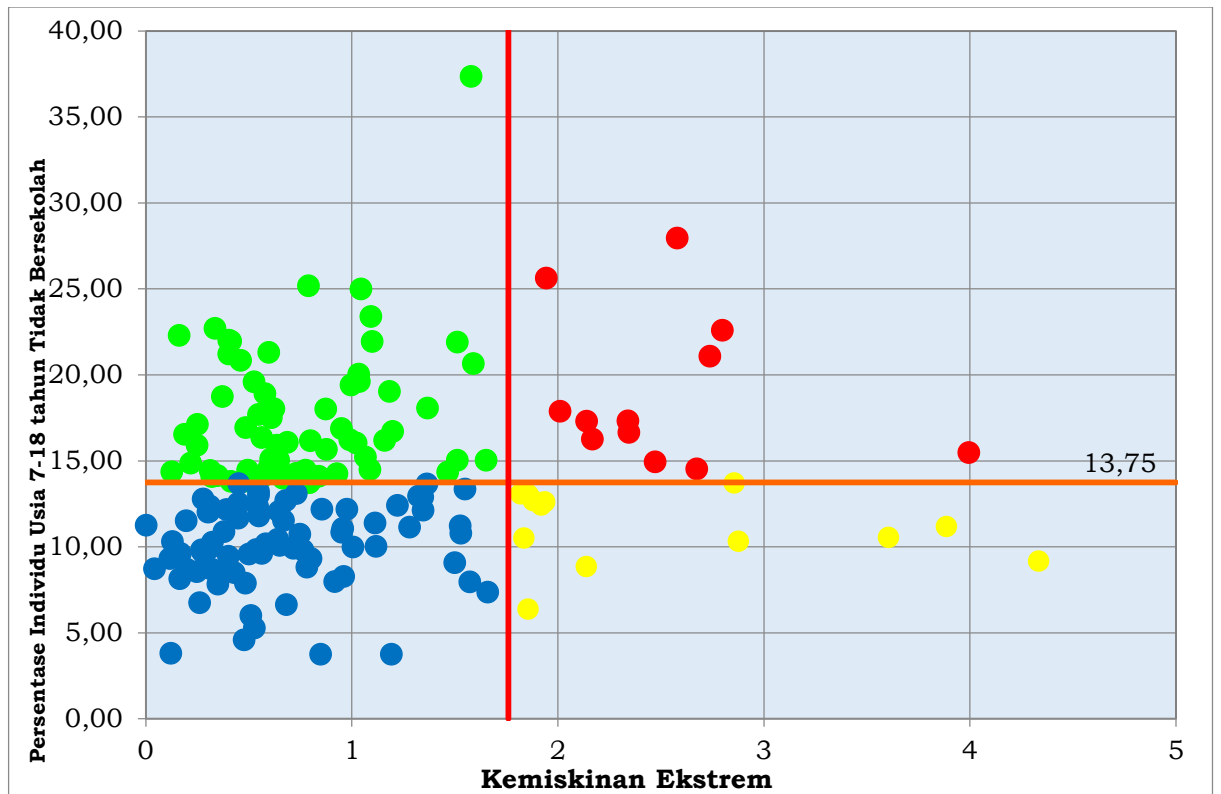
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
154.	Kartasura	Gumpang	0,25	1,00	4
155.	Kartasura	Ngemplak	0,22	1,25	4
156.	Kartasura	Wirogunan	0,20	0,69	4
157.	Bendosari	Jombor	0,20	0,49	4
158.	Kartasura	Kertonatan	0,19	1,01	4
159.	Sukoharjo	Combongan	0,17	0,40	4
160.	Nguter	Pondok	0,16	1,08	4
161.	Gatak	Sanggung	0,16	2,73	4
162.	Mojolaban	Sapen	0,13	1,04	4
163.	Grogol	Gedangan	0,12	0,49	4
164.	Kartasura	Gonilan	0,12	0,21	4
165.	Polokarto	Bulu	0,12	0,40	4
166.	Grogol	Manang	0,04	1,78	4
167.	Mojolaban	Triyagan	-	0,82	4

5.1. Penurunan Beban Pengeluaran Masyarakat

Pelaksanaan program untuk penurunan beban pengeluaran diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem diutamakan bagi lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan.

5.1.1. Bidang Pendidikan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang pendidikan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia 7-18 Tahun Tidak Bersekolah Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia 7-18 Tahun Tidak Bersekolah Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia 7-18 Tahun Tidak Bersekolah Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia 7-18 Tahun Tidak Bersekolah Rendah

Gambar 5.2

Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Pendidikan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang pendidikan dari sisi kemiskinan ekstrem dan individu usia 7-18 tahun tidak bersekolah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2

Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Pendidikan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 7-18 tahun Tidak Bersekolah	
1.	Nguter	Jangglengan	3,99	15,49	1
2.	Tawang Sari	Pundungrejo	2,80	22,61	1
3.	Bendosari	Manisharjo	2,74	21,10	1
4.	Weru	Karangmojo	2,67	14,55	1
5.	Tawang Sari	Tambakboyo	2,58	27,97	1
6.	Weru	Ngreco	2,47	14,96	1
7.	Bulu	Bulu	2,34	16,67	1
8.	Gatak	Jati	2,34	17,33	1
9.	Bulu	Sanggung	2,17	16,28	1
10.	Mojolaban	Laban	2,14	17,32	1
11.	Nguter	Juron	2,01	17,90	1
12.	Gatak	Krajan	1,94	25,64	1
13.	Nguter	Plesan	4,33	9,18	2
14.	Bendosari	Puhgogor	3,89	11,18	2
15.	Bulu	Kedungsono	3,60	10,56	2
16.	Weru	Karangtengah	2,88	10,34	2
17.	Nguter	Serut	2,86	13,73	2
18.	Polokarto	Bugel	2,14	8,86	2
19.	Gatak	Trangsan	1,93	12,64	2
20.	Nguter	Celep	1,92	12,45	2
21.	Tawang Sari	Grajegan	1,88	12,70	2
22.	Bulu	Ngasinan	1,85	13,06	2
23.	Weru	Alasombo	1,85	6,40	2
24.	Bendosari	Paluhombo	1,83	10,53	2
25.	Bulu	Kamal	1,82	13,10	2
26.	Bulu	Malangan	1,65	15,05	3
27.	Weru	Karanganyar	1,59	20,67	3
28.	Bendosari	Mertan	1,58	37,38	3
29.	Tawang Sari	Pojok	1,51	15,05	3
30.	Nguter	Gupit	1,51	21,92	3
31.	Baki	Mancasan	1,46	14,36	3
32.	Bendosari	Jagan	1,37	18,09	3
33.	Sukoharjo	Mandan	1,20	16,72	3
34.	Tawang Sari	Lorog	1,18	19,05	3
35.	Polokarto	Kemasan	1,16	16,21	3
36.	Baki	Jetis	1,10	21,96	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 7-18 tahun Tidak Bersekolah	
37.	Gatak	Tempel	1,09	23,40	3
38.	Gatak	Geneng	1,09	14,51	3
39.	Grogol	Pandeyan	1,07	15,24	3
40.	Weru	Karakan	1,04	25,00	3
41.	Tawang Sari	Majasto	1,03	19,62	3
42.	Polokarto	Bakalan	1,03	20,06	3
43.	Tawang Sari	Dalangan	1,02	16,05	3
44.	Bendosari	Toriyo	0,99	19,43	3
45.	Weru	Tegalsari	0,99	16,24	3
46.	Polokarto	Polokarto	0,95	16,90	3
47.	Grogol	Pondok	0,93	14,26	3
48.	Baki	Gedongan	0,88	15,68	3
49.	Polokarto	Ngombakan	0,87	18,02	3
50.	Polokarto	Pranan	0,84	14,12	3
51.	Mojolaban	Gadingan	0,80	16,19	3
52.	Sukoharjo	Dukuh	0,79	13,75	3
53.	Tawang Sari	Watubonang	0,79	25,19	3
54.	Polokarto	Jatisobo	0,77	14,47	3
55.	Nguter	Tanjung	0,73	14,29	3
56.	Gatak	Wironanggan	0,70	13,98	3
57.	Weru	Karangwuni	0,69	16,08	3
58.	Polokarto	Kenokorejo	0,66	14,00	3
59.	Kartasura	Pucangan	0,64	15,05	3
60.	Polokarto	Rejosari	0,64	14,83	3
61.	Mojolaban	Plumbon	0,63	15,92	3
62.	Weru	Krajan	0,62	18,04	3
63.	Sukoharjo	Sukoharjo	0,62	14,96	3
64.	Gatak	Luwang	0,61	17,53	3
65.	Bendosari	Cabeyan	0,61	15,12	3
66.	Tawang Sari	Kedungjambal	0,60	14,58	3
67.	Nguter	Kepuh	0,60	21,32	3
68.	Mojolaban	Bekonang	0,58	18,93	3
69.	Kartasura	Pabelan	0,57	14,09	3
70.	Baki	Siwal	0,56	16,36	3
71.	Baki	Bakipandeyan	0,55	17,71	3
72.	Gatak	Sraten	0,52	19,61	3
73.	Grogol	Grogol	0,49	14,48	3
74.	Kartasura	Kartasura	0,49	13,84	3
75.	Mojolaban	Cangkol	0,48	16,95	3

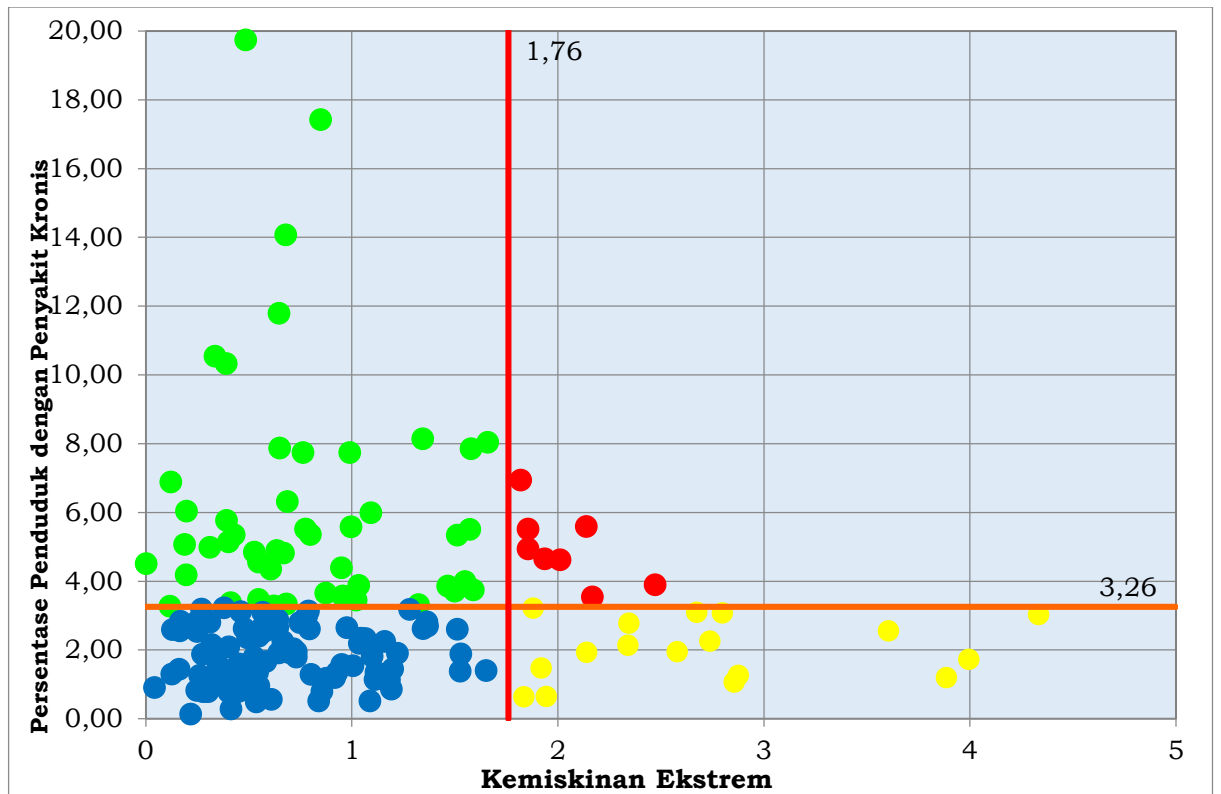
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 7-18 tahun Tidak Bersekolah	
76.	Bendosari	Mulur	0,46	20,85	3
77.	Grogol	Telukon	0,41	13,83	3
78.	Weru	Weru	0,41	21,98	3
79.	Gatak	Klaseman	0,40	21,23	3
80.	Polokarto	Wonorejo	0,40	22,02	3
81.	Sukoharjo	Gayam	0,37	18,75	3
82.	Grogol	Sanggrahan	0,35	14,15	3
83.	Gatak	Blimbing	0,33	22,73	3
84.	Bendosari	Gentan	0,32	14,09	3
85.	Mojolaban	Joho	0,31	14,44	3
86.	Gatak	Mayang	0,25	17,13	3
87.	Baki	Waru	0,25	15,93	3
88.	Kartasura	Ngemplak	0,22	14,89	3
89.	Kartasura	Kertonatan	0,19	16,55	3
90.	Gatak	Sanggung	0,16	22,31	3
91.	Grogol	Gedangan	0,12	14,38	3
92.	Bulu	Tiyaran	1,66	7,37	4
93.	Bulu	Gentan	1,57	7,97	4
94.	Grogol	Kwarasan	1,55	13,37	4
95.	Nguter	Tanjungrejo	1,53	10,81	4
96.	Baki	Bentakan	1,53	11,22	4
97.	Bendosari	Bendosari	1,50	9,09	4
98.	Bendosari	Mojorejo	1,36	13,66	4
99.	Tawang Sari	Ponowaren	1,34	12,14	4
100.	Bulu	Lengking	1,34	12,90	4
101.	Nguter	Lawu	1,32	12,97	4
102.	Nguter	Pengkol	1,28	11,17	4
103.	Bulu	Karangasem	1,22	12,43	4
104.	Polokarto	Godog	1,19	3,76	4
105.	Polokarto	Mranggen	1,12	10,04	4
106.	Sukoharjo	Begajah	1,11	11,40	4
107.	Sukoharjo	Kenep	1,00	10,00	4
108.	Polokarto	Kayuapak	0,97	12,21	4
109.	Nguter	Daleman	0,96	8,29	4
110.	Mojolaban	Kragilan	0,95	11,09	4
111.	Grogol	Kadokan	0,95	10,86	4
112.	Polokarto	Tepisari	0,92	8,00	4
113.	Grogol	Banaran	0,85	12,20	4
114.	Nguter	Kedungwinong	0,85	3,77	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 7-18 tahun Tidak Bersekolah	
115.	Tawang Sari	Kateguhan	0,80	9,34	4
116.	Nguter	Nguter	0,78	8,82	4
117.	Mojolaban	Klumprit	0,76	9,81	4
118.	Sukoharjo	Kriwen	0,75	10,75	4
119.	Grogol	Langenharjo	0,73	13,12	4
120.	Sukoharjo	Bulakan	0,71	9,92	4
121.	Mojolaban	Dukuh	0,68	6,64	4
122.	Tawang Sari	Tangkisan	0,68	12,69	4
123.	Weru	Grogol	0,67	11,54	4
124.	Weru	Tawang	0,65	10,09	4
125.	Mojolaban	Palur	0,64	12,07	4
126.	Mojolaban	Wirun	0,64	10,45	4
127.	Bulu	Puron	0,58	10,19	4
128.	Nguter	Baran	0,56	9,63	4
129.	Sukoharjo	Banmati	0,55	11,80	4
130.	Baki	Menuran	0,55	13,02	4
131.	Baki	Gentan	0,55	13,23	4
132.	Baki	Ngrombo	0,54	12,37	4
133.	Sukoharjo	Joho	0,54	9,85	4
134.	Mojolaban	Tegalmade	0,53	5,29	4
135.	Grogol	Parangjoro	0,51	6,02	4
136.	Baki	Kudu	0,50	9,58	4
137.	Polokarto	Karangwuni	0,48	7,90	4
138.	Bulu	Kunden	0,48	4,60	4
139.	Sukoharjo	Sonorejo	0,45	13,69	4
140.	Baki	Duwet	0,45	12,56	4
141.	Gatak	Kagokan	0,45	11,68	4
142.	Sukoharjo	Jetis	0,43	8,51	4
143.	Bendosari	Sugihan	0,40	9,47	4
144.	Gatak	Trosemi	0,39	12,17	4
145.	Bendosari	Sidorejo	0,39	8,71	4
146.	Weru	Jatingarang	0,38	10,89	4
147.	Grogol	Cemani	0,35	7,85	4
148.	Polokarto	Genengsari	0,32	10,27	4
149.	Mojolaban	Demakan	0,32	8,72	4
150.	Kartasura	Ngadirejo	0,31	9,94	4
151.	Kartasura	Ngabeyan	0,31	12,38	4
152.	Baki	Kadilangu	0,30	12,05	4
153.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,30	12,03	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 7-18 tahun Tidak Bersekolah	
154.	Kartasura	Singopuran	0,28	12,79	4
155.	Grogol	Madegondo	0,27	9,72	4
156.	Kartasura	Makamhaji	0,27	9,83	4
157.	Baki	Purbayan	0,26	6,76	4
158.	Kartasura	Gumpang	0,25	8,56	4
159.	Kartasura	Wirogunan	0,20	8,72	4
160.	Bendosari	Jombor	0,20	11,52	4
161.	Sukoharjo	Combongan	0,17	9,63	4
162.	Nguter	Pondok	0,16	8,16	4
163.	Mojolaban	Sapen	0,13	10,32	4
164.	Kartasura	Gonilan	0,12	3,82	4
165.	Polokarto	Bulu	0,12	9,32	4
166.	Grogol	Manang	0,04	8,74	4
167.	Mojolaban	Triyagan	-	11,27	4

5.1.2. Bidang Kesehatan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang kesehatan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu dengan Penyakit Kronis Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu dengan Penyakit Kronis Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu dengan Penyakit Kronis Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu dengan Penyakit Kronis Rendah

Gambar 5.3

Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Kesehatan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang kesehatan dari sisi kemiskinan ekstrem dan individu dengan penyakit kronis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3
Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan
Ekstrem Pada Bidang Kesehatan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu dengan Penyakit Kronis	
1.	Weru	Ngreco	2,47	3,90	1
2.	Bulu	Sanggung	2,17	3,54	1
3.	Polokarto	Bugel	2,14	5,60	1
4.	Nguter	Juron	2,01	4,63	1
5.	Gatak	Trangsan	1,93	4,66	1
6.	Bulu	Ngasinan	1,85	4,95	1
7.	Weru	Alasombo	1,85	5,52	1
8.	Bulu	Kamal	1,82	6,94	1
9.	Nguter	Plesan	4,33	3,04	2
10.	Nguter	Jangglengan	3,99	1,74	2
11.	Bendosari	Puhgogor	3,89	1,20	2
12.	Bulu	Kedungsono	3,60	2,56	2
13.	Weru	Karangtengah	2,88	1,27	2
14.	Nguter	Serut	2,86	1,07	2
15.	Tawang Sari	Pundungrejo	2,80	3,09	2
16.	Bendosari	Manisharjo	2,74	2,26	2
17.	Weru	Karangmojo	2,67	3,10	2
18.	Tawang Sari	Tambakboyo	2,58	1,95	2
19.	Bulu	Bulu	2,34	2,78	2
20.	Gatak	Jati	2,34	2,15	2
21.	Mojolaban	Laban	2,14	1,94	2
22.	Gatak	Krajan	1,94	0,65	2
23.	Nguter	Celep	1,92	1,48	2
24.	Tawang Sari	Grajegan	1,88	3,23	2
25.	Bendosari	Paluhombo	1,83	0,64	2
26.	Bulu	Tiyaran	1,66	8,05	3
27.	Weru	Karanganyar	1,59	3,75	3
28.	Bendosari	Mertan	1,58	7,86	3
29.	Bulu	Gentan	1,57	5,52	3
30.	Grogol	Kwarasan	1,55	4,00	3
31.	Nguter	Gupit	1,51	5,35	3
32.	Bendosari	Bendosari	1,50	3,72	3
33.	Baki	Mancasan	1,46	3,87	3
34.	Bulu	Lengking	1,34	8,15	3
35.	Nguter	Lawu	1,32	3,32	3
36.	Gatak	Tempel	1,09	5,99	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu dengan Penyakit Kronis	
37.	Polokarto	Bakalan	1,03	3,88	3
38.	Tawang Sari	Dalangan	1,02	3,46	3
39.	Bendosari	Toriyo	0,99	5,58	3
40.	Weru	Tegalsari	0,99	7,75	3
41.	Nguter	Daleman	0,96	3,57	3
42.	Mojolaban	Kragilan	0,95	3,58	3
43.	Polokarto	Polokarto	0,95	4,40	3
44.	Polokarto	Ngombakan	0,87	3,66	3
45.	Nguter	Kedungwinong	0,85	17,43	3
46.	Mojolaban	Gadingan	0,80	5,37	3
47.	Polokarto	Jatisobo	0,77	5,53	3
48.	Mojolaban	Klumprit	0,76	7,74	3
49.	Weru	Karangwuni	0,69	6,32	3
50.	Mojolaban	Dukuh	0,68	3,34	3
51.	Tawang Sari	Tangkisan	0,68	14,07	3
52.	Weru	Grogol	0,67	4,83	3
53.	Weru	Tawang	0,65	7,88	3
54.	Mojolaban	Palur	0,64	11,80	3
55.	Mojolaban	Plumbon	0,63	4,90	3
56.	Sukoharjo	Sukoharjo	0,62	3,29	3
57.	Bendosari	Cabeyan	0,61	4,36	3
58.	Baki	Gentan	0,55	4,56	3
59.	Baki	Bakipandeyan	0,55	3,47	3
60.	Mojolaban	Tegalmade	0,53	4,86	3
61.	Mojolaban	Cangkol	0,48	19,74	3
62.	Sukoharjo	Jetis	0,43	5,36	3
63.	Weru	Weru	0,41	3,38	3
64.	Bendosari	Sugihan	0,40	5,15	3
65.	Gatak	Trosemi	0,39	5,77	3
66.	Bendosari	Sidorejo	0,39	10,33	3
67.	Gatak	Blimbing	0,33	10,55	3
68.	Kartasura	Ngabeyan	0,31	4,99	3
69.	Kartasura	Wirogunan	0,20	6,04	3
70.	Bendosari	Jombor	0,20	4,19	3
71.	Kartasura	Kertonatan	0,19	5,08	3
72.	Kartasura	Gonilan	0,12	6,89	3
73.	Polokarto	Bulu	0,12	3,28	3
74.	Mojolaban	Triyagan	-	4,52	3
75.	Bulu	Malangan	1,65	1,40	4

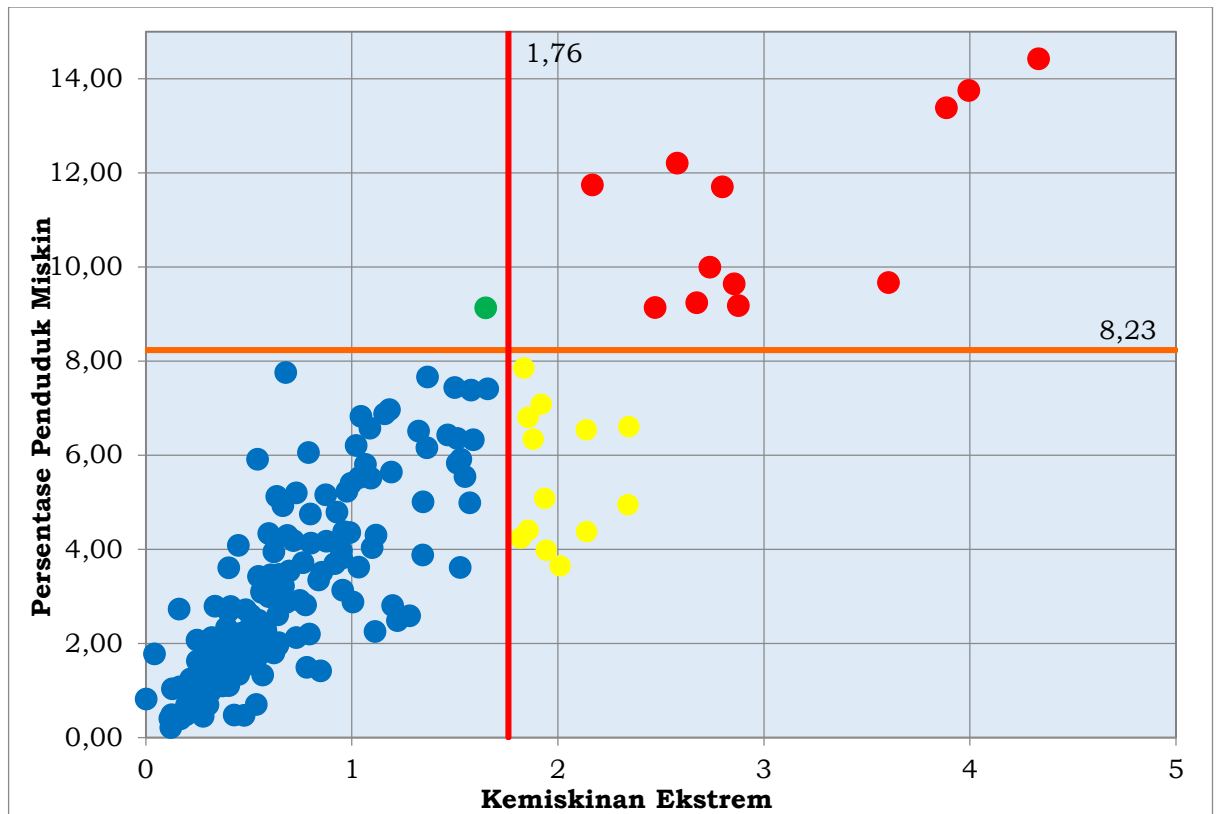
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu dengan Penyakit Kronis	
76.	Nguter	Tanjungrejo	1,53	1,90	4
77.	Baki	Bentakan	1,53	1,39	4
78.	Tawang Sari	Pojok	1,51	2,61	4
79.	Bendosari	Jagan	1,37	2,70	4
80.	Bendosari	Mojorejo	1,36	2,82	4
81.	Tawang Sari	Ponowaren	1,34	2,62	4
82.	Nguter	Pengkol	1,28	3,18	4
83.	Bulu	Karangasem	1,22	1,91	4
84.	Sukoharjo	Mandan	1,20	1,45	4
85.	Polokarto	Godog	1,19	0,87	4
86.	Tawang Sari	Lorog	1,18	1,14	4
87.	Polokarto	Kemasan	1,16	2,26	4
88.	Polokarto	Mranggen	1,12	1,36	4
89.	Sukoharjo	Begajah	1,11	1,15	4
90.	Baki	Jetis	1,10	1,83	4
91.	Gatak	Geneng	1,09	0,52	4
92.	Grogol	Pandeyan	1,07	2,34	4
93.	Weru	Karakan	1,04	2,35	4
94.	Tawang Sari	Majasto	1,03	2,20	4
95.	Sukoharjo	Kenep	1,00	1,54	4
96.	Polokarto	Kayuapak	0,97	2,65	4
97.	Grogol	Kadokan	0,95	1,58	4
98.	Grogol	Pondok	0,93	1,35	4
99.	Polokarto	Tepisari	0,92	1,20	4
100.	Baki	Gedongan	0,88	1,19	4
101.	Grogol	Banaran	0,85	0,81	4
102.	Polokarto	Pranan	0,84	0,52	4
103.	Tawang Sari	Kateguhan	0,80	1,30	4
104.	Sukoharjo	Dukuh	0,79	2,61	4
105.	Tawang Sari	Watubonang	0,79	3,14	4
106.	Nguter	Nguter	0,78	3,01	4
107.	Sukoharjo	Kriwen	0,75	2,80	4
108.	Nguter	Tanjung	0,73	1,79	4
109.	Grogol	Langenharjo	0,73	1,96	4
110.	Sukoharjo	Bulakan	0,71	2,04	4
111.	Gatak	Wironanggan	0,70	1,93	4
112.	Polokarto	Kenokorejo	0,66	2,25	4
113.	Kartasura	Pucangan	0,64	1,92	4
114.	Mojolaban	Wirun	0,64	2,89	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu dengan Penyakit Kronis	
115.	Polokarto	Rejosari	0,64	2,65	4
116.	Weru	Krajan	0,62	2,95	4
117.	Gatak	Luwang	0,61	0,57	4
118.	Tawang Sari	Kedungjambal	0,60	2,60	4
119.	Nguter	Kepuh	0,60	2,65	4
120.	Bulu	Puron	0,58	1,67	4
121.	Mojolaban	Bekonang	0,58	2,73	4
122.	Kartasura	Pabelan	0,57	3,10	4
123.	Baki	Siwal	0,56	2,50	4
124.	Nguter	Baran	0,56	2,64	4
125.	Sukoharjo	Banmati	0,55	0,96	4
126.	Baki	Menuran	0,55	2,40	4
127.	Baki	Ngrombo	0,54	1,35	4
128.	Sukoharjo	Joho	0,54	0,50	4
129.	Gatak	Sraten	0,52	1,80	4
130.	Grogol	Parangjoro	0,51	0,79	4
131.	Baki	Kudu	0,50	1,60	4
132.	Grogol	Grogol	0,49	2,36	4
133.	Kartasura	Kartasura	0,49	1,02	4
134.	Polokarto	Karangwuni	0,48	0,85	4
135.	Bulu	Kunden	0,48	2,62	4
136.	Bendosari	Mulur	0,46	3,12	4
137.	Sukoharjo	Sonorejo	0,45	1,60	4
138.	Baki	Duwet	0,45	1,38	4
139.	Gatak	Kagokan	0,45	0,79	4
140.	Grogol	Telukon	0,41	0,29	4
141.	Gatak	Klaseman	0,40	0,78	4
142.	Polokarto	Wonorejo	0,40	2,09	4
143.	Weru	Jatingarang	0,38	3,23	4
144.	Sukoharjo	Gayam	0,37	1,09	4
145.	Grogol	Cemani	0,35	1,59	4
146.	Grogol	Sanggrahan	0,35	1,03	4
147.	Polokarto	Genengsari	0,32	1,18	4
148.	Bendosari	Gentan	0,32	2,16	4
149.	Mojolaban	Demakan	0,32	1,89	4
150.	Mojolaban	Joho	0,31	1,03	4
151.	Kartasura	Ngadirejo	0,31	2,81	4
152.	Baki	Kadilangu	0,30	0,88	4
153.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,30	0,80	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu dengan Penyakit Kronis	
154.	Kartasura	Singopuran	0,28	0,79	4
155.	Grogol	Madegondo	0,27	1,88	4
156.	Kartasura	Makamhaji	0,27	3,20	4
157.	Baki	Purbayan	0,26	1,27	4
158.	Gatak	Mayang	0,25	2,84	4
159.	Baki	Waru	0,25	2,54	4
160.	Kartasura	Gumpang	0,25	0,83	4
161.	Kartasura	Ngemplak	0,22	0,15	4
162.	Sukoharjo	Combongan	0,17	2,84	4
163.	Nguter	Pondok	0,16	2,56	4
164.	Gatak	Sanggung	0,16	1,44	4
165.	Mojolaban	Sapen	0,13	2,60	4
166.	Grogol	Gedangan	0,12	1,31	4
167.	Grogol	Manang	0,04	0,92	4

5.1.3. Bidang Ketahanan Pangan

Berdasarkan analisis kuadran, desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketahanan pangan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Penduduk Miskin Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Penduduk Miskin Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Penduduk Miskin Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Penduduk Miskin Rendah

Gambar 5.4

Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketahanan Pangan

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketahanan pangan dari sisi kemiskinan ekstrem dan penduduk miskin dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4

Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketahanan Pangan

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
1.	Nguter	Plesan	4,33	14,43	1
2.	Nguter	Jangglengan	3,99	13,75	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
3.	Bendosari	Puhgogor	3,89	13,39	1
4.	Bulu	Kedungsono	3,60	9,67	1
5.	Weru	Karangtengah	2,88	9,18	1
6.	Nguter	Serut	2,86	9,64	1
7.	Tawang Sari	Pundungrejo	2,80	11,71	1
8.	Bendosari	Manisharjo	2,74	10,00	1
9.	Weru	Karangmojo	2,67	9,24	1
10.	Tawang Sari	Tambakboyo	2,58	12,21	1
11.	Weru	Ngreco	2,47	9,14	1
12.	Bulu	Sanggung	2,17	11,74	1
13.	Bulu	Bulu	2,34	6,61	2
14.	Gatak	Jati	2,34	4,95	2
15.	Mojolaban	Laban	2,14	4,38	2
16.	Polokarto	Bugel	2,14	6,54	2
17.	Nguter	Juron	2,01	3,65	2
18.	Gatak	Krajan	1,94	3,98	2
19.	Gatak	Trangsan	1,93	5,09	2
20.	Nguter	Celep	1,92	7,09	2
21.	Tawang Sari	Grajegan	1,88	6,34	2
22.	Bulu	Ngasinan	1,85	4,40	2
23.	Weru	Alasombo	1,85	6,81	2
24.	Bendosari	Paluhombo	1,83	7,86	2
25.	Bulu	Kamal	1,82	4,24	2
26.	Bulu	Malangan	1,65	9,13	3
27.	Bulu	Tiyaran	1,66	7,41	4
28.	Weru	Karanganyar	1,59	6,33	4
29.	Bendosari	Mertan	1,58	7,38	4
30.	Bulu	Gentan	1,57	4,99	4
31.	Grogol	Kwarasan	1,55	5,55	4
32.	Nguter	Tanjungrejo	1,53	5,92	4
33.	Baki	Bentakan	1,53	3,62	4
34.	Tawang Sari	Pojok	1,51	5,84	4
35.	Nguter	Gupit	1,51	6,36	4
36.	Bendosari	Bendosari	1,50	7,44	4
37.	Baki	Mancasan	1,46	6,43	4
38.	Bendosari	Jagan	1,37	7,66	4
39.	Bendosari	Mojorejo	1,36	6,16	4
40.	Tawang Sari	Ponowaren	1,34	5,01	4
41.	Bulu	Lengking	1,34	3,88	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
42.	Nguter	Lawu	1,32	6,52	4
43.	Nguter	Pengkol	1,28	2,59	4
44.	Bulu	Karangasem	1,22	2,49	4
45.	Sukoharjo	Mandan	1,20	2,81	4
46.	Polokarto	Godog	1,19	5,64	4
47.	Tawang Sari	Lorog	1,18	6,97	4
48.	Polokarto	Kemasan	1,16	6,88	4
49.	Polokarto	Mranggen	1,12	4,31	4
50.	Sukoharjo	Begajah	1,11	2,26	4
51.	Baki	Jetis	1,10	4,04	4
52.	Gatak	Tempel	1,09	5,52	4
53.	Gatak	Geneng	1,09	6,58	4
54.	Grogol	Pandeyan	1,07	5,81	4
55.	Weru	Karakan	1,04	6,83	4
56.	Tawang Sari	Majasto	1,03	5,53	4
57.	Polokarto	Bakalan	1,03	3,62	4
58.	Tawang Sari	Dalangan	1,02	6,21	4
59.	Sukoharjo	Kenep	1,00	2,88	4
60.	Bendosari	Toriyo	0,99	5,41	4
61.	Weru	Tegalsari	0,99	4,36	4
62.	Polokarto	Kayuapak	0,97	5,24	4
63.	Nguter	Daleman	0,96	4,38	4
64.	Mojolaban	Kragilan	0,95	3,13	4
65.	Grogol	Kadokan	0,95	3,81	4
66.	Polokarto	Polokarto	0,95	3,97	4
67.	Grogol	Pondok	0,93	4,79	4
68.	Polokarto	Tepisari	0,92	3,70	4
69.	Baki	Gedongan	0,88	4,17	4
70.	Polokarto	Ngombakan	0,87	5,16	4
71.	Grogol	Banaran	0,85	3,52	4
72.	Nguter	Kedungwinong	0,85	1,42	4
73.	Polokarto	Pranan	0,84	3,35	4
74.	Tawang Sari	Kateguhan	0,80	4,13	4
75.	Mojolaban	Gadingan	0,80	4,76	4
76.	Sukoharjo	Dukuh	0,79	2,20	4
77.	Tawang Sari	Watubonang	0,79	6,06	4
78.	Nguter	Nguter	0,78	1,49	4
79.	Polokarto	Jatisobo	0,77	2,82	4
80.	Mojolaban	Klumprit	0,76	3,72	4

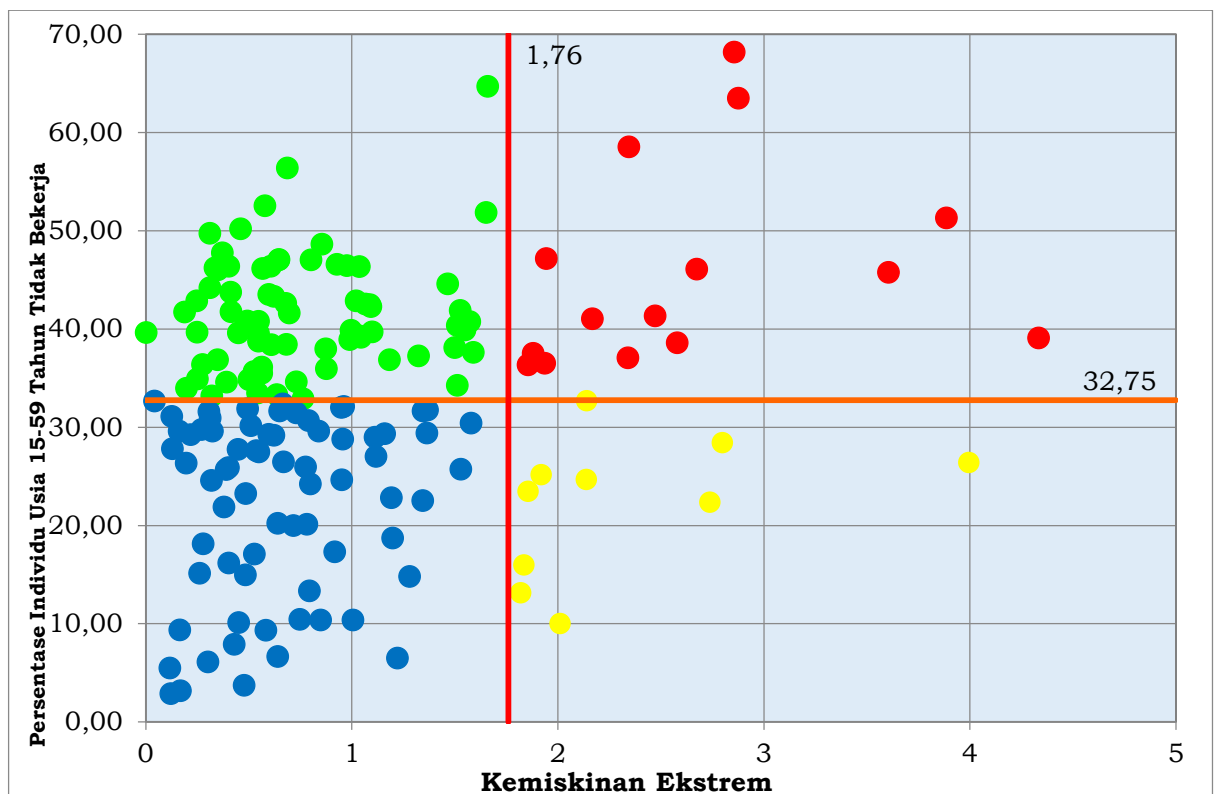
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
81.	Sukoharjo	Kriwen	0,75	2,92	4
82.	Nguter	Tanjung	0,73	5,20	4
83.	Grogol	Langenharjo	0,73	2,13	4
84.	Sukoharjo	Bulakan	0,71	4,19	4
85.	Gatak	Wironanggan	0,70	3,54	4
86.	Weru	Karangwuni	0,69	4,30	4
87.	Mojolaban	Dukuh	0,68	2,87	4
88.	Tawang Sari	Tangkisan	0,68	7,76	4
89.	Weru	Grogol	0,67	3,22	4
90.	Polokarto	Kenokorejo	0,66	4,93	4
91.	Weru	Tawang	0,65	3,11	4
92.	Mojolaban	Palur	0,64	3,47	4
93.	Kartasura	Pucangan	0,64	2,02	4
94.	Mojolaban	Wirun	0,64	1,95	4
95.	Polokarto	Rejosari	0,64	2,61	4
96.	Mojolaban	Plumbon	0,63	5,13	4
97.	Weru	Krajan	0,62	3,95	4
98.	Sukoharjo	Sukoharjo	0,62	1,80	4
99.	Gatak	Luwang	0,61	3,18	4
100.	Bendosari	Cabeyan	0,61	3,46	4
101.	Tawang Sari	Kedungjambal	0,60	4,34	4
102.	Nguter	Kepuh	0,60	3,00	4
103.	Bulu	Puron	0,58	2,29	4
104.	Mojolaban	Bekonang	0,58	2,20	4
105.	Kartasura	Pabelan	0,57	1,33	4
106.	Baki	Siwal	0,56	3,09	4
107.	Nguter	Baran	0,56	3,11	4
108.	Sukoharjo	Banmati	0,55	2,06	4
109.	Baki	Menuran	0,55	3,43	4
110.	Baki	Gentan	0,55	1,75	4
111.	Baki	Bakipandeyan	0,55	2,49	4
112.	Baki	Ngrombo	0,54	5,92	4
113.	Sukoharjo	Joho	0,54	0,71	4
114.	Mojolaban	Tegalmade	0,53	1,67	4
115.	Gatak	Sraten	0,52	1,95	4
116.	Grogol	Parangjoro	0,51	2,60	4
117.	Baki	Kudu	0,50	2,31	4
118.	Grogol	Grogol	0,49	1,87	4
119.	Kartasura	Kartasura	0,49	1,55	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
120.	Mojolaban	Cangkol	0,48	2,72	4
121.	Polokarto	Karangwuni	0,48	1,99	4
122.	Bulu	Kunden	0,48	0,48	4
123.	Bendosari	Mulur	0,46	2,22	4
124.	Sukoharjo	Sonorejo	0,45	1,35	4
125.	Baki	Duwet	0,45	4,08	4
126.	Gatak	Kagokan	0,45	1,62	4
127.	Sukoharjo	Jetis	0,43	0,48	4
128.	Grogol	Telukon	0,41	1,91	4
129.	Weru	Weru	0,41	2,79	4
130.	Gatak	Klaseman	0,40	3,61	4
131.	Polokarto	Wonorejo	0,40	1,11	4
132.	Bendosari	Sugihan	0,40	2,68	4
133.	Gatak	Trosemi	0,39	2,34	4
134.	Bendosari	Sidorejo	0,39	1,28	4
135.	Weru	Jatingarang	0,38	1,98	4
136.	Sukoharjo	Gayam	0,37	1,10	4
137.	Grogol	Cemani	0,35	1,54	4
138.	Grogol	Sanggrahan	0,35	1,28	4
139.	Gatak	Blimbing	0,33	2,79	4
140.	Polokarto	Genengsari	0,32	1,73	4
141.	Bendosari	Gentan	0,32	2,12	4
142.	Mojolaban	Demakan	0,32	2,09	4
143.	Mojolaban	Joho	0,31	1,20	4
144.	Kartasura	Ngadirejo	0,31	0,96	4
145.	Kartasura	Ngabeyan	0,31	1,29	4
146.	Baki	Kadilangu	0,30	1,66	4
147.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,30	0,70	4
148.	Kartasura	Singopuran	0,28	0,45	4
149.	Grogol	Madegondo	0,27	1,69	4
150.	Kartasura	Makamhaji	0,27	0,57	4
151.	Baki	Purbayan	0,26	1,14	4
152.	Gatak	Mayang	0,25	1,63	4
153.	Baki	Waru	0,25	2,08	4
154.	Kartasura	Gumpang	0,25	1,00	4
155.	Kartasura	Ngemplak	0,22	1,25	4
156.	Kartasura	Wirogunan	0,20	0,69	4
157.	Bendosari	Jombor	0,20	0,49	4
158.	Kartasura	Kertonatan	0,19	1,01	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Penduduk Miskin	
159.	Sukoharjo	Combongan	0,17	0,40	4
160.	Nguter	Pondok	0,16	1,08	4
161.	Gatak	Sanggung	0,16	2,73	4
162.	Mojolaban	Sapen	0,13	1,04	4
163.	Grogol	Gedangan	0,12	0,49	4
164.	Kartasura	Gonilan	0,12	0,21	4
165.	Polokarto	Bulu	0,12	0,40	4
166.	Grogol	Manang	0,04	1,78	4
167.	Mojolaban	Triyagan	-	0,82	4

5.2. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Pelaksanaan program untuk peningkatan pendapatan diutamakan bagi penduduk miskin ekstrem pada lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketenagakerjaan dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja Rendah

Gambar 5.5

**Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan
Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Ketenagakerjaan**

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang ketenagakerjaan dari sisi kemiskinan ekstrem dan individu usia 15-59 tahun tidak bekerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5

**Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan
Ekstrem Pada Bidang Ketenagakerjaan**

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja	
1.	Nguter	Plesan	4,33	39,11	1
2.	Bendosari	Puhgogor	3,89	51,32	1
3.	Bulu	Kedungsono	3,60	45,81	1
4.	Weru	Karangtengah	2,88	63,52	1
5.	Nguter	Serut	2,86	68,21	1
6.	Weru	Karangmojo	2,67	46,11	1
7.	Tawang Sari	Tambakboyo	2,58	38,63	1
8.	Weru	Ngreco	2,47	41,37	1
9.	Bulu	Bulu	2,34	58,57	1
10.	Gatak	Jati	2,34	37,09	1
11.	Bulu	Sanggung	2,17	41,06	1
12.	Gatak	Krajan	1,94	47,20	1
13.	Gatak	Trangsan	1,93	36,54	1
14.	Tawang Sari	Grajegan	1,88	37,56	1
15.	Weru	Alasombo	1,85	36,39	1
16.	Nguter	Jangglengan	3,99	26,42	2
17.	Tawang Sari	Pundungrejo	2,80	28,47	2
18.	Bendosari	Manisharjo	2,74	22,41	2
19.	Mojolaban	Laban	2,14	32,73	2
20.	Polokarto	Bugel	2,14	24,72	2
21.	Nguter	Juron	2,01	10,04	2

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja	
22.	Nguter	Celep	1,92	25,19	2
23.	Bulu	Ngasinan	1,85	23,52	2
24.	Bendosari	Paluhombo	1,83	16,01	2
25.	Bulu	Kamal	1,82	13,19	2
26.	Bulu	Tiyaran	1,66	64,72	3
27.	Bulu	Malangan	1,65	51,89	3
28.	Weru	Karanganyar	1,59	37,65	3
29.	Bulu	Gentan	1,57	40,79	3
30.	Grogol	Kwarasan	1,55	39,92	3
31.	Baki	Bentakan	1,53	41,92	3
32.	Tawang Sari	Pojok	1,51	34,30	3
33.	Nguter	Gupit	1,51	40,39	3
34.	Bendosari	Bendosari	1,50	38,13	3
35.	Baki	Mancasan	1,46	44,62	3
36.	Nguter	Lawu	1,32	37,27	3
37.	Tawang Sari	Lorog	1,18	36,88	3
38.	Baki	Jetis	1,10	39,74	3
39.	Gatak	Tempel	1,09	42,29	3
40.	Gatak	Geneng	1,09	42,50	3
41.	Grogol	Pandeyan	1,07	42,57	3
42.	Weru	Karakan	1,04	39,18	3
43.	Tawang Sari	Majasto	1,03	46,36	3
44.	Polokarto	Bakalan	1,03	39,34	3
45.	Tawang Sari	Dalangan	1,02	42,89	3
46.	Bendosari	Toriyo	0,99	39,89	3
47.	Weru	Tegalsari	0,99	38,93	3
48.	Polokarto	Kayuapak	0,97	46,47	3
49.	Grogol	Pondok	0,93	46,61	3
50.	Baki	Gedongan	0,88	35,97	3
51.	Polokarto	Ngombakan	0,87	37,99	3
52.	Grogol	Banaran	0,85	48,67	3
53.	Tawang Sari	Kateguhan	0,80	47,08	3
54.	Mojolaban	Klumprit	0,76	32,91	3
55.	Grogol	Langenharjo	0,73	34,64	3
56.	Gatak	Wironanggan	0,70	41,67	3
57.	Weru	Karangwuni	0,69	56,41	3
58.	Mojolaban	Dukuh	0,68	38,45	3
59.	Tawang Sari	Tangkisan	0,68	42,62	3
60.	Mojolaban	Palur	0,64	47,10	3

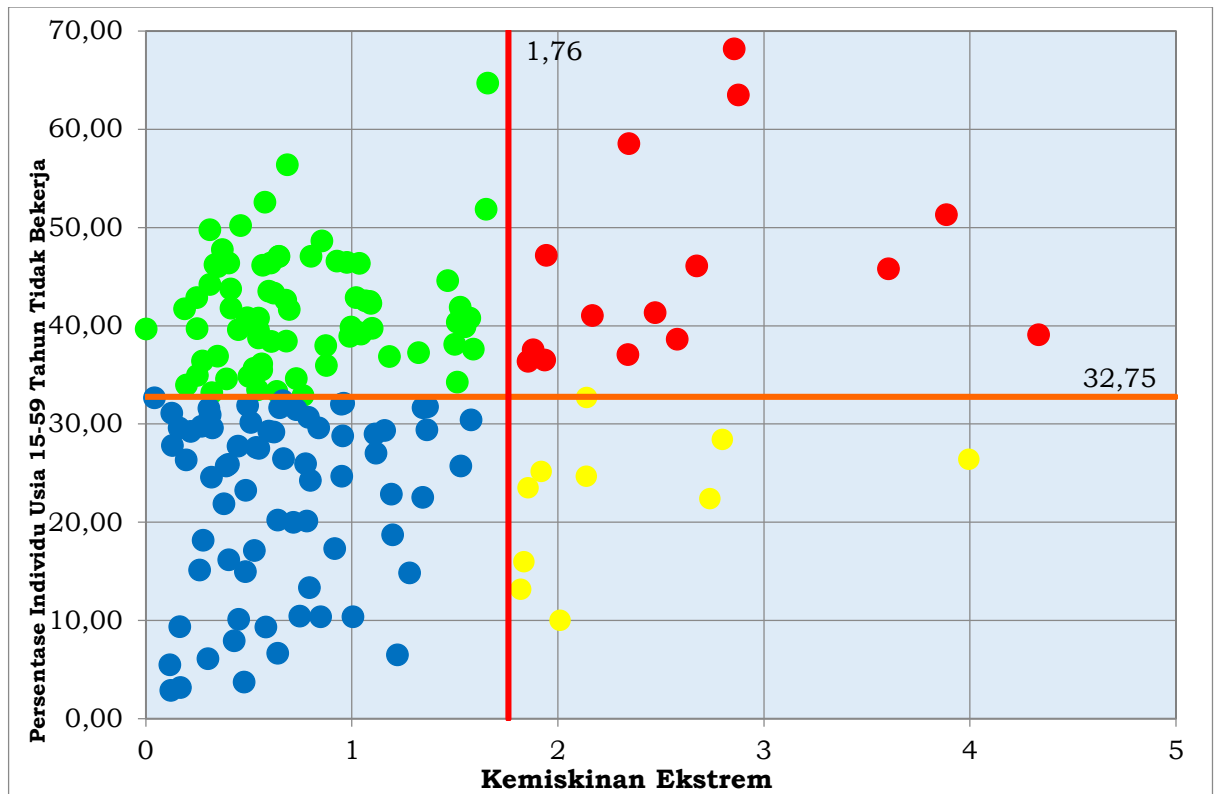
No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja	
61.	Kartasura	Pucangan	0,64	47,06	3
62.	Mojolaban	Plumbon	0,63	33,33	3
63.	Weru	Krajan	0,62	43,36	3
64.	Gatak	Luwang	0,61	38,44	3
65.	Bendosari	Cabeyan	0,61	46,39	3
66.	Nguter	Kepuh	0,60	43,54	3
67.	Mojolaban	Bekonang	0,58	52,58	3
68.	Kartasura	Pabelan	0,57	46,18	3
69.	Baki	Siwal	0,56	36,15	3
70.	Nguter	Baran	0,56	35,52	3
71.	Baki	Menuran	0,55	38,78	3
72.	Baki	Gentan	0,55	40,81	3
73.	Baki	Bakipandeyan	0,55	39,57	3
74.	Baki	Ngrombo	0,54	33,50	3
75.	Gatak	Sraten	0,52	35,70	3
76.	Baki	Kudu	0,50	34,87	3
77.	Kartasura	Kartasura	0,49	40,84	3
78.	Bendosari	Mulur	0,46	50,23	3
79.	Baki	Duwet	0,45	39,62	3
80.	Grogol	Telukon	0,41	41,80	3
81.	Weru	Weru	0,41	43,76	3
82.	Gatak	Klaseman	0,40	46,41	3
83.	Gatak	Trosemi	0,39	34,62	3
84.	Sukoharjo	Gayam	0,37	47,76	3
85.	Grogol	Cemani	0,35	46,05	3
86.	Grogol	Sanggrahan	0,35	36,91	3
87.	Gatak	Blimbing	0,33	46,25	3
88.	Bendosari	Gentan	0,32	33,22	3
89.	Kartasura	Ngadirejo	0,31	49,78	3
90.	Kartasura	Ngabeyan	0,31	44,22	3
91.	Grogol	Madegondo	0,27	36,42	3
92.	Gatak	Mayang	0,25	34,95	3
93.	Baki	Waru	0,25	39,71	3
94.	Kartasura	Gumpang	0,25	42,89	3
95.	Kartasura	Wirogunan	0,20	34,00	3
96.	Kartasura	Kertonatan	0,19	41,76	3
97.	Mojolaban	Triyagan	-	39,68	3
98.	Bendosari	Mertan	1,58	30,44	4
99.	Nguter	Tanjungrejo	1,53	25,76	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja	
100.	Bendosari	Jagan	1,37	31,77	4
101.	Bendosari	Mojorejo	1,36	29,44	4
102.	Tawang Sari	Ponowaren	1,34	31,69	4
103.	Bulu	Lengking	1,34	22,56	4
104.	Nguter	Pengkol	1,28	14,85	4
105.	Bulu	Karangasem	1,22	6,52	4
106.	Sukoharjo	Mandan	1,20	18,73	4
107.	Polokarto	Godog	1,19	22,87	4
108.	Polokarto	Kemasan	1,16	29,38	4
109.	Polokarto	Mranggen	1,12	27,05	4
110.	Sukoharjo	Begajah	1,11	29,01	4
111.	Sukoharjo	Kenep	1,00	10,40	4
112.	Nguter	Daleman	0,96	32,13	4
113.	Mojolaban	Kragilan	0,95	28,82	4
114.	Grogol	Kadokan	0,95	24,69	4
115.	Polokarto	Polokarto	0,95	32,05	4
116.	Polokarto	Tepisari	0,92	17,33	4
117.	Nguter	Kedungwinong	0,85	10,40	4
118.	Polokarto	Pranan	0,84	29,61	4
119.	Mojolaban	Gadingan	0,80	24,27	4
120.	Sukoharjo	Dukuh	0,79	13,38	4
121.	Tawang Sari	Watubonang	0,79	30,71	4
122.	Nguter	Nguter	0,78	20,16	4
123.	Polokarto	Jatisobo	0,77	25,99	4
124.	Sukoharjo	Kriwen	0,75	10,47	4
125.	Nguter	Tanjung	0,73	31,49	4
126.	Sukoharjo	Bulakan	0,71	20,02	4
127.	Weru	Grogol	0,67	26,50	4
128.	Polokarto	Kenokorejo	0,66	32,40	4
129.	Weru	Tawang	0,65	31,67	4
130.	Mojolaban	Wirun	0,64	20,23	4
131.	Polokarto	Rejosari	0,64	6,70	4
132.	Sukoharjo	Sukoharjo	0,62	29,21	4
133.	Tawang Sari	Kedungjambal	0,60	29,30	4
134.	Bulu	Puron	0,58	9,35	4
135.	Sukoharjo	Banmati	0,55	27,53	4
136.	Sukoharjo	Joho	0,54	27,64	4
137.	Mojolaban	Tegalmade	0,53	17,13	4
138.	Grogol	Parangjoro	0,51	30,18	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Individu Usia 15-59 Tahun Tidak Bekerja	
139.	Grogol	Grogol	0,49	31,90	4
140.	Mojolaban	Cangkol	0,48	23,26	4
141.	Polokarto	Karangwuni	0,48	14,99	4
142.	Bulu	Kunden	0,48	3,77	4
143.	Sukoharjo	Sonorejo	0,45	10,13	4
144.	Gatak	Kagokan	0,45	27,78	4
145.	Sukoharjo	Jetis	0,43	7,94	4
146.	Polokarto	Wonorejo	0,40	16,20	4
147.	Bendosari	Sugihan	0,40	25,91	4
148.	Bendosari	Sidorejo	0,39	25,73	4
149.	Weru	Jatingarang	0,38	21,90	4
150.	Polokarto	Genengsari	0,32	29,63	4
151.	Mojolaban	Demakan	0,32	24,61	4
152.	Mojolaban	Joho	0,31	30,97	4
153.	Baki	Kadilangu	0,30	31,60	4
154.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,30	6,14	4
155.	Kartasura	Singopuran	0,28	18,17	4
156.	Kartasura	Makamhaji	0,27	29,78	4
157.	Baki	Purbayan	0,26	15,15	4
158.	Kartasura	Ngemplak	0,22	29,26	4
159.	Bendosari	Jombor	0,20	26,36	4
160.	Sukoharjo	Combongan	0,17	3,20	4
161.	Nguter	Pondok	0,16	9,38	4
162.	Gatak	Sanggung	0,16	29,63	4
163.	Mojolaban	Sapen	0,13	27,83	4
164.	Grogol	Gedangan	0,12	31,13	4
165.	Kartasura	Gonilan	0,12	2,92	4
166.	Polokarto	Bulu	0,12	5,52	4
167.	Grogol	Manang	0,04	32,69	4

5.3. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan.

Pelaksanaan program untuk meminimalkan kantong kemiskinan diutamakan bagi lokasi desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang infrastruktur dasar dapat dikonsentrasikan pada desa/kelurahan yang termasuk prioritas 1/merah.



Keterangan:

- Prioritas 1 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tinggi
- Prioritas 2 : Kemiskinan Ekstrem Tinggi dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni Rendah
- Prioritas 3 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tinggi
- Prioritas 4 : Kemiskinan Ekstrem Rendah dan Persentase Rumah Tidak Layak Huni Rendah

Gambar 5.6

Grafik Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Infrastruktur Dasar

Selengkapnya persebaran desa/kelurahan prioritas untuk percepatan penurunan kemiskinan ekstrem pada bidang infrastruktur dasar dari sisi kemiskinan ekstrem dan rumah tidak layak huni dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.6

Desa/Kelurahan Prioritas Untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstrem Pada Bidang Infrastruktur Dasar

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
1.	Nguter	Plesan	4,33	36,23	1
2.	Nguter	Jangglengan	3,99	34,09	1

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
3.	Bendosari	Puhgogor	3,89	68,70	1
4.	Bulu	Kedungsono	3,60	54,78	1
5.	Weru	Karangtengah	2,88	65,94	1
6.	Nguter	Serut	2,86	33,93	1
7.	Tawang Sari	Pundungrejo	2,80	48,80	1
8.	Bendosari	Manisharjo	2,74	64,58	1
9.	Weru	Karangmojo	2,67	56,84	1
10.	Tawang Sari	Tambakboyo	2,58	33,53	1
11.	Weru	Ngreco	2,47	60,78	1
12.	Bulu	Bulu	2,34	54,76	1
13.	Bulu	Sanggung	2,17	30,60	1
14.	Nguter	Juron	2,01	31,22	1
15.	Nguter	Celep	1,92	45,27	1
16.	Tawang Sari	Grajegan	1,88	27,56	1
17.	Bulu	Ngasinan	1,85	48,89	1
18.	Weru	Alasombo	1,85	74,89	1
19.	Bendosari	Paluhombo	1,83	32,92	1
20.	Bulu	Kamal	1,82	48,19	1
21.	Gatak	Jati	2,34	3,00	2
22.	Mojolaban	Laban	2,14	7,32	2
23.	Polokarto	Bugel	2,14	4,69	2
24.	Gatak	Krajan	1,94	5,38	2
25.	Gatak	Trangsan	1,93	3,64	2
26.	Bulu	Tiyaran	1,66	34,04	3
27.	Bulu	Malangan	1,65	33,04	3
28.	Weru	Karanganyar	1,59	53,60	3
29.	Bendosari	Mertan	1,58	34,07	3
30.	Bulu	Gentan	1,57	51,27	3
31.	Nguter	Tanjungrejo	1,53	23,77	3
32.	Nguter	Gupit	1,51	43,17	3
33.	Bendosari	Bendosari	1,50	23,20	3
34.	Bendosari	Jagan	1,37	25,64	3
35.	Tawang Sari	Ponowaren	1,34	37,65	3
36.	Bulu	Lengking	1,34	26,58	3
37.	Nguter	Lawu	1,32	46,27	3
38.	Nguter	Pengkol	1,28	40,67	3
39.	Bulu	Karangasem	1,22	19,59	3
40.	Tawang Sari	Lorog	1,18	36,43	3
41.	Polokarto	Kemasan	1,16	20,94	3

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
42.	Weru	Karakan	1,04	70,32	3
43.	Tawang Sari	Majasto	1,03	51,07	3
44.	Bendosari	Toriyo	0,99	33,79	3
45.	Weru	Tegalsari	0,99	48,45	3
46.	Polokarto	Tepisari	0,92	22,65	3
47.	Nguter	Kedungwinong	0,85	22,17	3
48.	Polokarto	Pranan	0,84	34,05	3
49.	Sukoharjo	Dukuh	0,79	22,68	3
50.	Tawang Sari	Watubonang	0,79	31,74	3
51.	Nguter	Tanjung	0,73	21,51	3
52.	Sukoharjo	Bulakan	0,71	19,92	3
53.	Weru	Karangwuni	0,69	81,17	3
54.	Weru	Grogol	0,67	32,76	3
55.	Polokarto	Kenokorejo	0,66	21,79	3
56.	Weru	Tawang	0,65	41,77	3
57.	Polokarto	Rejosari	0,64	20,99	3
58.	Weru	Krajan	0,62	69,95	3
59.	Bendosari	Cabeyan	0,61	26,85	3
60.	Tawang Sari	Kedungjambal	0,60	21,49	3
61.	Nguter	Kepuh	0,60	20,71	3
62.	Bulu	Puron	0,58	38,04	3
63.	Nguter	Baran	0,56	28,14	3
64.	Grogol	Parangjoro	0,51	31,53	3
65.	Bulu	Kunden	0,48	34,07	3
66.	Sukoharjo	Sonorejo	0,45	31,01	3
67.	Weru	Weru	0,41	63,30	3
68.	Weru	Jatingarang	0,38	60,58	3
69.	Sukoharjo	Bulakrejo	0,30	30,16	3
70.	Grogol	Kwarasan	1,55	4,44	4
71.	Baki	Bentakan	1,53	0,42	4
72.	Tawang Sari	Pojok	1,51	16,23	4
73.	Baki	Mancasan	1,46	3,57	4
74.	Bendosari	Mojorejo	1,36	17,67	4
75.	Sukoharjo	Mandan	1,20	12,98	4
76.	Polokarto	Godog	1,19	12,68	4
77.	Polokarto	Mranggen	1,12	11,93	4
78.	Sukoharjo	Begajah	1,11	9,54	4
79.	Baki	Jetis	1,10	2,21	4
80.	Gatak	Tempel	1,09	4,87	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
81.	Gatak	Geneng	1,09	0,72	4
82.	Grogol	Pandeyan	1,07	11,19	4
83.	Polokarto	Bakalan	1,03	16,17	4
84.	Tawang Sari	Dalangan	1,02	13,66	4
85.	Sukoharjo	Kenep	1,00	7,75	4
86.	Polokarto	Kayuapak	0,97	17,65	4
87.	Nguter	Daleman	0,96	15,62	4
88.	Mojolaban	Kragilan	0,95	3,70	4
89.	Grogol	Kadokan	0,95	8,01	4
90.	Polokarto	Polokarto	0,95	19,35	4
91.	Grogol	Pondok	0,93	9,50	4
92.	Baki	Gedongan	0,88	3,74	4
93.	Polokarto	Ngombakan	0,87	8,01	4
94.	Grogol	Banaran	0,85	0,38	4
95.	Tawang Sari	Kateguhan	0,80	19,09	4
96.	Mojolaban	Gadingan	0,80	9,76	4
97.	Nguter	Nguter	0,78	18,87	4
98.	Polokarto	Jatisobo	0,77	5,60	4
99.	Mojolaban	Klumprit	0,76	9,29	4
100.	Sukoharjo	Kriwen	0,75	17,79	4
101.	Grogol	Langenharjo	0,73	10,54	4
102.	Gatak	Wironanggan	0,70	4,18	4
103.	Mojolaban	Dukuh	0,68	8,10	4
104.	Tawang Sari	Tangkisan	0,68	11,51	4
105.	Mojolaban	Palur	0,64	10,73	4
106.	Kartasura	Pucangan	0,64	6,78	4
107.	Mojolaban	Wirun	0,64	1,96	4
108.	Mojolaban	Plumbon	0,63	6,35	4
109.	Sukoharjo	Sukoharjo	0,62	15,35	4
110.	Gatak	Luwang	0,61	2,10	4
111.	Mojolaban	Bekonang	0,58	4,44	4
112.	Kartasura	Pabelan	0,57	3,03	4
113.	Baki	Siwal	0,56	2,10	4
114.	Sukoharjo	Banmati	0,55	11,58	4
115.	Baki	Menuran	0,55	5,22	4
116.	Baki	Gentan	0,55	2,08	4
117.	Baki	Bakipandeyan	0,55	3,44	4
118.	Baki	Ngrombo	0,54	4,90	4
119.	Sukoharjo	Joho	0,54	1,54	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
120.	Mojolaban	Tegalmade	0,53	3,48	4
121.	Gatak	Sraten	0,52	3,90	4
122.	Baki	Kudu	0,50	0,83	4
123.	Grogol	Grogol	0,49	13,68	4
124.	Kartasura	Kartasura	0,49	3,93	4
125.	Mojolaban	Cangkol	0,48	15,05	4
126.	Polokarto	Karangwuni	0,48	2,50	4
127.	Bendosari	Mulur	0,46	6,59	4
128.	Baki	Duwet	0,45	4,34	4
129.	Gatak	Kagokan	0,45	0,63	4
130.	Sukoharjo	Jetis	0,43	9,84	4
131.	Grogol	Telukon	0,41	13,83	4
132.	Gatak	Klaseman	0,40	2,14	4
133.	Polokarto	Wonorejo	0,40	4,48	4
134.	Bendosari	Sugihan	0,40	12,63	4
135.	Gatak	Trosemi	0,39	-	4
136.	Bendosari	Sidorejo	0,39	9,23	4
137.	Sukoharjo	Gayam	0,37	3,26	4
138.	Grogol	Cemani	0,35	1,05	4
139.	Grogol	Sanggrahan	0,35	1,34	4
140.	Gatak	Blimbing	0,33	3,47	4
141.	Polokarto	Genengsari	0,32	7,65	4
142.	Bendosari	Gentan	0,32	6,40	4
143.	Mojolaban	Demakan	0,32	8,64	4
144.	Mojolaban	Joho	0,31	4,11	4
145.	Kartasura	Ngadirejo	0,31	3,52	4
146.	Kartasura	Ngabeyan	0,31	2,57	4
147.	Baki	Kadilangu	0,30	2,12	4
148.	Kartasura	Singopuran	0,28	4,80	4
149.	Grogol	Madegondo	0,27	5,12	4
150.	Kartasura	Makamhaji	0,27	4,10	4
151.	Baki	Purbayan	0,26	2,82	4
152.	Gatak	Mayang	0,25	3,56	4
153.	Baki	Waru	0,25	1,18	4
154.	Kartasura	Gumpang	0,25	2,71	4
155.	Kartasura	Ngemplak	0,22	6,42	4
156.	Kartasura	Wirogunan	0,20	3,77	4
157.	Bendosari	Jombor	0,20	5,04	4
158.	Kartasura	Kertonatan	0,19	6,90	4

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Indikator Utama	Indikator Pendukung	Prioritas
			Kemiskinan Ekstrem	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	
159.	Sukoharjo	Combongan	0,17	18,65	4
160.	Nguter	Pondok	0,16	9,69	4
161.	Gatak	Sanggung	0,16	1,34	4
162.	Mojolaban	Sapen	0,13	6,32	4
163.	Grogol	Gedangan	0,12	2,06	4
164.	Kartasura	Gonilan	0,12	1,70	4
165.	Polokarto	Bulu	0,12	13,02	4
166.	Grogol	Manang	0,04	1,76	4
167.	Mojolaban	Triyagan	-	3,60	4

BAB VI PENUTUP

Pemerintah dan organisasi sosial di seluruh dunia makin menghadapi tekanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilakukan jika pemerintah mengetahui apa kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraannya. Sistem pemantauan dan evaluasi yang berfungsi baik memberikan alat dan kemampuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan tersebut.

Pemantauan dan evaluasi bertujuan menghasilkan informasi mengenai kemajuan dan kualitas pelaksanaan pelayanan dan program; mengidentifikasi masalah dan potensi masalah dalam pelaksanaan pelayanan dan program; memberikan penilaian terhadap keberhasilan pelayanan dan program, dari segi output, manfaat maupun dampaknya; dan menjelaskan keberhasilan, kekurangan atau kegagalan pelayanan dan program.

Pemantauan program dan evaluasi program berbeda dalam setidaknya tiga hal pokok, yaitu fokus, pemanfaatan informasi, dan pelaksanaannya. Fokus pemantauan adalah pada proses, dengan membandingkan pelaksanaan dengan rencana/prosedur yang sudah ditentukan. Sedangkan, evaluasi meletakkan fokus pada keluaran, hasil dan dampak: mengacu pada tujuan, membandingkan kondisi sebelum dan sesudah program, dan menggunakan kelompok kontrol. Informasi hasil pemantauan digunakan untuk mengendalikan pelaksanaan program. Sedangkan, informasi hasil evaluasi digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dan masa depan program. Pemantauan dilaksanakan oleh pengelola program atau pemangku kepentingan lain dari program yang bersangkutan. Sedangkan, evaluasi lebih sering dilakukan oleh lembaga di luar pengelola program, khususnya lembaga non-pemerintah.

Pemantauan menyediakan informasi tentang pelaksanaan suatu kebijakan atau program, yang diperlukan untuk tujuan pengendalian program. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan pertanyaan pokok (1) apakah program dan tahapannya dilaksanakan sesuai disain dan prosedur; (2) apakah program atau tahapan program dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan; (3) apakah anggaran program terserap sesuai dengan rencana; dan (4) apa masalah/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, baik yang telah diantisipasi maupun yang belum untuk selanjutnya dicoba diatasi.

Proses pemantauan akan menghasilkan informasi berupa analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya; analisis indikator kinerja kunci dan implementasi program. Sebagai dasar untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (output). Informasi tersebut juga membantu pemerintah dalam memahami sebab keberhasilan, kelemahan maupun kegagalan program.

Pemantauan akan mendukung pengambilan kebijakan. Informasi yang didapatkan sebagai hasil pemantauan membantu pemerintah dengan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan program, baik dari segi biaya maupun hasil/dampak. Pemantauan membantu pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek, dalam mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program.

Manfaat lain yang tak kalah penting dari pemantauan adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Informasi hasil pemantauan menyediakan bukti dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

6.1. Pelaksana Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota bahwa salah satu fungsi TKPK Kabupaten/Kota adalah penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.

Dalam hal efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan. Sekretariat TKPK Provinsi dan Sekretariat TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
- b. menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
- d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota.

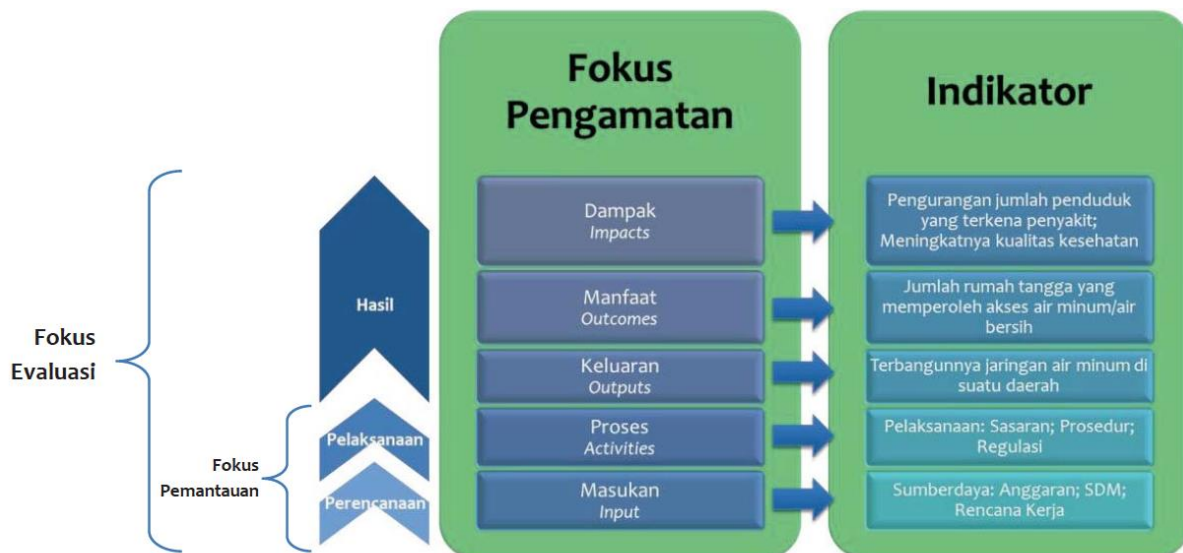
Dalam hal pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota, disebutkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 bahwa Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur selaku ketua TKPK Provinsi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan dilakukan untuk memberi gambaran kondisi kemiskinan secara nyata dan kinerja kebijakan secara objektif. Laporan yang

dihasilkan oleh berbagai pihak perlu diolah dan dikonsolidasikan agar komprehensif dan lengkap. Konsolidasi laporan hasil pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan juga dilakukan terhadap hasil laporan lembaga swadaya masyarakat, media massa, perguruan tinggi dan lembaga penelitian.

6.2. Metode Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan dengan mengamati tahapan perencanaan, pelaksanaan dan hasil program. Dalam setiap tahapan, terdapat fokus pengamatan dengan indikator tertentu menurut jenis program. Seperti terlihat pada Gambar di bawah, dalam tahapan perencanaan, fokus pengamatan adalah masukan (input) program dengan indikator sumberdaya yang mencakup anggaran, sumberdaya manusia dan rencana kerja.



Gambar 6.1. Fokus dan Indikator Pemantauan

Dalam tahapan pelaksanaan, fokus pengamatan adalah proses (kegiatan) program, dengan indikator pelaksanaan seperti pencapaian sasaran, penerapan prosedur dan regulasi. Sedangkan dalam tahap pasca- pelaksanaan, fokus pengamatan adalah hasil program, dengan indikator hasil keluaran atau output program.

Logika yang menghubungkan masing-masing fokus pengamatan, dari masukan (input) sampai dampak (impact) program dapat lebih mudah dibangun dengan menggunakan model pernyataan kondisi “If-Then”, seperti yang diilustrasikan pada Gambar dibawah. Proses pemantauan dilakukan pada focus masukan, kegiatan dan hasil (seperti yang tercantum di dalam kotak). Kegiatan yang tercantum di luar kotak dalam gambar tersebut merupakan proses evaluasi. Rangkaian logika yang digunakan adalah sama, antara pemantauan dan evaluasi.



Gambar 6.2. Model Pernyataan Kondisi “If-Then”

Ada beberapa pertanyaan utama yang perlu diajukan baik kepada pelaksana program maupun penerima manfaatnya, untuk memperoleh informasi kunci yang dibutuhkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pelaksana Program

- (1) Apa tujuan utama program tersebut?
- (2) Kapan program tersebut dimulai, bagaimana progress dan kapan rencana program tersebut berakhir?
- (3) Berapa anggaran yang telah disediakan untuk mendukung program tersebut? Berapa yang terserap?
- (4) Apa sasaran dari program tersebut?
- (5) Berapa banyak kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
- (6) Apa kriteria dari kelompok / individu sasaran dari program tersebut?
- (7) Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut?

2. Kepada Penerima Manfaat Program

- (1) Apa manfaat program?
- (2) Siapa saja yang berpartisipasi dalam program? Bagaimana partisipasi perempuan di dalamnya? Bagaimana partisipasi kelompok sasaran lainnya?
- (3) Bagaimana pendapat mereka tentang program tersebut?

Tolok ukur pelaksanaan pemantauan adalah rangkaian indikator kinerja program, meliputi target output dan outcome suatu program. Sedangkan tolok ukur evaluasi adalah indikator kinerja capaian program penanggulangan kemiskinan setiap tahun atau akhir dari suatu periode program. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi :

1. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan dan program yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo, sejak proses perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan;
2. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan;
3. Metode pemantauan dan evaluasi, ditentukan dan dilakukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja dengan semangat memperbaiki kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Secara umum, kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan menjawab pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah kebijakan dan program yang direncanakan dalam perangkat daerah dapat dilaksanakan/direalisasi dalam proses perencanaan dan penganggaran?
2. Apakah kebijakan dan program yang dilaksanakan sudah mencapai tujuan yang direncanakan?
3. Apakah indikator kinerja program penanggulangan kemiskinan yang meliputi keluaran, hasil, manfaat dan atau dampak pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berhasil dilaksanakan? Jika berhasil faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya? dan apabila tidak berhasil, hal-hal apa saja yang menyebabkan ketidakberhasilan tersebut mengapa?
4. Apakah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan daerah perlu dilanjutkan tanpa perbaikan, dilanjutkan dengan perbaikan atau merumuskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang berbeda?
5. Apakah hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan umpan balik bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan khususnya pembangunan upaya penanggulangan kemiskinan untuk periode sekarang maupun yang akan datang ?

Pada prinsipnya evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam program penanggulangan Kemiskinan. Penghitungan capaian kinerja memperhatikan karakteristik indikator, yaitu sebagai berikut.

- a. Indikator Invers, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya semakin baik.

Persentase capaian target untuk indikator positif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

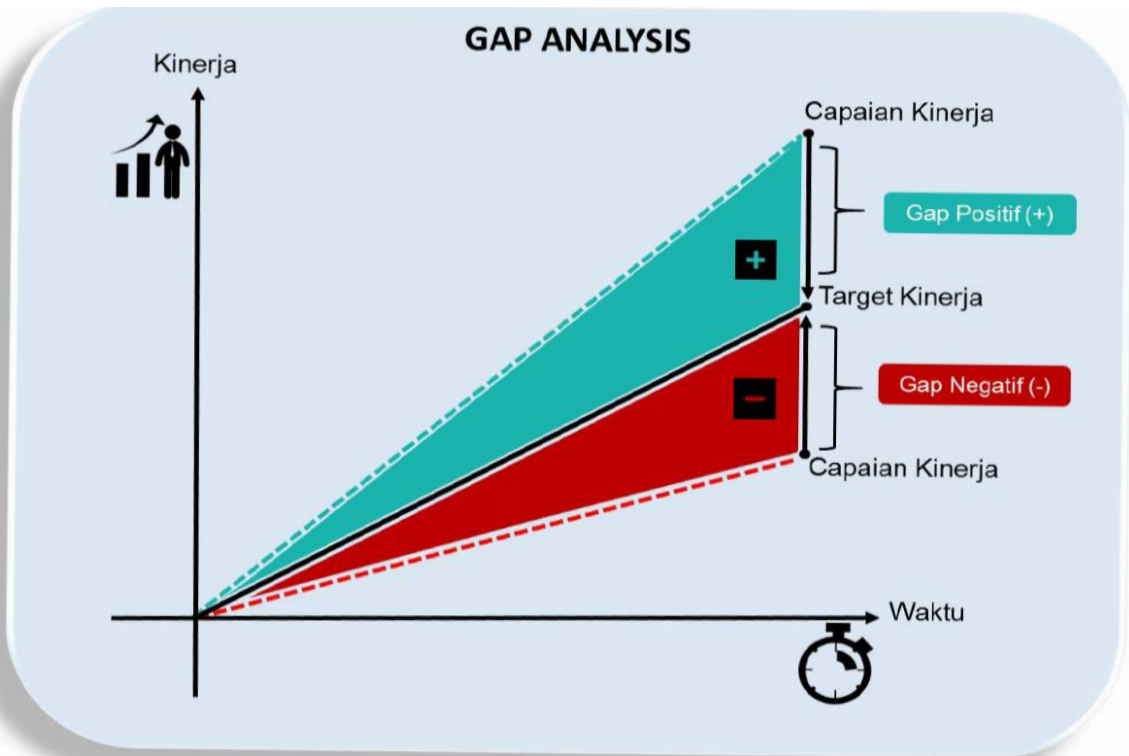
- b. Indikator Convers, yaitu indikator yang menunjukkan semakin tinggi angka capaian kinerja maka kondisinya justru semakin jelek.

Persentase capaian target untuk indikator negatif dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Teknik analisis yang digunakan dalam kegiatan evaluasi program penanggulangan kemiskinan, yaitu Gap Analysis. Evaluasi pengukuran kinerja adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan/program/kegiatan dengan membandingkan antara capaian dengan targetnya. Salah satu informasi yang digunakan dalam melakukan evaluasi pengukuran kinerja adalah menggunakan hasil pemantauan, antara lain menggunakan aplikasi e-monev yang memantau pelaksanaan rencana pembangunan secara triwulanan. Hasil pemantauan dapat dijadikan sebagai parameter dalam early warning system.

Evaluasi pengukuran kinerja dilakukan menggunakan metode Gap Analysis. Metode ini membandingkan antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang harus dicapai). Gap dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain Gap Analysis merupakan langkah untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya, sebagaimana tergambar berikut ini:



Gambar 6.3. Gap Analysis Antara Capaian Kinerja Dengan Target Kinerja

Gap analysis digunakan untuk membandingkan realisasi kinerja tahun n dengan target kinerja tahun n pada indikator kinerja yang ditetapkan dalam program penanggulangan Kemiskinan. Gap antara capaian kinerja dengan target kinerja dapat bernilai positif (+) maupun negatif (-). Gap bernilai (+) jika capaian kinerja lebih besar dari target kinerja, sebaliknya gap akan bernilai (-) jika capaian kinerja lebih kecil dari target kinerja.

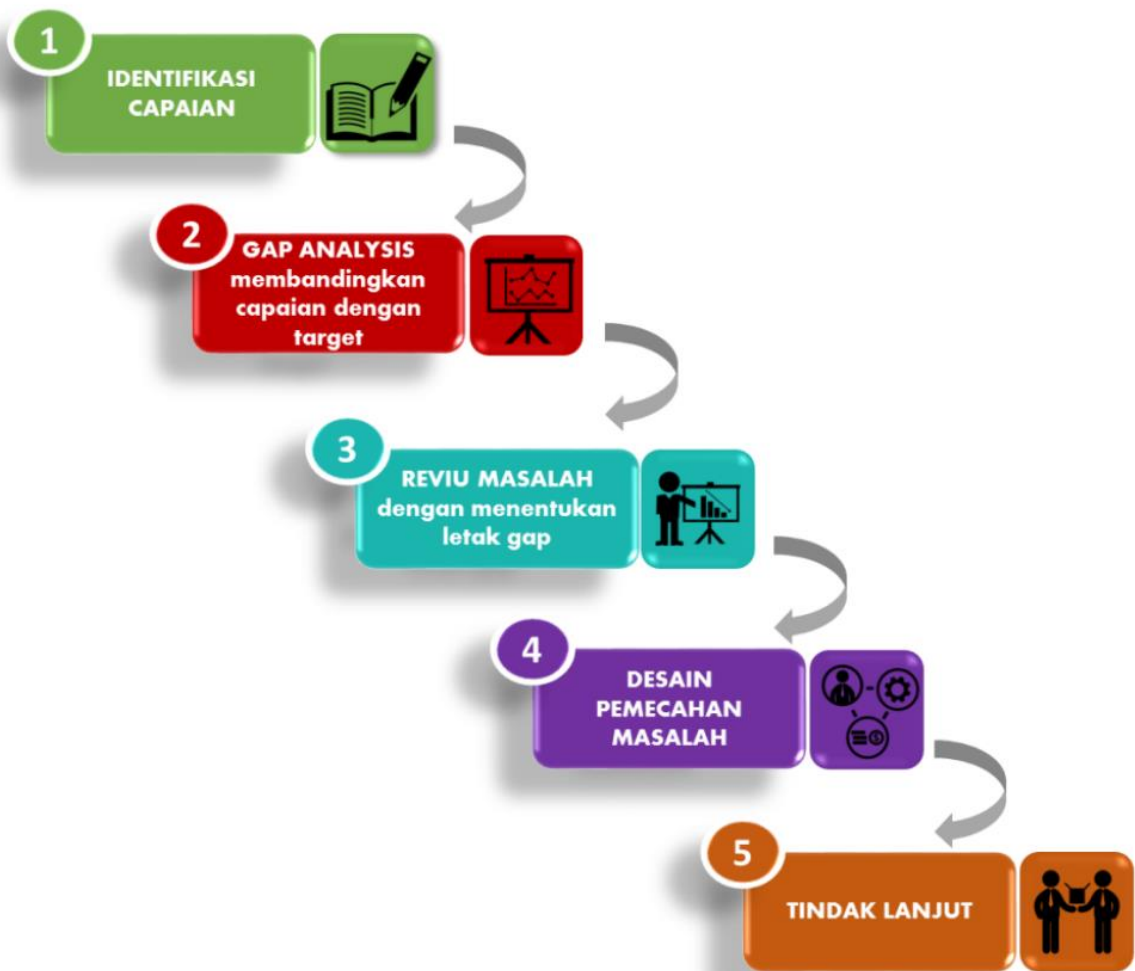
Metode Gap analysis atau “analisis kesenjangan” ini bermanfaat untuk :

- 1) Menilai tingkat kesenjangan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan.
- 2) Mengetahui tingkat peningkatan kinerja yang diperlukan untuk menutup kesenjangan tersebut.
- 3) Menjadi salah satu dasar pengambilan keputusan terkait prioritas waktu dan biaya yang dibutuhkan.

Langkah-langkah utama yang perlu dilakukan dalam *Gap Analysis* sebagai berikut:

- 1) Identifikasi kondisi aktual dan capaian kinerja.
- 2) Melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) dengan membandingkan capaian kinerja dengan target kinerja.

- 3) Reviu permasalahan/faktor keberhasilan dengan menggunakan statistik deskriptif, yaitu dengan melakukan analisis permasalahan/faktor keberhasilan berdasarkan besar atau kecilnya gap.
- 4) Menyusun desain pemecahan masalah apabila gap negatif.
- 5) Menentukan tindak lanjut yang diperlukan.



Gambar 6.4. Langkah-Langkah Pelaksanaan Gap Analysis

Evaluasi pengukuran kinerja dapat dilakukan terhadap keseluruhan dokumen perencanaan, karena sifatnya yang lebih sederhana yaitu hanya dengan membandingkan capaian dengan target sehingga tidak membutuhkan analisis yang rumit. Fokus evaluasi ditujukan untuk mengetahui hasil capaian kinerja pembangunan, identifikasi permasalahan, dan tindak lanjut yang direkomendasikan.





Dalam rangka memberikan informasi yang kredibel dan bermanfaat maka evaluasi harus didukung oleh data dan informasi yang akurat dan up to date. Mekanisme pengumpulan data biasanya menggunakan penelaahan dokumen (document review), data survei yang

dilakukan sendiri maupun hasil survei yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPS, World Bank, UNDP dan sebagainya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, evaluasi pengukuran kinerja tidak hanya membandingkan capaian dan target namun juga perlu menjelaskan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan suatu kebijakan/program/kegiatan maupun menjelaskan permasalahan yang menyebabkan kebijakan/program/kegiatan tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Analisis ini sangat penting sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya serta pengambilan kebijakan atas pelaksanaan program/kegiatan, apakah program/kegiatan tersebut akan dilanjutkan, dihentikan atau dikembangkan?

Dalam rangka memudahkan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan program maka perlu dibuat notifikasi capaian kinerja berdasarkan capaian indikator masing-masing program. Teknik penilaian status capaian kinerja terhadap target akhir program penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Kriteria Notifikasi Capaian Kinerja

Kategori	Kriteria Notifikasi	Kode
Kinerja Saat Ini:		
• Melampaui	Apabila kinerja (realisasi terhadap target) tercapai lebih dari 100%	
• Sesuai	Apabila kinerja (realisasi terhadap target) tercapai sama dengan 100%	
• Belum Tercapai	Apabila kinerja (realisasi terhadap target) tercapai kurang dari 100%	
Akselerasi:		
• Melampaui	Apabila kinerja (realisasi terhadap target) tercapai lebih dari 60%	
• Sesuai	Apabila kinerja (realisasi terhadap target) tercapai sama dengan 60%	
• Perlu Akselerasi	Apabila kinerja (realisasi terhadap target) tercapai kurang dari 60%	

6.3. Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi

Laporan hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Startegi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Sukoharjo ini dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). LP2KD disusun setahun sekali, dimana muatan dokumen LP2KD, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, keluaran (ouput) dan sistematika laporan akhir;

Bab II Kondisi Kemiskinan Daerah Kabupaten Sukoharjo

berisi kondisi umum daerah, kondisi umum kemiskinan Kabupaten Sukoharjo yang meliputi persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2), serta kinerja persentase penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo.

Bab III Kinerja Bidang Intervensi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

berisi pengukuran kinerja bidang intervensi dan kinerja bidang intervensi penanggulangan kemiskinan, meliputi bidang ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, ketahanan pangan, serta sosial.

Bab IV Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

berisi kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Bab V Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sukoharjo

berisi gambaran umum anggaran daerah, analisis pendapatan daerah, analisis belanja daerah, dan realisasi belanja program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sukoharjo.

Bab VI Penutup

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI